



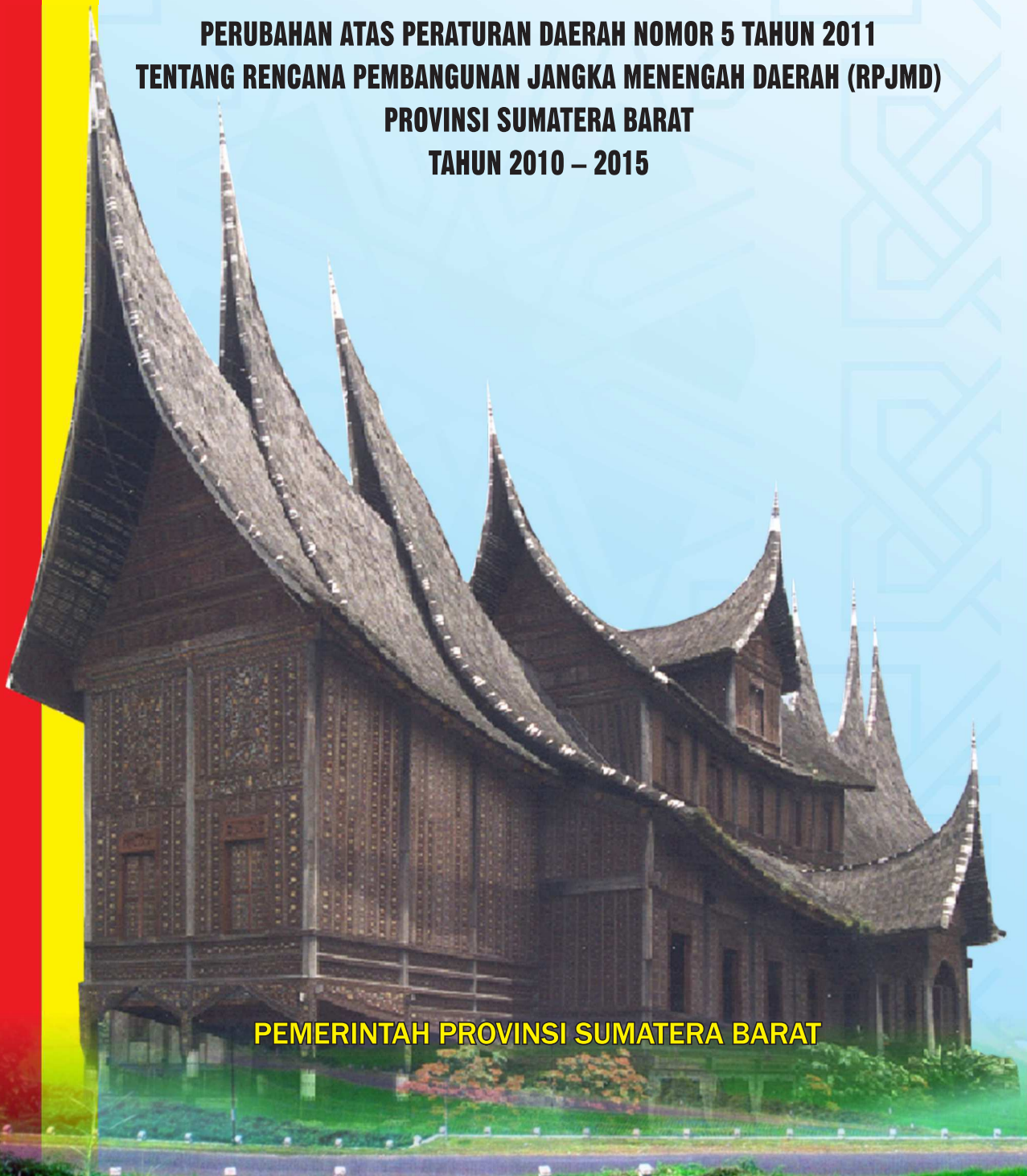
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010 – 2015**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, memperhatikan rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Barat disamping itu juga memuat arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam periode masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, MSc dan Muslim Kasim, SE, Akt, MM (dilantik pada tanggal 15 Agustus 2010) yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas pembangunan dan program Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahunan kedua dari RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan paling lambat 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, Pemerintah Daerah sudah harus menetapkan RPJMD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, sekaligus dalam kerangka penyusunan dan penguatan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan pelaku pembangunan.

Sampai dengan tahun 2013, pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tersebut, telah memasuki tahun ketiga. Untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi RPJMD dan RPJMN, RKPD dan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi pertengahan jalan terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi pertengahan jalan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa kebijakan yang harus disesuaikan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional, kemampuan keuangan daerah, perubahan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah serta perubahan asumsi, sehingga kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan kebijakan dimaksud. Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap indikator capaian pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan kesesuaian kembali antara target pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 50 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal (282)-(284) maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan perubahan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

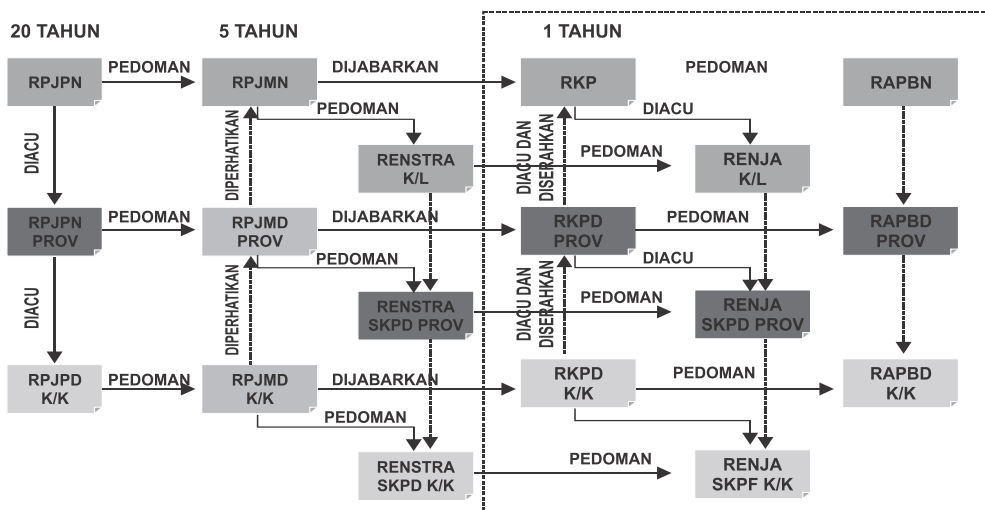
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dimana RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.
RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 merupakan RPJMD kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. RPJMD memuat Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.
2. RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Barat.
Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

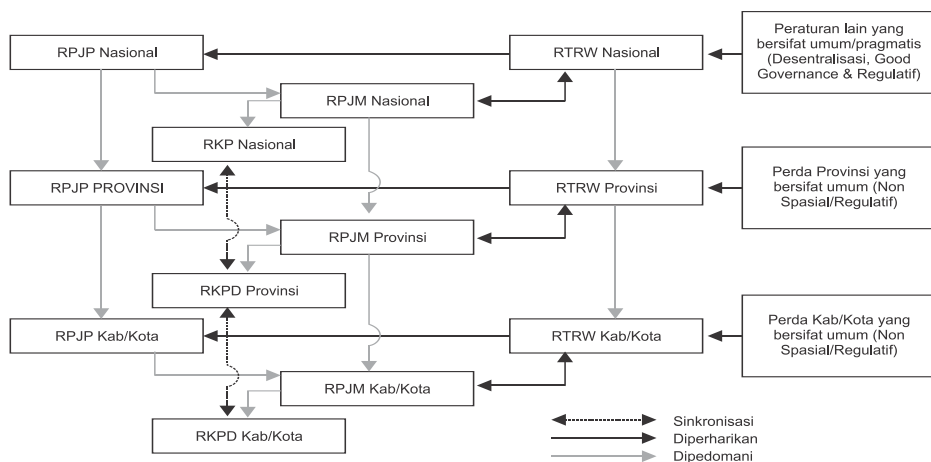
Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Proses penyusunan dan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya
Sumber : UU 17/2003, UU 25/2004, PP 8/2008 (diolah)

Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2.

Bagan keterkaitan RPJMD Provinsi
dengan dokumen perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sumber : UU 25/2004, UU 26/2007, PP 8/2008 (diolah)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Arah RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2010-2015.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta program pembangunan yang dikelompokkan ke dalam agenda dan prioritas pembangunan daerah.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja makro pemerintah daerah dalam pencapaian *outcome* tahunan selama periode 2011-2015.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat ketentuan peralihan untuk penyusunan RKPD transisi tahun 2016, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dari rencana yang telah disusun.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat) dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, supaya terwujud proses pembangunan yang bersinergi. Disamping itu RPJMD dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu dilingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, lintas sektor, wilayah, dan lintas Kabupaten/Kota. Selain itu juga dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun kedepan.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 antara lain bertujuan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah Sumatera Barat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak dan Luas Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54' Lintang Utara (LU), sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan (LS), dan antara 98° 36' sampai 101° 53' Bujur Timur (BT), mempunyai luas daerah daratan ± 42.297,30 km² dan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km² dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai kepulauan mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km. Perairan laut ini memiliki 185 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Dengan letak tersebut menjadikan provinsi ini sebagai gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana baik transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), maupun pelabuhan laut Internasional Teluk Bayur. Provinsi ini juga termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

2. Kondisi Geografis

A. Topografi

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41 %), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21 %), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07 %), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13 %), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67 %) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

Dataran rendah (< 500 m dpl) tercatat hanya 45 %, dataran menengah (500 – 1.000 m) 32 % dan 23 % daerah Sumatera Barat berada pada dataran tinggi. Dengan kondisi tersebut sumberdaya alam yang potensial pada suatu daerah, diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara seksama. Pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya alam perlu dicermati agar tidak terjadi kerusakan yang permanen di suatu kawasan yang berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang.

Dataran tinggi berupa jejeran bukit dan gunung adalah rantai dari pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan kelerengan di atas 40 % tercatat 1.017.000 Ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bahagian Timur Sumatera Barat.

B. Geologi

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

Secara umum kondisi stratigrafi dari struktur geologi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- **Kelompok Pra Tersier:** kelompok ini mencakup masa Paleozoikum – Mesozoikum, dipisahkan menjadi kelompok batuan ultrabasa; kelompok batuan mélange, kelompok batuan malihan; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- **Kelompok Tersier** dipisahkan menjadi kelompok batuan ultrabasa; kelompok batuan mélange; kelompok batuan sedimen; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- **Kelompok Transisi Tersier – Kwartar** (Pilo-Plistosen) dapat dipisahkan menjadi kelompok batuan sedimen; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- **Kelompok Kwartar** dipisahkan menjadi kelompok batuan sedimen; batuan gunungapi dan aluhium

C. Hidrologi

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 buah yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di provinsi berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km², sedangkan Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

D. Klimatologi

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem Schmidt-Fergusson daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayang-an hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 18^o – 34^o C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,5^oC. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5^o – 7^o C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan

Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 4° – 6° C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79 % – 87 % dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

E. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan manifestasi dari kegiatan sosial-budaya dan sosial-ekonomi dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada. Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan dan kelautan, dan kawasan hutan.

▪ Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Sebaran permukiman perkotaan relatif terkonsentrasi di wilayah bagian tengah, terutama jalur antara Kota Padang dan Bukittinggi, sedang permukiman perdesaan menyebar di seluruh wilayah provinsi.

Sebaran kawasan permukiman perkotaan mencakup beberapa wilayah, yaitu seperti Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. Dari sebaran kawasan permukiman perkotaan tersebut paling luas adalah Kota Padang dan yang terkecil Kota Sawahlunto. Perkembangan kawasan permukiman Kota Padang berjalan cukup pesat baik dari segi jumlah penduduk maupun luas kawasan, bahkan cenderung membentuk kawasan perkotaan cukup luas yang mencakup beberapa bagian wilayah kabupaten di sekitarnya, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Perkembangan ini ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, dan prasarana permukiman lainnya.

▪ **Kawasan Pertanian Tanaman Pangan**

Kawasan Tanaman Pangan yang meliputi Kabupaten-kabupaten Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Solok dan Pasaman. Daerah ini merupakan daerah subur yang sejak lama berfungsi sebagai "lumbung pangan" Sumatera Barat dengan produksi utama adalah padi, palawija dan tanaman pangan lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, daerah ini sudah sejak lama dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, kedepan daerah ini akan terus dikembangkan sebagai penghasil utama komoditi pangan untuk daerah Sumatera Barat maupun provinsi tetangga, terutama Riau.

Budidaya pertanian tanaman pangan di Provinsi Sumatera Barat meliputi pertanian tanaman pangan lahan basah, dan pertanian tanaman pangan lahan kering. Sampai tahun 2010 luas pertanian lahan basah yang meliputi sawah dengan irigasi, tadah hujan, pasang surut, dan polder lainnya mencapai 237.327 Ha. Dari luas sawah yang diusahakan, sebagian besar diusahakan untuk tanaman padi yang mencapai 230.756 Ha (97,23 %) dan sisanya bukan tanaman padi. Selanjutnya dari luas tanaman padi sekitar 73,84 % dapat dilakukan penanaman dua kali setahun, dan sisanya sekali dalam setahun.

Untuk pertanian tanaman pangan lahan kering sampai tahun 2007 luasnya sekitar 692.604 Ha yang diusahakan dalam bentuk lahan pekarangan, tegalan/kebun, dan ladang dengan total luas 510.945 Ha (73,77 %) dan sisanya sementara tidak diusahakan seluas 181.659 Ha.

▪ **Kawasan Perkebunan**

Kawasan Perkebunan yang meliputi kabupaten-kabupaten yaitu Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Produk utama daerah ini adalah karet, kelapa sawit dan teh yang merupakan komoditi ekspor utama Sumatera Barat. Untuk meningkatkan nilai tambah telah dibangun pula industri karet remah (*Crumb-rubber*) terutama di Kota Padang dan pabrik minyak sawit (*Crude Palm Oil, CPO*) terutama di daerah Pasaman Barat dan Dharmasraya. Kedepan kawasan ini akan terus dikembangkan sebagai daerah perkebunan besar dalam rangka mendukung peningkatan ekspor daerah Sumatera Barat.

Lahan di Provinsi Sumatera Barat sangat sesuai untuk pengembangan budidaya perkebunan, untuk tanaman karet, kelapa sawit, kopi, dan kakao sebagai komoditas utama, dan komoditi lain yang meliputi gambir, kasiavera, pala, cengkeh, tembakau, tebu, pinang, nilam, kelapa, kemiri dan sebagainya termasuk dalam komoditi unggulan lokal. Pemasaran komoditi utama telah menembus pasar

internasional, terutama Singapura, Jepang, Amerika, dan beberapa negara Eropa.

Pengelolaan dan pengembangan perkebunan dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, BUMN, swasta maupun masyarakat yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Budidaya perkebunan di provinsi ini sebagian besar dikelola oleh perkebunan rakyat, dan sisanya dikelola oleh pemerintah dan swasta.

Sampai tahun 2010, tanaman kelapa sawit menunjukkan luas terbesar yaitu mencapai sekitar 353.300 Ha dan menunjukkan pertambahan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena perluasan dan pembangunan kawasan perkebunan yang dilakukan oleh BUMN maupun perusahaan swasta cukup besar dalam sepuluh tahun terakhir. Dari segi produktivitas, kelapa sawit mempunyai produksi paling tinggi dibandingkan dengan komoditas perkebunan utama lainnya. Luas lahan Tanaman Karet tahun 2010 mencapai 175.985 Ha dan pada umumnya merupakan perkebunan rakyat. Luas tanaman Kakao tahun 2010 mencapai 101.014 Ha, tanaman ini merupakan perkebunan rakyat yang ditanam pada lahan pekarangan dan tegalan.

▪ **Kawasan Peternakan**

Pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein hewani baik untuk konsumsi sendiri, pemasokan ke wilayah provinsi lain maupun ekspor. Usaha pengembangan peternakan di provinsi ini ditunjang dengan ketersediaan pakan ternak dan prasarana penunjang peternakan. Pakan ternak untuk ternak besar dan kecil tersedia cukup banyak, yang terdiri dari rumput alam maupun rumput unggul, sisa pertanian (daun jagung dan jerami), dan limbah industri. Prasarana penunjang yang lain meliputi Rumah Potong Hewan sebanyak 7 unit, pasar ternak 29 unit, TPH 32 unit, poskeswan 41 unit, pos Inseminasi Buatan (IB) 110 unit, dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) 1 unit.

▪ **Kawasan Industri**

Kawasan industri membutuhkan hamparan areal cukup luas, dan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan, baik bentang alam, maupun kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan.

Adapaun rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman seluas \pm 70 Ha dan Kota Padang seluas \pm 220 Ha berupa kawasan Padang Industrial Park (PIP).

Disamping itu ditetapkan juga untuk pengembangan industri di kawasan pesisir yang mengolah hasil budidaya laut komersial, seperti industri perikanan tangkap.

Kegiatan industri yang telah berkembang di Provinsi Sumatera Barat dikelompokkan menjadi industri besar, menengah dan kecil. Bahan baku industri memanfaatkan bahan baku lokal. Industri besar yang berkembang seperti Semen Padang, industri menengah meliputi industri pengolahan, sedangkan industri kecil meliputi industri pengolahan hasil tanaman pangan, industri sandang kulit; industri kimia bangunan; industri logam elektronika dan industri kerajinan seperti industri bordir, konveksi, tenun, batik tanah liat, mebel kayu, rotan, dan kerajinan tanah liat.

Sampai tahun 2009 jumlah industri kecil baik formal maupun non formal memiliki 34.757 unit usaha, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 128.563 orang, dengan total investasi sebesar Rp.795.202.263.000.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan 10 (sepuluh) industri unggulan yaitu: Industri Pengolahan Kakao, Industri Gambir, Industri Minyak Atsiri, Industri Pengolahan Makanan Ringan, Industri Kulit dan Alas Kaki, Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri Pengolahan Hasil Laut, Industri Maritim (Perkapalan), Industri Alsintan, Industri Semen.

▪ **Kawasan Pertambangan**

Kawasan Pertambangan, yang meliputi Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dengan produksi utama adalah batubara. Walaupun sejak beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan jumlah produksi karena berkurangnya produksi tambang luar, namun demikian potensi tambang dalam sebenarnya masih sangat besar. Disamping itu kualitas batubara produksi daerah ini terkenal cukup baik dan mempunyai harga yang relatif cukup tinggi. Dalam rangka peningkatan produksi batubara daerah ini, pemerintah daerah telah mengundang beberapa investor asing baik dari Australia, Polandia dan China untuk mengelola tambang dalam yang memerlukan teknologi pertambangan yang lebih tinggi.

Pengelolaan usaha pertambangan yang ditetapkan dalam wilayah pertambangan (WP), terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan

negara (WPN), sedangkan untuk potensi usaha pertambangan dapat dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Selanjutnya pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.

Bahan pertambangan batubara potensinya cukup besar dan telah diusahakan untuk memasok kebutuhan bahan bakar di beberapa industri dan pembangkit listrik tenaga uap, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat. Penyebaran lokasi pertambangan batubara diantaranya di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan.

Sebaran bahan pertambangan mineral logam seperti emas berada di wilayah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Bahan mineral bijih besi diantaranya di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman Barat. Bahan pertambangan mineral logam lainnya berupa mangan ditemukan di Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar. Sedang timah hitam ditemukan di Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman.

Pertambangan mineral bukan logam, seperti pertambangan pasir besi menyebar di kawasan pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman. Tembaga dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Solok. Untuk bahan tambang yang berupa belerang ditemukan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, sementara air raksa potensinya ditemukan di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya bahan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan untuk industri yang berupa batu kapur menyebar di wilayah Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. Dolomit ditemukan di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Solok. Bahan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan lain yang ditemukan di provinsi ini adalah marmer (Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat); granit (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Dharmasraya); andesit dan basalt (Kabupaten

Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan), batu apung (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok), Batu tulis (Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto); feldspar (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok); obsidian (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar); perlit (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Padang Pariaman); Trass (Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Payakumbuh); kaolin (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto); pasir kuarsa (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sijunjung); fosfat (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang); dan tawas (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan).

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagian besar lokasi usaha pertambangan tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya, sementara metode penambangan umumnya dilakukan secara terbuka yang dapat mengancam keberadaan hutan lindung di atasnya. Kondisi fisik provinsi ini sangat membutuhkan kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor).

▪ **Kawasan Perikanan dan Kelautan**

Kawasan Perikanan dan Kelautan yang meliputi Kabupaten Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah pantai, potensi pembangunan yang dimiliki kawasan ini tentunya adalah dalam bidang perikanan dan kelautan. Dewasa ini daerah-daerah perikanan yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah adalah Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan Bungus sudah sejak beberapa tahun yang lalu ditetapkan sebagai pusat perikanan laut untuk kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera ini. Hal ini dilakukan mengingat hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa lautan Samudra Indonesia yang terletak di kawasan pantai Barat Sumatera Barat ini ternyata mempunyai potensi ikan tuna yang besar dengan kualitas yang sangat baik.

Produksi ikan dari perikanan laut di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sebanyak 197.345 ton, dengan jumlah nelayan penuh sebanyak 16.073 orang nelayan dan 30.061 orang nelayan sambilan. Potensi pembudidayaan perikanan darat (perairan umum dan budidaya) di Provinsi Sumatera Barat cukup besar.

Pengembangan sub sektor perikanan masih ada peluang untuk memanfaatkan potensi yang ada seperti:

1. Masih tersedianya lahan budidaya di darat seperti danau, sungai, kolam, sawah dan perairan umum lainnya untuk budidaya ikan air tawar,
2. Adanya potensi ikan tuna dan cakalang di perairan ZEE yang belum sepenuhnya di eksploitasi.
3. Adanya potensi pengembangan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan barat Provinsi Sumatera Barat, yang belum tersentuh oleh nelayan setempat.

Selanjutnya sumberdaya kelautan yang ada meliputi terumbu karang, hutan mangrove, moluska, teripang, dan penyu laut. Ekosistem terumbu karang di Provinsi Sumatera Barat luasnya 25.984 Ha dan menyebar di perairan pesisir kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai persentase tutupan karang rendah, sehingga dapat dikategorikan rusak dan rusak berat. Tutupan terumbu karang dengan kondisi baik hanya ditemukan pada 4 lokasi sebaran, yaitu Pulau Pieh di Kabupaten Padang Pariaman, Pulau Simangke Kecil, Pulau Cingkuak dan Pulau Penyu di Kabupaten Pesisir Selatan.

Potensi mangrove di Provinsi Sumatera Barat sebesar 39.832 Ha yang terdapat di sepanjang pesisir Kabupaten Pasaman Barat (6.273,5 hektar) sampai Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 32.600 hektar. Di Kota Padang, luas hutan mangrove tidak lebih dari 10 hektar, yang terdapat di kawasan Sungai Pisang. Budidaya rumput laut di Provinsi Sumatera Barat diusahakan masih dalam taraf skala rumah tangga, sehingga besaran tingkat pemanfaatan rumput laut masih sulit terdata. Jenis rumput laut yang diambil adalah jenis *Grasillaria sp* dan *Gellidum sp*.

Penyebaran kerang-kerangan meliputi seluruh perairan pantai yang berlumpur, terutama pada kawasan hutan bakau (*mangrove*), sepanjang pantai di Provinsi Sumatera Barat. Penyebaran cumi-cumi meliputi seluruh perairan di Provinsi Sumatera Barat.

▪ **Kawasan Hutan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/KPTS-II/1999, kawasan hutan Sumatera Barat ditetapkan seluas 2,6 juta Ha, yang terdiri atas Hutan suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam (0,85 juta Ha), hutan lindung (0,91 juta Ha), hutan produksi terbatas (0,25 juta Ha), hutan produksi tetap (0,40 juta Ha), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (0,19 juta Ha). Luasan kawasan hutan tersebut diatas meliputi seluas 61 % wilayah provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang paling luas.

Permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan selain menurunnya produktivitas hasil hutan karena semakin berkurangnya potensi hutan produksi, juga masalah perluasan kawasan budidaya ke dalam kawasan hutan, kondisi ini telah banyak menimbulkan bencana alam terutama banjir dan tanah longsor, bahkan berpengaruh terhadap perubahan iklim mikro.

Penetapan Kawasan Perairan seluas 39.900 Ha berupa Taman Wisata Laut Pulau Pieh di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan penunjukan SK Menhut 070/Kpts-II/2000.

2.1.2 Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah diperlukan untuk dapat mengetahui secara kongkrit sektor dan subsektor yang mempunyai potensi pengembangan yang mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerah bersangkutan. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah guna dapat menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah, dapat diwujudkan secara optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih maksimal.

Potensi pengembangan ekonomi suatu daerah dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh *Keuntungan Komperatif* yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektor yang sama secara nasional. Tingkat Keuntungan Komperatif sektor dan subsektor suatu daerah dapat diukur dengan Indeks Koefisien Lokasi (*Location Quotient*, LQ). Indikator ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan karena dalam era globalisasi seperti halnya dewasa ini, tingkat persaingan adalah sangat tajam. Dalam kondisi yang demikian, sektor dan subsektor yang dapat berkembang dengan pesat adalah sektor dan subsektor yang mempunyai daya saing yang didukung oleh keuntungan komperatif yang cukup tinggi. Sedangkan potensi pembangunan wilayah lebih banyak ditentukan oleh kandungan sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan sehingga menentukan arah pembangunan daerah terkait.

Berdasarkan Indeks Koefisien Lokasi maka potensi pengembangan ekonomi daerah menurut sektor dan subsektor di Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2005-2009 adalah seperti digambarkan pada Tabel 2.1. Disini terlihat bahwa nilai LQ dalam periode waktu 5 tahun sebelumnya sedikit mengalami fluktuasi, karena itu analisis didasarkan pada nilai rata-rata untuk periode 2005-2009 yang memperlihatkan kondisi umum daerah bersangkutan.

Hasil perhitungan pada Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sektor pertanian ternyata masih merupakan salah satu potensi ekonomi wilayah yang cukup penting bagi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini ditunjukkan oleh nilai LQ lebih besar dari satu yaitu 1,75 yang memperlihatkan bahwa sektor ini mempunyai Keuntungan Komperatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama secara rata-rata pada provinsi lainnya di Indonesia.

Di dalam sektor pertanian tersebut terlihat pula bahwa subsektor tanaman pangan ternyata merupakan potensi ekonomi utama Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini terlihat dari nilai LQ yang cukup tinggi yaitu rata-rata 1,78. Sedangkan subsektor perkebunan merupakan potensi ekonomi wilayah terbesar dengan nilai LQ rata-rata mencapai 2,75. Sedangkan subsektor Kehutanan mempunyai potensi pengembangan yang juga cukup tinggi dengan nilai LQ sebesar 1,71. Sedangkan subsektor perikanan dan peternakan mempunyai potensi pengembangan yang cukup besar yang terlihat dari nilai LQ yang lebih besar dari satu.

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai Indeks Koefisien Lokasi Menurut Sektor dan Subsektor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2009

No.	Sektor/Sub-sektor	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
1.	Pertanian	1.72	1.74	1.77	1.76	1.76	1.75
a.	Tanaman Pangan	1.76	1.78	1.80	1.77	1.78	1.78
b.	Perkebunan	2.57	2.69	2.80	2.85	2.83	2.75
c.	Perternakan	1.11	1.09	1.10	1.11	1.13	1.11
d.	Kehutanan	1.73	1.75	1.69	1.68	1.68	1.71
e.	Perikanan	1.24	1.21	1.21	1.23	1.22	1.22
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.35	0.35	0.36	0.37	0.37	0.36
a.	Pertambangan tanpa gas	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.20
b.	Penggalian	2.97	2.81	2.72	2.67	2.62	2.76
3.	Industri Pengolahan	0.52	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52
a.	Industri tanpa migas	0.52	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52
4.	Listrik dan Air Minum	1.76	1.80	1.74	1.62	1.51	1.68
a.	Listrik	2.31	2.36	2.34	2.25	2.23	2.30
b.	Air bersih	1.04	1.06	1.10	1.13	1.17	1.10
5.	Bangunan	0.83	0.82	0.80	0.79	0.77	0.80
6.	Perdagangan	1.08	1.08	1.06	1.06	1.08	1.07
a.	Perdagangan Besar dan Eceran	1.27	1.27	1.24	1.23	1.28	1.26
b.	Hotel	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23
c.	Restoran	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2.06	1.98	1.90	1.76	1.62	1.87
a.	Pengangkutan	2.71	2.71	2.81	2.89	2.89	2.80
b.	Komunikasi	1.06	1.02	0.94	0.00	0.73	0.75
8.	Keuangan, Persewaan , dan Jasa Perusahaan	0.76	0.55	0.55	0.38	0.54	0.56
a.	Bank	0.43	0.45	0.45	1.28	0.46	0.61
b.	Lembaga keuangan tanpa bank	1.63	1.65	1.61	2.27	1.54	1.74
c.	Jasa Perusahaan	0.09	0.09	0.09	1.14	0.08	0.30
9.	Jasa-jasa	1.79	1.76	1.75	1.75	1.74	1.76
a.	Pemerintahan	2.65	2.61	2.61	2.64	2.64	2.63
b.	Swasta	1.07	1.07	1.07	1.07	1.05	1.06

Sumber data : BPS Sumatera Barat, diolah

Potensi pengembangan sektor jasa cukup besar dalam perekonomian daerah Sumatera Barat dan cenderung meningkat. Sektor jasa yang dimaksudkan disini adalah dalam pengertian luas yang meliputi sektor: perdagangan, perhubungan dan komunikasi, dan jasa-jasa lainnya, termasuk juga jasa pendidikan dan kesehatan. Seperti terli merupakan potensi pembangunan yang berperan cukup penting dengan nilai LQ mencapai 2,63.

Salah satu potensi Sumatera Barat adalah penyediaan tenaga listrik dan air minum karena didukung oleh sumberdaya alam. Sebagaimana diketahui bahwa daerah ini mempunyai beberapa sumberdaya yang sangat potensial digunakan untuk pembangkit tenaga listrik seperti tenaga air dan batubara. Dewasa ini telah berjalan dua Pusat Listrik Tenaga Air, yaitu PLTA Maninjau dan PLTA Singkarak dengan kapasitas yang cukup besar. Karena daerah ini juga mempunyai tambang batubara, telah dibangun pula PLTU Ombilin dan sedang dibangun pula sekarang PLTU Bungus yang keduanya juga mempunyai kapasitas cukup besar. Potensi pembangkit tenaga listrik yang cukup besar ini menyebabkan Indeks Koefisien Lokasi sektor ini menjadi cukup tinggi yaitu 1,68. Dengan subsektor listrik merupakan potensi utama dengan nilai LQ mencapai 2,30.

Sektor industri pengolahan belum banyak berkembang di Sumatera Barat yang terlihat dari nilai LQ yang kurang dari satu. Hal yang sama juga terjadi dengan sektor pertambangan yang ternyata pertumbuhannya terus menurun karena semakin menipisnya deposit tambang luar, sedangkan eksploitasi tambang dalam memerlukan biaya produksi yang jauh lebih besar dan sebagian besar berada pada kawasan lindung. Sektor jasa keuangan belum berkembang secara optimal di Sumatera Barat yang terlihat dari nilai LQ kurang dari satu. Namun demikian, potensi pengembangan jasa keuangan non bank kelihatannya cukup tinggi dengan nilai LQ mencapai 1,74.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Dengan banyaknya jenis bahaya alam yang mengancam, Provinsi Sumatera Barat dapat disebut sebagai wilayah "Supermarket Bencana Alam". Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam, provinsi ini juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial, epidemi wabah penyakit dan kegagalan teknologi. Pada paragraf berikut akan disajikan gambaran umum potensi bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Potensi bencana ini diperoleh berdasarkan hasil identifikasi data melalui survey secara tidak langsung maupun secara langsung.

1. Ancaman Bahaya

Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euro Asia di Samudera Hindia sebelah barat Mentawai serta dilalui jalur patahan Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami.

Sejarah telah mencatat beberapa bencana yang ditimbulkan oleh gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 28 Juni 1926, telah terjadi gempa bumi di Padang Panjang dengan kekuatan 7 Skala Richter yang merenggut 354 korban meninggal dunia dan \pm 3.000 rumah rusak. Gempa ini sangat populer diantara para orang-orang tua masyarakat yang berada di wilayah yang terkena gempa dan menjadikan kejadian ini sebagai referensi penunjuk waktu untuk mencatat sesuatu kejadian. Pada tanggal 6 Maret 2007, siklus gempa yang sama terjadi lagi dengan kekuatan 6,3 Skala Richter dan merenggut 66 korban meninggal dunia dan \pm 35.000 rumah rusak di 10 kabupaten/kota yang berdekatan dengan pusat gempa ini. Begitu juga gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang berdampak pada 10 Kabupaten/Kota. Jumlah korban 1.195 orang meninggal. Kerusakan rumah lebih dari 249.000 dan kerusakan infrastruktur sosial ekonomi yang parah. Walaupun jumlah korban tidak sebanyak yang pertama, namun banyaknya rumah yang rusak telah membuat masyarakat trauma dan merasa tidak aman terhadap kehidupan yang akan datang. Setelah gempa dan tsunami Aceh pada bulan Oktober 2004, bencana gempa bumi telah menjadi momok bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Lebih-lebih lagi kejadian gempa yang terjadi secara beruntun pada tahun berikutnya seperti pada bulan April 2005, Maret 2007, September 2007, dan juga gempa-gempa kecil yang mengikutinya telah membuat bencana gempa bumi menjadi isu utama di provinsi ini yang menggerakkan semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Disamping itu, Peraturan Gempa Indonesia (SNI-1726, 2002) menempatkan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki percepatan gempa maksimum (PGA) tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat bisa dipastikan adalah daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Dari hasil kajian yang dilakukan para ahli geologi dan juga didukung oleh dokumen dari Pemerintahan Belanda menunjukkan bahwa di Kota Padang telah terjadi tsunami yang cukup besar yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1797 dan 24 November 1833. Dilaporkan ketinggian tsunami saat itu lebih kurang 3 sampai 4 meter dan landaannya menjangkau lebih kurang 1 km. Dalam waktu dekat para ahli juga memperkirakan akan terjadi gempa besar yang merupakan siklus gempa yang sama yang berpusat pada zona subduksi Sumatera yang berada di dekat Kepulauan Mentawai

di pantai barat pulau Sumatera dan memiliki potensi menimbulkan tsunami yang akan menggenangi daerah pantai wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 gunung berapi yaitu Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Keempat gunung ini berpotensi menimbulkan bencana terhadap wilayah di sekitarnya. Tahun 2006, aktifitas Gunung Talang yang sempat menyemburkan lahar, meskipun tidak sampai menimbulkan bencana besar, telah menarik para ahli nasional maupun internasional untuk mengkaji lebih lanjut karakteristik gunung untuk memprediksi aktifitasnya dimasa yang akan datang.

Begitu juga Gunung Marapi masih terus mengeluarkan asap pada beberapa tahun belakangan ini, sehingga potensi bencana yang ditimbulkannya terhadap penduduk di sekitar gunung yang cukup padat saat ini sangat besar. Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sungai-sungai besar yang mengalir dari wilayah pegunungan di sebelah timur menuju ke arah pantai di bagian barat. Secara tradisional, perkembangan penduduk di Provinsi Sumatera Barat dimulai dari daerah tepian sungai-sungai besar seperti asal usul masyarakat di Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Agam. Lokasi yang berada di sekitar sungai menyebabkan potensi terjadinya banjir juga besar terutama pada saat musim hujan. Telah dilaporkan bahwa banyak korban dan infrastruktur rusak ketika bencana banjir terjadi. Bencana longsor telah terjadi pada tanggal 4 Mei 1987 di Padang Panjang. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 143 orang meninggal dunia, 49 rumah rusak, dan 1 buah bangunan sekolah tertimbun. Bencana ini diperkirakan merupakan bencana longsor terbesar di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat berbatasan secara langsung dengan Lautan India di arah barat. Perbatasan dengan laut lepas ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam siklus aliran air laut yang berpotensi menimbulkan abrasi pantai. Dilaporkan telah terjadi perubahan garis pantai di Provinsi Sumatera Barat akibat abrasi pantai yang tentunya juga menyebabkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya runtuh.

2. Kerentanan

Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kurang-mampuan masyarakat untuk menanggulangi dampak suatu bencana. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Kerentanan dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kerentanan fisik dan kerentanan non-fisik. Secara umum kerentanan fisik dan non-fisik yang dimiliki oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat terhadap semua

jenis bahaya dapat di lihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Kerentanan Umum di Provinsi Sumatera Barat

Jenis Bahaya	Uraian Jenis Kerentanan	
	Fisik	Non-fisik
Semua Ancaman	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan sistem peringatan dini akan bahaya belum ada/lengkap - Peta risiko belum ada/lengkap - Jalur evakuasi belum definitif - Bangunan/tempat pengungsian belum ada - Listrik dan air bersih belum lengkap - Peralatan tanggap darurat belum tersedia - Tidak ada terminal khusus bantuan bencana - Peralatan kesehatan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada lembaga khusus kebencanaan - Masyarakat tidak/kurang terdidik - Sistem informasi bencana lambat - Rencana pembangunan tidak berorientasi bencana - Anggaran khusus kebencanaan di daerah masih kurang - Prosedur tanggap bencana tidak tersedia - Kurangnya pelatihan kebencanaan - Peraturan daerah/local kebencanaan kurang memadai - Kurangnya komitmen bersama antar lembaga (egosektoral)

Sumber data : BPBD Sumatera Barat, RAD, Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2009-2011

Berdasarkan data-data sekunder dan survey yang dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Barat terhadap suatu ancaman bahaya yang ada, telah teridentifikasi khusus kerentanan seperti terlihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Kerentanan Khusus di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Bahaya	Uraian Jenis Kerentanan	
		Fisik	Non-fisik
	Gempa-bumi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada panduan konstruksi bangunan tahan gempa - Belum ada peta risiko gempa-bumi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan aparaturnya dan Masyarakat tentang kegempaan kurang
	Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada sistem peringatan dini - Peta risiko belum definitif - Peta evakuasi belum definitif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan aparaturnya dan Masyarakat tentang tsunami kurang
	Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pendeteksi banjir belum memadai - Belum ada sistem peringatan dini - Peta risiko banjir belum lengkap - Bangunan penanggulangan banjir belum banyak/cukup 	<ul style="list-style-type: none"> - Tata ruang tidak berorientasi bahaya banjir - Masyarakat masih memanfaatkan aliran alam untuk keperluan hidupnya - Masih banyak masyarakat membuang sampah di aliran sungai
	Kebakaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peralatan pemadam kebakaran kurang - Belum ada standar pemadam kebakaran pada bangunan - Peralatan pemadam api di bangunan umum kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada latihan secara rutin untuk kebakaran - Rencana detail pembangunan tidak berorientasi kebakaran
	Badai/ Put-ting beliung	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada sistem peringatan dini untuk bahaya badai - Belum ada peta risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan rumah tidak tahan badai/angin
	Gelombang pasang	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peralatan sistem terpasang untuk peringatan - Belum ada peta risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terdidik - Budaya tinggal dekat pantai masih melekat
	Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peramalan bahaya kekeringan di daerah - Belum ada peta risiko kekeringan belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terdidik - Rencana pembangunan tidak berorientasi bencana

No	Jenis Bahaya	Uraian Jenis Kerentanan	
		Fisik	Non-fisik
	Epidemi wabah penyakit (termasuk AID/HIV)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada panduan bahaya epidemic yang harus diwaspadai. - Masih ada tempat-tempat dimana sumber bahaya berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan omog masih lemah - Masyarakat tidak terlibat secara langsung - Pengetahuan masyarakat/ aparaturnya masih kurang
	Penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang	<ul style="list-style-type: none"> - Buku panduan untuk bahaya narkoba bagi masyarakat umum kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi kurang gencar dari semua media - Pendidikan khusus di sekolah tidak ada
	Gagal Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya peralatan pendikteksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terinformasikan akan bahaya - Pengetahuan masyarakat/ aparaturnya masih kurang
	Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Batas administrasi antar wilayah belum definitif - Kurangnya fasilitas khusus/ umum untuk berkomunikasi/ silaturahmi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan masih beragam (senjang) - Kesenjangan ekonomi
	Pencemaran Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peralatan pendeteksi pencemaran - Kurangnya rambu-rambu peringatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terdidik untuk ramah terhadap lingkungan - Perilaku tradisional tidak berwawasan lingkungan (lading berpindah, dll) - Rencana pembangunan tidak/kurang berwawasan lingkungan
	Longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada (sangat kurang) tanda-tanda pada lokasi bahaya - Belum ada/lengkap peta risiko gempa bumi - Belum terpasang alat peringatan dini 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terdidik untuk menghindari bahaya - Keterbatasan lahan pembuatan pemukiman - Sistem pemilihan tanah melibatkan budaya lokal
	Letusan Gunung Api	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan sistem peringatan dini perlu diperbaharui 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terinformasi akan bahaya - Tidak ada organisasi khusus
	Kebakaran hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi hutan masih terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih tinggal dan memanfaatkan hutan sebagai penopang hidup - Masih ada budaya pembukaan lahan baru oleh masyarakat
	Abrasi pantai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peringatan bahaya abrasi - Organisasi masyarakat belum terbentuk di lokasi bahaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dilokasi kurang terdidik

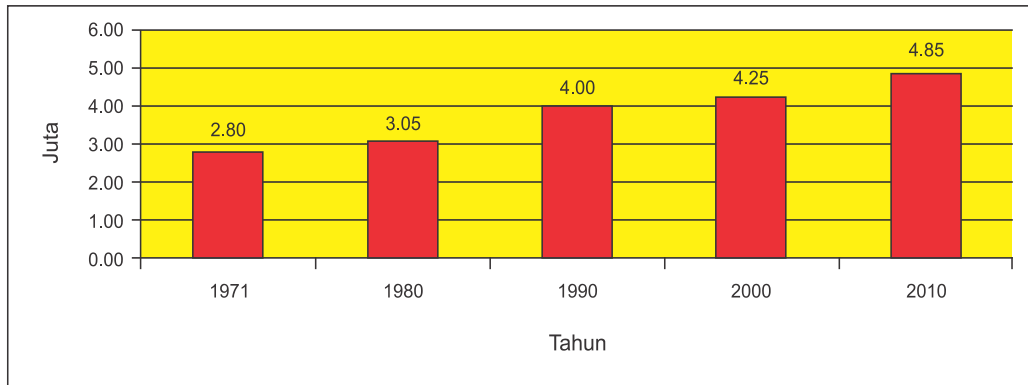
Sumber data : BPBD Sumatera Barat, RAD, Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2009-2011

2.1.4 Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, total penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 4.241.605 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 2.0778.572 jiwa dan perempuan 2.163.033 jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk terakhir 2010, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 4.845.998 orang, yang terdiri atas 2.404.472 laki-laki dan 2.441.526 perempuan. Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitannya peran penduduk tersebut, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Pada umumnya penduduk Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 1971 jumlah

penduduk Sumatera Barat berjumlah 2,80 juta jiwa, pada tahun 1980 telah bertambah menjadi 3,05 juta jiwa, tahun 1990 meningkat terus menjadi 4,00 juta jiwa, tahun 2000 sebanyak 4,25 juta jiwa, dan pada tahun 2010 sudah mencapai 4,85 juta jiwa. Tren tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2.1

Penduduk Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 1971-2010

Sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut tampak bahwa sebaran penduduk Sumatera Barat 73,10 persen berada di daerah Kabupaten dan 26,90 % berada di Kota. Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan 3 (tiga) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling kecil. Seperti terlihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 2010

Kabupaten/Kota	Penduduk			Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
Kabupaten				
Kep. Mentawai	39.629	36.792	76.421	108
Pesisir Selatan	212.640	217.059	429.699	98
Solok	172.004	176.987	348.991	97
Sijunjung	100.759	100.868	201.627	100
Tanah Datar	164.857	173.727	338.584	95
Padang Pariaman	191.496	198.708	390.204	96
Agam	223.544	231.940	455.484	96
Lima Puluh Kota	172.507	175.742	348.249	98
Pasaman	125.289	127.692	252.981	98
Solok Selatan	72.614	71.622	144.236	101
Dharmasraya	98.871	92.406	191.277	107

Kabupaten/Kota	Penduduk			Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
Pasaman Barat	183.828	180.759	364.587	102
Kota				
Padang	412.235	418.349	833.584	99
Solok	29.261	30.056	59.317	97
Sawahlunto	28.127	28.685	56.812	98
Padang Panjang	23.290	23.718	47.008	98
Bukittinggi	53.745	57.2009	110.954	94
Payakumbuh	57.890	59.020	116.910	98
Pariaman	38.886	40.187	79.073	97
Sumatera Barat	2.404.472	2.441.526	4.845.998	98

Sumber Data : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Sumatera Barat adalah sebesar 1,34 % per tahun jika dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2000. Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan angka proyeksi penduduk secara terperinci tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2006 - 2010

NO	URAIAN	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Penduduk	4.632.152	4.697.764	4.763.099	4.827.973	4.845.998
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,45	1,42	1,39	1,36	1,34

Sumber : Angka proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda dan kecendrungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Kendali yang dilakukan selama ini adalah melalui Program Keluarga Berencana (KB) melalui akseptor KB dengan jumlah akseptor KB tahun 2006 sebesar 104.369, tahun 2007 sebesar 108.296, tahun 2008 sebesar 122.589, tahun 2009 sebesar 140.369 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 10,30 %.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2010 menunjukkan adanya peningkatan pada kelompok penduduk yang bekerja dan sehingga terjadi penurunan

tingkat pengangguran. Angkatan kerja mencapai 2,27 juta orang, naik sebanyak lebih dari 92,1 ribu orang dibanding Februari 2009. Jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 92,3 ribu orang dan jumlah pengangguran terbuka turun sebanyak 169 orang, atau angka penganggurannya turun dari 7,90 % menjadi 7,57 %. Peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan jumlah penganggur telah menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,43 %, dari 64,91 % pada Februari 2009 menjadi 66,39 % pada Februari 2010.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu negara. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih.

Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat (66,39 %) lebih rendah dibandingkan TPAK Nasional (67,83 %) pada Februari 2010. Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat (9,73 %) lebih tinggi dari angka Nasional (8,46 %) pada Februari 2008, tetapi Februari 2009 (7,90 %) lebih rendah dari angka nasional (8,14 %), dan menariknya pada Februari 2010 (7,57 %) kembali lebih tinggi dari angka Nasional (7,41 %). Perkembangan ini mengungkapkan bahwa percepatan penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat lebih lambat dibanding tingkat Nasional. Salah satu penyebabnya adalah dampak dari gempa 7,6 SR pada 30 September 2009 yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, atau ada kemungkinan lain penyebabnya yang perlu dianalisis lebih lanjut.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, indeks ketimpangan wilayah menurut Williamson, jumlah penduduk diatas garis kemiskinan, dan jumlah angka kriminalitas yang tertangani.

Sektor yang memiliki nilai terbesar dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat pada periode RPJMD I tahun 2005-2010 adalah sektor pertanian yang pada tahun 2005 berjumlah Rp 7.293 milyar atau kontribusinya adalah sebesar 25,01 % dari total PDRB tahun 2005. Hal ini terus mengalami kenaikan dalam nilainya yang tahun 2010 mencapai Rp 9.094 milyar atau kontribusinya sebesar 23,40 %, lihat Tabel 2.6 di bawah.

Tabel 2.6
Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi
Dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat
Periode 2005-2010 atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor Ekonomi	2005		2006		2007		2008		2009		2010*	
		Rp Milyar	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Pertanian	7.293	25,01	7.658	24,74	8.039	24,43	8.437	24,10	8.761	24,03	9.094	23,40
2.	Pertambangan dan pengalian	951	3,26	980	3,17	1.029	3,13	1.081	3,09	1.125	3,09	1.204	3,10
3.	Industri Pengolahan	3.808	13,06	3.978	12,85	4.209	12,79	4.464	12,75	4.586	12,58	4.788	12,32
4.	Listrik, Gas, air bersih	338	1,16	368	1,19	394	1,20	408	1,17	431	1,18	441	1,13
5.	Bangunan	1.440	4,94	1.544	4,99	1.627	4,94	1.739	4,97	1.814	4,97	2.074	5,34
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	5.305	18,19	5.662	18,29	6.057	18,40	6.463	18,46	6.673	18,30	6.941	17,86
7.	Pengangkutan dan komunikasi	3.754	12,87	4.140	13,38	4.527	13,75	4.916	14,04	5.206	14,28	5.778	14,87
8.	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	1.464	5,02	1.579	5,10	1.693	5,14	1.811	5,17	1.895	5,20	2.011	5,17
9.	Jasa-jasa	4.802	16,47	5.035	16,27	5.339	16,22	5.688	16,25	5.972	16,38	6.531	16,81
	PDRB	29.159	100	30.950	100	32.912	100	35.008	100	36.465	100	38.860	100

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

**Angka Sementara*

Selama periode 2005-2010 sektor pertanian telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat, tetapi perkembangan kontribusinya telah mengalami penurunan. Tahun 2005 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 25,01 % terhadap nilai PDRB dan tahun 2010 telah menurun menjadi 23,40 %. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini diiringi oleh kenaikan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana tahun 2005 sektor ini berkontribusi sebesar 18,19 % dan mengalami peningkatan yang tajam sampai tahun 2009 menjadi 18,30 %. Sementara itu, industri pengolahan justru kontribusinya semakin menurun, dimana tahun 2005 adalah sebesar 13,06 % tetapi tahun 2009 menurun menjadi 12,58 %. Hal ini berimplikasi bahwa perkembangan perekonomian Sumatera Barat telah mengalami perubahan dari dominan sektor pertanian perlahan-lahan ke dominan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sehingga perekonomian Sumatera Barat menjadi lebih berorientasi ke luar (eksport), sedangkan seharusnya, keberhasilan sektor pertanian diikuti oleh sektor industri pengolahan yang mengolah produk pertanian

menjadi produk setengah jadi dan barang jadi, sehingga nilai ekspor akan lebih memberikan nilai tambah yang lebih besar lagi.

Kelemahan yang akan ditemui, jika keberhasilan sektor pertanian diiringi oleh sektor perdagangan hotel dan restoran bukan industri pengolahan, adalah produk pertanian yang pada umumnya masih bahan mentah (primer), lebih rentan terhadap guncangan fluktuasi nilai tukar rupiah, dan guncangan krisis moneter yang melanda negara-negara tujuan ekspor.

Oleh karena itu, kedepan, pengembangan sektor pertanian haruslah diiringi dengan pengembangan sektor industri pengolahan, agar terjadi peningkatan nilai tambah, dan perekonomian lebih tahan terhadap berbagai guncangan yang disebabkan oleh perkembangan perekonomian negara tujuan ekspor seperti krisis finansial global, dan lain sebagainya.

Tabel 2.7
Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi dalam
Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat
Periode 2005-2010 Atas Dasar Harga Berlaku

No	Sektor Ekonomi	2005		2006		2007		2008		2009		2010*	
		Rp Milyar	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Pertanian	11.433	25,59	13.397	25,26	14.744	24,66	17.273	24,46	18.120	23,75	20.792	23,84
2.	Pertambangan dan pengalihan	1.514	3,39	1.829	3,45	2.060	3,44	2.351	3,33	2.545	3,34	2.764	3,17
3.	Industri Pengolahan	5.084	11,38	6.056	11,42	7.179	12,01	8.554	12,11	9.195	12,05	10.197	11,69
4.	Listrik, Gas, Air Bersih	667	1,49	755	1,42	822	1,37	863	1,22	899	1,18	925	1,06
5.	Bangunan	2.473	5,54	2.972	5,60	3.290	5,50	3.905	5,53	4.314	5,65	5.499	6,30
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	7.800	17,46	8.992	16,96	10.368	17,34	12.529	17,74	13.727	17,99	15.475	17,74
7.	Pengangkutan dan komunikasi	6.167	13,80	8.022	15,13	9.009	15,07	10.603	15,02	11.543	15,13	13.439	15,41
8.	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	2.249	5,03	2.632	4,96	2.963	4,95	3.463	4,90	3.783	4,96	4.145	4,75
9.	Jasa-jasa	7.287	16,31	8.374	15,79	9.352	15,64	11.073	15,68	12.171	15,95	13.985	16,03
	PDRB	44.675	100	53.030	100	59.799	100	70.614	100	76.295	100	87.221	100

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

*Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, terlihat bahwa dari sisi harga berlaku kontribusi sektor pertanian pada tahun 2005 adalah sebesar 25,59 % terus mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 23,75 %. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan nilai PDRB pada harga berlaku ini diiringi oleh semakin meningkatnya kontribusi industri pengolahan dari 11,38 % pada tahun 2005 menjadi 12,05 % tahun 2009. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2005 berkontribusi sebesar 17,46 % dan terus mengalami kenaikan

tahun 2009 menjadi 17,99 %. Sehingga dari sisi harga berlaku ini, terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian masih tetap dominan, tetapi perlahan-lahan digantikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan.

Apabila dibandingkan antara kontribusi sektor ekonomi terhadap pembentukan nilai PDRB antara harga berlaku dengan harga konstan, maka terlihat bahwa sektor industri pengolahan terlihat semakin meningkat perannya sejalan dengan menurunnya peran sektor pertanian. Peningkatan peran industri pengolahan ini lebih besar disebabkan karena peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi. Besarnya laju inflasi umum pada tahun 2005 adalah sebesar 65,27 %, dan inflasi yang paling tinggi itu terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 93 % disusul oleh pertanian yang mencapai 58 %, sedangkan pada sektor bangunan sebesar 6 %. Sektor ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga itu adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran, dan jasa-jasa. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB pada tahun 2005-2010
atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat.

No	Sektor Ekonomi	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
		%HB	%HK	%HB	%HK	%HB	%HK	%HB	%HK	%HB	%HK	%HB	%HK
1.	Pertanian	25,59	25,01	25,26	24,74	24,66	24,43	24,46	24,10	23,75	24,70	23,84	23,40
2.	Pertambangan dan pengalihan	3,39	3,26	3,45	3,17	3,44	3,13	3,33	3,09	3,34	3,09	3,17	3,10
3.	Industri Pengolahan	11,38	13,06	11,42	12,85	12,01	12,79	12,11	12,75	12,05	12,58	11,69	12,32
4.	Listrik, Gas, air bersih	1,49	1,16	1,42	1,19	1,37	1,20	1,22	1,17	1,18	1,18	1,06	1,13
5.	Bangunan	5,54	4,94	5,60	4,99	5,50	4,94	5,53	4,97	5,65	4,97	6,30	5,34
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	17,46	18,19	16,96	18,29	17,34	18,40	17,74	18,46	17,99	18,30	17,74	17,86
7.	Pengangkutan dan komunikasi	13,80	12,87	15,13	13,38	15,07	13,75	15,02	14,04	15,13	14,28	15,41	14,87
8.	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	5,03	5,02	4,96	5,10	4,95	5,14	4,90	5,17	4,96	5,20	4,75	5,17
9.	Jasa-jasa	16,31	16,47	15,79	16,27	15,64	16,22	15,68	16,25	15,95	16,38	16,03	16,81
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju inflasi umum tahun 2009 adalah sebesar 47,79 % jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi umum tahun 2005 yang mencapai 65,27 %, sehingga selama lima tahun terakhir laju inflasi umum telah mampu ditekan sebesar 17,48 %. Pada tahun 2009 laju inflasi tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan

dan komunikasi sebesar 85 %, di susul oleh sektor bangunan sebesar 68 %, dan diiringi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 25 % (laju inflasi umum dihitung berdasarkan PDRB HK di bagi PDRB HB dikalikan 100 %).

Menurunnya kontribusi sektor pertanian pada harga berlaku pada tahun 2010 memperlihatkan juga bahwa nilai komoditi pertanian ini semakin lebih rendah kontribusinya terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat. Sedangkan pada sektor industri pengolahan nilainya semakin lebih tinggi dari tahun ke tahun, terkecuali untuk tahun 2009 yang mengalami perkembangan nilainya yang lebih rendah. Hal ini berimplikasi bahwa pengembangan industri pengolahan akan lebih baik dibandingkan dengan pengembangan sektor pertanian, karena lebih rentannya terhadap perubahan harga.

Selanjutnya, pertumbuhan nilai PDRB Sumatera Barat sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 telah mencapai 25,06 % pada harga konstan. Pertumbuhan tertinggi telah dicapai oleh sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 38,68%, disusul oleh pertumbuhan sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 29,44 %, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 27,51 %, sektor bangunan adalah sebesar 25,97 %, Sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 25,79 %. Sektor pertambangan dan pengalian serta sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan yang lambat selama ini, masing-masing hanya sebesar 18,30 % dan 20,13 %.

Masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dalam mendorong pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat selama ini adalah disebabkan oleh masing rendahnya nilai tambah sektor pertanian ini dalam system pertukaran ekonomi. Sektor pertanian masih mengalami hambatan dalam system produksi (*production plan*), karena komoditinya masih didominasi oleh produk primer, dan sub sektor yang menjadi andalan dalam peningkatan nilai sektor ini terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat selama ini yakni sub sektor perkebunan komoditinya masih dalam bentuk produk primer, dan belum dikembangkan kearah industri pengolahannya seperti karet, kayu manis, sawit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ke depan, pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambahnya dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor industri pengolahan produk-produk pertanian yang merupakan komoditi ekspor utama selama ini.

Tabel 2.9
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Pada Harga Belaku dan Harga Konstan
Tahun 2005-2009 di Provinsi Sumatera Barat.

No	Sektor Ekonomi	Pertumbuhan	
		%HB 2005-2009	%HK 2005-2009
1.	Pertanian	58,48	20,13
2.	Pertambangan dan pengalihan	68,10	18,30
3.	Industri Pengolahan	80,86	20,43
4.	Listrik, Gas, air bersih	34,78	27,51
5.	Bangunan	74,44	25,97
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	75,99	25,79
7.	Pengangkutan dan komunikasi	87,17	38,68
8.	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	68,21	29,44
9.	Jasa-jasa	67,02	24,36
	PDRB	70,78	25,06

Tabel 2.9 diatas memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan yang diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, ternyata juga belum berarti sumbangannya dalam pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor industri pengolahan selama ini hanyalah sebesar 20,43 %. Pada hal nilai transaksinya pada sektor industri pengolahan ini sangat besar yang terlihat dari pertumbuhan sektor ini pada harga berlaku sebesar 80,86 %.

Dari sisi harga berlaku, pertumbuhan nilai PDRB Sumatera Barat selama 2005-2009 adalah sebesar 70,78 % pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 87,17 %, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 80,86 %, dan sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 75,99 %. Artinya, aktifitas perekonomian Sumatera Barat selama ini telah didorong oleh kegiatan industri pengolahan yakni industri minyak sawit dan lemak hewan, industri tekstil, dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki, serta industri semen. Namun, nilai tambah yang ditangkap dari kegiatan ini adalah pada sektor pentransportasiannya, karena besarnya pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan komunikasi, disamping sektor perdagangan, hotel dan restoran. Artinya, kegiatan perekonomian Sumatera Barat yang didominasi oleh sub sektor perkebunan terutama perkebunan sawit, karet, dan kakao, ternyata lebih besar diperdagangkan ke luar wilayah dan eksternal wilayah, yang ditandai dengan besarnya pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi, terutama angkutan darat.

Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ke depan, upaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan raya, akan terus mendapat perhatian, terutama jalan arteri primer yang menghubungkan antara Kota Padang dengan kota-kota pusat kegiatan wilayah (PKW) yang ada di Sumatera Barat seperti dengan Kota Solok, Kota Bukittinggi, Pulau Punjung,

dan Simpang Empat. Kota-kota pusat kegiatan wilayah ini merupakan simpul-simpul pusat pertumbuhan pada kawasan perkebunan utama yang ada di Sumatera Barat. Besarnya, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi ini tentunya mengimplikasikan bahwa masih tingginya biaya transportasi melalui jalur angkutan jalan raya ini, sehingga apabila di masa depan dapat dikembangkan angkutan kereta api yang lebih efisien untuk pengangkutan barang, tentunya sektor-sektor pengangkutan dan perdagangan ini akan semakin lebih berkembang lagi dan pada gilirannya akan mampu memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat di masa yang akan datang.

Tabel 2.10
Perkembangan PDRB Tahun 2005-2010 menurut Kabupaten dan Kota
Berdasarkan pada harga berlaku dan harga Konstan

No	Kabupaten/Kota	PDRB											
		2005		2006		2007		2008		2009			
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1.	Kep Mentawai	671	429	797	446	913	466	1.100	487	1.295	509	1.439	534
2.	Kab. Pesisir Selatan	2.275	1.626	2.654	1.711	3.081	1.801	3.581	1.899	4.081	2.002	4.619	2.108
3.	Kab Solok	2.439	1.609	2.888	1.705	3.421	1.812	4.043	1.927	4.639	2.048	5.309	2.175
4.	Kab. Sijunjung	1.532	1.023	1.821	1.084	2.072	1.145	2.418	1.206	2.713	1.273	3.065	1.343
5.	Kab. Tanah Datar	2.867	1.962	3.395	2.076	3.814	2.202	4.377	2.332	4.844	2.469	5.425	2.614
6.	Kab. Padang Pariaman	2.987	1.972	3.890	2.346	4.382	2.490	5.128	2.645	5.594	2.749	6.021	2.891
7.	Kab. Agam	3.378	2.325	3.925	2.469	4.463	2.626	5.206	2.793	5.822	2.930	6.593	3.096
8.	Kab. 50 Kota	3.081	2.126	3.650	2.255	4.197	2.399	5.022	2.546	5.529	2.685	6.296	2.846
9.	Kab. Pasaman	1.592	1.022	1.909	1.081	2.234	1.145	2.578	1.215	2.889	1.289	3.283	1.368
10.	Kab. Solok Selatan	710	486	818	515	921	546	1.067	579	1.221	615	1.408	653
11.	Kab. Dharmasraya	1.290	846	1.513	899	1.787	958	2.110	1.020	2.346	1.088	2.678	1.159
12.	Kab. Pasaman Barat	2.983	1.989	3.507	2.115	4.116	2.251	4.868	2.395	5.518	2.545	6.320	2.707
13.	Kota Padang	13.266	9.111	15.294	9.577	17.369	10.166	20.142	10.797	21.837	11.346	24.586	12.022
14.	Kota Solok	575	394	676	419	757	445	891	473	982	498	1.091	527
15.	Kota Sawah Lunto	620	445	678	449	756	459	862	474	976	494	1.121	520
16.	Kota Padang Panjang	468	311	549	330	623	351	730	373	852	387	919	421
17.	Kota Bukittinggi	1.086	762	1.269	810	1.436	862	1.699	919	1.881	970	2.182	1.029
18	Kota Payakumbuh	952	644	1.133	684	1.295	728	1.501	774	1.653	818	1.886	872
19	Kota Pariaman	866	562	1.020	590	1.126	622	1.318	656	1.488	686	1.581	722
	Sumbar	44.675	29.159	53.030	30.950	59.799	32.913	70.614	35.008	76.295	37.408	86.004	39.607
	Pertumbuhan Ekonomi		5,73		6,14		6,34		6,37		4,16		5,93

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Tabel 2.10 di atas memperlihatkan bahwa perkembangan nilai PDRB Sumatera Barat dari tahun 2005 sampai tahun 2009 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2005 nilai PDRB Sumatera Barat mencapai Rp 44.675 milyar pada harga berlaku dan sebesar Rp 29.159 milyar pada harga konstan. Angka ini terus meningkat sampai tahun 2009, dimana nilai PDRB telah mencapai Rp 76.295 milyar pada harga berlaku dan sebesar Rp 36.465 milyar pada harga

konstan. Berarti selama tahun 2005-2009 nilai PDRB Sumatera Barat telah mengalami pertumbuhan sebesar 70,78 % pada harga berlaku dan sebesar 25,06 %. Rata-rata pertumbuhan pertahunnya menurut harga berlaku adalah sebesar 14,16 % dan pada harga konstan adalah sebesar 5,01 % setiap tahunnya.

Diantara kabupaten yang ada, maka kabupaten Agam memiliki nilai PDRB tahun 2005 yang paling tinggi yakni mencapai Rp 3.378 milyar atau sebesar 7,56 % dari PDRB Sumatera Barat tahun 2005 pada harga berlaku dan sebesar Rp 2.325 milyar atau (7,97 %), disusul oleh kabupaten 50 Kota yang mencapai Rp 3.081 milyar, atau sebesar 6,90 % dari PDRB Sumatera Barat, dan tempat ketiga diduduki oleh kabupaten Padang Pariaman yang mencapai Rp 2.987 milyar atau sebesar 6,69 % dari PDRB Sumatera Barat. Diantara wilayah kabupaten yang memiliki nilai PDRB yang masih relative rendah adalah kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 671 milyar, dan kabupten Solok Selatan yang berjumlah Rp 710 milyar tahun 2005 pada harga berlaku. Dominasi kabupaten Agam ini terus terjadi pada tahun 2009 yang mencapai Rp 5.822 milyar pada harga berlaku atau sebesar 7,63 % dan sebesar Rp 2.930 milyar atau sebesar perkembangan perekonomian yang baik selama ini adalah kabupaten Agam, kabupaten 50 Kota, kabupaten Padang Pariaman, dan kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kabupaten lain relative masih belum berkembangnya perekonomiannya dibandingkan dengan empat kabupaten maju ini.

Sedangkan pada seluruh wilayah Kota, maka kota Padang memiliki nilai PDRB yang tertinggi yakni mencapai Rp 13.266 milyar atau sebesar 29, 69% pada tahun 2005 dan pada harga berlaku. Kota Bukittinggi menempati urutan kedua terbesar yakni Rp 1.086 milyar atau sebesar 2,43%. Sedangkan kota Payakumbuh memiliki nilai PDRB Rp 952 milyar, dan Kota Pariaman sebesar Rp 866 milyar. Pada harga konstan, nilai PDRB Kota Padang adalah berjumlah Rp 9.111 milyar atau sebesar 31,25 % dari nilai PDRB provinsi Sumatera Barat, disusul oleh Kota Bukittinggi sebesar Rp 762 milyar atau sebesar 2,61 %. Sedangkan kota yang memiliki nilai PDRB tahun 2005 pada harga berlaku yang paling rendah adalah Kota Padangpanjang sebesar Rp 468 milyar atau hanya 1,05 % dari nilai PDRB Sumatera Barat.

Pada tahun 2009, nilai PDRB Kota Padang pada harga berlaku berjumlah Rp 21.837 milyar atau sebesar 28,62 %, sedangkan Kota Bukittinggi berjumlah Rp 970 milyar atau sebesar 2,66 % dari nilai PDRB Sumatera Barat. Setelah itu, disusul oleh Kota Payakumbuh sebesar Rp 1.653 milyar atau sebesar 2,17 %, dan Kota Pariaman sebesar Rp 1.488 milyar atau sebesar 1,95 %.

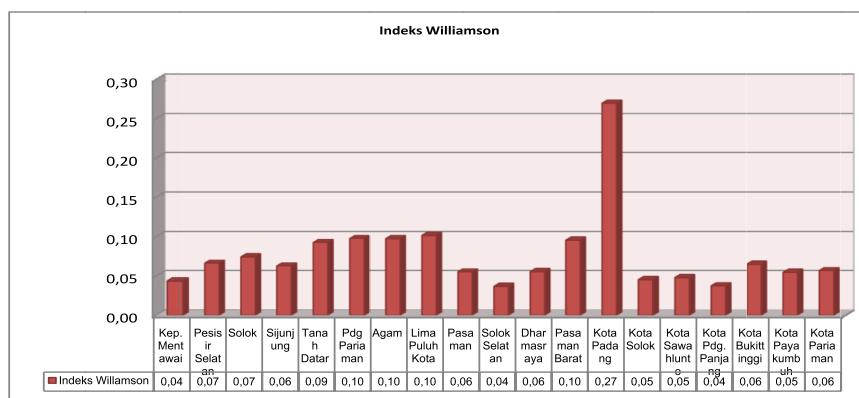
Tabel 2.11
Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2005 s/d 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Harga Konstan (Rp Juta)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kep Mentawai	6.65	6.73	6.93	7.15	6,75	6,98
2.	Kab. Pesisir Selatan	3.84	3.98	4.13	4.29	4,72	4,90
3.	Kab Solok	4.69	4.91	5.15	5.42	5,94	6,21
4.	Kab. Sijunjung	5.43	5.62	5.79	5.96	6,38	6,65
5.	Kab. Tanah Datar	5.92	6.21	6.57	6.94	7,38	7,71
6.	Kab. Padang Pariaman	5.21	6.14	6.48	6.83	7,13	7,40
7.	Kab. Agam	5.47	5.78	6.13	6.50	6,51	6,79
8.	Kab. 50 Kota	6.56	6.89	7.28	7.67	7,80	8,16
9.	Kab. Pasaman	4.18	4.34	4.52	4.72	5,16	5,40
10.	Kab. Solok Selatan	3.83	4.00	4.19	4.38	4,31	4,53
11.	Kab. Dharmasraya	5.12	5.28	5.46	5.64	5,76	6,05
12.	Kab. Pasaman Barat	6.28	6.56	6.87	7.19	7,07	7,42
13.	Kota Padang	11.39	11.68	12.13	12.60	13,78	14,41
14.	Kota Solok	7.29	7.51	7.79	8.09	8,49	8,88
15.	Kota Sawah Lunto	8.38	8.42	8.51	8.73	8,81	9,14
16.	Kota Padang Panjang	6.84	6.63	6.75	6.88	8,54	8,94
17.	Kota Bukittinggi	7.58	7.90	8.27	8.67	8,85	9,27
18.	Kota Payakumbuh	6.32	6.57	6.93	7.30	7,09	7,45
19.	Kota Pariaman	8.02	8.38	8.82	9.29	8,78	9,12
20.	Sumbar	6.40	6.68	7.01	7.35	7,81	8,16

Sumber Data : BPS, Nilai tahun 2006 s.d 2009 dihitung berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, Nilai tahun 2010 dihitung berdasarkan sensus penduduk tahun 2010

Tabel 2.11. di atas memperlihatkan besarnya nilai PDRB per Kapita Sumatera Barat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD pertama. Tahun 2005 besarnya PDRB per kapita Sumatera Barat adalah sebesar Rp 6,40 juta/jiwa terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan sampai tahun 2010 yang mencapai Rp 8,16 juta/jiwa, dengan pertumbuhan sebesar 27,50 % dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya adalah sebesar 5,50 % per tahun.

Pada tahun 2005, terdapat delapan kabupaten dan Kota yang memiliki nilai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata PDRB per kapita Sumatera Barat, diantaranya adalah kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 6,65 juta, kabupaten 50 Kota yang mencapai Rp 6,56 juta, Kota Padang sebesar Rp 11,39 juta, dan Kota Payakumbuh yang berada di bawah angka provinsi Sumatera Barat yakni sebesar Rp 6,32 juta. Pada tahun 2009 masih terdapat delapan wilayah kabupaten dan Kota yang memiliki PDRB per Kapita yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten 50 Kota sebesar Rp. 7,80 juta, Kota Padang sebesar Rp 13,78 juta, dan semua kota lainnya, untuk lebih jelasnya lihat tabel di atas.

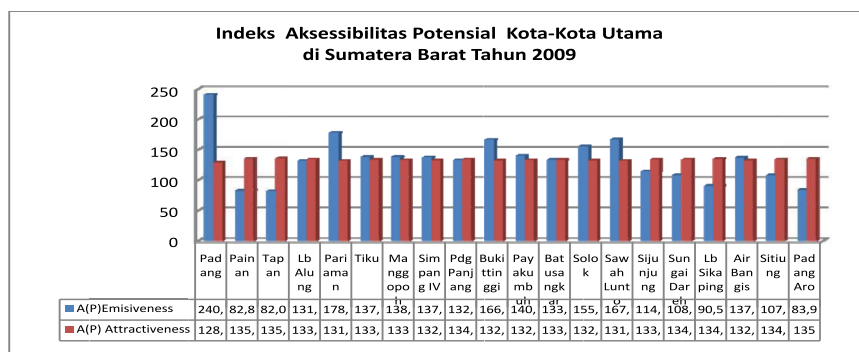


Gambar 2.2

Ketimpangan Wilayah Menurut Indeks Williamson di Sumatera Barat

Gambar 2.2 diatas memperlihatkan bahwa indeks ketimpangan wilayah yang paling tinggi terdapat pada Kota Padang yang ditunjukkan oleh nilai indeks Williamson sebesar 0,27 yang mendekati satu; yang berarti sangat timpang. Ketimpangan wilayah ini dilihat dari nilai pendapatan per kapita Kota Padang yang mencapai Rp 12,1 juta dengan jumlah penduduk tahun 2008 adalah sebanyak 838.190 jiwa dan besarnya PDRBnya adalah Rp 17,4 milyar. terdapat empat kabupaten yang lebih mendekati kemajuan wilayah Kota Padang yakni kabupaten Agam, 50 Kota, Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman, serta kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan kabupaten lain relatif merata. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang paling merata adalah Kabupaten Solok Selatan dan Kota Padangpanjang.

Besarnya ketimpangan wilayah yang terjadi ini lebih disebabkan karena lebih terfokusnya kegiatan ekonomi pada Kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional, sedangkan transaksi ekonomi antara kota Padang dengan kota-kota pusat kegiatan wilayah lainnya, lebih dominan pada pendistribusian barang dan jasa dari Kota Padang ke Kota PKW lainnya, sedangkan arus masuk barang dan jasa dari PKW menuju Kota Padang lebih rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan industri belum berfungsi dengan baik selama ini.



Gambar 2.3

Gambar Grafik Indeks Aksesibilitas Potensial Kota-Kota Utama di Sumatera Barat, Tahun 2009

Gambar 2.3 diatas memperlihatkan bahwa terdapat lima kota yang memiliki tingkat daya sebar arus barang dan jasa yang tinggi menuju ke luar wilayahnya yakni Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittingi, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto. Artinya, kota-kota ini arus barang dan orang lebih besar meninggalkan wilayahnya jika dibandingkan dengan arus barang dan orang yang masuk ke wilayah sendiri. Kota-kota yang berfungsi sebagai wilayah pusat pertumbuhan local dengan aktifitas ekonomi industri haruslah memiliki kekuatan arus barang masuknya lebih tinggi dari pada arus keluar barang dan orangnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan wilayah ke depan, bagaimana memfungsikan pusat-pusat pertumbuhan local ini saling terkait dengan pusat pertumbuhan utama di Sumatera Barat, sehingga saling hubungan wilayah pembangunan di Sumatera Barat dapat dikembangkan kearah transaksi ekonomi yang saling menguntungkan ke dalam wilayah sendiri. Apabila pusat-pusat pertumbuhan local ini lebih tertarik ke pusat pertumbuhan wilayah provinsi tetangga, tentunya akan terjadi kebocoran ekonomi wilayah (*economics of leakage*) di Sumatera Barat. Oleh karena itu, dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan harus memperhatikan saling keterkaitan spatial diantara wilayah-wilayahnya terutama keterkaitan wilayah pusat pertumbuhan utama dengan wilayah hinterlandnya.

Tabel 2.12
Nilai Inflasi PDRB Rata-rata Tahun 2005- 2009 Provinsi Sumatera Barat

No	Sektor Ekonomi	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	19,95	11,59	4,93	11,54	1,02
2.	Pertambangan dan pengalihan	11,69	17,26	7,34	8,61	3,98
3.	Industri Pengolahan	5,90	14,01	12,06	12,34	4,65
4.	Listrik, Gas, air bersih	7,88	3,93	1,90	1,60	1,60
5.	Bangunan	17,68	12,08	5,09	11,03	5,92
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	4,81	8,02	7,80	13,25	6,10
7.	Pengangkutan dan komunikasi	22,81	17,96	2,72	8,36	2,81
8.	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	9,53	8,48	5,06	9,22	4,40
9.	Jasa-jasa	10,94	9,59	5,34	11,13	4,68
	Sumatera Barat	13,10	11,84	6,04	11,02	3,73

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju inflasi PDRB Sumatera Barat tahun 2005 adalah sebesar 13,10 dan terus mengalami penurunan hingga sampai tahun 2009 yang hanya mencapai 3,73. Artinya selama periode 2005-2009 perkembangan harga produk sektor ekonomi semakin lebih baik. Pada tahun 2005 sektor ekonomi yang memiliki nilai inflasi yang paling tinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi

sebesar 22,81, disusul oleh sektor pertanian sebesar 19,95 dan sektor bangunan sebesar 17,68. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 5,90, dan perdagangan hotel dan restoran memiliki nilai inflasi yang paling rendah yakni mencapai 4,81. Rendahnya nilai inflasi sektor industri pengolahan dan perdagangan ini berimplikasi bahwa perkembangan harga-harga pada sektor ini masih rendah, karena produk yang dihasilkan masih barang primer atau bahan mentah.

Apabila dilihat per sektor, pada tahun 2009, sektor pertanian memiliki nilai inflasi yang paling rendah yakni hanya 1,02, sedangkan laju inflasi yang tertinggi ada pada sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 6,10, disusul oleh sektor bangunan sebesar 5,92. Sektor industri pengolahan hanya sebesar 4,64 telah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga peningkatan nilai produk industri pengolahan ini perlu terus ditingkatkan, dengan mengembangkan kearah pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi.

Angka laju inflasi lainnya seperti yang dipublikasikan oleh BPS pada setiap bulannya dihitung dengan menggunakan Indek Harga Konsumen (IHK) Kota Padang, dimana Kota Padang termasuk salah satu dari 66 kota di Indonesia yang dijadikan dasar perhitungan Indek Harga Konsumen Nasional/Gabungan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Visi Sumatera Barat Tahun 2025 yang menjadikan pembangunan di Sumatera Barat berbasiskan kepada penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Pembangunan manusia seutuhnya meliputi manusia sebagai insan manusia dan sumber daya pembangunan. Dalam perwujudannya selalu memperhatikan insan manusia yang beriman dan bertaqwa, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, bermoral, memiliki jati diri serta berkarakter; mempunyai sikap mental positif; berdaya pikir, cipta dan karsa dan karya. Dilain pihak pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi dan berkualitas, sehat jasmani dan rohani serta memiliki etos kerja, produktif, terampil, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, serta berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pembangunan sumber daya manusia sebagai insan manusia dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan tercapai apabila pendidikan yang baik dan benar dilaksanakan sejak dini dan mampu membentuk karakter sumber daya manusia itu sendiri yang kreatif serta seimbang antara kemampuan intelektual, emosional serta spiritual. Sehingga pendidikan dalam konteks ini, harus membuat seimbang antara pembentukan dan pembinaan karakter dan pendidikan yang menekankan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Selama periode 2005-2010, berbagai upaya pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sumatera Barat telah dilakukan. Kecenderungan (*trend*) keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia sampai dengan tahun 2008, menunjukkan kemajuan yang berarti.

Sampai dengan tahun 2008, antara besaran target dan realisasi program berjalan seimbang, namun terjadinya gempa pada tanggal 30 September 2009, di Sumatera Barat telah membawa kemunduran (*setback*) terhadap perkembangan pendidikan. Hasil survey setelah terjadinya gempa yang dilakukan UNDP: Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Manusia (UNDP tahun 2009) (N = 500), menunjukkan:

- a. Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan akibat gempa adalah: Kota Padang, Kota Pariaman, kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Pola bencana akibat gempa: (1) tingginya tingkat kehancuran rumah-rumah pedesaan, (2) tingginya tingkat kehancuran/kerusakan pada sekolah baik yang mengalami rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan (3) putusnya jalan akses pedesaan akibat longsor yang dipicu oleh gempa dan diperparah oleh degradasi hutan
- c. Salah satu dampak umum bencana: Terganggunya pendidikan anak, Lebih dari separuh gedung sekolah memerlukan rehabilitasi dan rekonstruksi, tiga puluh tujuh persen (37 %) tidak ada bangunan yang tersedia, 19,2 % tersedia, tetapi tidak aman
- d. Menurut laporan data Satkorlak Provinsi Sumatera Barat yang kemudian diadopsi dalam laporan UNDP tahun 2009, sarana dan prasarana sekolah yang rusak akibat gempa yakni :
 - a. Rusak Berat : 2.146 unit (perlu pembongkaran) ,
 - b. Rusak Sedang : 1.447 unit (perlu penilaian dari insinyur struktural)
 - c. Rusak Ringan : 1.137 unit (perlu rehab ringan).

2. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat, sumberdaya manusia adalah salah satu kekuatan bagi pembangunan Sumatera Barat. Kekuatan ini telah melahirkan kreativitas dari orang Minangkabau untuk turut serta dalam pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Sumatera Barat dewasa ini telah berkembang kepada masyarakat yang heterogen dan multikultural sebagai konsekuensi dari masuknya budaya luar. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain disebabkan karena keterbukaan masyarakat dan pemerintah daerah untuk: (1) terbuka terhadap warga luar daerah untuk bermukim dalam wilayah Sumatera Barat; (2) terbuka terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan berbasis ekonomi di Kabupaten/Kota; (3) terbuka terhadap perbedaan tingkat pendidikan dalam masyarakat; (4) terbuka terhadap perbedaan orientasi dan gaya hidup anggota masyarakat; dan (5) terbuka terhadap efek pembangunan fisik dan infrastruktur.

Selama RPJMD ke 1 (tahun 2006-2010) beberapa kegiatan yang melampaui target sasaran yang telah ditetapkan yaitu: (1) Pengembangan lembaga seni dan budaya target 446 lembaga/sanggar, sedangkan realisasinya adalah 510, dan (2) Pembinaan seni budaya langka, target 35 kegiatan, sedangkan realisasinya adalah 37 kegiatan.

Untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan, maka diperlukan gerakan terpadu untuk peningkatan nilai-nilai seni dan kebudayaan berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (ABS-SBK). Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat. Sistem nilai merupakan tingkat tertinggi dan abstrak yang mengatur adat istiadat, karena sifatnya yang abstrak, nilai budaya terletak dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga pendukung suatu kebudayaan tersebut. Dalam tiap masyarakat, terdapat sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan yang digunakan sebagai pedoman dan pendorong bagi kehidupan warga masyarakat.

2.2.3. Gambaran Kondisi Pencapaian SPM Provinsi Sumatera Barat

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara

secara minimal. Sampai kondisi tahun 2012 realisasi penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Gambaran kondisi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Barat

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target		
					2010	2011	2012
1	Sosial						
	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial:						
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2010-2015	0,95	1,46	2,83
	b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi	Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	60	2010-2015	38,17	39,69	41,98
	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:						
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80	2010-2015	43,51	45,04	48,09
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Presentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	60	2010-2015	14,40	20,16	20,99
	Penanggulangan korban bencana:						
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	80%	2010-2015	100,00	100,00	100,00
	b. Evaluasi korban bencana skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/ kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80%	2010-2015	100,00	100,00	100,00
	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:						
	a. Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	40%	2010-2015	100,00	100,00	100,00
2	Lingkungan Hidup						
	Jenis pelayanan Informasi status mutu air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	2010-2015	20,00	60,00	80,00
	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Persentase Jumlah Kabupaten/ Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya	100	2010-2015	26,32	47,37	78,95
	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2010-2015	40,00	100,00	100,00

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target		
					2010	2011	2012
3	Penanaman Modal						
	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 sektor/ bidang usaha/th	2010-2014	0	industri pengalengan ikan lokasi Pasa-man Barat luas 1.5 Ha dan Pabrik Ban Lokasi PIP luas lahan 587 Ha	Cable car lokasi padang panjang (minang kabau fantaasi dan minang kabau village) luas 1.680M2 dg panjang 1.800 M (PP)
	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dengan pengusaha	1 kali/th				0
	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	1 kali/th	2010-2014			7 kali
		Hasil promosi penanaman modal tingkat provinsi	5 MoU	2010-2014			
	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Izin Prinsip PMBN, Izin Usaha PMDN, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), per panjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kab/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.	100%	2010-2014			100%

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Dasar Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan pendidikan Sumatera Barat secara umum menunjukkan hasil cukup baik, antara lain dilihat dari perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, tata kelola, akuntabilitas, dan dalam kurun waktu tahun 2006-2009. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan pendidikan pada periode ini di Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada masyarakat antara lain dilihat dari pencapaian angka partisipasi kasar (APK), bahwa tingkat pendidikan SD/MI/Paket A, tahun 2006 dari target 113,36 % terealisasi 113,37 %. Selanjutnya dari tahun 2006 sampai tahun 2009 realisasi indikatornya selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti dan berdampak positif terhadap perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMTLB/Paket B, dapat dikatakan menunjukkan keberhasilan, hal ini dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi dari tahun 2006-2009 sudah melampaui target yang direncanakan, yaitu tahun 2006 target 88,18 %, teralisasi sebesar 88,28 % dan seterusnya tahun 2009 target 96,07 % terealisasi 97,42 %. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C, perlu mendapatkan perhatian karena pencapaian realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2006 dengan target 64,90 % terealisasi 64,71 %, selanjutnya tahun 2009 dengan target sebesar 76,84 % hanya terealisasi sebesar 72,51 %. Namun demikian realisasinya dari mulai tahun 2006 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup baik.

Pencapaian pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan unggul seperti Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dimulai pada tahun 2008, meliputi SBI SD sebanyak 2 sekolah, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP 17 sekolah, RSBI SAM 17 sekolah, RSBI SMK 21 sekolah dan SMA bersertifikat ISO 1900-2000 sebanyak 29 sekolah.

Untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM), pada seluruh jenjang pendidikan dapat dikatakan menggambarkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dapat terlihat pada Tingkat SD/MI/Paket A dari tahun 2006-2009 pada setiap tahunnya, hasil realisasi pencapaian indikator pembangunan mengalami peningkatan dan bahkan melebihi target yang direncanakan. Data tersebut dapat dicermati pada tabel di atas yaitu tahun 2006 dengan target 97,61 % terealisasi 97,61 %, seterusnya 2009 target 98,57 % telah direalisasikan sebesar 99,85 %. Tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga mengalami hal yang sama dengan tingkat pendidikan SD/MI/Paket A. Pada tahun 2006 dicapai realisasi 70,62 % dari target 67,16 % dan tahun 2009 target 77,25 % direalisasikan 78,56 %. Tingkat SMA/MA/SMK/Paket C rata-rata setiap tahunnya pencapaian realisasi juga melebihi target yang telah direncanakan.

Untuk indikator Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/Diploma IV, pada setiap jenjang tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, dalam kurun waktu 2006-2009, dapat digambarkan realisasi pelaksanaannya belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini, perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait pada tahun-tahun mendatang, sehingga pencapaian realisasi dapat memenuhi target yang telah direncanakan.

Pada Indikator Sertifikasi Guru dari evaluasi kinerja secara makro berdasarkan Tabel 2.14. menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat dari setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK,

SLB, SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2006-2009, realisasi pelaksanaan program selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data indikator makro pada tabel di atas, realisasi kegiatan dari tahun ke tahun mulai tahun 2006 sampai tahun 2009, menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Selain itu, sampai dengan tahun 2009, terjadi peningkatan terhadap rata-rata lama sekolah menjadi 8,45 tahun.

Tabel 2.14
Perkembangan Kinerja Makro Bidang Pendidikan
Tahun 2006– 2010

Indikator Kinerja	Sa- tuan	2006		2007		2008		2009		2010	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)											
1. SD/MI/SDLB/Paket A	%	113,36	113,37	117,27	114,50	119,67	115,82	122,08	116,11	124,48	112,54
2. SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	88,15	88,28	90,20	93,90	93,13	96,08	96,07	97,42	99,15	98,31
3. SMA/SMK/ MA/SMALB/ Paket C	%	64,90	64,71	70,52	65,98	73,68	68,56	76,84	72,51	80,25	83,92
b. Angka Partisipasi Murni (APM)											
1. SD/MI/SDLB/Paket A	%	97,61	97,61	97,69	98,60	98,13	99,67	98,57	99,85	99,01	99,67
2. SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	67,16	70,62	71,75	72,44	74,70	75,91	77,25	78,56	80,30	77,25
3. SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	%	49,16	49,13	48,77	53,36	49,84	55,55	50,90	62,13	51,97	55,50
c. Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/ Diploma IV											
1. SD	%	15,00	15,00	17,50	17,50	20,00	14,79	22,50	16,49	25,00	20,00
2. SMP	%	74,13	74,13	80,38	80,38	86,63	56,33	92,88	59,94	100,00	86,63
3. SMA	%	83,12	83,12	87,37	87,37	91,62	86,88	95,87	87,35	100,00	91,01
4. SMK	%	81,51	81,37	86,26	66,26	91,01	82,40	95,76	85,00	100,00	91,01
d. Sertifikasi Guru (Pem. Pusat)											
1. TK	Org	-	6	30	30	30	38	40	84	50	30
2. SLB	Org	-	5	30	30	30	23	40	74	50	30
3. SD/MI	Org	-	65	500	500	600	1.870	700	3.175	2.500	600
4. SMP/MTs	Org	-	84	1.240	1.240	1.440	1.499	1.620	2.458	2.900	1.440
5. SMA/SMK/MA	Org	-			1.700		1.743		2.889		2.400
Persentase penduduk Buta Huruf menurut kelompok umur											
a. 15 +	%	-	4,12	-	3,90	-	3,34	-	-	-	-
b. 15 - 44	%	-	1,50	-	1,78	-	0,83	-	-	-	-
c. 45 +	%	-	9,43	-	7,97	-	7,99	-	-	-	-
Rata-rata lama sekolah warga masyarakat	th	-	8	-	8,18	-	8,26	-	8,45		8,79

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi

Pendidikan merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk diantaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing Sumatera Barat. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis, dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama secara keseluruhan. Oleh karena itu pembangunan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas serta penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, dan menyenangkan dengan menekankan pada pembinaan

dan perkembangan pribadi anak didik secara utuh, berkarakter dan mandiri.

2. Kesehatan

Gempa yang terjadi 30 September 2009, memberikan dampak di segala sektor bagi Provinsi Sumatera Barat, khususnya Bidang Kesehatan. Hal ini akan makin menambah permasalahan kesehatan yang telah ada sebelumnya.

Pencapaian target bukan semata-mata menunjukkan kinerja pemerintah di bidang Kesehatan, namun target indikator bidang Kesehatan yang dibuat berdasarkan indikator 4 tahun pencapaian kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 - 2010, dimana dijadikan suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat merupakan rujukan dan gambaran kondisi derajat kesehatan di Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus sebagai bahan masukan dalam pengembangan dan peningkatan kinerja bidang kesehatan pada masa yang akan datang. Target kesehatan yang ingin dicapai mengacu untuk tahun Indikator Sumbang Sehat yang ingin dicapai pada Tahun 2010.

Pencapaian target kinerja program bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Tahun 2006- 2010, penilaian dilakukan dengan index antara target dan realisasi. Indeks lebih besar atau sama dengan 1,00 termasuk *Klasifikasi A*, Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006- 2010 terlampaui dengan klasifikasi Sangat memuaskan, namun target tersebut perlu tetap ditingkatkan. Indeks antara 0,75 dengan 1,00 termasuk *Klasifikasi B*, Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006- 2010 belum tercapai, sehingga perlu perhatian dan langkah peningkatan, indeks antara 0,55 sampai 0,75 termasuk *Klasifikasi C*, Target belum terpenuhi dan perlu perbaikan terhadap kinerja pencapaian target. Indeks dibawah 0,55 termasuk *Klasifikasi D*, target masih jauh dari harapan, perlu penanganan dan tindakan khusus terhadap kinerja pencapaian target.

Perkembangan pencapaian indikator derajat Kesehatan selama Tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel Pencapaian Target Derajat Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Terhadap target Indikator Kinerja Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010.

Tabel 2.15
Perkembangan Kinerja Makro Bidang Kesehatan Sumatera Barat
Tahun 2006-2010

INDIKATOR KINERJA	Sat	2006			2007			2008			2009			2010		
		Tar get	Realisasi	Index	Tar get	Realisasi	Index	Tar get	Realisasi	Index	Tar get	Realisasi	Index	Tar get	Realisasi	Index
1. Angka harapan hidup (Th)	TH	66.52	68.60	1.03	66.7	68.80	1.03	67.00	68.90	1.03	67,20	70.40	1.06	70,9	70,9	1.00
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	KH	42.10	36.00	1.14	41.7	34.00	1.18	40.12	28.50	1.29	39.25	26.00	1.34	26	26	1.00
3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (KH)	KH	274.6	230	1.16	258.4	229	1.11	242.2	215.9	1.11	226	208	1.08	214	207	0.97
4. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)/ Jumlah ibu hamil yang berkunjung 4 kali sebelum melahirkan (%)	%	81	76.2	0.94	84	84.8	1.01	87	87.1	1.00	90	90	1.00	90	93,5	1.04
5. Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi (%)	%	79.5	75.6	0.95	82	82.7	1.01	84.5	85.97	1.02	87	87.1	1.00	90	90,8	1.01
6. Desa Universal Child Imunization (Desa/ Jorong/ Kelurahan Cakupan Imunisasi) (%)	%	80	84.7	1.06	85	88.8	1.04	90	90.2	1.00	95	95.4	1.00	100	96,6	0.97
7. Prevalensi Gizi Kurang pada anak balita (%)	%	14.2	12.9	1.09	13.5	12.8	1.05	12.8	12.7	1.01	12.1	10.5	1.13	11,4	8,2	0.72
8. Cakupan Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Puskesmas (Visit Rate)	Kali	1.6	1.3	0.81	1.7	2.2	1.29	1.8	1.81	1.01	1.9	1.93	1.02	2	2	1.00
9. BOR (Bed Occupation Rate)/ Persentase pemanfaatan Tempat Tidur di Rumah Sakit (%)	%	62	68.6	1.11	65	71.2	1.10	70	62	0.89	77	65.1	0.85	85	70,4	0.83
10. Terakreditasinya Rumah Sakit (Pemerintah dan Swasta) (%)	%	80	33	0.41	83	35.18	0.42	88	37.03	0.42	93	33.88	0.36	40,74	43,4	1.07
11. Ketersediaan obat esensial dan obat generik pada puskesmas dan rumah sakit	%	80	81.7	1.02	85	85.4	1.00	90	91.07	1.01	95	92.5	0.97	100	100	1.00
12. Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	%	37	37	1.00	44	44.8	1.02	51	58	1.14	58	69.38	1.20	65	69,3	1.07
TOTAL				12.75			13.28			12.93			12.98			11.66
INDEX RERATA/TAHUN				0.98			1.02			0.99			1.00			0.97
INDEX RERATA													1.00			1.24

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi, Desember 2010

Berdasarkan hasil kompilasi data, diperoleh indeks rata-rata derajat Kesehatan Sumatera Barat sebesar 1.00, artinya termasuk ke dalam kelompok dengan Klasifikasi A, sangat memuaskan, dimana target rata-rata dapat dicapai. Selanjutnya masih diperlukan langkah-langkah

peningkatan pencapaian dari masing-masing parameter indikator, dimana pencapaian tidak hanya untuk menyamai target angka pada tahun 2010, namun yang lebih penting adalah agar derajat Kesehatan Sumatera Barat tercapai setinggi-tingginya dan memiliki ketahanan Kesehatan yang handal.

Indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada perencanaan mendatang adalah terakreditasinya rumah sakit (pemerintah dan swasta) yang baru mencapai 33.88%. Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu syarat Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jika dipertahankan seperti ini, maka dengan laju pertumbuhan yang sangat kecil, maka pada akhir tahun 2015 hanya akan mencapai 33.8% saja. Sangat diperlukan program peningkatan untuk terakreditasinya rumah sakit (pemerintah dan swasta) agar bisa mencapai 100% pada tahun 2015

Untuk indikator angka kematian bayi, berdasarkan trend Angka Kematian Bayi yang ada maka diprediksikan dalam 5 tahun ke depan akan berhasil mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu, menurunkan angka kematian bayi sampai 23/1000 kelahiran hidup. Diprediksikan dengan laju penurunan sejak tahun 2006-2009, bahkan Provinsi Sumatera Barat bisa mencapai 14/1000 kelahiran hidup. Kecepatan penurunannya per tahun mampu mencapai 9,62%. Artinya dalam 5 tahun ke depan estimasi penurunan dapat mencapai hampir setengahnya. Ini merupakan pencapaian yang sangat baik sekali bagi Provinsi Sumatera Barat. Percepatan penurunan angka kematian bayi akan dapat dicapai antara lain bila terjadi perbaikan terhadap kesehatan ibu dan bayi, peningkatan ketersediaan sarana prasarana KIA, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga medis dan paramedis.

Untuk pencapaian peningkatan kesehatan ibu dan mengurangi sampai tiga perempat jumlah angka kematian ibu hamil dan melahirkan, dengan target 102/100.000 kelahiran hidup, sepertinya akan cukup sulit dari pencapaian menjadi seperti yang ditargetkan. Peningkatan upaya program-program KIA yang lebih banyak lagi, yang menunjang untuk menurunkan angka kematian ibu tersebut. Prediksi penurunan angka kematian ibu pada tahun 2015 hanya bisa mencapai 181.6 /100.000 kelahiran hidup. Kecepatan laju penurunan per tahun, baru mencapai 2.64%. Artinya dalam 5 tahun kedepan hanya mampu menurunkan sekitar 13.2% saja.

Dengan adanya *global health*, perubahan iklim akan menyulitkan untuk memberantas HIV/AIDS dan penyakit-penyakit infeksi penyebab utama kematian seperti penyakit tuberkulosis dan malaria pada tahun 2015. Program-program intervensi dan upaya mencari bantuan dana dari berbagai sumber pembiayaan perlu diupayakan.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan antara lain tercermin dari peningkatan capaian Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Indeks pemberdayaan gender meliputi keanggotaan perempuan dalam parlemen (%), persentase perempuan pekerja profesional (%), perempuan dalam angkatan kerja (%) dan upah pekerja non pertanian (Rp.000). sedangkan Indeks pembangunan gender meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki dan perempuan dan persentasi angkatan kerja.

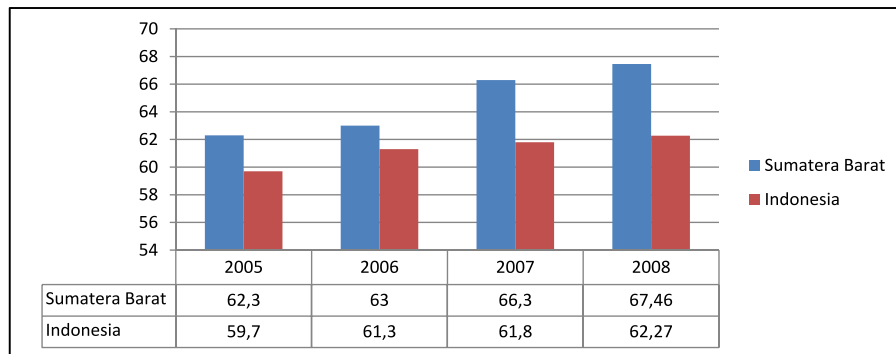
Pembangunan gender di Sumatera Barat dihitung berdasarkan Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur tingkat pencapaian dalam kemampuan dasar dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG dan IDG Sumatera Barat tahun 2007 sudah berada diatas angka nasional. Berikut tabel pencapaiannya:

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2007

Lokasi	Angka harapan hidup		Angka melek huruf		Rata-rata lama sekolah		% angkatan kerja		IPG	Rangking
	L	P	L	P	L	P	L	P		
Sumatera Barat	66.5	70.5	97.6	94.6	8.3	7.8	61.80	38.20	66.3	5
Indonesia	66.50	70.5	94.6	88.4	7.9	6.9	63.61	36.39	65.3	

Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan BPS

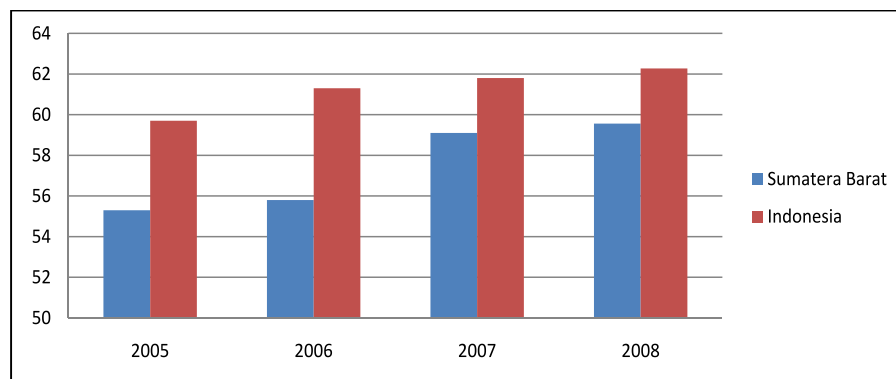
Jika dilihat trend Indeks Pembangunan Gender sejak tahun 2005 sampai 2008, yang diambil sumbernya dari Pembangunan Berbasis Gender 2006, 2007 & 2008 Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak bekerjasama BPS terlihat capaian trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut pencapaian dari tahun 2005-2008:



Gambar. 2.4

Indeks Pembangunan Gender Indonesia Tahun 2005 – 2008

Akan tetapi pada trend Indeks Pemberdayaan Gender sejak tahun 2005 sampai 2008, yang diambil sumbernya dari Pembangunan Berbasis Gender 2006, 2007 & 2008 Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak bekerjasama BPS terlihat capaian trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi pencapaian ini masih dibawah angka nasional. Berikut pencapaian dari tahun 2005-2008.



Sumber : Pembangunan Berbasis Gender 2006.2007 & 2008.
Kementerian PP&PA bekerjasama BPS

Gambar. 2.5

Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia Tahun 2005 – 2008

Berdasarkan kondisi ini tentunya upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pencapaian rendahnya angka indeks pemberdayaan wanita tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Sumatera Barat belum responsif. Persentase berdasarkan jumlah wanita di parlemen, perempuan yang menjadi pejabat tinggi, manajer, dan posisi staf teknis, serta angkatan kerja wanita masih kurang.

Permasalahan lainnya, di Sumatera Barat jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak, seperti data yang dikumpulkan oleh Dirjen pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM jumlahnya mencapai kurang lebih 375 anak baik laki-laki maupun perempuan. Tapi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Sumatera Utara 6.061 kasus dan Jawa Tengah 2.280 kasus. Tapi angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara 30 kasus dan Papua Barat 42 kasus.

Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya sistem hukum.

Data anak berhadapan dengan hukum menurut jenis kelamin Tahun 2008 yang didapat dari Dirjen pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM untuk Provinsi Sumatera Barat meliputi tahanan anak laki-laki 263 orang, perempuan 9 orang, untuk anak didik pemasyarakatan, terdiri dari anak sipil, anak negara dan anak pidana. Anak didik pemasyarakatan yang berstatus anak negara laki-laki 24 orang, berstatus anak pidana laki-laki 374 orang dan perempuan 1 orang.

4. Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan bidang pemuda dan olah raga memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pemberdayaan dan prestasi olah raga. Hal itu merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai salah satu rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga selama RPJMD ke 1, telah memberikan kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga pada RPJMD ke 2 Sumatera Barat.

Berbagai kemajuan yang dicapai di bidang pemuda, antara lain;

- a. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) pemuda, yaitu APS penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 46,96 persen pada tahun 2005 menjadi 55,50 persen pada tahun 2008; APS penduduk usia 19-24 tahun, meningkat dari 12,23 persen pada 2005 menjadi 14,35 pada 2008.

- b. Meningkatnya program peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan seperti; a). Paskibraka, b). Pramuka, c). Siswa/Osis.
- c. Percepatan/Akselerasi program sekolah sehat, pada TP UKS, UKS SD/MI, UKS SMP/MTs/UKS SMA/MA/K, UKS PONPES dan UKS PAUD.
- d. Meningkatnya kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Hal ini ditandai oleh banyaknya sarjana pelopor pembangunan yang turun ke nagari-nagari di Sumatera Barat.

Berbagai kemajuan pembangunan di bidang olahraga, antara lain ditandai oleh;

- a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama di satuan pendidikan.
- b. Meningkatnya program pemasyarakatan olahraga seperti; a). pembinaan atlit dari 0 % pada tahun 2005 menjadi 28,02 % tahun 2009. b). Penggalan Potensi Atlit pelajar dari 0 % pada tahun 2005 menjadi 40,13 % pada tahun 2009. c). Penggalan Potensi Atlit Klub Olahraga dari 0% tahun 2005 menjadi 19,12 % tahun 2009. d). Penggalan Potensi Atlit Yuniior dari 0 % pada tahun 2005 menjadi 15,92 % tahun 2009. e). Pembudayaan Olahraga Massal dari 0 % pada tahun 2005 menjadi 26,27 tahun 2009.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah penyelesaian substansi masalah kemiskinan dan kebodohan secara sistemik dengan menggerakkan segenap lingkungan dan pelaku melalui pengelolaan kegiatan yang bersifat bottom-up, partisipasi, akuntabel terpadu dan berkelanjutan.

Pemberdayaan memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai aktor “yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya”. Konsekuensinya, pembangunan yang berpusat pada rakyat memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal dan sistem-sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang berskala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga

masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Program pemberdayaan hendaknya menyentuh tiga level pemberdayaan, yakni: 1) pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan potensi dan keterampilan; 2) pemberdayaan pada level kelompok / organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; serta 3) pemberdayaan pada level kesisteman, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis.

Pemberdayaan masyarakat desa/nagari yang telah dilaksanakan selama periode RPJMD pertama dalam agenda mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Melalui agenda mempercepat tingkat kemiskinan telah diperoleh penurunan jumlah penduduk miskin dari 550.250 jiwa pada tahun 2006 menjadi 429.250 jiwa pada tahun 2009. RTM penerima bantuan juga menurun dari 312.640 RTM tahun 2006 menjadi 257.412 RTM pada 2008. Namun pada agenda memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan terlihat bahwa kegiatan Penataan Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perantau Dalam Pembangunan Nagari, dan pengembangan Lembaga Keuangan Nagari (BPR dan LPN) belum terlaksana sepenuhnya sesuai harapan.

Disamping itu, bagi Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, pemberdayaan usaha mikro juga menjadi fokus perhatian, terlihat dari komitmen pemerintah untuk meluncurkan kredit tanpa bunga kepada masyarakat yang merupakan spesifiknya Sumatera Barat yaitu Kredit Mikro Nagari (KMN) yang direalisasikan melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota mulai tahun 2007.

Pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro tidaklah mudah mengingat jumlah usaha mikro di Sumatera Barat cukup besar dan sulit didata. Menurut Survey Ekonomi Tahun 2006 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah usaha mikro kecil berjumlah lebih kurang 57.000 unit. Didalam pelaksanaannya program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro sebagian besar tergabung kedalam program/kegiatan urusan pertanian, kelautan perikanan, industri, perdagangan serta koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Capaian kinerja pembangunan pemberdayaan usaha mikro cukup sulit untuk diukur, karena ketersediaan data usaha mikro sangat minim, namun dengan meningkatnya pelaku usaha mikro yang dilatih setiap tahunnya selama kurun waktu 2006 – 2008 serta meningkatnya jumlah bantuan sarana usaha dan modal yang disalurkan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah serta BUMN/BUMD dan swasta, maka tentunya terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas

usaha mikro, sehingga tidak lagi hanya untuk sekedar bertahan hidup bagi pelakunya.

6. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kealpaan dalam membangun dan meningkatkan perpustakaan, baik sarana maupun pelayanannya, berarti menutup sebagian sumber belajar warga masyarakat. Secara langsung dan tidak langsung mengganggu pembentukan dan pembinaan karakter individu yang matang dalam segala aspeknya serta mencederai pembangunan karakter bangsa. Penyediaan perpustakaan yang memadai dan dapat di akses oleh semua warga masyarakat sebenarnya telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Untuk itu tidak perlu diragukan lagi pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara demokratis menuju masyarakat madani, di samping sebagai pelestari nilai budaya dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang.

Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 4,8 juta pada tahun 2010 sesungguhnya membutuhkan ketersediaan perpustakaan dalam jumlah yang relatif cukup banyak sebagai sumber dan media mentransformasikan ilmu pengetahuan, namun tidak dapat dipungkiri dewasa ini perpustakaan negara, perpustakaan nagari dan perpustakaan sekolah kurang memadai sesuai dengan tuntutan dan pengguna jasa baik dari kuantitas maupun kualitas. Demikian juga pelayanan yang di berikan. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan perpustakaan sangat diperlukan dalam upaya peningkatan insan manusia dan membangun minat baca masyarakat. Hal itu merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai salah satu rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Sumatera Barat.

7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau lazim disebut sebagai UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi), menjadi isu sentral dalam program pemulihan ekonomi nasional dewasa ini. Ekonomi kerakyatan diartikan sebagai sistim perekonomian dimana kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat sementara penyelenggaraan kegiatan ekonomi juga berada dibawah pengendalian dan pengawasan anggota masyarakat.

Berlandaskan pengertian ekonomi kerakyatan tersebut diatas, maka diharapkan adanya peningkatan peran dari usaha kecil dan

menengah serta individu wirausaha dalam kegiatan ekonomi. Namun upaya peningkatan peran tersebut terkendala oleh banyaknya kelemahan yang melekat dalam usaha kecil baik industri maupun perdagangan dan jasa sehingga memerlukan bantuan perkuatan yang sekarang sering disebut sebagai upaya perberdayaan UMKMK.

Kontribusi UMKMK terhadap pembentukan PDB dan PDRB sudah cukup besar namun memperlihatkan pertumbuhan yang berfluktuasi selama periode 2004-2008. Di tingkat nasional kontribusi output UMKMK terhadap pembentukan PDB Indonesia secara rata-rata dalam periode tersebut mencapai 53,41 % sementara kontribusi UMKMK terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat secara rata-rata adalah sebesar 26,87 %. Perkembangan capaian nasional dan daerah Sumatera Barat di bidang kontribusi UMKMK terhadap PDRB dapat disimak di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Perbandingan Output UMKMK Terhadap PDB/PDRB Indonesia
dan Sumatera Barat Tahun 2004 – 2008 (dalam %)

% Output UMKMK Thdp PDRB	2004	2005	2006	2007	2008	Rata2 Kontribusi	Rata2 Pert.
Capaian Nasional	55,40	53,90	53,49	53,60	52,70	53,41	-1,23
Capaian Sum.Barat	25,43	24,29	25,30	32,47	-	26,87	9,34

Sumber : Bappenas RI, Laporan EKPD Sumatera Barat 2009

Kontribusi output UMKMK terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat dalam kurun waktu 2004 – 2007 menunjukkan peningkatan sebesar 9,34 % yang mengindikasikan bahwa sektor UMKMK mengalami pertumbuhan yang cukup berarti dan hal itu tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat di provinsi Sumatera Barat.

Gambaran mengenai perkembangan koperasi dan UKM di daerah Sumatera Barat selama periode 2006 – 2009 dapat dilihat pada tabel 2.18

Tabel 2.18
Perkembangan Koperasi di Sumatera Barat Tahun 2006 -2009

Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Jumlah Anggota (orang)	Rata-rata (Jumlah anggota/Kop)	Waserda (unit)	Vol.Usaha Waserda (Rp jt)	Rata-rata modal (Rp jt/ kop)
2006	3.254	536.068	165	286	56.998	230,2
2007	3.388	560.845	166	274	60.659	156,5
2008	3.424	540.418	158	265	57.762	285,7
2009	3.475	560.521	162	284	58.267	336,8

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009/2010

Dari segi jumlah badan usaha dan jumlah anggota dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi cukup baik selama ini namun bila dilihat tingkat partisipasi anggota dan mutu pengelolaan koperasi, ternyata kondisinya tidak begitu baik. Sementara itu perkembangan UKM di daerah Sumatera Barat dapat disimak dari perkembangan industri kecil pangan, sandang, kimia & bangunan, logam & elektronik, kerajinan dan bengkel dan disajikan dalam tabel 2.19.

Tabel 2.19
Perkembangan UKM di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2009

Tahun	Unit Usaha	T.Kerja (orang)	Vol.Usaha (Rp jt)	Nilai Investasi (Rp jt)
2006	41.222	140.480	1.578,9	253,7
2007	42.483	147.002	1.665,4	297,8
2008	43.853	152.174	2.037,3	332,8
2009	35.391	132.895	2.167,2	628,5

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009/2010

Jumlah UKM cukup signifikan dengan penyerapan tenaga kerja yang juga cukup besar dimana secara rata-rata setiap UKM dapat menyerap 4 orang pekerja yang juga berarti bagi penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. Namun demikian data diatas juga mengungkapkan rendahnya potensi perkembangan UKM mengingat rendahnya volume usaha dan investasi.

8. Perumahan dan Permukiman

Sejak tahun 2005 sampai saat ini, Sumatera Barat mengalami kejadian gempa bumi yang beruntun, baik dengan intensitas rendah dan tinggi. Kejadian tahun 2005, 2007, telah meninggalkan kerusakan sarana dan prasarana serta kerugian harta dan benda bagi masyarakat. Untuk kejadian terakhir yaitu gempa tahun 2009 saja, perkiraan kerusakan dan kerugian pasca bencana terparah terjadi pada komponen perumahan dengan nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp.15,41 triliun. Sektor infrastruktur lainnya mengalami kerusakan dan kerugian mencapai Rp.963 miliar, sektor social Rp.1,52 triliun, sektor ekonomi Rp.2,3 triliun, dan lintas sektor (sub-sektor pemerintahan dan lingkungan) menderita kerusakan dan kerugian sebesar Rp.674,6 miliar, sehingga total nilai kerusakan dan kerugian tercatat Rp.20,86 triliun.

Selain itu, sesuai hasil pemutakhiran data pada tanggal 28 Oktober 2009 oleh Pemerintah, total jumlah rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 249.833 unit dengan rincian: 114.797 unit rumah rusak berat, 67.198 unit rumah rusak sedang dan 67.838 unit rumah rusak ringan. Selain rumah juga telah merusak sarana dan prasarana publik lainnya, termasuk kerusakan sejumlah gedung pemerintahan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan,

fasilitas perdagangan, hotel dan gedung/perkantoran keuangan dan perbankan.

Hasil dari observasi dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kualitas rumah bahwa dari rumah-rumah yang hancur dan rusak berat setelah terjadinya gempa 30 September 2009 yang lalu, terjadi pada umumnya pada rumah yang secara struktural bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis. Artinya rumah-rumah tersebut dibangun dengan tidak memperhatikan persyaratan teknis bagi rumah yang aman terhadap bencana gempa.

Permasalahan lain dalam sektor perumahan adalah masih tingginya backlog perumahan yang harus dipenuhi. Dengan backlog atau perbedaan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan yang masih besar tahun 2010, di Sumatera Barat, menyebabkan beban pemerintah dan pengembang semakin meningkat untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah di tahun berikutnya. Selain itu pada beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Barat, cenderung makin besarnya kawasan perumahan yang kumuh, yang memerlukan perhatian pihak yang terkait untuk melakukan peningkatan mutu perumahan tersebut. Kawasan tersebut ditandai dengan tidak lancarnya saluran drainase, sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik, air bersih atau minum yang tidak secara kontinue tersedia serta tata kelola ruang yang tidak terencana dengan baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang memasukkan faktor perumahan sebagai salah satu indikator, menempatkan Indonesia di urutan 107 dari 175 negara. Untuk Sumatera Barat, dibandingkan dengan Provinsi lainnya menempati urutan ke 9 dari 33 provinsi di Indonesia. Dari sisi investasi, pembangunan perumahan di Indonesia masih ketinggalan (dimana masih dibawah 5 % dari PDB), sementara Malaysia dan Amerika pada tahun 2002 saja sudah mencapai mencapai 27,7 % dan 45,3 %.

Infrastruktur perumahan dan permukiman yang juga sangat mendukung kelangsungan dan kenyamanan hunian adalah drainase dan persampahan. Kondisi drainase saat ini beragam antar kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan topografi setempat. Di daerah yang terletak pada dataran tinggi drainasenya lebih lancar dibandingkan dengan dataran rendah. Keadaan ini terjadi karena sistem drainase yang dibuat relatif sama, sehingga kelancarannya lebih tinggi di daerah yang topografinya tidak datar. Kemudian saluran drainase sering mampet karena budaya masyarakat yang masih membuang sampah ke dalam saluran drainase, disamping relatif rendahnya pemeliharaan saluran tersebut. Sistem pengelolaan limbah rumah tangga di Sumatera Barat masih sederhana dengan mengalirkan saluran air limbah rumah tangga ke saluran drainase. Sementara penampungan tinja dilakukan dengan membangun tangki septik pada masing-masing rumah tangga. Jika sudah penuh, mobil penyedot yang dikelola pemda atau swasta

mendatangi tempat tersebut dan membuangnya pada tempat tertentu. Sebagian di antaranya telah mempunyai instalasi pengolahan limbah. Pertambahan penduduk yang semakin tinggi dengan aktifitas yang meningkat, menyebabkan pengelolaannya perlu ditingkatkan dan direncanakan antisipasinya untuk masa datang.

Secara umum pengelolaan sampah dilakukan adalah dengan mengumpulkan sampah rumah dalam kantong plastik atau karung dan ditempatkan di depan rumah. Kemudian petugas mengumpulkannya dalam *Tempat Penampungan Sementara* (TPS) yang ditempatkan di setiap kelurahan atau RW. Selanjutnya truk sampah mengangkutnya ke *Lokasi Pengolahan Akhir* (LPA). Penanganannya sederhana dengan membakar sebagian tumpukan sampah dan dijadikan kompos. Permasalahan umum dihadapi adalah bercampurnya sampah organik dan an-organik. Hal ini menyebabkan pengolahan lebih lanjut menjadi sulit. Pemisahan ini seyogyanya dilakukan mulai dari rumah tangga sampai ke tempat pembuangan akhir. Dengan cara ini teknologi pengolahan sampah yang lebih efektif dan efisien dapat dilaksanakan.

Dalam era otonomi daerah ini, pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan swasta, masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota. Bila melihat fenomena tersebut maka dapat diperkirakan bahwa masa mendatang, kebutuhan akan perumahan dan permukiman akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan teknologi. Persoalan lain adalah meningkatkan kebutuhan atas sarana dan prasarana bagi perumahan dan permukiman seperti: jaringan air, listrik, telekomunikasi, saluran limbah, persampahan, jalan dan transportasi, dan lainnya. Sehingga sangat perlu menetapkan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman.

9. Komunikasi dan Informasi

Dari pengalaman selama ini di Indonesia, banyak pranata komunikasi dan informasi pada masa lalu dikontrol ketat oleh penguasa, sehingga mereka dapat dikendalikan. Keadaan itu terjadi karena penguasa mengembangkan sistem kekuasaan birokrasi otoriter (*authoritarian bureaucratic state*) yang memposisikan seluruh pranata komunikasi sebagai pendukung kekuasaan. Saluran-saluran komunikasi dan pusat-pusat penyebaran informasi berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah, sensor dilakukan dengan ketat, monopoli posisi untuk melakukan interpretasi disentralisir guna mempertahankan hegemoni dan sekaligus mematahkan resistensi. Oleh karena itu, pada saat ini perkembangan pembangunan sangat ditentukan juga oleh perkembangan bidang komunikasi dan informasi. Globalisasi informasi dan gerakan reformasi telah memaksa semua pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi

merumuskan kembali dan menata ulang posisi, peran, cara kerja dan bentuk-bentuk pelayanannya. Arus globalisasi dan gerakan reformasi secara paradigmatis telah mengubah konsep dan praktek di bidang komunikasi dan informasi. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini secara mendasar telah membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam.

Untuk Sumatera Barat, bidang komunikasi dan informatika sedang berkembang, membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Keberadaan komunikasi dan informatika sangat diperlukan, terutama karena Sumatera Barat, yang rawan terhadap bencana yang jika terjadi bencana bisa memutuskan hubungan transportasi, sehingga pilihan penggunaan media telekomunikasi dan informasi menjadi hal sangat diperlukan.

10. Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berangkat dari visi dan misi pembangunan daerah Sumatera Barat dalam bidang Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, terutama untuk menciptakan jaminan perlindungan hukum dan HAM, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006- 2010, pengembangan produk hukum, serta penegakan hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat telah dicapai beberapa kemajuan.

Dalam periode jabatan Gubernur hasil Pilkada tahun 2005 (sampai bulan Juni 2010) telah dihasilkan berbagai produk hukum daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah sebanyak 60 buah, Peraturan Gubernur sebanyak 488 buah, dan Keputusan Gubernur sebanyak 2.321 buah serta Instruksi Gubernur sebanyak 18 buah, sebagai bagian untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam pelaksanaan RPJMD telah dihasilkan berbagai produk hukum dimaksud, juga merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan urusan yang khusus/khas dimiliki oleh Sumatera Barat. Walaupun disadari di luar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, maka Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur merupakan instrumen hukum yang secara tidak langsung berhubungan dengan pembangunan bidang hukum.

Apabila dilihat dari sisi lain, keberhasilan dalam membentuk peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai bentuk produk hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*) pada dasarnya diupayakan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahun 2005-2025. Apabila dianalisis dari berbagai produk hukum daerah dimaksud, khususnya Peraturan Daerah yang dihasilkan dalam periode jabatan Gubernur tersebut diatas (sampai bulan Juni

2010) sebanyak 60 buah, secara kuantitatif memang relatif sedikit, tetapi secara kualitatif telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Barat dalam aspek, ekonomi, sosial dan budaya serta pembangunan lainnya.

Sebagai bahan analisis lanjutan, maka beberapa materi Peraturan Daerah (Perda) akomodatif terhadap pengembangan nilai-nilai lokal sehingga cukup efektif, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, Perda Nomor 3 tahun 2007 tentang Pendidikan Al-quran, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Nomor 6 tahun 2008 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat, dan Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang Pemberantasan Maksiat, Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009), serta Perda lainnya. Peraturan Daerah yang mendukung kegiatan ekonomi seperti Perda Nomor 2 tahun 2006 Pembinaan dan Pengembangan perkoperasian, Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Investasi pemerintahan Daerah yang diamanatkan dalam RPJMD 2006-2010 telah dapat diwujudkan. Kemudian selama tahun 2010 (data sampai Juni 2010), telah dihasilkan sebanyak 7 buah peraturan daerah. Salah satu yang terpenting di antaranya adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perda Nomor 2 Tahun 2010).

Walaupun berbagai produk hukum daerah telah dapat dihasilkan, namun beberapa permasalahan masih menjadi tantangan dalam pembangunan hukum terutama dalam pembentukan Perda, pada umumnya Perda tersebut dibuat tanpa melalui kajian akademis dan belum partisipatif. Dalam bidang kesadaran hukum, pengetahuan masyarakat akan hukum cukup meningkat baik, tetapi kesadaran masyarakat tetap masih rendah. Langkah harmonisasi hukum, sinkronisasi hukum dalam menciptakan produk hukum daerah belum menunjukkan hasil yang signifikan, hal itu ditandai banyaknya produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Hal itu mempunyai korelasi langsung bahwa masih lemahnya profesionalisme dalam perancangan produk hukum di daerah.

Persoalan penegakan hukum masih dikeluhkan oleh banyak pihak, independensi peradilan masih dipertanyakan terutama oleh lembaga swadaya masyarakat yang kritis manakala terdakwaanya menyangkut pejabat pemerintah dan anggota legislatif. Persoalan Hak Asasi Manusia masih merupakan persoalan yang harus diatasi dalam pembangunan masa datang, baik hak asasi berkaitan dengan hak milik, hak pendidikan dan pekerjaan dan lain-lain.

Walaupun pembangunan hukum terutama melalui pembentukan Peraturan Daerah, serta penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia telah dilakukan, termasuk pengawasan terhadap berbagai

produk hukum Kabupaten dan Kota, pembinaan dan pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi hukum. Namun perlu upaya peningkatan dalam menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan berkualitas, melalui melibatkan masyarakat, pengkajian akademis, pembinaan sumberdaya aparatur perancang perundang-undangan, pengkajian produk hukum yang melanggar HAM, pengembangan jaringan informasi hukum. Untuk penegakan hukum yang optimal, perlu dilakukan koordinasi antar berbagai aparatur penegak hukum, termasuk penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi yang merupakan kewenangan dari daerah, terutama dalam penegakan peraturan daerah. Peningkatan budaya hukum masyarakat, juga perlu dioptimalkan melalui pendidikan hukum dan sosialisasi berbagai produk hukum yang dibentuk.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, bahwa sasaran pembangunan bidang hukum diarahkan pada pembangunan materi hukum, struktur, dan kelembagaan serta budaya hukum. Pembangunan materi hukum dilakukan melalui kebijakan pembaharuan produk-produk hukum daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan hukum nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan dan pemantapan desentralisasi, demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan hal ini perlu pula dilakukan transformasi berbagai nilai-nilai kebiasaan Minangkabau ke dalam produk-produk hukum daerah sebagai bagian dari pembangunan materi hukum. Disamping itu, perlu pula dilakukan pembangunan struktur atau kelembagaan hukum dalam upaya penegakan hukum, serta diarahkan pada upaya terwujudnya aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang sadar hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia.

11. Pemerintahan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005- 2025, yang kemudian dijabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat agenda pembangunan bidang pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan "Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik" dengan berbagai prioritas program yang akan dicapai, terutama berkaitan dengan: Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara makro penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada provinsi merupakan gambaran keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh kabupaten dan kota yang merupakan bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal itu pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan di provinsi sangat ditentukan oleh keterpaduan kebijakan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan agenda sangat strategis karena merupakan lokomotif bagi pencapaian agenda RPJM lainnya. Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang otonomi dan pemerintahan umum, dan administrasi keuangan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mantap dan sesuai dengan prinsip yang terkandung pada *good governance*. Program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah koordinasi penyelenggaraan, penyelenggaraan pelayanan, pengawasan, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara umum dapat digambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, telah dilakukan berbagai penataan kelembagaan melalui peraturan daerah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Terwujudnya Peningkatan kemampuan pemerintahan daerah juga ditentukan oleh indikator peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), capaian terhadap hal ini dimana telah dilakupan peningkatan strata pendidikan aparatur baik S-3, S-2, S-1 dan DIII sesuai dengan kemampuan daerah. Untuk mewujudkan transparansi pemerintahan telah ditata Pola Rekrutmen pegawai dalam 3 tahun terakhir lebih objektif Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk tidak ada nepotisme dalam penerimaan pegawai dan selanjutnya pemeriksaan terhadap seleksi penerimaan pegawai melibatkan Perguruan Tinggi.

Langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan memberikan kemudahan dalam pelayanan untuk kepentingan publik juga telah dicapai privatisasi BUMD yakni dengan ditetapkannya berbagai peraturan daerah. Langkah itu adalah untuk mengurangi peran pemerintah dan menciptakan profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan daerah, peraturan daerah tersebut antara lain adalah :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan PT ATS.
- c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Grafika.
- d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Dinamika.

Agenda penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada RPJMD 2006-2010 telah memperlihatkan peningkatan terhadap kemampuan pemerintah dan itu terlihat dari capaian kinerja, tetapi untuk promosi pegawai yang duduk pada jabatan, mutasi pegawai/aparatur yang akan menduduki jabatan, aspek transparansi dan profesionalisme pengisian jabatan masih banyak dipersoalkan dan dikritisi karena dirasakan masih belum dilakukan secara terbuka dan belum berbasis kompetensi.

Pembangunan prioritas peningkatan kemampuan pemerintahan telah dilakukan dengan menetapkan berbagai kebijakan daerah dalam hal ini penetapan SOTK yang lebih efisien, kebijakan swastanisasi fungsi pemerintahan, transparansi pengisian jabatan publik dan rekrutmen pegawai dengan cara penyempurnaan manajemen pegawai, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Namun, pelaksanaan prioritas ini masih perlu ditingkatkan karena masih banyak hal yang perlu dicapai untuk mewujudkan *good governance*, seperti antara lain:

- a. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
- b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan;
- c. Masih belum optimalnya standarisasi baik untuk rekrutmen pegawai, dalam penentuan jabatan publik (promosi);
- d. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintahan dan antar instansi;
- e. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan dan jenis, dan sifat pekerjaan;
- f. Terbatasnya kualitas SDM aparatur sehingga dapat mengganggu kinerja pemerintahan;
- g. Sistem insentif/perbaikan penghasilan yang belum didasarkan atas beban kerja, tanggung jawab dan kompetensi/kecakapan, kerajinan aparatur;
- h. Terbatasnya SDM pengelola Diklat dan belum terpenuhi semua spesialisasi/mengajar terutama keuangan dan pembangunan.

Upaya pembangunan pada prioritas pelayanan publik pada beberapa jenis pelayanan publik telah dilakukan antara lain melalui penggunaan teknologi informasi/elektronik seperti layanan pengadaan barang dan jasa yang dikenal dengan *electronic procurement* (*e-procurement*). Partisipasi publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, telah dilakukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Masyarakat dapat mempertanyakan segala persoalan tentang pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui media masa.

Pembangunan dalam bidang pelayanan publik secara umum telah dilakukan perbaikan dengan penetapan standar pelayanan, penetapan

kebijakan pelayanan, penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan dan pelibatan masyarakat dalam kontrol pelayanan publik, namun masih terdapatnya beberapa hal yang harus dibenahi. Namun, pengembangan manajemen pelayanan publik, peningkatan pengembangan partisipasi, pengembangan sistem informasi penduduk sesuai dengan amanat RPJM perlu dicapai sesuai agenda yang ditetapkan.

12. Perencanaan Pembangunan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan, yaitu: Politik; Teknokratik; Partisipatif; Atas-bawah (*top-down*); dan Bawah atas (*bottom-up*).

Sedangkan perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat cukup mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

- a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, SKPD Lembaga masyarakat lainnya, organisasi profesi, dan sektor swasta;

- b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- c. Terselenggaranya forum SKPD, dan Forum Musrenbang;
- d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- b. Tersedianya hasil-hasil kajian dan dokumen perencanaan, meliputi: RPJPD, RPJMD RTRW, RKPD, KUA-PPAS, *data base* pembangunan, data base kemiskinan, dan data-data pembangunan serta kajian-kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- c. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui rapat-rapat koordinasi dan *focused group discussion (FGD)*;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Selama lima tahun terakhir perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan tersebut adalah disamping membuat perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS), juga telah membuat perencanaan yang bersifat khusus, misalnya perencanaan pembangunan bidang Ekonomi antara lain Penyusunan *Grand Design* Industri Unggulan Sumatera Barat, Kajian Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD), Bidang Sosial Budaya antara lain Penyusunan Database Perencanaan Pendidikan berbasis spasial, Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup antara lain Perencanaan pengembangan kawasan konservasi lingkungan hijau asri dan lestari.

Tabel 2.20
Data Perencanaan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Jenis	Jumlah dokumen				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2006-2010	1	-	-	-	-
2	Penyusunan Ranperda RPJMD Tahun 2006-2010	-	1	-	-	-
3	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025	-	1	-	-	-
4	Penyusunan Ranperda Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025	-	-	1	-	-
5	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1	1	1	1	1
6	Penyusunan KUA-PPAS APBD	1	1	1	1	1
7	Penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD	-	1	1	1	1
8	Penyusunan Buku Tujuh Agenda Pembangunan Sumatera Barat	1	-	-	-	-
9	Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada) Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Aksi Daerah	-	1	-	-	-

Sumber Data : Bappeda Propinsi Sumatera Barat tahun 2010

13. Pengembangan IPTEK

Perkembangan kegiatan penelitian dan pengembangan di Sumatera Barat yang dikelola oleh sebuah Badan Litbang baik diperguruan tinggi maupun oleh lembaga litbang lainnya yang telah menghasilkan temuan dan berbagai rekomendasi untuk dimanfaatkan oleh lembaga dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pembangunan. Pada Tabel dibawah dapat dilihat perkembangan hasil penelitian dari tahun 2006 – 2010.

Tabel 2.21
Perkembangan Jumlah Judul Penelitian di Sumatera Barat
Tahun 2006-2009.

No	Jumlah Judul Penelitian				
	Bidang/Jenis	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1.	Riset Murni	195	243	221	123
2.	Riset Aplikatif	109	154	104	142
	Jumlah	304	397	325	265

Sumber Data : Data sementara Stakeholder terkait bidang Litbang Sumatera Barat Tahun 2009

Secara umum hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga Litbang dan perguruan tinggi belum dimanfaatkan oleh dinas dan instansi terkait. Lembaga-lembaga pemerintah belum merasakan adanya kebutuhan terhadap hasil penelitian dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dalam bidang masing-masing.

Kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan nilai tambah proses produksi usaha kecil menengah masih rendah. Usaha kecil dan menengah, yang merupakan usaha dominasi di Sumatera Barat, masih mengandalkan proses produksi dengan teknologi yang konvensional, sehingga nilai tambah proses produksi masih sangat rendah malahan sebagian besar produk usaha masyarakat dijual dalam bentuk produk primer tanpa melalui pengolahan dengan teknologi yang berbasis IPTEK.

Publikasi dan sosialisasi hasil litbang masih terbatas yang disebabkan oleh relatif kecilnya jurnal ilmiah yang terakreditasi di Sumatera Barat. Demikian pula teknologi yang telah dihasilkan dari kegiatan litbang tidak banyak masyarakat dan kalangan dunia usaha yang memanfaatkannya untuk kepentingan peningkatan hasil usahanya. Disamping itu hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga-lembaga litbang pada taraf keilmuan telah cukup banyak malah sudah ada yang mengajukan paten namun tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya, sehingga hasil penelitian tersebut baru digunakan

penemuan sebagai sekedar tambahan kredit untuk naik pangkat. Manfaat bagi masyarakat belum banyak dirasakan.

Budaya ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum berkembang dalam masyarakat, hal ini bisa dilihat dari kondisi masyarakat yang cenderung konsumtif, lebih suka membeli dan memakai produk yang dihasilkan pihak lain ketimbang menghasilkan karya inovasi yang dihasilkan sendiri. Demikian juga dari lembaga-lembaga birokrasi masih banyak kebijakan dan program yang dicanangkan tidak didasarkan pada hasil litbang yang umumnya membutuhkan waktu, serta belum dialokasikannya dana penelitian yang memadai.

Koordinasi dan sinergi lembaga penelitian dalam menghadirkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah masih lemah. Perguruan tinggi melaksanakan kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan arahan para penyanggah dana. Demikian juga balai penelitian sebagai perpanjangan tangan litbang departemen pusat melaksanakan penelitian sesuai arahan pusat. Sebagian dari dinas provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota juga melaksanakan penelitian, tetapi sampai saat ini belum ada koordinasi antara lembaga tersebut untuk mengarahkan kegiatan penelitian bagi kepentingan agar produk yang dihasilkan lebih bermanfaat.

14. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, baik secara nasional maupun Daerah. Penyebab terjadinya kemiskinan antara lain karena penduduk mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi; keterbatasan akses modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk; pengaruh eksternal seperti lonjakan kenaikan harga bbm, tarif, dan regulasi lain yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta semakin terbatasnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada RPJMD Tahun 2006-2010, telah ditetapkan indikator kemiskinan yaitu penduduk miskin dan Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan (berdasarkan 14 indikator, menurut data PPLS 06). Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebesar 12,51 % dan RTM sebanyak 312.640 KK atau sebesar 29,28 %, yang dijadikan sebagai sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

Percepatan penanggulangan kemiskinan antara lain dilakukan melalui penguatan lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik Provinsi maupun daerah kabupaten/kota, peningkatan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan baik Nasional, Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, berdasarkan data BPS, mengalami kenaikan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 dari laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 % tahun 2006 menjadi 6,37 % pada tahun 2008. Hal ini berdampak kepada capaian penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 12,52 % dengan jumlah penduduk miskin 550.251 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 146.781 perkapita / bulan. Pada tahun 2007, tingkat kemiskinan mencapai 11,90 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 529.200 jiwa dengan garis kemiskinan Rp.180.669 perkapita/bulan dan pada tahun 2009, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 9,54 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 429.250 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 217.649 perkapita/bulan. Tren penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat 2006-2009 mencapai 0,6 % pertahunnya. Namun pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mengalami penurunan secara signifikan, hal ini dikarenakan pada tanggal 30 September 2009, Sumatera Barat dan sebagian besar Kabupaten/ Kota yang berada dipesisir pantai barat Sumatera mengalami bencana Gempa Bumi sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dan pada tahun 2010 (kondisi Maret), dapat diturunkan sedikit menjadi 9,5% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 430.024 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 230.823 perkapita / bulan.

Capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tersebut dari tahun 2006-2010 selalu berada dibawah rata-rata Nasional dimana pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Nasional mencapai sebesar 13,3 %. (pada gambar 7.6.1). Selain itu, tingkat pengangguran di Sumatera Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2006 yang mencapai 11,87 % menjadi 7,9 % pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 menjadi 6,95 %.

Tabel 2.22
Persandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran & Kemiskinan Antara Nasional dengan Sumatera Barat

	2005		2006		2007		2008		2009	
	Nas	Sum-bar	Nas	Sum-bar	Nas	Sum-bar	Nas	Sum-bar	Nas	Sum-bar
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,73	5,5	6,14	6,3	6,34	6,1	6,37	4,5	4,16
Pengangguran (%)	11,24	13,34	10,28	11,87	9,11	10,31	8,39	8,04	7,87	7,90
Kemiskinan (%)	15,97	10,89	17,75	12,51	15,42	11,90	15,42	9,80	14,15	9,54

Sumber : RPJMN 2010-2014

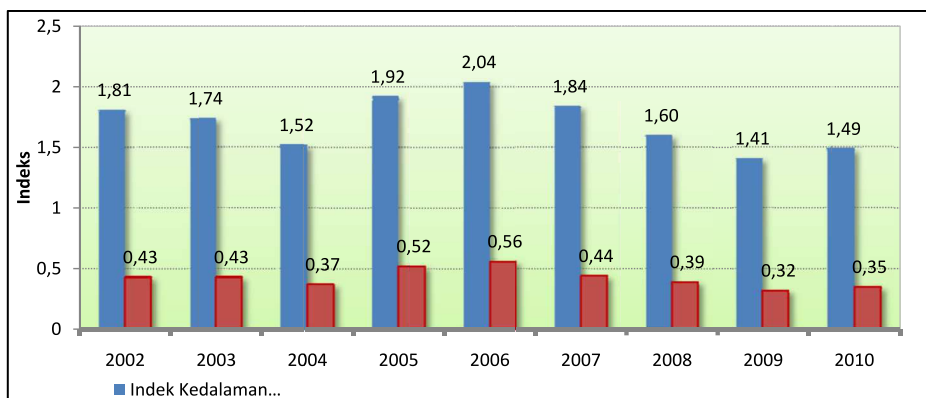


Sumber: Susenas Panel BPS, berbagai edisi penerbitan.

Gambar 2.6
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2002 - 2010

Berdasarkan BPS Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2006 sebesar 12,51 % dan menjadi 9,50 % pada tahun 2010 (maret) atau penduduk miskin sebesar 430.024 jiwa (trend 0,6 % per tahun).

Pada perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Sumatera Barat (Gambar 7.6.3) menunjukkan kecenderungan penurunan dari 2006 s.d 2009 dan sedikit meningkat di tahun 2010. Secara umum indeks ini dipengaruhi oleh penurunan di perkotaan yang menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan penduduk miskin di perkotaan lebih baik daripada di pedesaan.



Sumber Data : Sesenas

Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Tahun 2002 - 2010

Kondisi Indeks keparahan kemiskinan tidak jauh berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan. Indeks ini sedikit meningkat di tahun 2009-2010. Indeks keparahan kemiskinan untuk daerah perkotaan lebih rendah daripada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi penduduk miskin di daerah perkotaan memiliki disparitas yang lebih rendah

Tabel 2.23
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan
Nasional dan Sumbar Tahun 2010-2015

	2010		2011		2012		2013		2014		2015
	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Sumbar
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5-5,6	5,93	6,0-6,3	6,37	6,4-6,9	6,56	6,7-7,4	6,78	7,0-7,7	6,99	7,21
Pengangguran (%)	7,6-7,6	6,95	7,3-7,4	6,59	6,7-7,0	6,22	6,0-6,6	5,86	5,0-6,0	5,50	5,13
Kemiskinan (%)	12,0-13,5	9,5	11,5-12,5	8,55	10,5-11,5	8,15	9,5-10,5	7,75	8,0-10,0	7,35	6,95

2.3.2 Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan

1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Secara umum peran sektor pertanian dalam pembangunan di Sumatera Barat tahun 2006- 2009 terlihat pada Tabel 2.24

Tabel 2.24
Peranan Pertanian dalam Pembangunan di Sumatera Barat 2006-2010

No	Aspek	2006	2007	2008	2009	2010
1	Angkatan Kerja Yang Bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian (%)	45,46	47,93	47,25	46,50	44,10
2	Kontribusi Pertanian dalam PDRB (%)	25,26	24,67	24,46	23,92	23,40
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura	13,11	12,52	12,56	12,36	12,42
	- Perkebunan	5,61	5,61	5,45	5,03	5,18
	- Peternakan	2,04	2,02	1,97	1,97	1,97
	- Kehutanan	1,50	1,56	1,56	1,50	1,43
	- Perikanan	3,01	2,96	2,94	2,98	2,81
3	Nilai Tukar Petani	74,21	75,19	105,09	103,73	105,60
4	Produktivitas Tenaga kerja Pertanian (Juta Rp)	9,32	8,88	9,13	9,66	-

Sumber Data : SKPD Terkait

Dalam sektor pertanian, yang memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat diantaranya adalah sub sektor tanaman pangan dan Hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Ke empat sub sektor ini perlu dikembangkan ke arah peningkatan nilai tambah produknya dengan mendorongnya melangkah ke agroprosesing dan agroindustri. Pengembangan industri unggulan berbasis produk pertanian rakyat untuk peningkatan kualitas perekonomian Sumatera Barat, juga merupakan upaya peningkatan kesejahteraan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan. Gambaran umum produksi komoditi utama pertanian di Sumatera Barat tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.25

Tabel 2.25
Produksi Beberapa Komoditi Utama Pertanian di Sumatera Barat
Tahun 2006 – 2010 (Ton)

NO	KOMODITI	2006	2007	2008	2009	2010
1	PADI	1.889.489	1.938.120	1.965.634	2.105.790	2.211.248
2	JAGUNG	202.298	223.233	351.843	404.799	354.262
3	DAGING SAPI	15.561,7	16.367,9	17.609,4	18.322.349	19.426.163
4	TELUR	58.346,5	57.339,8	60.288,5	65.361.496	76.464.967
5	SUSU	2.502,6	1.092,4	3.209,0	3.293.752	4.073.406
6	KARET	89.631	89.714	103.880	10.993	10.993
7	KELAPA SAWIT	694.234	771.406	794.167	833.483	850.237
8	KAKAO	18.721	20.917	32.359	40.250	49.769

Sumber Data : SKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat merupakan komoditas sangat prospektif untuk dikembangkan, mengingat potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ketersediaan teknologi, serta potensi serapan pasar ekspor yang terus meningkat.

Produk hortikultura Sumatera Barat juga merupakan komoditi andalan karena disamping untuk memenuhi kebutuhan lokal, Komoditi hortikultura terutama sayuran dan buah-buahan telah di pasarkan keluar Sumatera Barat. Sebagian besar sayuran Sumatera Barat juga untuk memenuhi kebutuhan propinsi tetangga.

Secara umum produktifitas komoditi utama pangan mengalami kenaikan, kecuali Kacang tanah dan kacang hijau yang menurun dari tahun 2008 dan 2009 (Tabel 2.26).

Tabel 2.26
Produktivitas Beberapa Komoditi Tanaman Pangan
Tahun 2006-2010 (kwintal/ha)

No	Komoditi	2006	2007	2008	2009	2010
1	Padi	45,22	45,75	46,59	47,91	48,02
2	Jagung	47,04	51,7	55,65	57,11	59,00
3	Kedele	12,23	12,81	12,97	16,87	16,00
4	kacang tanah	12,62	13,46	13,16	11,92	12,59
5	kacang hijau	11,52	11,78	11,69	11,67	11,75
6	Ubikayu	170,63	185,78	194,27	230,06	349,85
7	Ubijalar	129,66	136,98	151,44	186,55	238

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Pada tahun 2009 juga telah dilakukan pembinaan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian organik melalui DPA-SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat dan Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dalam bentuk demplot-demplot, peningkatan penggunaan kompos jerami, pengembangan Kawasan Pertanian Organik di beberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Tanah Datar, Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, dan Padang Panjang, serta pelaksanaan magang ke Institut Pertanian Organik Aie Angek. Aktivitas dan operasional yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan / sentra produksi pertanian organik selama tahun anggaran. Pengembangan pertanian organik tidak hanya terfokus pada komoditi hortikultura, melainkan juga diterapkan pada komoditi tanaman pangan terutama padi.

2. Perkebunan

Sumatera Barat memiliki potensi cukup besar di bidang perkebunan, karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan iklim yang sesuai. Komoditi unggulan perkebunan Sumatera Barat adalah karet, pala, kelapa sawit, kopi, dan kakao. Sedangkan yang ditetapkan sebagai komoditi spesifik daerah Sumatera Barat adalah cisiavera, gambir, kelapa dan nilam. Usaha perkebunan mempunyai peran cukup besar dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan serta devisa untuk negara, juga berpeluang besar menggerakkan kegiatan ekonomi di Sumatera Barat karena hasilnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Pemasaran hasil perkebunan Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir ini juga meningkat cukup signifikan, terlihat dari ekspor mencapai nilai (90,77 % dari nilai ekspor pertanian pada tahun 2008).

Usaha dibidang perkebunan cukup kompleks, diusahakan oleh petani kecil (perkebunan rakyat), pengusaha besar swasta dan perkebunan Negara (perkebunan Besar). Perkebunan Rakyat diusahakan di lahan usaha dengan status hak milik petani atau tanah kaum/ulayat, dan umumnya diusahakan oleh pemilik beserta keluarganya. Rata-rata luas kepemilikan kecil dan tersebar tidak merata, sehingga tidak memenuhi skala ekonomi (*economic of scale*). Luas tanaman perkebunan di Sumatera Barat tahun 2008 adalah 728.535 Ha, tahun 2009 menjadi 782.815 Ha dengan kenaikan seluas 54.280 Ha (7,45 %). Perkembangan luas dan produksi komoditi utama perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.27

Tabel 2.27
Perkembangan Luas Dan Produksi Komditi Utama Perkebunan
Tahun 2008-2010

NO	KOMODITI	LUAS (Ha)			PRODUKSI (Ton)		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	Kelapa sawit	327.653	344.351	353.300	794.167	833.485	850.237
2	Kelapa Dalam	91.272	91.767	91.672	82.595	85.715	86.459
3	Kopi	22.883	22.986	47.764	33.339	37.991	37.621
4	Casia vera	38.566	38.741	38.701	36.648	19.827	19.782
5	Cengkeh	6.954	6.987	6.997	1.741	1.749	1.717
6	Gambir	19.663	18.335	18.910	13.930	13.932	13.919
7	Kakao	61.464	84.254	101.014	32.359	40.250	49.769
8	Karet	151.032	166.719	175.985	103.880	133.816	134.401
9	Pinang	9.035	9.007	9.077	4.655	4.834	4.845
10	Nilam	2.976	2.997	3.880	396	397	416

Sumber Data : Dinas Perkebunan Prov. Sumbar Tahun 2009

Penambahan produksi tahun 2009 sebesar 819 ton (+0,07 %), terjadi pada Perkebunan Rakyat (PR), sedangkan pada Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) naik 21 ton dan PT. Perkebunan Negara (PT.PN) produksinya naik 1 ton. Namun demikian, Produktivitas komoditi perkebunan masih jauh dari potensi produksi dari masing-masing komoditi, untuk itu perlu inovasi baru untuk meningkatkan produksi terutama pada aspek budi daya serta peran aktif penyuluh dalam penerapan teknologi budi daya.

Produktifitas yang rendah menyebabkan pendapatan petani komoditi perkebunan juga relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena: pemakaian benih unggul masih rendah, pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) belum maksimal, pemanfaatan kemampuan lahan masih belum optimal, penggunaan teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan belum sepenuhnya sesuai petunjuk teknis, jaringan pemasaran belum luas, kualitas mutu produk belum

mampu bersaing di pasar internasional karena belum sesuai dengan permintaan pasar.

Disamping masalah produktifitas, Komoditi perkebunan sebagai komoditi ekspor juga menghadapi persaingan yang cukup besar di pasaran, yaitu dari negara-negara penghasil komoditi yang serupa dan dipasarkan di pasar yang sama. Persaingan semakin ketat karena jumlah negara-negara penghasil komoditi yang sama bertambah, juga dengan adanya produk-produk sintetis yang bersifat substitusi dengan proses produksi yang sangat efisien.

Dalam bidang pengolahan hasil tanaman perkebunan, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan adalah pengadaan bantuan alat pengolahan beberapa komoditi perkebunan seperti alat pengolahan kakao terpadu, alat penyulingan nilam, alat pengolahan gambir dan alat pengolahan kelapa terpadu.

Disamping itu, Sumatera Barat akan dijadikan sebagai salah satu sentra pengembangan tanaman kakao di wilayah barat Indonesia yang dicanangkan oleh Wakil Presiden pada tanggal 3 Agustus 2006.

3. Peternakan

Secara umum program pengembangan usaha peternakan di Sumatera Barat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewani, meningkatkan mutu generik, populasi dan produksi daging ternak sehingga mampu menyediakan protein hewani asal ternak seperti daging, telur dan susu untuk dikonsumsi memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun provinsi tetangga. Khusus untuk usaha peternakan sapi, dalam peningkatan populasi secara umum dapat dilakukan melalui bioteknologi reproduksi kawin suntik/inseminasi buatan (IB), merupakan upaya penerapan teknologi tepat guna yang dalam peningkatan mutu genetik dan jumlah ternak serta pembentukan bibit ternak yang berkualitas.

Populasi dan produksi daging ternak di Sumatera Barat tahun 2008 memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Populasi ternak besar sebanyak 671.207 ekor, ternak kecil sebanyak 245.766 ekor, dan unggas sebanyak 26.580.470 ekor. Produksi daging Sumatera Barat tahun 2008 paling banyak berasal dari ternak unggas sebesar 25.161.890 kg, ternak besar yaitu 20.266.119 kg, ternak kecil sebesar 3,580,084 kg.

Capaian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak adalah terlaksananya pemberantasan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk wabah Penyakit Hewan Menular (PHM) pada wilayah 5 Kab/Kota, Pemberantasan Penyakit Septichemia Epizootica (SE) di Kab. Mentawai serta Terkoordinasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit Flu Burung (AI) pada 8

Kabupaten/Kota. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah dalam rangka melindungi wilayah Sumatera Barat terhadap penyakit hewan eksotik dan melindungi konsumen serta memberikan keamanan dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan; mengetahui ada tidaknya pencemaran lingkungan peternakan sehingga berkurangnya kasus penyakit hewan ternak.

Capaian selanjutnya adalah terlaksananya pengambilan spesimen darah dan faeces sapi; Tersedianya obat-obatan pada Klinik dan Labor Keswan, terlaksananya pembinaan ke kawasan agropolitan dalam rangka persiapan kelompok tani dalam kegiatan agropolitan di Kab. Agam, Tanah Datar, Solok, Pessel, Padang Pariaman dan 50 Kota terlaksananya pertemuan deklarasi Brucellosis.

4. Kelautan dan Perikanan

Sub sektor Kelautan dan Perikanan merupakan sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai andalan masa depan Provinsi Sumatera Barat, karena sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sebagai pemasok kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, serta sebagai tulang punggung ekspor komoditi non migas daerah ini. Pertimbangan ini didasarkan, karena Sumatera Barat memiliki kawasan laut yang sangat luas yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, memiliki 185 pulau-pulau kecil, serta kawasan budidaya (baik budidaya air tawar maupun budidaya laut) yang juga cukup luas. Disamping potensi lautan, Sumatera Barat juga mempunyai potensi perikanan budidaya (baik laut maupun daratan) yang juga cukup luas. Potensi ini akan dapat mendongkrak produksi perikanan daerah ini guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, sekaligus meningkatkan pendapatan / kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah / devisa Negara.

Provinsi Sumatera Barat terletak pada kawasan yang sangat strategis dari segi kawasan laut sebagai daerah penangkapan ikan yaitu pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Samudera Hindia seluas 186.580 Km², ditunjang dengan panjang garis pantai 375 Km, dimulai dari Kabupaten Pasaman Barat hingga ke Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dimasukkan garis pantai pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai maka panjang keseluruhan pantai di Propinsi Sumatera Barat mencapai 2.420 Km.

Potensi ikan diperairan laut Sumatera Barat tercatat sebesar 248.708,40 ton (289.936 ton) dengan produksi ikan tahun 2008 sebesar 187.043,0 ton menjadi sebesar 191.343,9 ton pada tahun 2009 atau sejak 5 tahun terakhir produksi meningkat rata-rata sebesar 16,97 % pertahun, dengan perkataan lain pada tahun 2009 produksi perikanan laut sudah mencapai 75,22 % dari potensi perikanan.

Komoditi yang menjadi unggulan dari perikanan laut, yaitu; ikan tuna, dengan potensi lestari sebesar 43,343 ton dan ikan cakalang yang terdapat di perairan barat Sumatera Barat adalah sebesar 64.965 ton, pada tahun 2008 tingkat pemanfaatannya baru sekitar 14,6 % dari potensi lestarnya. Dengan demikian potensi perikanan tuna masih mempunyai peluang besar untuk dikembangkan, dan dapat dijadikan sebagai program prioritas pengembangan perikanan didaerah ini. Disamping ikan tuna masih terdapat jenis-jenis ikan ekonomis penting lainnya, seperti kakap, kerapu, udang, dll.

Disamping potensi sumberdaya perikanan laut, masih terdapat potensi kelautan lainnya, diantaranya:

- a. *Hutan mangrove* (Hutan bakau), merupakan ekosistem utama kehidupan yang penting diwilayah pesisir dan laut. Potensi hutan bakau (*mangrove*) adalah sebesar 3.700 Ha, yang terdapat sepanjang pesisir Kabupaten Pasaman sampai Kabupaten Pesisir Selatan), dan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 15.000 Ha);
- b. *Terumbu Karang*, ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis, dimana terdapatnya berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis penting. Di perairan Sumatera Barat terdapat seluas 40.804 Ha Terumbu Karang, dengan tingkat kerusakan sudah mencapai 80 %,
- c. *Padang lamun dan rumput laut*, ekosistem ini juga mempunyai prospek untuk dikembangkan dan dibudidayakan secara berkelompok oleh masyarakat pesisir.
- d. *Pulau-pulau kecil*, jumlahnya mencapai 185 pulau besar dan kecil yang sudah diberi nama dan diusulkan kepada PBB, juga mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikelola dan dikembangkan. Beberapa kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk dikembangkan budidaya laut, pariwisata bahari, pertambangan, jasa-jasa kelautan lainnya.

Potensi perikanan darat di Sumatera Barat cukup besar, antara lain terdiri dari potensi perairan danau, perairan sungai, telaga maupun perairan umum lainnya. Aktivitas budidaya dilakukan melalui; budidaya kolam air deras, air tenang serta budidaya di keramba / jaring apung dan disawah. Luas areal dan produksi perikanan darat; dimana perikanan perairan umum seluas 51.645,6 Ha, sedangkan luas areal budidaya adalah 8.449,7 Ha.

Tabel 2.28
Perkembangan Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2006-2010

No	Jenis Kegiatan	2006	2007	2008	2009	2010	Pertumb (%)
A	Perikanan Tangkap	130.100,5	196.448,8	195.585,0	199.895,4	202.599,5	16,01
1.	Penangkapan di Laut	123.527,4	187.088,8	187.043,0	191.344,9	192.658,4	16,79
2.	Penangkapan di Perairan Umum	6.373,1	9.360,0	8.542,0	8.550,5	9.941,1	3,98
B	Perikanan Budidaya	41.870	54.787,2	65.653	84.864,7	115.602,15	21,64
1.	Budidaya Air Tawar	41.824,9	54.750,2	58.614,3	84.794,6	115.577,37	22,4
2.	Budidaya Air Payau	5,1	3,5	4,8	10,0	12,11	31,8
3.	Budidaya Laut	40	33,5	33,9	60,1	12,67	4386,3

Sumber Data : Laporan tahunan dan Perikanan dalam Angka, Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam beberapa tahun terbitan

Perikanan air tawar dilakukan pada daerah yang mempunyai sumber air yang banyak seperti di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2008 adalah sebesar 58.614 ton dan sebesar 84.794 pada tahun 2009, atau mengalami loncatan kenaikan yang sangat tinggi yaitu sebesar 45 %. Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir adalah 21,64 %.

Untuk menunjang perikanan budidaya telah tersedia sumber-sumber benih ikan yang dilaksanakan oleh berbagai BBI.

Berdasarkan produksi diatas, maka tingkat konsumsi ikan masyarakat Sumatera Barat pada tahun 2008 sudah mencapai 26,20 kg / capita / tahun, lebih rendah dari konsumsi rata-rata nasional. Angka ini baru mencapai sekitar 75 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004 menetapkan sebesar 35 kg / capita / tahun.

Dilihat dari armada penangkapan ikan di laut, secara kuantitatif terjadi penurunan rata-rata sebesar 12 %/tahun dalam masa 4 tahun terakhir, dimana pada tahun 2006 tercatat sebesar 9.950 unit, dan pada tahun 2009 menjadi 9.913 unit. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya program pengadaan motor long tail di berbagai kabupaten / kota, sehingga terjadi pengalihan dari perahu tanpa motor menjadi perahu motor tempel. Hal yang sama juga terjadi armada penangkapan di perairan umum, Lihat Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Perkembangan Armada Perikanan di Sumatera Barat
tahun 2006-2010

Jenis Armada	2006	2007	2008	2009	2010	Pertumbuhan (%)
A. Perikanan Laut	9.950	9.130	9.095	8.819	8.725	10,28
1.Perahu Tanpa Motor	5.623	4.023	3.793	3.215	3.093	-2,92
2.Motor Tempel	2.235	3.070	3.286	3.563	3.583	36,16
3.Kapal Motor	2.092	2.037	2.016	2.041	2.049	4,54
B. Perikanan Perairan Umum	5.803	2.557	2.340	2.365	3.470	-19,63
1.Jukung	208	216	114	1.183	625	223,58
2.Perahu Tanpa Motor	5.770	2.520	2.043	851	2.764	-37,15
3.Motor Tempel	33	37	25	25	81	-14,21
4.Kapal Motor	-	-	3	3	-	0

Sumber Data : Laporan Tahunan dan Perikanan Dalam Angka, Dinas Kelautan Perikanan Prov Sumbar. Dalam beberapa tahun terbitan

Seiring dengan pertumbuhan produksi perikanan, maka dari segi nilai produksi perikanan juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dalam 5 tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan sebesar 639 % per tahunnya. Peningkatan tersebut didominasi oleh produk perikanan laut, yaitu pada tahun 2009 sekitar 67 % dari total nilai produksi perikanan Sumatera Barat, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.55. Dari produksi perikanan tersebut pada tahun 2009 telah berhasil diekspor sebesar 723 ton ikan, dengan nilai Rp. 10,3 juta US \$. Ekspor komoditi perikanan selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 887 % / tahun. Kenaikan ini terutama karena hadirnya perusahaan industry perikanan PT. DEMPO dan berbagai perusahaan penangkapan ikan tuna.

Tabel 2.30
Perkembangan Nilai Produksi (Rp. Milyar)
dan Ekspor Hasil Perikanan (Rp. Milyar) Tahun 2006-2010

No	Jenis Kegiatan	2006	2007	2008	2009	2010	Pertumb (%)
1.	Perikanan Tangkap	<i>3.194,4</i>	<i>3.403,0</i>	<i>3.061,4</i>	<i>3.089,9</i>	202.599,5	1,52
a	Penangkapan di Laut	3.121,6	3.297,8	2.904,4	2.968,9	192.658,4	1,37
b	Penangkapan di Perairan Umum	72,8	105,2	157,0	121,0	9.941,1	12,75
2.	Perikanan Budidaya	<i>607,8</i>	<i>646,1</i>	<i>766,8</i>	<i>1.599,5</i>	2.058,7	43,33
a	Air Tawar	606,8	644,3	765,3	1.596,7	2.056,8	43,42
b	Tambak	0,204	0,087	0,266	0,179	0,388	22,81
c	Laut	0,677	1,702	1,234	2,555	1,452	44,02
3.	Ekspor						
	Jumlah ('000 kg)	593,0	496,2	391,0	723,3	1.122,9	639,94
	Nilai ('000 US \$)	2.279,3	992,4	4.292,0	10.288,4	7.848,15	887,19

Sumber Data : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Sumatera Barat, berbagai tahun

Dilihat dari segi sumberdaya manusianya, maka pada tahun 2009 tercatat sebanyak 150.940 orang yang bekerja dalam bidang perikanan, antara lain sebagai nelayan laut, nelayan perairan umum dan pembudidaya ikan (Lihat Tabel 2.31). Jumlah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 1,13 % setiap tahun. Jumlah terbanyak tercatat pada pembudidaya ikan, yaitu mendominasi sebesar 62,40 % dari angkatan kerja perikanan. Dominasi ini juga selaras dengan target pengembangan produksi perikanan secara nasional, yaitu yang mengarah kepada produksi perikanan budidaya.

Tabel 2.31
Jumlah Tenaga Kerja Masyarakat Perikanan tahun 2006 – 2009

Angkatan Kerja	2006	2007	2008	2009	Pertumbuhan (%)
1. Nelayan Laut	34.220	34.220	34.220	34.984	0,58
2. Nelayan Perairan Umum	24.506	24.506	21.763	21.775	-10,04
3. Pembudidaya Ikan	81.678	82.825	84.027	94.181	4,23
Jumlah	140.404	141.551	140.010	150.940	1,13

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Kelautan Perikanan Prov Sumbar, dari berbagai tahun

5. Ketahanan Pangan

Pangan adalah makanan/minuman yang berasal dari hayati, air dan bahan tambahan dalam proses pengolahan (PP. NO : 68 TAHUN 2002). Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/ atau pengawasan terhadap kegiatan proses produksi dan peredaran pangan sampai dengan siap di konsumsi masyarakat (PP 28 Tahun 2004).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas Karbohidrat, Protein, Lemak, Vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya secara merata dan terjangkau (UU. NO.7/ 1996).

Peningkatan ketahanan pangan sebagai suatu sistem bertumpu kepada empat pilar, yaitu produksi, konsumsi, distribusi, dan penunjang seperti kelembagaan. Pengembangan ketahanan pangan adalah untuk terpenuhinya pangan dengan kondisi; Cukup, Berkelanjutan, Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman, Merata. Terjangkau

Kondisi 2008 telah menghasilkan capaian antara lain berkembangnya perbenihan/pembibitan benih padi untuk seluas 4 ha, palawija 4 ton, kentang 0,5 ha dan bibit jeruk 19.000 batang, bibit rambutan dan

mangga 1000 batang di UPTD BBI Lubuk Minturun untuk memenuhi kebutuhan benih sebar oleh petani terutama benih padi, palawija dan hortikultura oleh Balai Benih Induk (BBI/BBU); Pengembangan Informasi Pasar (Pemberdayaan Kelompok Pangan melalui PENAS Tani XII di Palembang), Pencatatan Harga Pasar di Sentra 6 Lokasi di Pasaman Barat, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Kota Bukittinggi dan Pariaman, Pengiriman Harga ke RRI sehingga petani mengetahui tingkat perkembangan harga komoditi TPH setiap saat dan meningkatkan posisi tawar petani / produsen. Selanjutnya meningkatnya mutu dan keamanan pangan melalui pengawasan pupuk dan pestisida, terlaksananya penanggulangan serangan hama penyakit yang bersifat eksplosif di 19 Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan serta Pendamping Pemberdayaan P3 A melalui pembinaan kelompok Petani Pemakai Air (P3A) dan pelatihan P3A.

Program ketahanan pangan ini juga menghasilkan pengembangan desa mandiri pangan dalam bentuk pembentukan kelompok desa mandiri pangan sebanyak 8 kelompok pada 2 Kabupaten, yakni Dharmasraya dan Pasaman dengan sasaran dengan dengan KK miskin minimal 30 % dan kepada kelompok diberikan bantuan penguatan modal usaha; Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dalam bentuk pemberian LUEP kepada 108 LUEP gabah dan 14 LUEP jagung. Apresiasi diarahkan dalam rangka pengamanan penerapan Harga Pembelian oleh Pemerintah (HPP) minimal Rp. 2.000,-/kg (GKP), pengembangan dan peningkatan SDM petugas serta masyarakat tentang keamanan pangan dalam bentuk pembinaan terhadap petugas provinsi dan kabupaten kota, masyarakat produsen (kelompok tani dan pengusaha) dan konsumen.

Capaian program ketahanan pangan juga telah melaksanakan penyusunan database potensi produksi pangan Pemantauan analisis harga pangan masyarakat (Advokasi Penyusunan dan Koordinasi Pencapaian Target Tahunan Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2006-2010, pengembangan Lumbung Pangan Desa (Koordinasi Pengembangan kelembagaan Pangan) dalam bentuk pengembangan jaringan informasi, baik dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maupun dengan Provinsi tetangga; Pengembangan Lumbung Pangan Desa (pelatihan petugas kecamatan pembina lumbung pangan) dalam bentuk monitoring dan pembinaan terhadap kelompok penerima pinjaman Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pada 13 kabupaten/kota. Pelatihan penyusunan peta kerawanan pangan (FIA) untuk petugas FIA yang telah dilatih di 4 (empat) Kabupaten yakni Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat.

Walaupun telah dicapai beberapa kemajuan dalam pembangunan pertanian tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi, seperti: Masih belum optimalnya peningkatan produktivitas pada masing-

masing komoditi, Masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi oleh petani, Lemahnya akses petani ke sumber modal, Masih lemahnya lembaga petani dan lembaga pendukung pertanian, Belum terpadunya di dalam pengelolaan pengembangan kawasan pertanian, Kapasitas SDM pelaku usaha pertanian dan penyuluhan belum memadai, Rendahnya pemanfaatan potensi pertanian dan peluang pasar, Lemahnya sistem jaringan distribusi sarana produksi, serta Terbatasnya prasarana penunjang pembangunan pertanian.

Dalam mengantisipasi kerentanan masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok terutama kebutuhan pangan, pemerintah mengeluarkan pemberian bantuan beras terhadap masyarakat miskin. Program bantuan pangan berupa pemberian beras bersubsidi dikenal dengan istilah Bantuan Beras Keluarga Miskin (Raskin). Selama 3 tahun pelaksanaan RPJMD sudah disalurkan sebanyak 109.650 ton yang sebar ke 462 titik pendistribusian di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, masing-masingnya tahun 2006 sebanyak 22.060 ton, tahun 2007 meningkat menjadi 32.870 ton untuk 247.255 RT miskin pada tahun 2007 ini pendistribusian tidak mencapai 100 % karena tidak terdistribusinya Raskin sesuai target di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan tahun 2008 menjadi 54.710 ton untuk 312.475 RT miskin. Untuk itu perlu pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Provinsi Sumatera Barat secara mendalam.

Tabel 2.32
Komposisi Ketersediaan Energi dan Protein di Sumatera Barat
Tahun 2005 - 2009

No.	Tahun	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr)			Ketersediaan Protein (Gr/kap/hr)		
		Pencapaian	Dianjurkan	(%)	Pencapaian	Dianjurkan	(%)
1	2005	4.238	2.500	169,5	86,13	52,0	165,6
2	2006	5.565	2.200	253,0	88,59	57,0	155,4
3	2007	5.744	2.200	261,1	91,30	57,0	160,2
4	2008	4.638	2.200	210,8	94,73	57,0	166,2
5	2009	4.382	2.200	222,6	100,56	57,0	181,3

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Sumbar, 2009

Ketersediaan energi dan protein untuk dikonsumsi cenderung meningkat setiap tahunnya. Tingkat pencapaian ketersediaan energi dan protein di Sumatera Barat sudah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut PPH, sebagaimana tertera pada tabel 2.32.

Meskipun Sumatera Barat terlihat surplus dalam penyediaan bahan pangan, namun, kondisi kualitas konsumsi penduduk di Sumatera Barat masih berada dibawah standar skor PPH optimal sebesar 100. Berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan fluktuasi

dimana pada tahun 2006 skor PPH sebesar 75,79. Mengalami peningkatan di tahun 2007 dengan skor PPH sebesar 77,87 dan 2008 skor PPH sebesar 79,83, kemudian tahun 2009 mengalami penurunan kembali dengan skor PPH menjadi 76,93. Untuk itu masih perlu strategi mencapai kualitas konsumsi pangan ideal di Sumatera Barat.

6. Kehutanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/KPTS-II/1999, kawasan hutan Sumatera Barat ditetapkan seluas 2,6 juta Ha, yang terdiri atas Hutan suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam (0,85 juta Ha), hutan lindung 0,91 juta Ha, hutan produksi terbatas 0,25 juta Ha, hutan produksi tetap 0,40 juta Ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi 0,19 juta Ha. Luasan kawasan hutan tersebut diatas meliputi seluas 61 % wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang paling luas.

Sesuai dengan usulan Provinsi Sumatera Barat terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan dalam rangka perubahan tata ruang luas kawasan hutan menjadi 57,2 % meliputi: Hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (0,77 juta Ha), hutan lindung 0,79 juta Ha), hutan produksi terbatas (0,23 juta Ha), hutan produksi tetap (0,36 juta Ha), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (0,19 juta Ha). Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi masih tetap merupakan kawasan yang paling luas.

Izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam maupun hutan tanaman terdapat pada 5 (lima) kabupaten. Bentuk-bentuk hasil hutan yang dihasilkan Sumatera Barat adalah dalam bentuk Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Produksi hasil hutan berupa kayu bulat dari Sumatera Barat (dari IUPHHK, IPK, dan IPKTM), pada tahun 2005 adalah 257.287 m³, dan pada tahun 2009 produksi tersebut mengalami penurunan. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh karena adanya program pembatasan produksi hutan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup.

7. Perindustrian

Pembangunan ekonomi Sumatera Barat dalam jangka panjang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 diarahkan kepada mewujudkan perekonomian yang produktif dan mampu bersaing di dunia global, maka dapat ditempuh dengan empat strategi yakni: (1). Meningkatkan usaha pertanian moderen dan agribisnis yang maju, (2). Melaksanakan kegiatan industri dan jasa yang efisien, (3). Menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan

wisata nasional dan Internasional, (4). Menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang pantai Barat Sumatera. Dalam kegiatan pengembangan industri dan jasa yang efisien, maka pada RPJMD II tahun 2010-2015 ini terutama dititikberatkan kepada: 1). Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sub sector perikanan terutama peningkatan sarana dan prasarana pendukung, kelembagaan usaha, 2), mewujudkan kegiatan perdagangan yang mampu bersaing, 3). Pengembangan kewirausahaan yang mampu bersaing, dan pengembangan UMKM dan koperasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi. 4). Pengembangan kewirausahaan dan manajemen usaha secara lebih intensif.

Berdasarkan kepada arahan RPJPD Sumatera Barat ini, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi Sumatera Barat pada saat sekarang dalam RPJMD II 2010-2015 adalah pengembangan industri pertanian dan melalui pengembangan kegiatan agroindustri dan agro bisnis, sebagai pengembangan industri unggulan Sumatera Barat.

Sementara itu, Perpres No: 28 Tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional menetapkan 10 industri unggulan Sumatera Barat yakni: industri hasil laut, industri pengolahan kakao, industri pengolahan makanan ringan, industri kulit dan alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil, industri gambir, industri minyak atsiri, industri maritim, industri semen, industri alsintan.

Dari sepuluh industri unggulan Sumatera Barat yang ditetapkan di atas, maka enam diantaranya adalah industri yang berbasis produk pertanian yakni agro industri dan agro bisnis. Tentu saja industri agro ini merupakan tahap awal dalam pengembangan industri di suatu daerah dalam menuju industri manufaktur lainnya. Perekonomian Sumatera Barat sampai saat ini masih berada pada tahap pengembangan industri pengolahan produk pertanian ini, terutama pada industri pengolahan produk perkebunan tanaman perenial.

Dalam struktur perekonomian Sumatera Barat, terdapat sebanyak 21 kelompok usaha industri (KBLI) yang memberikan sumbangan terhadap nilai PDRB Sumatera dalam sub sektor industri besar dan kecil. Diantaranya yang memiliki jumlah output yang besar dan jumlah ekspor yang tinggi itu adalah industri minyak dan lemak hewan, industri tekstil, pakaian, dan kulit, industri beras, industri semen dan industri makanan lainnya. Untuk lebih lengkapnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.33
Kondisi Jumlah Output dan Ekspor Industri Pengolahan
Sumatera Barat Tahun 2008

No	Jenis Industri	Jumlah Output (Rp Juta)	Jumlah Ekspor (Rp Juta)	Persentase Ekspor Terhadap Output
1.	Industri Pemotongan hewan	290,365.27	-	0.00
2.	Industri Pengolahan dan pengawetan makan	-	11,499.00	0.00
3.	Industri Minyak dan Lemak	3,871,817.52	1,983,741.49	51.24
4.	Industri Beras	2,883,729.33	737,315.39	25.57
5.	Industri Tepung	126,204.39	885.86	0.70
6.	Industri Gula	44,802.88	9,202.37	20.54
7.	Industri Makanan lainnya	1,707,057.35	332,239.71	19.46
8.	Industri Minuman	667,347.60	98,554.41	14.77
9.	Industri Pemintalan	1,441,982.45	177,468.28	12.31
10.	Industri Tekstil, Pakaian, Kulit	3,980,618.43	545,076.83	13.69
11.	Industri Bambu, kayu, dan rotan	334,813.93	99,227.15	29.64
12.	Industri Kertas	51,273.88	1,316.74	2.57
13.	Industri Pupuk dan Pestisida	41,094.93	-	0.00
14.	Industri Kimia	22,763.59	1,379.23	6.06
15.	industri barang karet dan Plastik	705,675.80	56,349.16	7.99
16.	Industri barang barang mineral dan logam	458,810.68	104,284.06	22.73
17.	Industri Semen	1,856,855.56	943,748.83	50.83
18.	Industri barang dan logam	62,380.05	6,613.27	10.60
19.	Industri Mesin dan alat-alat perlengkapan listrik	136,604.42	6,248.27	4.57
20.	Industri alat pengangkutan	8,381.68	1,536.84	18.34
21	Industri barang lain yg belum digolongkan di-manapun	23,646.64	-	0.00
	Total	18,716,226.38	5,116,686.89	27.34

Sumber: Tabel I-O Sumatera Barat, BPS Sumbar 2008

Tabel 2.33 di atas memperlihatkan bahwa struktur industri pengolahan Sumatera Barat outputnya paling tinggi didominasi oleh 4 usaha industri yakni: industri tekstil, pakaian, kulit, industri minyak dan lemak hewan dan industri beras, serta industri semen. Namun output industri yang diekspor yang besar hanyalah industri minyak dan lemak hewan, industri semen dan industri beras, dan industri tekstil, pakaian, dan kulit. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kecilnya nilai tambah industri pengolahan Sumatera Barat ini diduga disebabkan karena rendahnya jumlah ekspor dari kelompok industri lain terutama ekspor ke negara lain. Sedangkan, kelompok industri yang outputnya besar tetapi, jumlah eksportnya kecil, diduga ditransaksikan ke wilayah provinsi tetangga seperti industri tepung, industri tekstil, pakaian, dan kulit.

Penetapan beberapa industri unggulan Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 sesuai dengan potensi industri dalam analisa input dan output seperti: industri tekstil dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki serta industri semen.

Sedangkan untuk industri unggulan lainnya merupakan industri yang potensial yang akan dikembangkan di Provinsi Sumatera Barat.

Ke sepuluh Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari industri berbasis agro seperti: industri kakao, industri pengolahan hasil laut, industri gambir, industri makanan ringan, industri kulit dan alas kaki, industri minyak atsiri dan industri unggulan berbasis manufaktur seperti: industri semen, industri perkapalan, industri alsintan dan industri tekstil dan produk tekstil.

Disamping memiliki industri-industri unggulan, juga telah dikembangkan beberapa sentra-sentra industri potensial seperti: sentra industri bordir dan sulaman, sentra industri makanan ringan, sentra industri tenun, sentra batubata, sentra kerajinan, sentra perabot rotan dan terdapat satu klaster industri yang telah dikembangkan yaitu klaster industri semen.

Pengembangan industri pengolahan Sumatera Barat harus dimulai dari pengolahan produk pertanian masyarakat yang telah memberikan pendapatan yang luas kepada masyarakat selama ini. Produk unggulan pertanian yang mendatangkan aliran keuntungan kepada masyarakat petani.

8. Perdagangan

A. Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam bidang perdagangan yang besar pengaruhnya terhadap pembangunan daerah. Kegiatan utama yang dilakukan adalah dalam bentuk ekspor dan impor. Pengalaman masa lalu di banyak negara menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri ini merupakan salah satu faktor penggerak yang sangat penting bagi peningkatan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan perkembangan permintaan di luar negeri. Dengan demikian, peningkatan perdagangan luar negeri dapat berfungsi sebagai faktor penggerak pertumbuhan ekonomi (*Export led Growth*) untuk suatu daerah maupun nasional dalam rangka meningkatkan proses pembangunan.

Perkembangan ekspor Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2006-2008 ternyata menunjukkan tendensi peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian pada tahun 2009 terjadi penurunan nilai ekspor yang cukup drastis. Kondisi ini terjadi sebagai akibat adanya *Krisis Finansial Global* yang mengakibatkan terjadinya penurunan drastis terhadap permintaan komoditi ekspor Sumatera Barat, khususnya karet, minyak sawit dan lilita manis. Disamping itu terjadinya gempa dengan kekuatan 7,9 Skala Richter pada tahun 2009 juga telah mengakibatkan menurunnya kegiatan ekspor daerah sebagai akibat dari hancurnya

beberapa kantor dan pergudangan perusahaan ekspor yang berada di Kota Padang. Tabel 2.34 memperlihatkan perkembangan kegiatan ekspor menurut negara tujuan.

Tabel 2.34
Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan
Tahun 2006-2009 (Dalam US\$)

No	Negara Tujuan	Tahun				Pertumbuhan (%)
		2006	2007	2008	2009	
1	Amerika	406,296	325,104	609,739	158,972	-26,9
2	India	204,069	160,943	674,432	489,744	33,9
3	Singapura	87,065	583,334	355,591	179,406	27,3
4	Belanda	150,031	69,736	177,753	17,321	-51,3
5	China	107,582	27,265	180,124	187,564	20,4
6	Malaysia	17,049	28,977	54,819	55,933	48,6
7	Italia	15,559	1,081	10,368	17,652	4,3
8	Pakistan	13,383	7,035	59,312	7,278	-18,4
9	Negara Lainnya	141,955	230,470	262,451	262,451	22,7
	Jumlah	1,074,134	1,512,799	2,384,568	1,273,717	4,4

Sumber Data : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, beberapa terbitan.

Seperti terlihat pada Tabel 2.33 ternyata laju pertumbuhan nilai ekspor dalam periode 2006-2008 adalah 9,5 % dan menurun drastis pada tahun 2009. Sedangkan perkembangan ekspor menurut negara tujuan memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran daerah pemasaran komoditi ekspor Sumatera Barat dari pasar tradisional di Amerika Serikat dan Eropa menuju Asia, khususnya India, Pakistan dan Malaysia. Pergeseran pemasaran ekspor ini juga dipicu oleh terjadinya Krisis Finansial Global pada tahun 2008 sehingga permintaan komoditi ekspor di Amerika dan Eropa mengalami penurunan drastis. Sungguhpun demikian, ekspor Sumatera Barat ke negara-negara ASEAN masih tetap rendah, kecuali Malaysia.

Bila dilihat perkembangan nilai ekspor Provinsi Sumatera Barat menurut kelompok komoditi pada tahun 2009, laju pertumbuhan nilai ekspor hasil pertanian ternyata cukup tinggi yaitu mencapai 41,8 % rata-rata setiap tahunnya untuk periode 2006-2009. Dari ekspor hasil pertanian ini, ternyata ekspor biji coklat (cocoa beans) merupakan komoditi ekspor utama daerah dengan kontribusi mencapai 79,4 % sedangkan komoditi lainnya mempunyai kontribusi yang relatif kecil. Sedangkan dalam kelompok komoditi hasil industri, komoditi minyak kelapa sawit merupakan komoditi ekspor utama dengan kontribusi sekitar 63,8 % dan disusul oleh *crumb-rubber* dengan kontribusi sebesar 21,2 %. Sedangkan komoditi ekspor lainnya ternyata tidak terlalu penting dengan sumbangan yang sangat kecil. Tabel 2.35 menunjukkan perkembangan nilai ekspor Provinsi Sumatera Barat menurut komoditi untuk periode 2006-2009.

Tabel 2.35
Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat
Menurut Kelompok Komoditi 2006-2009 (Dalam 000 US\$)

No	Kelompok Komoditi	Tahun				Pertum- buan (%)
		2006	2007	2008	2009	
A	Hasil Pertanian	15.914	24.900	53.118	64.378	41,8
1.	Biji Coklat	3.040	13.205	34.878	51.095	57,0
2.	Kulit Manis	6.104	7.588	8.712	5.005	-4,8
3	Biji Lainnya	146	356	4.731	5.403	100,4
4	Buah-buahan	2.107	2.291	2.076	1.010	-16,8
5	Hasil Pertanian Lainnya	4.517	1.460	2.721	1.865	-19,8
B	Hasil Industri	1.053.083	1.460.754	2.244.993	1.241.896	-4,2
1.	Minyak Kelapa Sawit	-	717.805	1.276.769	791.867	5,0
2.	Crumb-rubber	496.361	560.497	651.341	263.628	-14,6
3.	Minyak Biji Sawit	-	107.193	204.066	123.210	3,5
4.	Hasil Industri Lainnya	556.722	75.259	112.817	63.191	-42,0
C.	Hasil Tambang	5.137	27.145	86.457	37.983	64,9
1.	Batubara	4.219	26.758	83.783	30.147	63,5
2.	Hasil Tambang Lainnya	918	387	2.674	7.836	70,9
	Jumlah	1.074.134	1.512.799	2.384.568	1.273.717	4,4

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka, beberapa terbitan

Kalau dilihat komposisi jumlah nilai impor Sumatera Barat menurut jenis barang, ternyata sebagian besar dari barang impor tersebut adalah bahan penunjang kegiatan produksi dalam daerah seperti bahan mentah, bahan kimia, barang hasil industri dan mesin-mesin untuk perlengkapan pabrik dan pengangkutan. Sedangkan sisanya lebih banyak merupakan barang konsumsi seperti bahan makanan dan minuman.

Perkembangan kegiatan impor Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tendensi peningkatan yang cukup signifikan, mulai pada tahun 2007 dan 2008. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya terlihat adanya tendensi penurunan yang cukup berarti. Fluktuasi ini terutama akibat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998 karena menurun drastisnya kegiatan produksi dalam negeri sehingga kebutuhan akan barang impor juga otomatis menurun. Akan tetapi mulai tahun 2006 pemulihan ekonomi mulai terjadi dan hal ini terlihat dari mulai meningkatnya kegiatan produksi dalam negeri sehingga impor juga mulai menunjukkan tendensi kembali meningkat. Tabel 2.36 memberikan perkembangan nilai impor Sumatera Barat tahun 2006-2009.

Tabel 2.36
Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang 2006-2009

Kode SITC	Golongan Barang	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
0	Bahan Makanan dan Binatang Hidup	3.797	16.448	7.826	-
1	Minuman dan Tembakau	-	-	-	-
2	Bahan Mentah Tidak untuk Dimakan	3.276	8.129	36.042	1.890
3	Bahan Bakar Mineral, Pelumas dan Bahan terkait	-	-	278.536	302.103
4	Bahan Kimia	15.581	37.011	112.928	9.992
5	Barang Buatan Pabrik	8100	15.154	27.914	8.596
6	Perlengkapan mesin dan pengangkut	6.058	18.674	12.903	11.263
7	Barang-barang Lainnya	-	444	307	404
	Jumlah	36.812	95.861	476.457	346.247

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2009/2010

Mengingat komoditi impor Sumatera Barat adalah barang-barang yang relatif berat untuk mendukung kegiatan produksi dalam negeri, kebanyakan kegiatan impor tersebut dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Sedangkan kegiatan ekspor yang dilakukan melalui bandar udara minangkabau masih relatif kecil. Namun demikian, sebenarnya nilai impor Sumatera Barat yang dibawa melalui pelabuhan lain seperti: Tanjung Periuk (Jakarta), Belawan (Medan) dan Dumai (Pekanbaru) juga cukup besar karena adanya variasi dalam ongkos angkut dan muat barang di pelabuhan serta jadwal kedatangan kapal. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi ongkos transpor dan biaya muat bongkar di pelabuhan Teluk Bayur sangat penting artinya untuk meningkatkan kegiatan impor Sumatera Barat dimasa mendatang.

Dalam perdagangan luar negeri, kendala dan permasalahan pokok Sumatera Barat adalah masih rendahnya daya saing komoditi ekspor yang dapat dihasilkan daerah. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan relatif sulitnya dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah dan nilai ekspor daerah karena kalah bersaing dengan produk yang sama dihasilkan oleh negara dan daerah lainnya. Kesulitan ini semakin serius dalam era globalisasi dewasa ini dimana tingkat persaingan di dunia internasional semakin tajam.

Rendahnya daya saing tersebut terutama disebabkan karena komoditi ekspor Sumatera Barat umumnya masih barang-barang hasil pertanian dan barang setengah jadi yang diproduksi dengan menggunakan teknologi produksi yang masih bersifat tradisional. Disamping itu, pola manajemen usaha yang digunakan oleh produsen dan pengusaha ekspor dalam daerah umumnya juga masih bersifat usaha kecil dan menengah dan usaha keluarga yang belum banyak

menggunakan tenaga profesional terkait. Akibatnya, tingkat produktivitas menjadi rendah dan harga pokok rata-rata cenderung akan lebih tinggi sehingga daya saing produk menjadi rendah.

B. Perdagangan Dalam Negeri

Perkembangan kegiatan perdagangan dalam negeri Sumatera Barat dapat dilihat dari 3 indikator utama yaitu: perkembangan pemberian *Surat Izin Usaha Perdagangan* (SIUP), distribusi dan perkembangan harga 9 bahan pokok dan perkembangan kegiatan pengujian mutu barang. Melalui perkembangan pemberian SIUP akan dapat memberikan gambaran umum tentang banyaknya pengusaha yang meminta izin usaha baru dan pelaksanaan kemetrolagian dalam bentuk pelaksanaan tera baru dan tera ulang. Perkembangan distribusi serta harga barang akan dapat memberikan gambaran tentang volume perdagangan dalam negeri serta tingkat kestabilan harga. Sedangkan perkembangan pelaksanaan tera baru dan ulang menggambarkan perkembangan kegiatan pengujian barang sehingga mutu barang yang diperdagangkan akan menjadi lebih terjamin dan tidak merugikan konsumen.

Tabel 2.37
Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2009

Tahun	PB	PM	PK	Jumlah
2005	235	543	4.619	5.397
2006	252	699	3.955	4.906
2007	343	990	3.616	4.949
2008	375	1.239	4.418	6.032
2009	341	705	4.336	5.382
Jumlah	1.546	4.176	20.944	26.666
Pertumbuhan (%)	9,6	6,7	-0.02	-0.01

Sumber Data : Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan pemberian izin usaha perdagangan di Provinsi Sumatera Barat ternyata kurang menggembirakan. Seperti terlihat pada Tabel 2.37, bahwa SIUP yang telah dikeluarkan sejak tahun 2005-2009 telah berjumlah 26.666 Namun demikian, bila dilihat laju pertumbuhannya ternyata negatif yang berarti kegiatan perdagangan di Provinsi Sumatera Barat tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bila dilihat pemberian SIUP tersebut menurut jenisnya ternyata perkembangan distribusi barang ditekankan pada distribusi 9 bahan pokok yang merupakan kebutuhan utama masyarakat secara umum, seperti; beras, minuman dan barang kebutuhan masyarakat lainnya. Barang-barang tersebut umumnya adalah hasil produksi dalam daerah dan impor baik dari daerah lain di Indonesia, maupun dari luar negeri. Sedangkan jenis barang kebutuhan lainnya umumnya merupakan peralatan mesin dan elektronik untuk kebutuhan rumah tangga yang umumnya di datang dari kota-kota besar di Jawa.

Data tentang distribusi sembilan bahan pokok sebegitu jauh tidak tersedia dengan baik. Namun demikian, dari gejolak harga akan dapat pula diketahui kondisi distribusi produk-produk tersebut. Bila harga cukup stabil, maka ini berarti bahwa distribusi barang tersebut cukup baik. Akan tetapi bila terjadi gejolak harga yang cukup tinggi maka hal ini memberikan indikasi bahwa distribusi barang belum baik dan banyak daerah yang mengalami kelangkaan barang sehingga memicu kenaikan harga.

Tabel 2.38
Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2009

No	Jenis Barang	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	Pertumbuhan (%)
1	Beras							
	- IR. 42 Solok	L	5.079	6.067	6.770	6.774	8.053	12,2
	- Bukittinggi	L	5.080	6.903	7.250	7.500	7.766	11,2
2	Gula Pasir							
	- Dalam Negeri	Kg	6.386	6.840	6.600	6.500	8.981	8,9
	- Impor	Kg	5.648	6.881	-	-	-	-
3	Tepung Terigu							
	- Segi tiga Biru	Kg	4.040	5.005	6.100	7.500	7.474	16,6
4	Daging							
	-Daging sapi	Kg	39.331	49.837	52.000	60.000	60.094	11,1
	- Dagig ayam boiler		12.502	15.176	16.500	20.387	25.323	19,3
5	Telur ayam	Kg	13.500	16.156	15.200	13.500	13.505	0,1
6	Ikan Teri asin No. 2	Kg	19.513	20.843	28.200	31.226	31.830	13,0
7	Cabe merah keriting	Kg	13.213	15.130	18.000	21.935	17.552	7,4
8	Bawang Merah	Kg	7.975	8.865	9.550	10.465	11.707	10,1
9	Minyak Goreng							
	- Merek Bimoli	Lt/btl	7.542	10.681	11.500	13.210	13.074	14,7
	- Tanpa Merek	kg	4.804	7.670	7.200	7.103	8.311	14,7

Sumber Data : Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Pada Tabel 2.38 terlihat bahwa harga makanan meningkat berkisar antara 9 %-16,0 % yang berarti lebih tinggi dari tingkat inflasi secara keseluruhan. Ini berarti bahwa kenaikan harga bahan makanan tersebut dapat dikatakan relatif tinggi yang mengidentifikasikan adanya kendala dalam pengadaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan distribusi 9 bahan pokok tersebut keseluruh pelosok daerah Provinsi Sumatera Barat akan sangat penting sekali dalam pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri.

Kendala dan permasalahan pokok yang dihadapi pada perdagangan dalam negeri adalah relatif rendahnya daya saing produk

yang dihasilkan oleh daerah Sumatera Barat. Permasalahan ini menjadi semakin serius sejak diberlakukannya sistem perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA) mulai tahun 2010. Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya produk-produk yang dihasilkan China umumnya lebih murah, tetapi mempunyai kualitas yang relatif lebih baik sehingga mempunyai daya saing yang relatif lebih kuat dibandingkan produk hasil produksi Sumatera Barat.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah pada dasarnya adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Indikator utama yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat daya saing daerah tersebut antara lain adalah: (1) Kemampuan Ekonomi Daerah, (2) Ketersediaan Infrastruktur, (3) Iklim Investasi dan (4) Kualitas Sumberdaya Manusia. Dalam hal ini peringkat ditentukan secara komperatif antar provinsi yang ada di Indonesia sesuai dengan ketersediaan data.

Gambaran umum tentang daya saing daerah dapat diketahui dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh *Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan Bank Indonesia* (2002). Dengan melakukan sedikit modifikasi, yaitu hanya menggunakan 4 indikator utama saja, maka rangkuman hasil studi tentang daya saing daerah tersebut adalah seperti terlihat pada Tabel 2.38. Pada tabel ini terlihat bahwa daya saing daerah Provinsi Sumatera Barat hanya terletak pada peringkat 16 dari 25 provinsi di Indonesia yang dinilai. Ini berarti bahwa peringkat daya saing Provinsi Sumatera berada dibawah rata-rata nasional yang berarti cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Provinsi yang mempunyai daya saing tertinggi adalah DKI Jakarta sedangkan provinsi dengan daya saing terendah adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Namun demikian, sangat disadari bahwa karena studi ini dilakukan pada tahun 2002 yang lalu, sehingga besar kemungkinan peringkat daya saing daerah ini sudah mengalami perubahan dewasa ini. Disamping itu, karena penilaian dilakukan berdasarkan aspek yang cukup luas dan sebagian tidak bisa dinilai secara kuantitatif, maka penilaian juga akan cenderung menjadi kurang tepat dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya dilapangan.

Tabel 2.39
Peringkat Daya Saing Daerah Sumatera Barat di Indonesia

Provinsi	Kemampuan Ekonomi Daerah	Ketersediaan Infrastruktur	Iklim Investasi	Kualitas Sumberdaya Manusia	Peringkat Keseluruhan
DKI Jakarta	1	1	1	1	1
Kalimantan Timur	3	2	6	6	2
Jawa Timur	9	3	2	5	3
Jawa Tengah	4	9	8	3	4
Jawa Barat	2	13	5	4	5
DIY Yogyakarta	7	15	3	2	6
Bali	12	8	7	7	7
Sumatera Utara	6	7	11	8	8
Sulawesi Selatan	10	5	9	14	9
Riau	5	4	10	20	10
Kalimantan Tengah	8	12	15	18	11
Lampung	19	18	4	10	12
Jambi	20	22	13	17	13
Sumatera Selatan	14	16	14	11	14
Kalimantan Selatan	23	6	12	16	15
<i>Sumatera Barat</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>17</i>	<i>13</i>	<i>16</i>
Kalimantan Barat	11	20	19	23	17
Sulawesi Tengah	21	17	18	21	18
Nusa Tenggara Barat	24	19	23	24	19
Sulawesi Tenggara	18	23	20	19	20
Nusa Tenggara Timur	13	21	22	25	21
Maluku	26	26	21	12	22
Irian jaya	17	11	25	26	23
Bengkulu	25	25	24	18	24
Aceh	22	24	26	22	25

Sumber Data : Bank Indonesia, Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, Yogyakarta; BPFE, 2002, halaman 101-110 dengan melakukan beberapa modifikasi.

Kondisi daya saing yang relatif rendah tersebut tentunya akan menyebabkan daya tarik investor untuk melakukan investasi di Sumatera Barat menjadi relatif kecil. Hal ini selanjutnya akan mengakibatkan pula relatif rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di daerah, sehingga peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan juga akan relatif lambat. Dengan demikian terlihat bahwa upaya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Barat dimasa mendatang akan menjadi tantangan daerah yang cukup besar dan perlu segera dilakukan dalam rangka menggerakkan proses pembangunan daerah secara lebih cepat dan terarah. Dalam kaitan dengan hal ini pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya perlu mendapatkan perhatian lebih besar dimasa mendatang.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka kepada persaingan dengan provinsi lain. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Pada bagian ini akan dianalisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah Sumatera Barat dengan menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktifitas total daerah dan nilai tukar petani.

Tabel 2.40
Perkembangan Konsumsi Rumahtangga Per Kapita
Tahun 2005 s/d 2010 Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
1.	Total Pengeluaran Rumahtangga Rp milyar)	16.362	17.038	17.739	18.541	18.846	19.123
2.	Jumlah Pengeluaran bahan makanan (Rp milyar)	10.464	10.892	11.312	11.756	12.039	12.393
3.	Jumlah Pengeluaran non makanan (Rp milyar)	5.898	6.146	6.426	6.798	6.876	6.730
4.	Jumlah Rumahtangga (jiwa)	1.070.543	1.109.731	1.121.904	1.073.923	1.086.792	1.086.792
5.	Konsumsi perkapita (Rp juta)	15,28	15,35	15,81	17,26	17,34	17,60

Sumber Data : BPS Sumatera Barat Tahun 2010

**angka sementara*

Berdasarkan kepada tabel di atas terlihat bahwa total pengeluaran rumahtangga di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tahun 2005 berjumlah Rp 16.362 milyar didominasi oleh pengeluaran jenis bahan makanan yakni sebesar Rp 10.464 milyar atau 63,95 % dari total pengeluaran rumahtangga, sisanya untuk pengeluaran non pangan. Jumlah pengeluaran rumahtangga ini mengalami kenaikan yang sangat berarti sampai tahun 2009 yang mencapai Rp 18.846 milyar sehingga telah mengalami pertumbuhan sebesar 15,18 % selama periode 2005 sampai 2009, sehingga rata-rata kenaikan per tahunnya adalah 3,04 %. Besarnya proporsi untuk pengeluaran bahan makanan tahun 2009 adalah sebesar 63,58 %, hal ini telah mengalami penurunan sejak tahun 2005.

Semakin berkurangnya proporsi pengeluaran untuk bahan makanan ini tentunya telah diiringi oleh peningkatan untuk konsumsi non pangan dari 36,05 % tahun 2005 menjadi 36,42 % tahun 2009. Semakin meningkatnya proporsi rumahtangga untuk konsumsi non pangan tentunya memperlihatkan kemajuan yang lebih baik, karena konsumsi

non pangan dalam bentuk investasi rumahtangga ke peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerjanya, seperti pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara umum, meningkatnya proporsi pengeluaran untuk jenis pengeluaran non pangan telah memperlihatkan adanya pengurangan keadaan kemiskinan di tengah penduduk. Menurut ukuran kemiskinan yang diyakini benar selama ini adalah bahwa rumahtangga miskin adalah rumahtangga yang proporsi pendapatannya digunakan untuk konsumsi pangan lebih besar. Sehingga secara umum kemiskinan masih ada di tengah masyarakat Sumatera Barat, tetapi secara umum, angka kemiskinan itu secara perlahan mulai menurun, yang ditandai secara makro oleh semakin meningkatnya pengeluaran non pangan rumahtangga.

Konsumsi perkapita Sumatera Barat telah mencapai Rp 17,34 juta tahun 2009 yang didominasi oleh pengeluaran untuk bahan makanan sebesar Rp 11.982 milyar dan konsumsi non pangan sebesar Rp 6.864 milyar. Apabila dibandingkan dengan tahun 2005, berarti telah mengalami pertumbuhan konsumsi per kapita sebesar 13,48 selama periode 2005 s/d 2009 dengan rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 2,70 % per tahun.

Kemampuan perekonomian masyarakat juga dapat dilihat dari besarnya nilai tukar petani yang menggambarkan rasio antara jumlah penerimaan petani dalam system produksinya dengan jumlah harga yang dibayarkan petani dalam konsumsinya. Selama periode 2005 sampai 2010 nilai tukar petani terus mengalami peningkatan dari 70,3 tahun 2005 menjadi 105,68 tahun 2010, sehingga pertumbuhan nilai tukar petani selama 2006 sampai dengan 2009 adalah sebesar 39,78 % dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,95 %. Nilai tukar petani tertinggi selama lima periode lalu adalah pada tahun 2010 yang mencapai 105,68, artinya kemampuan daya beli petani lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami penurunan, memperlihatkan bahwa kemampuan daya beli petani mulai menurun apabila dibandingkan tahun 2008.

Tabel 2.41
Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2005-2010
Provinsi Sumatera Barat.

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Indeks yang diterima Petani	368,8	439.6	455.7	119.8	125.1	132,98
2.	Indeks yang dibayar petani	524,7	592.4	606.1	114.0	120.6	126,07
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	70,3	74,21	75,19	105,09	103,73	105,68

Sumber Data : berita resmi statistik beberapa edisi

Pertumbuhan indeks yang diterima petani selama tahun 2005 sampai 2009 adalah telah mengalami pertumbuhan negative sebesar 66,16 %, artinya terjadi penurunan penerimaan petani selama ini, hal ini tentu saja disebabkan oleh karena harga relative komoditi pertanian yang dihasilkan petani mengalami penurunan nilainya, terutama produk yang berasal dari bahan mentah. Sedangkan pertumbuhan indeks pembayaran petani selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah mengalami pertumbuhan negative sebesar 77,11 %. Data ini mengimplikasikan telah terjadi penurunan tingkat daya beli petani terhadap barang-barang bahan makanan dan bukan makanan selama periode 2005-2009. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan rumah tangga tani, dan di lain sisi juga dapat dilakukan upaya peningkatan kemampuan daya beli petani untuk barang-barang makanan dan bukan makanan. Masih kecilnya indeks nilai tukar petani (<100) selama periode 2005 sampai 2007 memperlihatkan bahwa kemampuan daya beli petani masih rendah, barulah sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 kemampuan daya beli petani menjadi lebih baik.

Tabel 2.42
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (RPJPD)	Interpretasi Belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
1.	Kesejahteraan Masyarakat								
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1.	Otonomi daerah, pemerintahan umum ad ministrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian								
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB	5,73	6,14	6,34	6,37	4,19	5,93	6,90	(<)
1.1.1.2.	Laju Inflasi	13,10	11,84	6,04	11,02	3,73	-	6,50	(<)
1.1.1.3.	PDRB perkapita	6,40	6,68	7,01	7,35	7,55	8,16	8,50	(<)
1.1.1.4.	PDRB Harga Berlaku (milyar)	44.675	53.030	59.799	70.614	76.295	87.221	68,4	(>)
1.1.1.5.	PDRB Harga Konstant (milyar)	29.159	30.950	32.913	35.008	36.465	38.860	40,7	(<)
1.1.1.6.	Kontribusi Sektor Pertanian	25,01	24,74	24,43	24,10	24,03	23,40		
1.1.1.7.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan	13,06	12,85	12,79	12,75	12,58	12,32		
1.1.1.8.	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel Restoran	18,19	18,29	18,40	18,46	18,30	17,86		
1.1.1.9.	Kontribusi Sektor Jasa	16,47	16,27	16,22	16,25	16,38	16,81		
1.1.1.10.	Konsumsi Masyarakat (%)	56,11	55,05	54,03	52,96	44,35	49,21		
1.1.1.11.	Konsumsi Swasta (%)	0,96	0,94	0,91	0,90	0,83	0,89		
1.1.1.12.	Konsumsi Pemerintah (%)	11,99	11,82	11,05	11,48	11,08	12,91		
1.1.1.13.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	18,48	18,11	10,04	17,46	13,46	18,43		
1.1.1.14.	Eksport (%)	20,67	23,02	22,07	31,98	16,57	34,28		
1.1.1.15.	Impor (%)	7,95	8,17	6,09	14,29	13,71	13,59		
1.1.1.16.	ICOR (dihitung berdasarkan pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok kapital)	3,46	3,26	2,72	2,92	4,41	3,65	4,06	(>)
	ICOR (berdasarkan BPS)		3,60	3,60	3,51	3,60	3,63		

Sumber Data : evaluasi kinerja pemerintan daerah beberapa edisi

Pembangunan pertanian ke depan haruslah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan petani dengan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan petani, sehingga nilai tukarnya menjadi lebih baik. Peningkatan nilai tambah produk petani dapat dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan produk pertanian.

Upaya lain yang harus mendapat perhatian besar pula adalah memperbaiki system tataniaga pertanian masyarakat terutama pada komoditi ekspor yang selama ini menjadi tumpuan rumahtangga petani dalam memperoleh pendapatannya, seperti karet, kayu manis, coklat, gambir, dan lain sebagainya, termasuk juga untuk tanaman palawija. Disamping peningkatan system tataniaga yang memberikan margin keuntungan lebih besar kepada rumahtangga tani, juga yang tidak kalah penting dapat dilakukan adalah peningkatan nilai tambah produk pertanian rumahtangga tani melalui agroindustri terutama agroprosesing pasca panen, dengan menurunkan teknologi tepat guna untuk peningkatan mutu ke tingkat rumahtangga tani. Produk pertanian yang dihasilkan di tingkat rumahtangga harus dalam bentuk barang setengah jadi bukan barang mentah, pengolahan atau prosesing bukan dilakukan oleh pedagang untuk mengup-grade mutu, tetapi rumahtangga tani. Sehingga harga di tingkat petani lebih tinggi dan keuntungan yang diterima akan lebih besar pula. Peran pemerintah disini adalah bagaimana pasar bersaing dalam keadaan sempurna dalam system tataniaga pertanian ini, mencegah terjadinya monopsoni alami yang diperankan oleh pedagang perantara pada pasar-pasar tradisional.

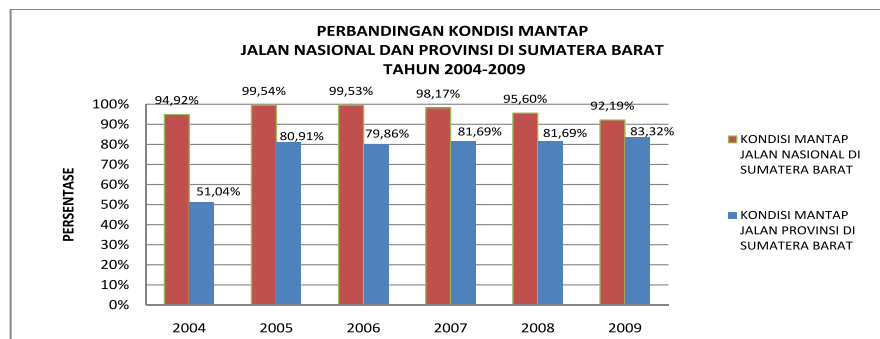
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Pekerjaan Umum

Kejadian bencana (gempa, longsor, banjir dan abrasi) beruntun dari tahun 2005, 2007 dan 2009 yang menimpa Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. Dampak yang demikian besar merusak berbagai prasarana fisik: Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air. Seperti akibat bencana gempa tahun 2007, berdampak jalan-jalan yang retak dan tertutup longsor berada di Kabupaten Solok, Tanah Datar dan Agam. Beberapa jaringan irigasi yang sebelumnya berfungsi dengan baik, mengalami kerusakan yang cukup berat. Kemudian kejadian gempa 30 September 2009, jalan yang berada di kawasan Silaing dekat lokasi air terjun hingga pasar Padang Panjang mengalami kerusakan atau tertutup karena longsor. Akses jalan lain menuju ke Padang seperti melalui Maninjau Kabupaten Agam pun juga tidak luput dari longsor, kondisi jalannya menjadi rusak. Begitu juga jalan lingkaran sepanjang Danau Maninjau, yang tidak dapat dilalui karena tertutup longsor.

Seringnya terjadi bencana alam, yang mengakibatkan banyaknya badan jalan yang rusak, terutama pada jalan Provinsi dan jalan kabupaten, sedangkan dana untuk penanggulangan bencana alam sangat terbatas. Untuk tahun 2009, akibat gempa cukup banyak infrastruktur di Sumatera Barat mengalami kerusakan. Dari data Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, tercatat jembatan yang mengalami rusak akibat gempa sebanyak 68 buah yang terdiri dari 21 buah rusak berat, 30 buah rusak sedang, serta 17 rusak ringan. Empat titik kerusakan jalan yang parah di wilayah Padang Pariaman dan satu titik di jalur Padang-Solok Kilometer 18 mendesak untuk diperbaiki. Kerusakan empat titik jalan di wilayah Padang Pariaman relatif akan mengganggu pengiriman bantuan dan aktivitas pemulihan serta tahap rekonstruksi di sejumlah wilayah pedalaman di kabupaten tersebut. Empat titik tersebut semuanya terletak di Kecamatan V Koto Timur, yang menuju ke arah Nagari Padang Alai serta Patamuhan. Dua wilayah yang menjadi area terparah dampak gempa sebagian besar warganya masih dalam pengungsian. Di Jalur Padang-Solok di Km 18 juga mengkhawatirkan. Jalur ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Padang dengan Kabupaten Solok serta kabupaten-kabupaten lain di wilayah tenggara Kota Padang.

Secara umum, persentase kondisi mantap dari jaringan jalan Nasional dan Provinsi di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut. Pada jalan Nasional dari total 1022,09 km terdapat 99.54 % dengan kondisi mantap tahun 2005, pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan kondisi mantap menjadi 99,53 % untuk tahun 2006; tetapi selanjutnya terjadi penurunan menjadi 98,17 tahun 2007; dan terus menurun menjadi 95,60 % tahun 2008; kondisinya terus menurun menjadi hanya 92,19 pada tahun 2009. Sedangkan untuk jalan provinsi dari 1153,87 km, dari tahun 2005 sampai tahun 2009 kecenderungannya meningkat, dimana kondisi mantap tahun 2005 adalah 80,91 %, hanya pada tahun 2006 menurun menjadi 79,86, sedangkan hingga tahun 2009 menjadi 83,32 % dengan kondisi mantap.



Gambar 2.8
Perbandingan Kondisi Mantap Jalan Nasional dan Provinsi
di Sumatera Barat Tahun 2004-2009

Walaupun kondisi mantap jalan nasional dan provinsi di Sumatera Barat cukup memadai, namun yang sangat penting selain itu adalah peningkatan kemampuan daya dukung ataupun kelas jalan yang mampu untuk mendukung peningkatan volume pergerakan orang dan volume serta beban dari barang yang akan melalui jaringan jalan yang ada.

Pada akhir tahun 2009, terdapat kondisi jembatan yang tidak mantap sebanyak 83 buah, dengan rincian kategori jembatan yang sempit sekitar 28 buah. Ditargetkan sampai tahun 2014 dapat ditingkatkan menjadi kondisi mantap sebanyak 31 buah. Selain dari pada itu saat ini, masih belum optimalnya kualitas pelayanan prasarana jalan, seperti masih banyaknya jalan rusak di jalur ekonomi; keterbatasan akses dari pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran, outlet maupun ke perkotaan dan jalan lintas yang ada belum optimal mendukung pengembangan wilayah.

Permasalahan pembangunan bidang prasarana jalan dan jembatan di Sumatera Barat selama periode 2005-2009, antara lain: *rendahnya daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan yang ada*. Hal ini dapat dilihat dari kejadian runtuhnya jembatan di Pesisir Selatan karena dilalui oleh kendaraan berat yang melebihi kapasitas jembatan yang tersedia. Dimana saat ini kelas jalan maksimal hanya kelas IIA, dengan beban sumbu gandar yang diizinkan hanya 8 ton. Keadaan ini jelas tidak sejalan dengan peningkatan kemampuan kendaraan yang ada serta peningkatan volume produksi serta volume pengangkutan yang muncul dari dunia industri ataupun dari pertanian dan perkebunan. Hasil atau volume produksi pertanian dan perkebunan seperti CPO dan semen yang mendominasi angkutan barang perkebunan di Sumatera Barat jelas perlu didukung oleh kemampuan dan kapasitas jalan yang memadai agar angkutan hasil produksi perkebunan dan industri semen dapat didistribusikan / disalurkan melalui jaringan jalan yang terdapat di Sumatera Barat.

Hal ini terjadi karena *rendahnya kesadaran dari pengguna jalan* (terutama pengusaha angkutan barang), dimana mereka memuat kendaraannya dengan beban yang melebihi dari beban yang diizinkan. Keadaan ini diperburuk oleh pengawasan yang rendah dan lemah dari satuan kerja yang ada di jembatan timbangan, terhadap beban kendaraan berat yang melalui jalan dan jembatan yang ada, sehingga banyak *kendaraan pengangkut barang yang melebihi beban yang diizinkan* pada jalan tersebut tetap beroperasi melaluinya.

Biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan semakin tinggi karena faktor topografis daerah yang bergelombang dan berbukit. Kejadian gempa bumi tersebut mengakibatkan bencana yang bukan saja merusak infrastruktur tetapi juga memangsa korban jiwa. Dimulai pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2009, bencana gempa bumi yang

terjadi merusak infrastruktur yang ada di Sumatera Barat dengan nilai kerugian yang sangat besar. Untuk bidang prasarana jalan, jelas membutuhkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat besar untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik.

Belum terpadunya penanganan sistem jaringan jalan kabupaten, kota, Provinsi dan nasional, merupakan permasalahan tambahan yang perlu mendapat perhatian pihak penyelenggara jalan dan transportasi. Hal lain adalah lemahnya informasi kondisi jalan kabupaten. Banyak kabupaten yang belum memberikan data valid yang dilakukan dengan survey yang baik dan benar, banyak data yang diterbitkan berupa data perkiraan ataupun hanya dengan bentuk pengamatan tanpa menggunakan alat survey atau uji yang selayaknya.

Potensi sumberdaya air yang ada di Sumatera Barat yang terdapat pada 9 Satuan Wilayah Sungai dengan potensi air permukaan sebesar $80.2 \times 10^9 \text{ m}^3$ dan air tanah $2,67 \times 10^9 \text{ m}^3$ dengan luas *catchment area* seluas 42.297,21 Ha, dengan 30 sungai-sungai besar dan 260 anak sungainya, serta 4 buah danau terdiri dari Danau Singkarak dengan luas 13.011 Ha, Danau Ditas dengan luas 3.150 Ha, Danau Dibawah dengan luas 1.400 Ha dan Danau Maninjau 9.950 ha, potensi ini dalam mendukung kebutuhan air masyarakat perkotaan, pedesaan, pertanian, industri secara adil dan merata belum terwujud. Di bidang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, telah dilakukan pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi. Selama rentang waktu 2005 sampai 2009, pemerintah telah melakukan peningkatan / perbaikan jaringan sepanjang 4.867 m; 9.093 m, 5.325 m; dan 6000 m. Sedangkan untuk pemeliharaan dilakukan terhadap jaringan yang memiliki luas 35.541 Ha, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Peningkatan Perbaikan dan Pemeliharaan Irigasi
Tahun 2006-2010

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2006	2007	2008	2009	2010
1.	Peningkatan/perbaikan jaringan	m	4.867	9.093	5.325	6.000	9.356
2	Pemeliharaan fungsi jaringan	Ha	35.541	35.141	35.541	35.541	35.541

Sumber Data : Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2010

Terlihat bahwa terjadi peningkatan perbaikan terhadap jaringan irigasi pada tahun 2007. Hal ini terjadi karena banyaknya saluran irigasi yang rusak pada tahun tersebut karena dampak dari gempa yang terjadi pada tahun sebelumnya yang banyak merusak saluran irigasi, yang memerlukan perbaikan agar jaringan yang memberikan pelayanan pada lahan pertanian tetap berfungsi. Pembangunan jaringan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi sangat diperlukan oleh Sumatera Barat, karena provinsi ini masih tergantung pada bidang pertanian yang membutuhkan dukungan dari infrastruktur irigasi. Pernyataan ini tidak cukup hanya dengan pernyataan di atas kertas, tetapi harus diiringi dengan perhatian dan pendanaan yang cukup pada bidang ini agar hasil produksi pertanian dan perkebunan yang menjadi pendukung utama perekonomian masyarakat Sumatera Barat dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan lahan yang ada.

Untuk bangunan pengendali banjir, pengamanan abrasi pantai dan pengamanan daya rusak air selama periode 2006 sampai tahun 2009, telah cukup banyak pembangunan dibidang ini. Pembangunan bangunan pengendali banjir selama periode ini telah terbangun lebih kurang 21.021 m, dan untuk bangunan pengaman abrasi pantai sepanjang 1.300 m, sedangkan untuk bangunan pengaman daya rusak air dibangun untuk seluas 3.000 Ha. Pembangunan dibidang ini jelas membutuhkan dana yang sangat besar, diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan pembangunan bidang lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung pembangunan bidang lainnya.

Tabel 2.44
Pembangunan Pengendalian Banjir, Pengamanan Abrasi Pantai dan Pengamanan Daya Rusak Air Tahun 2006-2010

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2006	2007	2008	2009	2010
1.	Bangunan Pengendalian Banjir	M	5.123	4.434	4.264	7.200	3.228
2.	Pengamanan Abrasi Pantai	M	500	350	350	100	350
3.	Pengamanan Daya Rusak Air	Ha	750	950	500	800	500

Sumber Data : Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2010

Permasalahan Sumber Daya Air, relatif juga cukup banyak, antara lain: *Tingkat Kerusakan DAS yang Makin Parah*. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh kerusakan daerah hulu sungai yang cenderung terus berlangsung dimana tutupan lahan hutan berubah menjadi lahan terbuka yang mengakibatkan besarnya limpasan air permukaan dan menyusutnya infiltrasi. Hal ini menyebabkan turunnya ketersediaan air permukaan dan ketersediaan air tanah. Ancaman keberlanjutan sumberdaya air juga disebabkan akibat terjadinya penggunaan air tanah yang tidak terkendali, baik penggunaan air permukaan maupun

penyedotan air bawah tanah. Kerusakan sumberdaya juga menyebabkan pencemaran air seperti yang terjadi pada sungai-sungai yang mengalir melalui kawasan industri, kawasan permukiman, dan kawasan pertanian yang menghasilkan banyak limbah.

Kerusakan prasarana sumberdaya air akibat bencana alam. Banyak prasarana irigasi yang rusak akibat bencana alam seperti rusaknya bendungan Tongar di Pasaman Barat dan rusaknya prasarana irigasi yang berupa saluran irigasi primer, sekunder dan tersier akibat banjir dan longsor. Permasalahan banjir dan galodo yang semakin meningkat. Pada musim penghujan, suatu hal yang harus di waspadai saat ini di Sumatera Barat adalah ancaman bencana banjir dan galodo. Pada tahun 2008, telah terjadi bencana galodo yang cukup besar di daerah Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Dampak bencana tersebut, menimbulkan merugikan material yang besar bagi masyarakat dan pemerintahan. Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana umum, seperti Masjid, jembatan dan jalan penghubung. Sebelum itu telah terjadi pula bencana banjir di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, dengan meluapnya Batang Agam dan Sinamar, yang juga menimbulkan kerugian infrastruktur yang besar bagi masyarakat.

Kurang optimalnya layanan jaringan irigasi sehingga masih diperlukan pengembangan serta peningkatan fungsi jaringan irigasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Setelah kejadian gempa yang sering melanda Sumatera Barat, yang terjadi pada tahun 2005, 2007 dan 2009, mengakibatkan kerusakan pada saluran irigasi sehingga distribusi air untuk lahan irigasi teknis, semi teknis menjadi terganggu. Terganggunya pelayanan irigasi ini mempengaruhi dan mengurangi hasil dan produksi dari lahan pertanian yang dialiri oleh jaringan irigasi tersebut. *Operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air yang masih rendah.* Kondisi ini akan mengakibatkan kerusakan tidak hanya jaringan irigasi, namun juga kerusakan sungai akibat erosi dan pendangkalan sehingga mengakibatkan inefisiensi pemanfaatan air irigasi dan air sungai.

Dampak perubahan iklim global yang semakin intens, menimbulkan gejala alam yang beragam. Gejala alam ini juga mempengaruhi Sumatera Barat, seperti gejala kenaikan level rata-rata permukaan laut, atau terjadinya fenomena alam badai dan arus gelombang laut yang besar. Sumatera Barat mempunyai panjang garis pantai daratan Sumatera Barat sekitar 541 km yang membujur dari Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Kabupaten Pasaman Barat. Wilayah ini langsung berhadapan dengan Samudera Hindia yang mempunyai gelombang besar dan memberikan potensi untuk terjadinya abrasi pantai. Untuk melindungi daerah pantai dari abrasi juga telah dibangun bangunan pengaman pantai terutama di pantai Padang sedangkan pada daerah daerah rawan abrasi seperti di Sasak dan Air Bangis belum dapat ditangani.

Masih lemahnya penyediaan, pengelolaan data dan informasi sumber daya air. Data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, dengan tersedianya data dan informasi yang dapat diakses seluruh masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada kenyataannya ketersediaan data dan informasi sumberdaya air dirasa masih sangat kurang. Sehingga *koordinasi dan partisipasi masyarakat juga belum begitu kuat.* Peningkatan koordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air sangat diperlukan dalam rangka mengendalikan potensi konflik yang cenderung semakin besar. Hal ini perlu didukung dengan tersedianya peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka menjamin keberlanjutan sumberdaya air.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air memerlukan dana yang sangat besar. Merupakan suatu tantangan yang besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh dana yang dimaksudkan. Agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempertahankan tingkat layanan dari infrastruktur yang ada dapat diberikan sangat perlu diprioritaskan agar tidak mengganggu kegiatan dan produksi bidang lainnya yang menghasilkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Perhubungan

Sistem transportasi merupakan elemen dasar infrastruktur yang berpengaruh pada pola pengembangan wilayah. Sistem transportasi suatu wilayah merupakan suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah sedemikian sehingga: terakomodasi mobilitas penduduk; dimungkinkan adanya pergerakan barang; dimungkinkannya akses ke semua wilayah. Dari peranannya, transportasi juga mendukung aspek lainnya yang bekerja secara bersama-sama dan saling keterkaitan dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Sektor transportasi berhubungan erat dengan sektorekonomi, sosial, politik dan kewilayahan. Pengembangan transportasi dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan program pemerintah. Kondisi saat ini pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi. Kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan estándar perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, terutama transportasi jalan dan perkeretaapian. Begitu pula untuk pembangunan jaringan prasarana dan sarana transportasi yang baru ataupun peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi yang ada.

Provinsi Sumatera Barat dilayani oleh bermacam jenis moda angkutan penumpang dan barang yang beroperasi. Pergerakan penumpang di dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat saat ini didominasi oleh moda angkutan darat. Pengguna angkutan umum masih memiliki persentase terbesar yaitu kurang dari dua pertiga total pergerakan, diikuti pengguna kendaraan pribadi hampir sepertiga dan sisanya kendaraan tidak bermotor / becak. Dari berbagai jenis angkutan umum yang digunakan oleh pelaku perjalanan, yang mendominasi adalah bus sedang, sedangkan untuk kendaraan pribadi didominasi oleh pengguna mini bus / van. Untuk perjalanan antar Provinsi yang berskala regional, angkutan moda antar pulau saat ini yang dominan adalah angkutan udara (dengan terminal Bandara Internasional Minangkabau). Untuk angkutan laut mendominasi angkutan barang menuju pulau Jawa ataupun untuk pengangkutan internasional, untuk angkutan laut saat ini dilayani oleh pelabuhan Teluk Bayur.

Hal yang perlu juga disikapi kedepannya adalah manajemen pengelolaan transportasi yang memungkinkan keterkaitan / integrasi antar moda maupun perkembangan angkutan multimoda yang memungkinkan pergerakan barang dan orang dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

A. Angkutan Jalan Raya

Untuk angkutan darat jalan raya, Sumatera Barat memiliki empat daerah yang memiliki terminal dengan tipe A dan enam daerah yang memiliki terminal dengan tipe B. Dengan melihat data tersebut diatas dapat dilihat bahwa masih ada kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat yang belum dilengkapi dengan sarana terminal. Kota / Kabupaten yang belum memiliki sarana terminal adalah Kab Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Mentawai, Kab Solok Selatan, Kab. Agam, dan Kab. Padang Pariaman.

Tabel 2.45
Lokasi Terminal di Provinsi Sumatera Barat

	Tipe A	Tipe B
Kota/Kabupaten	Bukittinggi Solok Kiliranjao	Pariaman Padang Panjang Payakumbuh Batusangkar Sago (Painan) Lubuk Sikaping Sawah Lunto

Sumber Data : Dinas Perhubungan Sumatera Barat, 2009

Untuk wilayah pelayanan jaringan angkutan umum untuk masa mendatang pada dasarnya tidak berbeda jauh dari kondisi saat ini, karena wilayah pelayanan saat ini sudah cukup luas dan mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Sumatera Barat. Jaringan Trayek Angkutan Umum di Sumatera Barat dibagi atas Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Taksi dan Angkutan Sewa (travel). Pada masa datang selain pelayanan angkutan tersebut, juga akan dikembangkan Angkutan Antar Jemput.

Sumatera Barat saat ini menghadapi kondisi rendahnya mutu pelayanan jasa transportasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama dari keselamatan, mobilitas, akses, dan keterjangkauan oleh masyarakat serta kurangnya perawatan. Angkutan penumpang umum yang beroperasi saat ini menghadapi kompetisi yang sangat gencar dari jenis angkutan penumpang liar. Didapati bahwa angkutan penumpang umum yang memiliki izin trayek, masih beroperasi dengan umur kendaraan yang relative tua, kurang memperhatikan aspek pelayanan terhadap kenyamanan, keamanan dan keselamatan, serta masih kurangnya dalam hal frekuensi operasi dan waktu operasi.

Walaupun angkutan penumpang umum liar (tanpa izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan) juga mengabaikan aspek nyaman, keselamatan dan keamanan, namun mereka beroperasi menggunakan kendaraan minibus terbaru. Sehingga sebagian penumpang memilih angkutan penumpang tanpa izin ini untuk mereka gunakan karena relatif cepat. Ancaman terhadap keberlangsungan pelayanan angkutan penumpang umum yang berizin trayek demikian beratnya, sehingga sebagian telah berhenti beroperasi. Menghadapi hal ini, diperlukan suatu aturan dan penanganan yang tegas terhadap angkutan penumpang liar yang mengabaikan sisi legalitas operasinya.

Disamping keberadaan angkutan tidak resmi (travel liar), angkutan bus AKDP juga dibebani oleh permasalahan tidak optimalnya fungsi terminal, sehingga bus AKDP semakin ditinggalkan akibat kurangnya aksesibilitas ke dan dari terminal tersebut. Berbagai permasalahan tidak optimalnya terminal sebagai simpul transportasi bukan saja karena masalah teknis semata, namun juga dipengaruhi oleh perilaku pengguna jasa serta *law enforcement* yang penegakannya masih belum maksimal. Kedepan diharapkan dengan perencanaan dan komitmen Pemerintah dalam penataan jaringan transportasi, keberadaan terminal-terminal tersebut mampu berfungsi optimal untuk pelayanan masyarakat pengguna jasa angkutan umum, baik untuk Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), sehingga dapat memperlancar dan mempermudah perpindahan orang yang sesuai dengan fungsi terminal.

Tingginya angka kecelakaan dan jumlah korban jiwa akibat kecelakaan. Pada tahun 2009, terdapat angka kematian sekitar 3,2

jiwa setiap harinya di Sumatera Barat. Setiap tahun angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa tersebut maupun harta benda semakin meningkat. Banyak penyebab hal tersebut, salah satu sebab kesadaran berlalu lintas yang rendah dari pengguna jalan dan kendaraan. Tingginya tingkat kerusakan jalan yang salah satunya diakibatkan operasional kendaraan yang kelebihan muatan sebagai dampak belum optimalnya pengawasan / kontrol pada jembatan timbang. Banyaknya pelanggaran penggunaan kendaraan dengan muatan yang melebihi kelas jalan. Hal ini mengakibatkan kerusakan parah badan jalan.

B. Angkutan Udara

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura II, yang mengoperasikan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), terjadi peningkatan jumlah angkutan penumpang yang sangat signifikan. Pada tahun 2009, jumlah pesawat yang mendarat di Bandara Internasional Minangkabau mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Frekuensi penerbangan di BIM pada tahun 2009 cukup tinggi dimana sudah melayani 10 koneksitas dengan kota didalam dan luar negeri. Operasional BIM ini memberikan kemudahan aksesibilitas dan peningkatan mobilitas bagi masyarakat Sumatera Barat dan Sumatera Utara bagian selatan dalam pergerakannya. Pada tahun 2009, jumlah pesawat yang datang/berangkat tercatat 7,348 kali, dengan jumlah penumpang datang 915,012 orang. Kondisi terminal penumpang BIM saat ini pun sudah mencapai kapasitasnya yang hampir 1,000,000 penumpang/tahun, sehingga saat ini sedang dilaksanakan pembangunan / penambahan ruangan terminal untuk penumpang di bandara tersebut. Untuk cargo yang datang dan berangkat di BIM pada tahun 2009, untuk bongkar berjumlah 15.688 ton dan muat berjumlah 12,091 ton. Dari tahun 2007 hingga tahun 2009 terjadi peningkatan cargo bongkar rata-rata 500 ton/tahun, namun untuk cargo muat terjadi penurunan rata-rata 950 ton/tahunnya.

Peningkatan jumlah penerbangan dan penumpang tersebut, memerlukan pelayanan yang terorganisir dengan baik. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang serius pada tingkat pelayanan yang dapat diberikan pada pengguna jasa angkutan umum. Untuk angkutan umum dari dan ke BIM saat ini dilayani oleh angkutan penumpang umum yang dilayani oleh PT. DAMRI dan PT. Tranex yang beroperasi tiap 30 menit, melayani dua jurusan dari/ke BIM dan kota Padang. Untuk saat ini layanan ini masih pada kondisi cukup memadai. Namun dengan akan terjadinya peningkatan dimasa datang diperlukan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat pengguna angkutan darat dari dan ke BIM.

Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sebagai prasarana moda transportasi udara di Sumatera Barat memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat

baik kunjungan wisata, bisnis dan sosial. Disamping sebagai prasarana, BIM adalah simpul transportasi udara yang merupakan Bandara Pusat Penyebaran, sehingga aktifitas dan fasilitasnya harus dikembangkan di masa mendatang.

Disamping BIM, sesuai dengan kondisi daerah yang rawan bencana khususnya di Kepulauan Mentawai, maka perlu penyiapan bandara *three in one* (untuk penumpang, pariwisata serta penanganan bencana alam), yaitu perlu disetiap pulau besar (Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan).

C. Angkutan Laut

Angkutan laut di Sumatera Barat didukung oleh keberadaan pelabuhan laut yaitu 1 (satu) Pelabuhan Laut Internasional dan 5 (lima) Pelabuhan Laut Nasional. Pelabuhan Laut Internasional adalah Teluk Bayur, sedangkan Pelabuhan Laut Nasional adalah Air Bangis, Muara Padang, Muara Siberut, Sikakap dan Sioban. Keberadaan pelabuhan laut ini sangat mendukung angkutan barang menuju dan dari Sumatera Barat. Sedangkan angkutan penumpang mengalami kemunduran, dimana pada tahun 2007, penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut turun drastis, walaupun kapal yang berlabuh di Teluk Bayur mengalami kenaikan. Jumlah penumpang pada Pelabuhan Teluk Bayur turun sebesar 97,24 %. Sedangkan untuk arus muat barang di pelabuhan Teluk Bayur dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Angkutan Khusus Batu Bara dan Semen Melalui Pelabuhan Teluk Bayur
Tahun 2005-2009 (Ton)

NO	Uraian	T A H U N			
		2006	2007	2008	2009
A	LUAR NEGERI				
	a. Batu Bara	80.248	438.549	1.113.526	526.230
	b. Semen	983.900	1.557.694	911.021	441.666
	c. CPO	1.205.681	1101145	1.356.776	1.552.981
B	DALAM NEGERI				
	a. Batu Bara	16.063	14.079	80.093	53.440
	b. Semen	2.434.628	1.826.003	2.480.120	2.615.630
	c. CPO	13.707	8.013	19.032	19.948

Sumber Data : PT. Pelindo II Cabang Teluk Bayur Padang

Terlihat terjadi peningkatan untuk angkutan semen setiap tahunnya. Perkembangan pelabuhan Teluk Bayur, sangat menarik untuk diamati, Karena pada saat ini jika dilihat dari keberadaan kapal yang bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur ini sudah mengalami antrian. Banyaknya kapal yang antri untuk membongkar barangnya di Teluk Bayur

relatif tinggi, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, pertama bongkar muat barang yang sudah mencapai kapasitas kemampuan pelayanan pelabuhan pada saat tertentu, hal lain adalah karena keterbatasan kemampuan angkutan *feeder* darat untuk mengangkut barang yang akan dibawa, kemudian karena keterbatasan area penampungan barang (kapasitas terminal yang terbatas). Hal lain juga adalah karena kemampuan pengelolaan bongkar muat barang yang masih terbatas.

D. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Keberadaan angkutan Sungai dan Danau di Provinsi Sumatera Barat masih terbatas. Jenis angkutan ini didominasi oleh angkutan wisata, sedangkan untuk kebutuhan angkutan penumpang dan barang saat ini adalah angkutan dari Padang ke Mentawai. ASDP di Sumatera Barat, khususnya untuk kepulauan Mentawai memegang peranan yang sangat penting, menjadi angkutan primer (moda utama) bagi masyarakat kepulauan Mentawai menuju Sumatera Barat. Masyarakat kepulauan Mentawai sangat tergantung pada angkutan ini, Keberadaannya menjadi sangat penting karena keterbatasan pilihan dan ketersediaan angkutan menuju dan dari Kepulauan Mentawai.

Keberadaan dan operasional angkutan ASDP Mentawai – Padang dipengaruhi oleh cuaca dan keadaan gelombang laut di perairan antara Sumatera dan kepulauan Mentawai menjadi penentu, dimana jika musim angin barat gelombang laut di perairan ini menjadi sangat besar, sehingga kapal feri yang beroperasi tidak mampu untuk mengarungi perairan ini. Sehingga transportasi antara Mentawai dan kota Padang menjadi terputus.

Permasalahan transportasi lainnya yang ada di Sumatera Barat khususnya adalah tuntutan terhadap masalah yang ditimbulkan oleh sarana dan prasarana transportasi, dimana permasalahannya sangat kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Lalu lintas dan angkutan semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Hal-hal yang berkaitan erat dengan transportasi menyinggung langsung kebutuhan masyarakat dan perekonomian kota. Persoalan-persoalan yang dikemukakan diatas, pada umumnya, meskipun dalam tingkat skala yang berbeda, hampir dijumpai diseluruh kota-kota. Masalah dampak lingkungan, keselamatan, dan pemborosan energi di bidang transportasi, akibat sistem lalu lintas dan tata guna lahan yang kurang efisien, perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka terwujudnya sistem lalu lintas dan angkutan yang handal dan terjangkau oleh masyarakat secara luas.

Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembenahan sektor transportasi menjadi hal yang mendesak, untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Barat diperlukan peran serta masyarakat dan swasta, juga diperlukan tatanan transportasi

nasional dan wilayah yang dapat mewujudkan ketersediaan transportasi di daratan dan antar pulau di Kepulauan Mentawai secara lebih terpadu dan efisien, baik menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara yang bersinergis dengan pengembangan wilayah dan pembangunan sektor-sektor lainnya. Di dalam perencanaan transportasi memuat perancangan sarana (mobil, kereta api, pesawat, dll), perancangan prasarana (jalan, rel, pelabuhan, bandara dll) dan perancangan operasional dan pengendalian (lalu lintas, transit, jadwal, dll).

3. Energi

Provinsi Sumatera Barat dengan luas 42.297,31 km² pada tahun 2010 mempunyai 4.845.998 Jiwa Penduduk. PDRB harga konstan tahun 2000 32.900.000 juta Rupiah dan PDRB per kapita 7.003,33 ribu Rupiah. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi sebesar 3,38 %. Sumatera Barat menghasilkan energi produksi energi primer berupa batubara dengan produksi 518.754 ton dan tenaga air sebesar 1.159.666 MWh Output.

Kebutuhan energi didominasi oleh sektor industri (42 %) dan sektor transportasi (41 %), kemudian disusul dengan sektor rumah tangga (16 %), sektor komersial (1 %), dan sektor lainnya (kurang dari 1 %). Kebutuhan energi pada sektor industri kurang dari tiga kali lipat kebutuhan sektor rumah tangga. Kebutuhan energi pada sektor komersial bahkan hanya 6 % dari kebutuhan energi pada sektor rumah tangga. Mengingat bahwa sektor rumah tangga adalah sektor non produktif, dengan demikian sebagian porsi kebutuhan energi belum digunakan untuk kegiatan produktif.

Di sektor industri, kebutuhan energi sebagian besar dicatu oleh batubara (85 %), kemudian oleh listrik (10 %), minyak bensin (4,5 %), dan sebagian kecil lainnya minyak diesel dan minyak bakar. Sedangkan, pada sektor transportasi, kebutuhan energi sebagian besar berupa minyak bensin (58 %), kemudian minyak diesel (35 %), avtur (5 %), dan sebagian kecil *residual fuel oil*. Pada sektor komersial, energi final yang digunakan sebagian besar adalah minyak diesel (87 %) dan listrik (12,8 %) serta dalam proporsi yang sangat kecil minyak tanah. Di sektor rumah tangga, kebutuhan energi dipenuhi oleh minyak tanah (58 %), listrik (35 %), dan sisanya adalah LPG. Rumah tangga juga menggunakan kayu bakar, namun data tentang jumlah penggunaan kayu bakar belum tersedia.

A. Energi dan Ekonomi

Pemakaian energi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009 menurut jenis energy meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 5.872.406,16 SBM, Liquid Petroleum Gas (LPG) sebesar 102.539,86 SBM, Batubara sebesar 3.406.747,33 SBM, dan energi Listrik sebesar 989.904,52 SBM

Konsumsi energi final per jenis di Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2009 Secara total konsumsi energi final meningkat dari 10,548 juta SBM pada tahun 2005 menjadi 11.086 ribu pada tahun 2009. Secara rata-rata konsumsi energi final di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan 5,10 % per tahun. Jenis energi BBM yang dikonsumsi terdiri avgas, avtur, premium, minyak tanah dan minyak bakar. Sedangkan berdasarkan Konsumsi energi final per sektor di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 konsumsi energi pada Sektor Transportasi sebesar 4.537.540 SBM, sektor industri sebesar 4.610.900 SBM, sektor rumah tangga sebesar 1.754.270 SBM, komersial sebesar 117.655 SBM dan sektor lainnya sebesar 65.711 SBM.

B. Batubara

Batubara yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat tersebar di beberapa wilayah kabupaten / kota, yaitu Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok. Total sumber daya batubara yang ada pada 7 (tujuh) kabupaten / kota di atas berjumlah 951 juta ton, sedangkan total cadangan mencapai 948 juta ton.

Selama 5 tahun terakhir, penyediaan batubara dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, seperti: PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin di Kota Sawahlunto, PT. AIC di Kabupaten Sijunjung dan PT. Karbindo di Kabupaten Sijunjung. Selain itu, masih terdapat beberapa perusahaan tambang lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumatera Barat.

Tabel 2.47
Pemakaian Batubara di Sumatera Barat Tahun 2005-2009

Pemakai Batu Bara	Jumlah Pemakaian Batubara (Ton)				
	2005	2006	2007	2008	2009
PT. Semen Padang	678.123,37	846.353	703.118	908.714	800.688
PLTU Ombilin (PT. PLN)	547.904,58	520.967	543.505	407.628	456.044,1
Jumlah	1.226.027,95	1.367.320	1.246.623	934.967	1.256.732

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Batubara yang diproduksi Sumatera Barat sebagian besar untuk kebutuhan energi di PT. Semen Padang dan kebutuhan PLTU Ombilin, sedangkan sebagian lagi diekspor. Disamping itu, ada sebagian batubara untuk PT. Semen Padang dan PLTU Ombilin yang dipasok dari Propinsi Jambi dan Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan karena produksi batubara yang memenuhi spesifikasi yang diperlukan oleh PT. Semen Padang dan PLTU Ombilin belum mencukupi. Tabel 2.47 menunjukkan grafik pemakaian batubara di Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir.

C. Energi Listrik

Tabel 2.48
Produksi Pembangkit Listrik Tahun 2005 – 2009

Produksi (MWh)/ Jenis Produksi	Periode				
	2005	2006	2007	2008	2009
PLTD	26.126,10	48.857,48	40.927,26	30.695	-
PLTA	1.051.908,57	1.003.452,65	1.159.666	869.749	826.907,9
PLTG	54.871,39	123.605	54.127	40.595	123.660,1
PLTU	1.087.910,00	1.031.730	1.068.915	801.686	927.621,6
JUMLAH	2.220.816,06	2.207.654,13	2.323.635	1.742.725	1.878.189,6

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Tabel 2.48 menunjukkan produksi energi listrik untuk pembangkit-pembangkit listrik PLN yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2005-2009. Produksi energi listrik selama 5 tahun terakhir menurun dari 2.220.816,06 MWh pada tahun 2005 menjadi 1.878.189,6 pada tahun 2009. Kontribusi terbesar dalam produksi energi listrik ini adalah PLTU dan terkecil PLTD. Pada tahun 2009, produksi PLTU memberikan kontribusi 49,38 % dari total energi listrik yang diproduksi, sedangkan PLTA, PLTG dan PLTD masing-masing 44,03 %, 6,5 % dan 0%.

Pemakaian energi listrik di Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir diperlihatkan oleh Gambar 2.49. Total pemakaian energi listrik meningkat dari 1.580.350 GWh pada tahun 2005 menjadi 1.846.064 GWh tahun 2009, dengan persentase pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 3,36 %. Pada tahun 2009, pemakaian energi listrik pada sektor rumah tangga mencapai 43,75 % dari total seluruh pemakaian, sedangkan sektor industri merupakan pemakai energi listrik terbesar kedua mencapai 34,85 %, dan sektor bisnis & publik mengkonsumsi energi listrik masing-masing 12,44 % dan 8,96 %.

Tabel 2.49
Pemakaian Energi Listrik Tahun 2005 – 2009

Sektor	Pemakaian Energi Listrik (Gwh)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Rumah Tangga	669.198	696.012	751.519	501.013	807.671
Unit Usaha/Bisnis	147.456	147.960	193.411	128.941	229.674
Industri	634.344	732.204	665.314	443.543	643.387
Umum (Publik)	129.352	164.788	166.124	110.749	165.330
JUMLAH	1.580.350	1.740.964	1.776.368	1.184.246	1.846.064

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Tahun 2009

Indikator kinerja makro bidang energi listrik. Terlihat bahwa daerah cakupan pelayanan listrik dari tahun 2005-2009 meningkat dan mencapai 90,1 % dengan rasio elektrifikasi hampir 70%.

Tabel 2.50
Indikator Kinerja Makro Bidang Energi Listrik Tahun 2005-2009

No	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator kinerja makro RPJMD 2006-2009 bidang energi								
			2005	2006		2007		2008		2009	
			R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Daerah Cakupan Pelayanan Listrik	%	80,00	83,60	88,94	85,20	89,23	86,80	89,60	88,40	90,10
2	Rasio Elektrifikasi	%	51,50	52,83	53,98	54,64	57,94	56,46	71,50	58,29	69,92

Sumber Data : evaluasi kinerja pembangunan daerah beberapa edisi

Keterangan: T=Target; R=Realisasi

D. Potensi Energi Terbarukan

Pengembangan energi terbarukan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 dan Peraturan Presiden No.5 tahun 2006 yang menempatkan energi alternatif, khususnya bahan bakar nabati sebagai instrumen penting dalam perencanaan dan pengembangan energi nasional. Untuk mengatasi kekurangan bahan bakar minyak bumi, pemerintah telah menggalakkan peluang pencarian alternatif bahan bakar berbasis bahan baku yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan memberikan jaminan suplai bahan baku.

Sumber energi terbarukan tersebut meliputi tenaga air, panas bumi, biomassa, energi surya dan biofuel.

E. Tenaga Air

Potensi mikro / piko-hidro tersebar di Kabupaten-kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pariaman, Agam, Pasaman, dan Pasaman Barat. Sejumlah kecil potensi juga ditemui di Kabupaten 50 Kota dan Sijunjung. Potensi mikro / piko-hidro diperkirakan mencapai 127 MW. Distribusi potensi PLTMH berdasarkan kabupaten. Potensi terbesar terletak di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 39 % dari potensi yang telah dikaji. Potensi yang relatif besar juga terdapat di Kabupaten Agam dan Solok dengan masing-masing sebesar 32 % dan 26 %. Potensi yang kecil terdapat di Kabupaten 50 Kota, Pasaman Barat, dan Tanah Datar. Pada Tabel 2.50 diperlihatkan jumlah unit serta kapasitas terpasang dari PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro). Sebagian besar unit dipasang di Kabupaten-kabupaten Agam, Pasaman, dan Solok dengan persentase kapasitas lebih dari 80 % dari semua unit yang terpasang.

Tabel 2.51
Jumlah Unit dan Kapasitas Terpasang PLTMH

Kabupaten	Jumlah (Unit)	Variasi Daya(kVA)	Total Daya(kVA)
Kabupaten Agam	27	3 – 60	317
Kabupaten 50 Kota	8	3 – 10	51
Kabupaten Pasaman	30	2 – 60	280
Kabupaten Solok	14	3 – 60	338
Kabupaten Pesisir Selatan	8	2 – 40	85
Kabupaten Sijunjung	2	5 – 30	35
Kabupaten Tanah Datar	4	3 – 15	26
Total	93	2 – 60	1132

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009

F. Panas Bumi

Kebanyakan, potensi energi panas bumi yang utama tersebar di Kabupaten Pasaman (termasuk Pasaman Barat) dan Solok (dan Solok Selatan). Potensi yang lebih kecil terdapat di Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, dan Tanah Datar. Potensi energi panas bumi di Sumatera Barat diperkirakan mencapai 1598 MWe. Distribusi potensi panas bumi berdasarkan kabupaten. Dari gambar tersebut terlihat bahwa potensi terbesar terdapat di Kabupaten Solok, yaitu sebesar 55 %, dan yang kedua adalah Kabupaten Pasaman dengan potensi sebesar 36 %.

G. Biomassa

Secara garis besar, biomassa terdiri dari bahan bakar berbasis kayu (batang kayu, ranting, serbuk gergaji, dll.), hasil samping dan limbah pengolahan hasil pertanian / perkebunan, limbah peternakan, serta produk turunannya, seperti arang tempurung. Sampah rumah tangga kadang-kadang juga dipandang sebagai biomassa. Sumatera Barat memiliki potensi energi dari biomassa, khususnya yang berasal dari limbah atau hasil samping pertanian dan perkebunan, di samping dalam porsi yang lebih kecil dari limbah peternakan.

Tabel 2.52
Potensi Energi Biomassa

Komoditi	Produksi (kilo ton)*	Residu	RPR	Kadar air (%)	Jumlah residu (kilo ton)	Nilai kalor (MJ/kg)	Energi (TJ)
Kelapa sawit	3960.24	Tandan kosong	0.23	55	910.86	8.16	7,688
		Sabut	0.11	40	435.63	11.34	2,964
		Cangkang	0.06	10	237.61	18.83	4,027
Kelapa	75.33	Sabut	0.419	10.3	31.56	18.62	527
		Tempurung	0.12	8.7	9.04	18.09	149

Komoditi	Produksi (kilo ton)*	Residu	RPR	Kadar air (%)	Jumlah residu (kilo ton)	Nilai kalor (MJ/kg)	Energi (TJ)
Padi	1982.49	Sekam	0.267	12.37	529.32	19.33	8,966
		Jerami	1.757	12.71	3,483.23	16.02	48,709
Tebu	17.67	Bagasse	0.29	49	5.12	18.1	47
		Top/leaves	0.3	10	5.30	17.41	83
Kopi	24.65	Husk	2.1	15	51.77	12.38	545
Ubi kayu	125.96	Batang	0.062	15	7.81	17.5	116
Jagung	211.91	Tongkol	0.273	7.53	57.85	16.28	871
		Batang	2	15	423.83	19.66	7,083

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan

H. Energi Surya

Secara kasar, dari peta penerimaan energi surya dunia, Sumatera Barat terletak di wilayah dengan tingkat penyinaran matahari yang berkisar 4 – 5 kWh/m²/hari. Pemanfaatan energi surya dapat dilakukan dengan menggunakan sel surya (*photovoltaic*) maupun secara termal. Beberapa unit sel surya telah dipasang sejak tahun 1995. Secara keseluruhan, sampai tahun 2009 sebanyak 3.366 unit yang sudah terpasang. Berada di jalur khatulistiwa, Sumatera Barat menerima radiasi energi radiasi surya yang relatif merata sepanjang tahun. Namun demikian, besaran radiasi yang diterima rata-rata hanya sekitar 334 W/m².

I. Biofuel

Sebagai biofuel, biodiesel dan bioetanol merupakan sebuah alternatif bahan bakar diesel yang dihasilkan dari sumber terbarukan (*renewable resources*) seperti minyak nabati atau lemak hewan. Secara umum kedua bahan bakar tersebut ramah lingkungan, pembakarannya bersih, *biodegradable*, mudah dikemas dan disimpan, serta dapat diperbaharui.

Di Sumatera Barat pada 2006 terdapat tanaman kelapa 90.663 ha dan produksi buah 79.046 ton. Dari potensi buah kelapa, dapat diperoleh sekitar 7,24 % minyak biodiesel yang berarti sekitar 5.720,7 ton biodiesel atau sekitar 6.350 kiloliter per tahunnya. Dengan asumsi 5 % dari buah kelapa dapat diperoleh bioetanol air kelapa, maka dapat diperoleh sekitar 4.000 ton bioetanol (sekitar 4.400 kiloliter) per tahunnya.

Biodiesel dapat juga dibuat dari CPO yang banyak dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit Sumatera Barat.

J. Jenis Energi Terbarukan Lainnya

Beberapa jenis pembangkit listrik yang belum tergarap di Sumatera Barat (energi baru dan terbarukan) dapat dilihat pada Tabel 2.53

Tabel 2.53
Jenis Pembangkit Listrik Yang Belum Tergarap Di Sumatera Barat
(Energi Baru Dan Terbarukan)

No	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI
1	Pembangkit Listrik Tenaga Angin	Sepanjang Pantai Barat
2	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Kab. Solok Selatan dan Kab. Pasaman
3	Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Mentawai, dan Kota Padang
4	Pembangkit Listrik Tenaga Ombak	Sepanjang Pantai Barat

Sumber Data : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2009

Sesuai Kyoto Protocol, pengurangan emisi karbon Jepang sebesar 6 % sampai tahun 2012. Jepang menawarkan bentuk kerjasama saling menguntungkan untuk mengurangi CO² yang dihasilkan Indonesia dengan menggunakan dana dan teknologi dari Jepang. Keunggulan: Selain menghasilkan listrik juga menghasilkan produk penyulingan air laut menjadi air tawar. Perkembangan OTEC di Sumatera Barat mesti dilakukan dengan pengajuan permohonan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Jepang melalui kedutaan besar pemerintah Jepang di Indonesia

Kesulitan mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) baik oleh karena sistem distribusinya maupun oleh karena relatif mahal nya harga BBM juga dialami oleh nelayan Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu di sisi lain di lingkungan di sekitar nelayan terdapat potensi tanaman kelapa yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan Biodiesel yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternative untuk kapal nelayan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya fasilitasi pembuatan biodiesel dari minyak yang berasal dari tanaman kelapa, melalui teknologi dan system yang dapat dilakukan oleh industri pada skala rumah tangga, atau skala kecil.

4. Penataan Ruang

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat berlaku sampai dengan tahun 2005, namun dengan ditetapkannya undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, perlu dilakukan revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan tahun perencanaan 2009-2029.

Sesuai dengan Undang-undang 26/2007 tentang Penataan Ruang, PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ditetapkan sebagai kawasan strategis dari segi lingkungan hidup, karena selain kondisi topografi yang berbukit dan bergunung juga beberapa sungai besar hulunya berada di Sumatera Barat.

Penataan ruang Provinsi Sumatera Barat mencakup struktur dan pola ruang. Berdasarkan Struktur Ruang Sumatera Barat yang berisi sistem perkotaan, dan system jaringan transportasi, system jaringan komunikasi, jaringan sumberdaya air, jaringan sistem energi serta sistem jaringan prasarana lingkungan. Berdasarkan struktur ruang RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029, sistem perkotaan di Sumatera Barat terdiri dari 1 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Padang, 5 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Bukittinggi, Sawahlunto, Pariaman, Solok dan Muara Siberut. Disamping itu diusulkan beberapa kota akan menjadi pusat kegiatan wilayah yaitu Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan dan Simpang Empat. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebanyak 12 Kota, yaitu Painan, Padang Panjang, Lubuk Sikaping, Sari Lamak, Batusangkar, Padang Aro, Tuapejat, Lubuk Basung, Muaro Sijunjung, Lubuk Alung, Aro Suka dan Parik Malintang.

Berdasarkan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat kawasan lindung seluas 35,86 % (516.593 Ha) dari luas provinsi Sumbar dan kawasan budidaya seluas 64,14 % (2.713.137 Ha) dari luas provinsi Sumatera Barat. Kawasan lindung meliputi kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Lindung Lainnya. Kawasan Budidaya meliputi Kawasan hutan produksi, Kawasan hutan rakyat, Kawasan perkebunan, Kawasan pertanian pangan, Kawasan perikanan, Kawasan pertambangan, Kawasan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan permukiman dan Kawasan peruntukan lainnya.

Berdasarkan PP Nomor 26 tahun 2008, Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan strategis nasional yaitu Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, Taman Nasional Kerinci Seblat, Stasiun Pengamat Dirgantara Bukit Koto Tabang, dan kawasan pulau kecil terluar (pulau Sibaru-Baru dan pulau Sinyaunyu Kab. Kep. Mentawai). Berdasarkan RTRW Sumbar 2009-2029 Provinsi Sumbar memiliki 14 kawasan strategis yang terdiri atas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ITBM (Indarung-Teluk Bayur-Bungus-Mandeh), kawasan industri PIP, kawasan poros barat timur (jalur Padang – batas Riau), kawasan Tapus Rao-Mapat Tunggul, Sungai Rumbai, Lunang Silaut, Pangkalan Koto Baru, Kamang Baru, Abai-Sangir-Taluak Aia Putih; kawasan strategi sosial

budaya pada Kabupaten Tanah Datar dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Ngarai Sianok, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Kembar dan Danau Talang.

5. Lingkungan Hidup

Sumatera Barat memiliki luas lahan 4,2 juta Ha. dengan kontur bergelombang, terdiri atas wilayah perbukitan dan pegunungan 2,2 juta Ha. (52,19 %), wilayah daratan yang dapat dihuni hanya 13,31 % (0,5 juta Ha). Dari luasan tersebut sekitar 60 % diantaranya (2,6 juta Ha.) adalah kawasan hutan. Dengan keadaan tersebut sangat menyulitkan bagi Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan. Sehubungan dengan pertumbuhan penduduk, kondisi perbukitan dan pegunungan tersebut juga memposisikan wilayah ini pada daerah rawan bencana dan rawan gempa.

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana baik pemukiman, industri, transportasi serta penduduk tentunya membutuhkan sumber daya alam yang lebih banyak, serta menghasilkan bahan sisa yang lebih banyak. Hal ini telah mendorong terjadinya penurunan kualitas lingkungan, baik itu sumber daya air, udara, ketersediaan lahan yang sekaligus mempengaruhi aspek sosiologi masyarakat. Isu lingkungan yang terdapat dalam konteks kekinian adalah persoalan lingkungan yang terkait dengan tekanan akibat aktifitas kegiatan manusia dan kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh proses alami bumi.

Alam Sumatera Barat juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, antara lain; a) keanekaragaman ekosistem (suaka alam, cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata), b) keanekaragaman flora dan fauna (termasuk yang dilindungi), dan c) keanekaragaman genetik.

Keberadaan kuantitas air di Sumatera Barat, dapat dilihat dari perbedaan debit air antara musim kemarau dan musim hujan. Perbedaan debit yang sangat kontras terutama terjadi pada sungai utama di daerah perkotaan. Hal ini menandakan daerah tangkapan air (*catchments area*) dan daerah aliran sungai (DAS) telah mengalami kerusakan. Ketersediaan sumberdaya air di Sumatera Barat didukung oleh sebanyak 506 sungai besar dan kecil, serta 238 danau dan telaga.

Walaupun Sumatera Barat tidak menjadi sentra industri skala besar, isu terkait kualitas udara juga dapat dikontribusikan oleh dampak pemanfaatan lahan untuk pembukaan perkebunan dan dampak transportasi. Kualitas udara di Sumatera Barat umumnya masih baik pada saat keadaan normal, karena tidak ada kebakaran hutan yang signifikan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan perkembangan

industri pabrik kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara yang potensial ke depannya. Namun yang penting juga untuk diperhatikan adalah perubahan fungsi lahan berkaitan dengan kontribusinya dalam penyediaan karbon.

Kerusakan hutan bakau pada daerah pesisir juga perlu menjadi perhatian sebagai akibat dari laju erosi dan pembalakan yang tinggi. Kerusakan hutan bakau bisa dilihat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Pada kabupaten tersebut terlihat bahwa keberadaan hutan bakaunya semakin terancam dengan kategori rusak cukup parah sekitar 70-80 %. Disamping itu, kondisi terumbu karang juga mengalami kerusakan yang parah, yang terjadi sebagai akibat penggunaan sistim penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan bom, potas maupun terumbu karang yang diambil secara langsung untuk diperdagangkan.

Fenomena lainnya di daerah pesisir yang perlu di cermati adalah potensi terjadinya abrasi pantai. Hal ini terutama pada daerah-daerah pesisir yang tekanan pada sempadan pantainya tinggi. Pemanfaatan sempadan dan daerah berbahaya sepanjang daerah pesisir sampai saat ini juga masih terjadi pada berbagai daerah, seperti halnya pemukiman nelayan yang sampai ke bibir pantai. Abrasi paling parah saat ini terlihat di kota Padang. Selain itu, yang perlu juga menjadi perhatian penting adalah kondisi terkait dengan lingkungan pemukiman, yang pada beberapa daerah belum memiliki sanitasi lingkungan yang memadai, terutama di kota-kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, seperti Padang dan Pariaman.

Sesuai dengan kondisinya Sumatera Barat memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi, dengan curah hujan rata-rata 4.000 mm/th. Kondisi alam yang penuh perbukitan ditambah dengan curah hujan yang tinggi menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah rawan dengan bencana alam, dan gempa.

Tabel 2.54
Tingkat Kekritisn Lahan Tiap Wilayah Administrasi Pemerintah

No	Kab/Kota	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah (Ha)
	Kabupaten			
1	Agam	6.182	1.064	7.246
2	Lima Puluh Kota	105.591	6.508	112.099
3	Padang Pariaman	2.539	-	2.539
4	Pasaman	59.078	10.567	69.645
5	Pasaman Barat	162	-	162
6	Pesisir Selatan	8.169	3	8.172
7	Solok	28.719	8.898	37.617
8	Solok Selatan	174	-	174

No	Kab/Kota	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah (Ha)
9	Tanah Datar	27.210	5.943	33.153
10	Sijunjung	73.923	1.230	75.153
11	Dharmasraya	1.589	-	1.589
12	Kep. Mentawai	-	-	-
	Kota			
13	Bukittinggi	104	-	104
14	Padang	2.292	-	2.292
15	Padang Panjang	326	31	357
16	Sawahlunto	14.966	3.320	18.286
17	Payakumbuh	586	854	1.440
18	Solok	1.829	529	2.358
19	Pariaman	-	-	-
	Jumlah	333.439	38.947	372.386

Sumber Data : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

6. Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam, seni dan budaya tradisional. Sebagai Negara yang memiliki keindahan alam dan keragaman budaya, Indonesia telah menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup populer di dunia. Kunjungan wisata ke Indonesia maupun ke daerah Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.

Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi tujuan wisata utama di pulau Sumatera untuk semua kategori wisatawan. Dari data yang diperoleh dari BPS Sumatera Barat, terungkap bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan nusantara ke Provinsi Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, tahun 2007 jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Sumatera Barat sebanyak 4.843.822 orang dan wisatawan manca negara 27.978 orang. Pada tahun 2009 kunjungan wisatawan nusantara meningkat menjadi 7.412.910 orang dan wisatawan manca negara naik menjadi 47.6233 orang.

Walaupun daerah Sumatera Barat dilanda gempa bumi yang membawa kerusakan pada infrastruktur dan bangunan pada tahun 2009, namun infrastruktur pariwisata masih berfungsi dengan baik. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 267 hotel yang beroperasi dengan jumlah kamar 4.42.7 buah dan 8.827 tempat tidur. Tingkat hunian hotel juga masih cukup tinggi berkisar 35 – 50 % secara rata-rata yang mengindikasikan bahwa daerah Sumatera Barat masih banyak

dikunjungi baik untuk tujuan wisata maupun social dan kekeluargaan. Tercatat juga sebanyak 231 obyek wisata alam, 401 obyek wisata budaya dan 147 obyek wisata khusus yang masih beroperasi dengan baik di berbagai wilayah Sumatera Barat.

2.4.3 Investasi Daerah

Salah satu faktor utama yang menentukan daya saing daerah adalah kondisi iklim investasi yang terdapat di daerah bersangkutan. Alasannya jelas karena kemampuan suatu daerah untuk bersaing dalam menarik investor dari luar daerah akan sangat ditentukan oleh kondisi iklim investasi daerah bersangkutan. Sedangkan peningkatan kegiatan investasi tersebut akan sangat menentukan kemampuan daerah bersangkutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian, kondisi iklim investasi akan sangat menentukan kemampuan daerah bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat secara keseluruhan dimasa mendatang.

Peningkatan iklim investasi diperlukan untuk memperbaiki kondisi dan situasi sehingga investor merasa nyaman untuk melakukan penanaman modal di daerah ini. Iklim investasi tersebut mencakup berbagai kondisi yang dapat mendukung kegiatan investasi di daerah seperti tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang baik, prosedur perizinan yang relatif singkat dan mempunyai kepastian hukum, aturan perpajakan, kondisi korupsi dan pungutan liar dan lain-lainnya. Belum optimalnya kinerja investasi di Provinsi Sumatera Barat saat ini selain disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi global juga disebabkan karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang belum bisa diatasi.

Tabel 2.55
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) (Rp. Juta)
Tahun 2006-2010

No	Institusi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Atas Dasar Harga Berlaku					
1	Pemerintahan Umum	1.163.483,52	1.292.035,09	1.646.375,81	1.922.880,41	2.333.361,42
2	BUMN/D dan Swasta	4.162.865,50	4.558.840,08	5.292.647,29	6.017.754,62	7.869.747,51
3	Rumah Tangga	4.081.735,06	4.602.786,27	5.674.688,21	6.236.635,38	6.830.765,32
	Provinsi Sumatera Barat	9.408.084,08	10.453.661,43	12.613.711,31	14.177.270,42	17.033.874,25
	Atas Dasar Harga Konstan					
1	Pemerintahan Umum	731.770,51	765.968,46	804.208,00	865.907,29	1.000.359,97
2	BUMN/D dan Swasta	2.379.069,07	2.406.327,17	2.555.757,52	2.744.200,22	3.303.896,61
3	Rumah Tangga	2.493.806,29	2.651.977,83	2.771.924,63	2.825.765,51	2.856.839,59
	Provinsi Sumatera Barat	5.604.645,29	5.824.273,46	6.131.890,15	6.435.873,02	7.161.096,17

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang masih akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan adalah kecenderungan menurunnya aliran investasi dari negara-negara maju. Namun demikian, prospek untuk berinvestasi di Indonesia cukup baik. UNCTAD (2009) dalam *World Investment Prospect 2009-2011* melaporkan bahwa prospek untuk berinvestasi di Indonesia menduduki peringkat ke delapan atau cukup prospektif, terutama karena besarnya pasar dan ketersediaan sumber daya alam. Meskipun demikian, ke depan keunggulan berupa besarnya pasar dan sumberdaya alam yang dimiliki perlu didukung dengan pelayanan perizinan dan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik investasi bagi para investor.

Permasalahan lain yang menyebabkan masih rendahnya pertumbuhan realisasi PMDN dan PMA di Sumatera Barat disebabkan antara lain oleh potensi sumber alam dan kemampuan ekonomi daerah yang relatif rendah, jumlah dan kualitas infrastruktur yang kurang memadai, pengkajian dan promosi potensi investasi masih kurang intensif, kurang tersedianya mitra lokal pendamping investor dari luar, pelayanan publik kurang memadai, insentif investasi seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan lain-lain masih kurang, adanya masalah/konflik tanah ulayat yang tidak kunjung selesai, dan kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Salahsatusumberutamapertumbuhanekonomiyangberkelanjutan adalah investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan proyek investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi oleh upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh suatu daerah. Belum optimalnya kinerja investasi saat ini selain disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi global juga karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang belum bisa diatasi.

Perkembangan investasi di Sumatera Barat selama periode 2004 – 2009 terlihat cukup menggembirakan terutama realisasi PMDN. Investasi PMA terlihat menurun secara konsisten baik dari sisi persetujuan rencana penanaman modal maupun realisasinya. Rendahnya kinerja investasi asing berkaitan juga dengan krisis ekonomi global dan adanya isu negative tentang keamanan dan stabilitas politik selama masa pemilu dan pilkada di daerah Sumatera Barat.

Data lebih rinci mengenai perkembangan investasi PMDN dan PMA serta data penyerapan tenaga kerja sebagai hasil dari kegiatan penanaman modal dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Investasi PMA/PMDN
di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2009 (US \$ 000)

Tahun	PMA		PMDN	
	Persetujuan	Realisasi	Persetujuan	Realisasi
2004	18.443,95	29.532,64	712.333,44	631.733,95
2005	160.545,37	85.568,91	358.420,30	607.061,37
2006	38.527,41	87.423,70	1.113.992,50	234.856,62
2007	153.489,56	7.028,76	2.667.814,88	58.511,10
2008	207.738,30	20.626,32	731.089,78	608.917,89
2009	23.315,39	20.994,06	647.680,83	761.617,90

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009/2010

Ditinjau dari penyerapan tenaga kerja, terlihat bahwa rata-rata jumlah tenaga kerja per perusahaan PMDN adalah 256 orang, 1.149 orang dan, 656 orang masing-masing tahun 2007, 2008, dan 2009. Sementara itu PMA menyerap tenaga kerja sebanyak 163 orang, 115 orang dan 490 orang untuk periode yang sama. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa daya serap perusahaan PMA dan PMDN terhadap tenaga kerja relatif kecil karena kebanyakan berupa perusahaan yang menggunakan teknologi dan padat modal.

Realisasi investasi asing atau PMA di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menurun dan pertumbuhannya sangat fluktuatif karena sangat berkaitan dengan kondisi keamanan dalam negeri, gejolak politik dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Gambaran yang hampir sama juga terlihat dalam perkembangan realisasi PMA di daerah Sumatera Barat walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang jauh berbeda. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2008 pertumbuhan realisasi PMA di tingkat nasional menunjukkan angka sekitar 23,39 % per tahun sedangkan untuk daerah Sumatera Barat pertumbuhannya hanya berkisar 0,50 %.

Capaian pertumbuhan realisasi PMA di Sumatera Barat jauh lebih rendah dari kinerja nasional di bidang investasi. Penyebabnya antara lain; potensi sumber alam dan ekonomi daerah relatif rendah, infrastruktur kurang memadai, pengkajian dan promosi potensi investasi masih kurang intensif, kurang tersedianya mitra lokal pendamping investor dari luar, pelayanan publik kurang memadai, insentif investasi seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan lain-lainnya masih kurang, adanya masalah / konflik tanah ulayat yang tidak kunjung selesai.

Walaupun angka pertumbuhan realisasi investasi PMA di daerah Sumatera Barat relatif kecil, namun kontribusinya bagi pembangunan ekonomi daerah cukup besar. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan

jumlah badan usaha yang berstatus PMA, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam berbagai proyek investasi PMA tersebut.

Realisasi investasi domestik atau PMDN menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari waktu ke waktu dengan pertumbuhan yang juga berfluktuasi. Hal itu berkaitan dengan kondisi keamanan dalam negeri, gejolak politik dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan baik domestik maupun internasional. Gambaran yang hampir sama juga terlihat dalam perkembangan realisasi PMDN di daerah Sumatera Barat walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2008 pertumbuhan realisasi PMDN di tingkat nasional menunjukkan angka sekitar 32,70 % per tahun sedangkan untuk daerah Sumatera Barat pertumbuhannya hanya berkisar 2,01 %. Rincian angka pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN dapat dilihat dalam Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Pertumbuhan PMA dan PMDN di Indonesia dan Sumatera Barat
Tahun 2006-2008

% Pertumbuhan Realisasi PMA/PMDN	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata (%)
PMA						
Capaian Nasional	25,82	99,39	-32,79	68,91	-41,62	23,39
Capaian Sum.Barat	1,90	0,02	-0,92	1,93	-	0,50
PMDN						
Capaian Nasional	-15,04	94,90	-32,76	72,60	43,80	32,70
Capaian Sum.Barat	-0,04	-0,61	-0,75	9,41	-	2,01

Sumber Data : Bappenas RI, Laporan EKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pasal 5 ayat 2 undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2006–2010 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 16,02 %. Pertumbuhan sebesar ini terutama didorong oleh pertumbuhan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dana perimbangan, yaitu 19,34 % berbanding 9,07 %. Pada tahun 2006 jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh adalah Rp 494.930 juta dan meningkat menjadi Rp 1.004.001 juta pada tahun 2010. Berarti dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,34 %. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9,07 %, yaitu meningkat dari Rp 554.232 juta pada tahun 2006 menjadi Rp 784.476 juta pada tahun 2010.

Akibat dari pertumbuhan sumber dana perimbangan lebih rendah daripada pendapatan asli daerah, maka komposisi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat pun mengalami perubahan yang cukup mendasar, dimana pada tahun 2006 komposisi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih rendah daripada dana perimbangan, yaitu Rp 494.930 juta (46,75 %) berbanding Rp 554.232 juta (52,35 %). Sebaliknya, pada tahun 2010, komposisinya sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih besar daripada dana perimbangan, yaitu Rp 1.004.001 juta (52,34 %) berbanding Rp 784.476 juta (40,90 %). Hal ini berarti, bahwa pada tahun 2010 ketergantungan Provinsi Sumatera Barat terhadap sumber dana dari Pemerintah Pusat semakin rendah.

Komposisi sumber pendapatan daerah seperti dijelaskan di atas sedikit menguntungkan untuk pengembangan pembangunan daerah yang lebih baik. Akan tetapi, ketergantungan terhadap pemerintah pusat pada masa datang pun tidak dapat diharapkan banyak. Karena, pemerintah pusat pada akhir-akhir ini juga mengalami kesulitan keuangan. Hal ini, dapat dilihat dengan peningkatan penerimaan dana alokasi umum (DAU) pada banyak daerah hanya berkisar 5 % saja. Untuk itu, pada masa datang harus diupayakan bagaimana meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki daerah sendiri.

Sumber pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling besar berasal dari pajak daerah, yang dalam kurun waktu 2006 – 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 17,08 %. Sekalipun pada tahun 2009 terjadi penurunan penerimaan pajak daerah dibandingkan tahun 2008, namun pada tahun 2010 pemerintah daerah membuat kebijakan sehubungan dengan pajak kendaraan yang mengakibatkan penerimaan dari pajak daerah kembali mengalami peningkatan. Penurunan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah terjadi pada tahun 2010. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah pendapatan ini adalah dampak Gempa 30 September 2009 dan perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga sumber penerimaan daerah dari RSUD ini dicatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah. Namun ke depan, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat harus lebih mengupayakan meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, yang didukung pula dengan adanya perubahan tentang undang-undang yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu dari UU No. 34 tahun 2000 menjadi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penggalian sumber-sumber pendapatan dari aset dan potensi daerah yang dimiliki dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dapat dikurangi. Untuk itu, perubahan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah harus sesegera mungkin ditindak lanjuti dengan penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan atau retribusi daerah. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah. Sedangkan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah. Apalagi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dilihat dari segi jenis objek pajak maupun tarif pajak. Misalkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor akan dikenakan tarif pajak progresif bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 buah kendaraan bermotor.

Perkembangan penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber dana perimbangan lainnya. Penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak mengalami peningkatan dari Rp 71.453 juta pada tahun 2006 menjadi Rp 105.852 juta pada tahun 2010. Hal ini berarti terjadi peningkatan rata-rata per tahun sebesar 10,32. Sebaliknya penerimaan dari dana bagi hasil bukan pajak menurun dari Rp 5.750 juta pada tahun 2006 menjadi Rp. 2.590 juta pada tahun 2010. Sedangkan peningkatan penerimaan dana alokasi umum sedikit lebih baik, karena masih menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp 477.029 juta pada tahun 2006 menjadi Rp 661.617 juta pada tahun 2010, atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,52 %.

Sekalipun daerah tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan penerimaan dana perimbangan ini, namun upaya meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat secara tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan pemerintah dari penerimaan pajak ataupun bukan pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan alokasi dana perimbangan bagi daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah dan pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 - tahun 2010

No	Uraian	TA 2006	TA 2007	TA 2008	TA 2009	TA 2010	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		(Rp'Juta)					
	PENDAPATAN	1.058.664	1.281.400	1.727.424	2.026.241	1.918.052	16,02
A	Pendapatan Asli Daerah	494.930	571.608	794.300	739.747	1.004.001	19,34
1	Pajak daerah	409.140	479.453	663.379	619.270	768.761	17,08
2	Retribusi daerah	10.786	32.386	54.374	51.932	28.267	27,24
3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	25.574	29.889	36.481	39.582	46.814	16,32
4	Lain-Lain PAD yang sah	49.430	29.879	40.066	28.963	160.159	34,17
B	Dana Perimbangan	554.232	633.866	744.202	789.840	784.476	9,07
1	Dana bagi hasil pajak	71.453	84.268	85.943	86.636	105.852	10,32
2	Dana bagi hasil bukan pajak	5.750	3.265	1.981	7.081	2.590	(18,07)
3	Dana alokasi umum	477.029	546.332	631.711	648.943	661.617	8,52
4	Dana alokasi khusus	-	-	24.567	47.179	14.415	
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.503	75.927	188.921	496.654	129.575	92,16
1	Hibah		2.857	188.921	495.775	80.678	
2	Dana darurat		53.000				
3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus		20.070		879	48.898	

Sumber : DPKD Provinsi

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Berdasarkan Neraca Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 terlihat bahwa komposisi aset tetap lebih jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 88,57 %, 5,16 %, dan 6,24 %, sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Namun demikian, komposisi aset tetap sedikit mengalami penurunan pada tahun 2010, yaitu menjadi 85,90 %, dan komposisi aset lancar naik menjadi 7,22 %. Perubahan komposisi aset ini disebabkan karena adanya peningkatan kewajiban bagi hasil kota/kabupaten yang belum dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai akhir tahun sehingga jumlah Kas di Kasda (bagian dari aset lancar) mengalami peningkatan dengan jumlah yang signifikan.

Aset yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan cukup signifikan, yaitu dari Rp 4.838.858 juta pada tahun 2006 menjadi Rp 6.463.738 juta pada tahun 2010, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 7,51 %. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang diperoleh dari tahun ke tahun, kemudian peningkatan investasi jangka panjang, dan peningkatan aset tetap. Namun pada sampai saat ini Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki Dana Cadangan dan Kewajiban Jangka Panjang. Hal ini antara lain disebabkan sulitnya prosedur dan izin untuk melakukan pinjaman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan belum adanya rencana kerja yang membutuhkan dana besar sehingga perlu dicadangkan pada beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Jumlah dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana
Provinsi Sumatera Barat, tahun 2006– 2010

URAIAN	TA 2006	TA 2007	TA 2008	TA 2009	TA 2010	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
	(Rp'Juta)					
ASET						
Aktiva Lancar	249.485	288.486	396.706	788.531	466.519	16,94
Investasi Jangka Panjang	301.831	290.263	340.572	368.791	401.302	7,38
Aset Tetap	4.285.753	4.542.084	4.773.401	5.038.199	5.552.048	6,69
Dana Cadangan	-	-	-	-		
Aset Lainnya	1.789	1.570	23.378	74.763	43.870	122,52
JUMLAH ASET	4.838.859	5.122.403	5.534.057	6.270.283	6.463.739	7,51
KEWAJIBAN dan EKUITAS						
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	24.605	30.104	78.018	60.056	60.738	25,35
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	24.605	30.104	78.018	60.056	60.738	25,35
EQUITAS DANA						
Ekuitas Dana Lancar	224.880	258.382	318.688	728.474	405.782	15,90
Ekuitas Dana Cadangan						
JUMLAH EKUITAS DANA	4.814.253	5.092.299	5.456.039	6.210.227	6.403.001	7,39
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.838.859	5.122.403	5.534.057	6.270.283	6.463.739	7,51

Sumber : DPKD Provinsi

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga sama untuk pertumbuhan jumlah dari kewajiban dan ekuitas dana. Pertumbuhan ekuitas dana per tahun adalah 7,39 % dan pertumbuhan kewajiban adalah 25,35 %. Namun karena komposisi ekuitas dana jauh lebih besar (lebih kurang 99 %) dibandingkan kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban yang lebih besar tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas dana. Tabel 3.2 menyajikan jumlah dan rata-rata aset, kewajiban, dan ekuitas dana Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memahami kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan analisis ratio keuangan, meliputi rasio lancar, kas rasio, rasio total hutang terhadap aset, dan rasio hutang terhadap modal. Rasio lancar dan kas rasio kedua-duanya dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi kas rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki. Sedangkan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total hutang terhadap ekuitas dana, sama-sama menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset atau aset bersih digunakan.

Baik rasio lancar maupun kas rasio menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu lebih 1.000 %. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang lancar lebih dari 10 kali lipat, dan atau jumlah hutang yang relative sangat kecil. Kondisi jumlah hutang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total hutang terhadap ekuitas dana dan atau total aset, yaitu berkisar hanya 1 % saja. Artinya, hutang yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat hanya 1 % dari jumlah aset atau ekuitas dana-nya. Dengan demikian, ke empat rasio keuangan ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang sangat kuat (baik) dalam melunasi seluruh hutangnya. Tabel 3.3 berikut menyajikan rasio keuangan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2007 – 2010(Persen)

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Rasio lancar (current ratio)	1.013,95	958,28	508,48	1,312,99	768,09
2	Rasio quick (quick ratio)	880,92	856,30	426,97	1,165,43	486,06
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,51	0,59	1,41	0,96	0,94
4	Rasio hutang terhadap modal	0,51	0,59	1,43	0,97	0,95

Sumber : DPKD Provinsi

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengklasifikasian belanja berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung terkait dengan metode penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran berbasis kinerja yang mulai diterapkan dalam era otonomi daerah merupakan manifestasi untuk meningkatkan dan mempercepat efektivitas proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran daripada menitikberatkan alokasi biaya atau *input* semata dan mengabaikan keluaran yang akan dicapai. **Output** (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan *input* yang digunakan. **Input** (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap penggunaan sumber daya yang direncanakan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan produk berupa barang atau

jasa yang akan dihasilkan, kecuali untuk belanja tidak langsung yang memang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan barang dan jasa yang dihasilkan.

Pada tahun 2007 dan tahun 2008, jumlah belanja tidak langsung sedikit lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Akan tetapi, pada tahun 2009 dan tahun 2010 jumlah belanja langsung sedikit lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Pada tahun 2007 jumlah belanja langsung Provinsi Sumatera Barat lebih besar dibandingkan dengan tidak langsung, yaitu Rp 668.009 juta berbanding Rp 577.432 juta. Sedangkan pada tahun 2010, jumlah belanja tidak langsung adalah Rp 1.033.035 juta dan belanja langsung Rp 1.208.010 juta.

Pertumbuhan belanja tidak langsung rata-rata per tahun adalah 15,64 %, yaitu dari Rp 668.009 pada tahun 2007 menjadi Rp 1.033.035 juta pada tahun 2010. Analisis berdasarkan elemen pembentuk belanja tidak langsung menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja tidak langsung untuk belanja pegawai jauh lebih besar daripada belanja tidak langsung lainnya; seperti belanja sosial, belanja tak terduga, dan belanja hibah. Pada tahun 2007 jumlah belanja pegawai berjumlah Rp 308.430 juta dan meningkat menjadi Rp 452.839 juta pada tahun 2009. Di samping peningkatan jumlah pegawai Provinsi Sumatera Barat, peningkatan belanja pegawai ini juga disebabkan adanya kebijakan kenaikan gaji yang ditetapkan pemerintah, khususnya antara tahun 2007 dengan 2008.

Provinsi Sumatera Barat juga memberikan bagi hasil dan bantuan keuangan kepada kota/kabupaten yang jumlah juga relatif besar, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban daerah provinsi. Pada tahun 2007, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan berjumlah Rp 300.526 juta dan meningkat menjadi Rp 463.591 juta pada tahun 2009, Sedangkan belanja tidak langsung lainnya memiliki jumlah dan proporsi yang relatif kecil. Antara tahun 2007 sampai tahun 2010, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mengeluarkan belanja bunga karena sampai saat ini belum memiliki hutang jangka panjang.

Dalam kurun waktu 2007-2010 pertumbuhan belanja langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu 27,90 % berbanding 15,64 %. Pertumbuhan komponen belanja langsung yang terbesar terjadi untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa, sedangkan belanja langsung untuk pegawai mengalami penurunan yang cukup berarti. Dengan demikian, kebijakan belanja Provinsi Sumatera Barat telah berubah ke arah yang lebih baik, yang menekankan belanja untuk meningkatkan kinerja dan mempunyai dampak pembangunan ekonomi yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk memperbaiki komposisi belanja kearah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan memperbesar jumlah belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung, khususnya untuk belanja pegawai mengalami peningkatan yang relatif lebih rendah, bahkan untuk belanja langsung; pegawai mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007. Tabel 3.4 berikut memperlihatkan jumlah dan pertumbuhan realisasi belanja Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 – tahun 2010.

Tabel 3.4
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja
Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 - 2010

No	Uraian	TA 2007	TA 2008	TA 2009	TA 2010	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		(Rp.Juta)				
A	Belanja Tidak Langsung	668.009	906.348	769.823	1.033.035	15,64
1	Belanja Pegawai	308.430	367.199	396.240	452.839	13,66
2	Belanja Bunga	-	-	-		
3	Belanja Subsidi	-	-	-		
4	Belanja Hibah	-	24.628	16.760	57.091	
5	Belanja Bantuan Sosial	54.987	35.067	29.514	55.848	0,52
6	Belanja Bagi Hasil	177.336	229.538	266.352	290.666	17,91
7	Belanja Bantuan Keuangan	123.189	249.799	58.531	172.925	11,97
8	Belanja Tidak Terduga	4.066	119	2.425	3.667	(3,39)
B	Belanja Langsung	577.432	735.008	887.581	1.208.010	27,90
1	Belanja Pegawai	76.255	59.173	66.105	79.095	1,23
2	Belanja Barang dan Jasa	241.916	313.732	359.444	545.847	31,16
3	Belanja Modal	259.261	362.103	462.032	583.068	31,02
	Total Belanja	1.245.441	1.641.357	1.657.404	2.241.045	21,63

Sumber : DPKD Provinsi

Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah belanja untuk aparatur, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, termasuk belanja untuk anggota DPRD dan Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Semakin tinggi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan belanja yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2007-2010 yang relatif baik sebagaimana di jelaskan di atas, kebijakan belanja aparatur juga menunjukkan kebijakan yang relatif baik. Hal ini juga ditunjukkan oleh realisasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur, dimana pada tahun 2007 berjumlah Rp 619.186 dan meningkat menjadi Rp.1.312.699

pada tahun 2010. Peningkatan yang lebih besar untuk belanja aparatur ini terutama adalah untuk belanja langsung; yang berhubungan untuk peningkatan kinerja aparatur, seperti belanja modal. Peningkatan belanja modal adalah 31,02 % sedangkan peningkatan belanja pegawai baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung adalah sebesar 15 % atau kurang.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		(Rp' Juta)				
A	Belanja Tidak Langsung	308.430	367.199	404.300	460.067	14,26
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	218.127	245.710	307.148	327.188	14,47
2	Belanja Tambahan Penghasilan	76.873	108.355	63.640	91.902	6,13
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	13.430	13.134	13.480	12.455	(2,48)
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah			20.031	28.522	
B	Belanja Langsung	310.756	421.276	693.588	852.632	40,00
1	Belanja Pegawai	51.495	59.173	66.105	79.095	15,38
2	Belanja Honorarium PNS	n.a	n.a	31.010	46.948	51,39
3	Belanja Uang Lembur	n.a	n.a	13.965	15.558	11,40
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	n.a	n.a	9.494	6.626	(30,21)
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	n.a	n.a	23.610	26.154	10,78
6	Belanja premi asuransi kesehatan	n.a	n.a	8.417	4.567	(45,74)
7	Belanja makanan dan minuman pegawai	n.a	n.a	31.919	38.578	20,86
8	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	n.a	n.a	3.300	3.300	-
9	Belanja Pakaian Kerja, Khusus dan Hari-hari Tertentu	n.a	n.a	1.221	1.209	(0,98)
10	Belanja perjalanan dinas	n.a	n.a	87.299	109.862	25,85
11	Belanja perjalanan pindah tugas	n.a	n.a	190	173	(8,87)
12	Belanja Pemulangan Pegawai	n.a	n.a	Na	na	Na
13	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	259.261	362.103	462.032	583.068	31,02
	TOTAL	619.186	788.475	1.097.888	1.312.699	28,46

Sumber : DPKD Provinsi

Berdasarkan hasil pengolahan data perbandingan antara belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan total belanja dan pembiayaan, terjadi sedikit fluktuasi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur antara tahun 2007-2010. Pada tahun 2007, proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur adalah

49,72 %, dan turun menjadi 48,04 % pada tahun 2008. Tetapi, pada tahun 2009 proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur meningkat kembali dan jauh lebih tinggi yaitu menjadi 66,24 % dan 58,58 % pada tahun 2010. Hal ini terutama terjadi karena adanya peningkatan belanja tidak langsung akibat peningkatan gaji dan jumlah pegawai serta peningkatan belanja modal untuk aparatur yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya karena Gempa 30 september 2009 maka jumlah belanja yang dapat direalisasikan pada tahun 2009 ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2008. Akibatnya, komposisi pemenuhan kebutuhan belanja aparatur mengalami peningkatan. Tabel 3.6 berikut menyajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel 3.6
Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2010

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur(Rp juta)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp juta)	Prosentase
1	TA 2007	619.186	1.245.441	49,72
2	TA 2008	788.475	1.641.357	48,04
3	TA 2009	1.097.888	1.657.404	66,24
4	TA 2010	1.312.699	2.241.045	58,58

Sumber : DPKD Provinsi

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah dana yang dapat digunakan untuk mengerakkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat relatif terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus dapat meningkatkan **Kualitas Belanja**, baik dari segi ketepatan kegiatan yang harus didanai untuk mencapai sasaran tertentu maupun menerapkan konsep *value for money* dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dicapai melalui tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga mampu menyusun perencanaan yang berkualitas dan penyusunan analisis standar belanja untuk kegiatan rutin serta menyusun standar harga yang lebih baik dan akurat.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 5 ayat 3 undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman

daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan dana pada masa datang.

Analisis terhadap pendapatan, belanja, dan pengeluaran pembiayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2010 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan belanja, termasuk pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus yang terjadi pada tahun 2007 relatif rendah, yaitu sebesar Rp 30.722 juta dan meningkat menjadi Rp 70.585 juta pada tahun 2008, dan menjadi Rp 360.590 juta pada tahun 2009. Surplus yang sangat besar pada tahun 2009 tidak hanya disebabkan tertundanya dan atau terkendalanya pelaksanaan banyak kegiatan karena Gempa 30 September 2009 tetapi juga disebabkan adanya penerimaan pajak daerah yang lebih besar daripada yang dianggarkan.

Akibat lebih lanjut dari surplus yang terjadi pada 3 tahun terakhir tersebut dan ditambah dengan dana SILPA pada tahun 2006 sebesar Rp 212.783 juta, maka jumlah SILPA yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat pada awal tahun 2010 berjumlah Rp 674.679. Akumulasi Surplus yang cukup besar tersebut telah dibelanjakan pada tahun 2010, sehingga jumlah belanja pada tahun 2010 lebih dari Rp 2,2 Triliun. Tabel 3.7 berikut memperlihatkan perkembangan Surplus Riil dan SILPA pada masing-masing tahun.

Tabel 3.7
Surplus (Defisit) Riil Anggaran Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2007 – 2010 (Rp juta)

NO	Uraian	TA 2007	TA 2008	TA 2009	TA 2010
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.281.400	1.727.424	2.026.241	1.918.052
	Dikurangi realisasi:				
2	Belanja Daerah	1.245.441	1.641.357	1.657.404	2.241.045
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.236	15.482	8.248	19.884
A	Surplus (Defisit) riil	30.722	70.585	360.590	(342.877)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	212.783	243.505	314.090	674.679
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	212.783	243.505	314.090	674.679
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	243.505	314.090	674.679	331.803

Sumber : DPKD Provinsi

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Pengeluaran mengikat bermakna pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Karena selama ini Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pinjaman, tidak ada dana cadangan, dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama terbatas pada belanja tidak langsung; gaji dan tunjangan, belanja Dewan dan Kepala Daerah, belanja bagi hasil, serta belanja langsung; Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, dan belanja jasa kantor.

Karena terjadinya peningkatan belanja yang cukup signifikan antara tahun 2007 dengan tahun 2008 akibat kenaikan gaji, maka analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama akan dilakukan berdasarkan pertumbuhan belanja yang terjadi antara tahun 2008-2010. Hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan jumlah yang cukup besar, yaitu Rp 579.236 pada tahun 2008 dan meningkat menjadi Rp 747.080 pada tahun 2010. Hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 13,57 %. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat minimal harus menyediakan dana sebesar jumlah tersebut di atas karena ikatan kerjasama yang telah disepakati sebelumnya.

Tabel 3.8
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Prov. Sumbar, tahun 2008– 2010

No	Uraian	2008	2009	2010	Pertumbuhan rata-rata (%)
		(Rp)			
A	Belanja Tidak Langsung	488.382	586.981	630.310	13,60
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	245.710	307.148	327.188	15,40
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	13.134	13.480	12.455	(2,62)
3	Belanja Bunga		-		
4	Belanja bagi hasil	229.538	266.352	290.666	12,53
B	Belanja Langsung	90.854	98.794	116.770	13,37
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	14.209	20.938	28.774	42,30
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		9.494	6.626	(30,21)
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	76.644	68.362	81.369	3,04
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
	TOTAL (A + B + C)	579.236	685.775	747.080	13,57

Sumber : DPKD Provinsi

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Karena evaluasi capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2011-2012 menunjukkan kondisi yang lebih baik, maka diperlukan revisi terhadap proyeksi pendapatan daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

Pada awalnya perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicapai Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2006-2010 serta perubahan peraturan yang berlaku khususnya tentang pajak dan retribusi daerah dan perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Perubahan peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui UU No. 28 tahun 2009, dengan mengizinkan pengenaan tarif

pajak progresif sehingga diperkirakan akan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Akan tetapi pengalihan wewenang pengelolaan pajak air tanah dari propinsi ke kota/kabupaten akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak daerah. Oleh sebab itu, diperkirakan pajak daerah akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2011, tetapi setelah itu hanya akan mengalami sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebelumnya, yaitu 5 % per tahun.

Retribusi daerah menunjukkan prestasi yang cukup baik dalam periode 2006 -2010, yaitu dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 17,08 %. Prestasi seperti ini harus dipertahankan pada masa datang. Namun karena adanya perubahan status Rumah Sakit Umum menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka terjadi perubahan klasifikasi pendapatan, yaitu dari retribusi daerah menjadi lain-lain PAD yang sah.

Secara umum, penerimaan retribusi daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut. Dengan demikian, kalau pun kemungkinan akan terjadi fluktuasi sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian daerah, namun secara rata-rata diperkirakan akan mampu mempertahankan prestasinya pada tingkat pertumbuhan 9,14 % per tahun sebagaimana pertumbuhan yang terjadi antara tahun 2009 dengan tahun 2010.

Pembenahan manajemen pengelolaan dari usaha-usaha milik daerah yang ada saat ini diperkirakan masih mampu memberikan kontribusi yang memadai. Jika pada tahun 2006 sampai tahun 2010 terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 16,32 %, tetapi antara tahun 2008 dengan tahun 2009 hanya sebesar 8,50 %. Berdasarkan hal tersebut maka proyeksi sampai tahun 2015 didasarkan perkiraan pesimis dengan pertumbuhan sama besarnya dengan tahun 2008-2009, yaitu 8,50 % pertahun. Dalam hal ini pemerintah daerah harus membuat kebijakan bahwa penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan ini dialokasikan kembali untuk pengembangan kapasitas pengembalian investasi daerah.

Sedangkan lain-lain PAD yang sah membutuhkan seseorang yang mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dia mampu menyusun perencanaan kas dengan baik sehingga kelebihan dana dalam periode tertentu dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah. Hal seperti ini telah dibuktikan oleh beberapa daerah yang mempunyai seorang Manajer Keuangan yang baik. Di samping itu, pada pos pendapatan ini juga terdapat sumber PAD yang berasal dari Rumah Sakit Umum yang berstatus BLUD. Oleh sebab itu, diperkirakan pendapatan daerah akan dapat ditingkatkan dari lain-lain PAD sebesar 5 % pertahun.

Pertumbuhan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak diperkirakan dapat ditingkatkan menjadi 10,32 % sejalan dengan perkiraan peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil bukan pajak dari tahun ke tahun sangat berfluktuasi, dengan standar deviasi yang cukup tinggi. Untuk periode 2006-2010 terjadi pertumbuhan bagi hasil bukan pajak sebesar minus 18,05 %. Namun pada masa datang diperkirakan dapat ditingkatkan tetap dapat dipertahankan yaitu 5,00 %. Hal ini dapat dilakukan di samping mengoptimalkan sumberdaya alam yang ada saat ini, juga meningkatkan penelitian untuk mendapatkan potensi pajak yang berasal dari sumberdaya alam lainnya.

Pertumbuhan dana alokasi umum antara tahun 2006-2010 adalah 8,52 %. Pertumbuhan yang sangat besar terjadi antara tahun 2005 sampai tahun 2007 yaitu rata-rata pertahun sebesar 48,58 %. Tetapi antara tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu menjadi 2,34 % pertahun. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah dalam pemekaran daerah sehingga pertumbuhan dana alokasi umum menjadi jauh lebih rendah. Kebijakan pemekaran seperti ini pada tahun-tahun mendatang akan diperketat sehingga diperkirakan jumlah dana alokasi umum yang diterima daerah akan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, untuk memproyeksikan pendapatan daerah yang berasal dari dana alokasi umum akan dilakukan berdasarkan data yang lebih logis yaitu antara tahun 2007 sampai tahun 2010.

Pertumbuhan pendapatan daerah yang berasal dari dana alokasi umum pada tahun 2007 – tahun 2010 adalah 6,59 %. Tingkat pertumbuhan 6,59 % ini lebih logis dan digunakan untuk memproyeksikan dana alokasi umum sampai tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi untuk sumber dana yang berasal dari dana alokasi khusus, yang diperkirakan mengalami pertumbuhan menjadi 5 %. Sedangkan sumber dana yang berasal dari hibah dan dana penyesuaian diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yang berarti.

Evaluasi kinerja pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat pada 2 tahun terakhir (tahun 2011 dan tahun 2012) menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan daerah sebesar 33,8 %, yaitu dari Rp. 2.183.959 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 2.922.607 juta pada tahun 2012. Besarnya peningkatan pendapatan ini terjadi karena penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat yang diakui atau diperlakukan sebagai bagian pendapatan hibah. Padahal setelah diterima, dana ini akan didistribusikan kembali kepada pemerintah kota/kabupaten. Dana BOS yang berjumlah Rp 543.900 juta hanya numpang lewat. Oleh sebab itu, pemberlakuan penerimaan Dana BOS ini sebagai Pendapatan Hibah dalam analisis kinerja adalah kurang tepat, karena tidak mencerminkan hal sesungguhnya atau dapat

dibelanjakan untuk tujuan lain.

Jika Pendapatan Hibah Dana BOS dikeluarkan dari perhitungan/ analisis, realisasi jumlah pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari Rp 2.183.959 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 2.378.641 juta pada tahun 2012; yang berarti meningkat sebesar Rp 194.682 juta. Peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 1.051 juta, sedangkan peningkatan jumlah pendapatan Dana Perimbangan berjumlah Rp 212.013 juta, yang terdiri dari peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berjumlah Rp 153.879 juta dan pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berjumlah Rp 66.366 juta. Dengan demikian, peningkatan jumlah PAD jauh lebih rendah daripada peningkatan jumlah pendapatan DAU dan Bagi Hasil Pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan realisasi PAD jauh lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan sumber pendapatan daerah lainnya. Dari segi capaian realisasi anggaran pendapatan, capaian kinerja PAD juga lebih rendah dibandingkan dengan dua sumber pendapatan daerah lainnya. Tabel 3.9 memperlihatkan perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan, serta tingkat capaian pada tahun 2011 dan tahun 2012.

Tabel 3.9
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – Tahun 2012 (Rp juta)

Uraian	Tahun 2011			Tahun 2012 *		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PENDAPATAN DAERAH	2,071,161	2,183,959	105.45	2,349,555	2,378,641	101.24
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,147,304	1,224,415	106.72	1,232,140	1,225,466	99.46
Pendapatan Pajak Daerah	933,800	983,602	105.33	990,319	994,570	100.43
Pendapatan Retribusi Daerah	32,331	41,698	128.97	33,897	38,055	112.26
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	80,603	80,453	99.81	88,879	80,349	90.40
Lain-lain PAD yang Syah	100,570	118,660	117.99	119,045	112,492	94.50
DANA PERIMBANGAN	897,641	931,883	103.81	1,107,390	1,143,896	103.30
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	92,227	126,468	137.13	156,329	192,835	123.35
Dana Alokasi Umum	764,681	764,681	100.00	918,560	918,560	100.00
Dana Alokasi Khusus	40,733	40,733	100.00	32,501	32,501	100.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	26,217	27,662	105.51	10,025	9,279	92.56
Pendapatan Hibah	7,381	9,012	122.10	9,290	8,544	91.97
Dana Penyesuaian	18,836	18,650		735	735	
Pendapatan Lainnya	-	-		-	-	

*) Tidak termasuk Dana BOS

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 (diolah)

Karena realisasi pendapatan daerah tahun 2011 dan tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi yang dibuat sebelumnya,

maka diperlukan revisi terhadap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan informasi capaian kinerja sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk konsistensi, dikarenakan penghitungan sebelumnya, yaitu untuk Tahun 2011 dan Tahun 2012 tidak memasukkan Dana BOS, maka untuk revisi proyeksi pendapatan tahun 2013, 2014 dan 2015 pun dihitung dengan tidak memasukkan Dana BOS.

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 – 2015 *)

NO.	URAIAN	TA 2011	TA 2012	TA 2013		TA 2014		TA 2015	
				Sebelum Revisi	Setelah Revisi	Sebelum Revisi	Setelah Revisi	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
				(Rp. Juta)					
	PENDAPATAN	1.986.576	2.106.241	2.233.479	2.585.214	2.368.798	2.828.241	2.512.743	3.110.525
A	Pendapatan Asli Daerah	1.086.756	1.144.541	1.205.516	1.303.622	1.269.868	1.368.500	1.337.793	1.445.822
1	Pajak daerah	911.8	957.39	1.005.260	1.055.932	1.055.522	1.067.706	1.108.299	1.079.611
2	Retribusi daerah	30.576	33.371	36.421	29.461	39.75	30.893	43.383	32.395
3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	62.322	67.619	73.367	91.45	79.603	113.826	86.369	141.677
4	Lain-lain PAD yang sah	82.058	86.161	90.469	126.78	94.992	156.075	99.742	192.139
B	Dana Perimbangan	894.605	956.224	1.022.213	1.271.802	1.092.894	1.449.591	1.168.612	1.654.180
1	Dana bagi hasil pajak	87.582	96.62	106.591	159.057	117.591	195.449	129.727	240.169
2	Dana bagi hasil bukan pajak	1.609	1.761	1.927	8	2.109	11.012	2.308	15.158
3	Dana alokasi umum	764.681	815.073	868.787	1.039.923	926.04	1.169.724	987.066	1.315.727
4	Dana alokasi khusus	40.733	42.77	44.908	64.823	47.154	73.406	49.512	83.126
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.215	5.476	5.75	9.79	6.037	10.15	6.339	10.524
1	Hibah	5.215	5.476	5.75	9.79	6.037	10.15	6.339	10.524
2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Proyeksi pendapatan tidak termasuk dana BOS

Berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2011 dan tahun 2012, maka revisi proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2013 berjumlah Rp 2.585,14 juta, meningkat menjadi Rp 2.828.241 juta pada tahun 2014, dan menjadi Rp 3.110.525 juta pada tahun 2015. Hasil perhitungan proyeksi pendapatan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011-2015 sebelum dan setelah revisi dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Analisis kapasitas riil keuangan daerah dilakukan berdasarkan perhitungan selisih antara jumlah pendapatan daerah dikurangkan dengan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Karena proyeksi pendapatan daerah telah dilakukan sebagaimana yang dapat dijelaskan di atas, maka langkah berikutnya adalah memproyeksikan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berdasarkan

tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 13,57 % sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab 3.3.1. Hasil perhitungan selisih total pendapatan daerah dengan jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Evaluasi terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak jauh berbeda dibandingkan hasil proyeksi sebelum revisi belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Oleh sebab itu, tidak perlu dilakukan revisi terhadap proyeksi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tahun 2013-2015. Dengan demikian jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sebelum revisi dan setelah revisi adalah sama.

Jika pada awal tahun 2011 masih tersedia SILPA sebesar Rp 331.803 juta dan pada tahun-tahun berikutnya juga masih terjadi SILPA karena jumlah belanja langsung yang menjadi prioritas Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada tabel 8.1 dan juga perkiraan belanja tidak langsung belum menghabiskan seluruh perkiraan pendapatan yang dihasilkan. Dengan demikian, penambahan SILPA ini mengakibatkan hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi yang lebih tinggi.

Akibat peningkatan revisi proyeksi pendapatan dan adanya SILPA pada awal tahun 2013, maka kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2013 menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelum revisi. Jika sebelum revisi kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2013 berjumlah Rp 1.139.178 Juta dan meningkat menjadi Rp 1.655.483 Juta setelah revisi. Dengan kata lain terjadi peningkatan kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp 516.305 juta setelah dilakukan revisi. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 juga terjadi peningkatan kapasitas riil keuangan daerah sebelum dengan setelah revisi, masing-masing sebesar Rp 459.443 juta pada tahun 2014, yaitu dari Rp 1.126.020 juta menjadi Rp 1.585.463 juta, serta sebesar Rp 597.782 pada tahun 2015, yaitu dari Rp 1.101.340 juta menjadi Rp 1.699.122 juta.

Perhitungan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mempertimbangkan hanya belanja tidak langsung Gaji dan tunjangan serta Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga, dan Belanja Bagi Hasil sebagai pengurang pendapatan. Hasil perhitungan ini menggambarkan total sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan atau seluruh belanja langsung. Hasil perhitungan setelah revisi menunjukkan sumber dana menurut perhitungan ini berjumlah Rp 1.989.676 juta pada tahun 2014 dan Rp 1.939.976 juta pada tahun 2015. Rincian perkembangan dan atau revisi kapasitas riil keuangan daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat,
tahun 2011 - tahun 2015

NO.	URAIAN	TA 2011	TA 2012	TA 2013		TA 2014		TA 2015	
				Sebelum Revisi	Setelah Revisi	Sebelum Revisi	Setelah Revisi	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
				(Rp. Juta)					
1	Pendapatan	1.986.576	2.106.241	2.233.479	2.585.214	2.368.798	2.828.241	2.512.743	3.110.525
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)								
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	331.803	317.192		164.57		211.324		221.77
	Total penerimaan	2.318.379	2.423.433	2.233.479	2.749.784	2.368.798	3.039.565	2.512.743	3.132.702
	Dikurangi:								
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	848.444	963.562	1.094.301	1.094.301	1.242.778	1.242.778	1.411.403	1.411.403
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (Sesuai Permendagri 54/2010)	1.469.934	1.459.871	1.139.178	1.655.483	1.126.020	1.796.787	1.101.340	1.721.299
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (Pendapatan - Belanja Tidak Langsung); Untuk Menutupi Belanja Langsung dan Belanja Transfer	1.602.316	1.609.949	1.309.321	1.825.626	1.318.909	1.989.676	1.320.017	1.939.976

Kapasitas riil kemampuan keuangan dihitung di luar Pendapatan dan Belanja Dana Bos

Berdasarkan tabel 3.11, dapat pula disusun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011-2015. Sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010, penggunaan kapasitas riil tersebut terutama diprioritaskan untuk belanja langsung guna melaksanakan program kerja yang menjadi prioritas utama Provinsi Sumatera Barat. Belanja langsung yang menjadi prioritas utama ini akan disusun berdasarkan urusan seperti dapat dilihat pada tabel 8.1. Pada tahun 2011, jumlah belanja langsung yang menjadi prioritas utama berjumlah Rp 781.091 juta, dan pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menjadi Rp 1.052.454 juta pada tahun 2012, menjadi Rp 1.194.268 juta pada tahun 2013, menjadi Rp 1.375.436 juta pada tahun 2014, serta menjadi Rp 1.562.042 juta pada tahun 2015.

Di samping belanja langsung dan menjadi prioritas utama sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga dibutuhkan belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Proyeksi kebutuhan belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat ini didasarkan pada tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun selama 3 tahun seperti terlihat pada tabel 3.8, yaitu sebesar 13,37 %.

Setelah dilakukan perhitungan, jumlah belanja langsung bersifat wajib dan mengikat diperkirakan meningkat menjadi Rp 132.381 juta pada tahun 2011, menjadi Rp 150.079 juta pada tahun 2012, menjadi Rp 179.143 juta pada tahun 2013, menjadi Rp 192.889 juta pada tahun 2014, dan menjadi Rp 218.676 pada tahun 2015.

Belanja yang menjadi prioritas berikutnya bagi Provinsi Sumatera Barat adalah untuk membiayai pengeluaran belanja tidak langsung. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa dalam analisis revisi analisis aspek pendanaan ini tidak dimasukkan belanja hibah untuk penyaluran Dana BOS. Dalam pembahasan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini pun juga tidak dimasukkan sumber dan penggunaan dana BOS. Proyeksi belanja tidak langsung dilakukan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010-2012. Penggunaan 3 tahun terakhir ini untuk proyeksi didasarkan asumsi perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan belanja tidak langsung khususnya besarnya gaji PNS lebih tercermin dari data 3 tahun terakhir dan juga adanya kebijakan yang lebih ketat dari Gubernur Sumatera Barat dalam mengimplementasikan kebijakan belanja bagi hasil.

Sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010, perhitungan proyeksi belanja tidak langsung juga mempertimbangkan belanja wajib dan mengikat sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Seperti dapat dilihat pada tabel 3.8 di atas, belanja tidak langsung wajib dan mengikat yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga, dan Belanja Bagi Hasil. Oleh sebab itu, belanja tidak langsung wajib dan mengikat pun di proyeksi sesuai dengan pertumbuhan rata-rata pertahun, yaitu sebesar 13,60 %. Proyeksi belanja tidak langsung wajib dan mengikat ini akan menjadi pengurangan terhadap jumlah hasil proyeksi belanja tidak langsung secara keseluruhan.

Hasil perhitungan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diperoleh selama tahun 2011-2015 dapat menutupi seluruh kebutuhan dana untuk menggerakkan pembangunan yang direncanakan oleh Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, ada kecendrungan jumlah pendapatan daerah sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Akibatnya, dari tahun ke tahun terjadi pengurangan jumlah SILPA; mulai Rp 317.192 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 24.921 juta pada tahun 2015. Secara lebih rinci, hasil perhitungan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat, tahun 2011 - tahun 2015

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.469.934	1.459.871	1.655.483	1.585.463	1.699.122
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung *)	913.472	1.202.533	1.364.411	1.568.325	1.780.719
II.b	Pembentukan dana cadangan					
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	132.381	150.079	170.143	192.889	218.676
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama					
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a + II.b - II.c - II.d)	781.091	1.052.454	1.194.268	1.375.436	1.562.042
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	688.843	407.417	461.214	210.027	137.080
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	1.087.715	1.056.330	1.174.048	1.237.739	1.304.885
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	716.063	813.484	924.158	1.049.889	1.192.726
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a - III.b)	371.651	242.847	249.891	187.850	112.159
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	317.192	164.570	211.324	22.177	24.921

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pada dasarnya adalah menyangkut dengan unsur dan aspek yang sangat penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat kedepan. Karakteristik isu-isu strategis adalah kondisi yang mendasar, berjangka panjang dan mendesak dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan daerah baik pada waktu sekarang maupun dimasa mendatang. Ini berarti bahwa, apabila isu-isu strategis ini tidak diantisipasi secara baik, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis mencakup berbagai aspek pembangunan daerah yang meliputi bidang agama dan budaya ekonomi, sosial dan fisik prasarana. Sedangkan tantangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa yang lebih baik. Kesemua aspek ini akan dihadapi dan harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan pembangunan daerah Sumatera Barat dimasa depan yang lebih baik dan diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini juga merupakan bagian penting dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan visi, misi, arah dan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 tahun mendatang.

4.1 PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pembangunan daerah di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa bidang yaitu ekonomi, sosial-budaya dan fisik prasarana. Kendala dan tantangan bidang ekonomi menyangkut dengan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mendorong proses pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kemakmuran daerah. Tantang bidang sosial menyangkut dengan kendala dan permasalahan dalam bidang sosial yang perlu segera dipecahkan untuk dapat mewujudkan kondisi sosial yang sejahtera dan harmonis dalam masyarakat. Sedangkan kendala dan tantangan bidang fisik prasarana adalah berbagai permasalahan pokok yang harus segera

ditanggulangi untuk dapat mendorong proses pembangunan wilayah secara terarah dan berkelanjutan.

Permasalahan pokok pembangunan daerah yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat dewasa ini antara lain adalah sebagai berikut:

Telah terjadi pergeseran nilai sehingga terjadi ketidakselarasan antara tingkah laku masyarakat dengan hukum dan kaedah yang terdapat dalam ajaran agama, baik Islam maupun agama lainnya. Sudah menjadi kenyataan umum dalam masyarakat bahwa apa yang dilarang dalam agama justru dianggap hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada umumnya agama melarang umatnya menipu dan mencuri, tetapi dalam kenyataannya korupsi dan penipuan menjadi hal yang banyak terjadi dalam masyarakat. Akibatnya bagi proses pembangunan daerah adalah banyak sekali upaya-upaya pembangunan yang sebenarnya sangat baik yang telah direncanakan tetapi ternyata belum dapat diraih manfaatnya semaksimal mungkin untuk peningkatan proses pembangunan daerah dan penciptaan keadilan dalam masyarakat.

2. Adanya kondisi geografis dan posisi Sumatera Barat yang kurang strategis bagi pengembangan ekonomi daerah. Kondisi geografis daerah di Sumatera Barat adalah berbukit-bukit sehingga biaya angkutan barang menjadi relatif tinggi sehingga menimbulkan kendala bagi pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Sementara itu, Sumatera Barat juga mempunyai hutan lindung yang cukup luas sehingga lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan pertambangan juga sangat terbatas. Selain itu, letak daerah yang berada di pantai Barat pulau Sumatera ternyata membelakangi pusat kegiatan ekonomi dunia, yaitu Singapura, Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan China, yang semuanya berada di Timur. Akibatnya sinergi antar perekonomian Sumatera Barat dengan negara-negara maju menjadi sangat lemah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah juga cenderung menjadi lambat.
3. Kondisi prasarana dan sarana, terutama berkaitan dengan sektor perhubungan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat ternyata juga belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Kondisi ini semakin diperburuk dengan sering terjadinya bencana alam (longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami). Akibatnya kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dan pembangunan daerah umumnya mengalami kendala yang cukup besar dalam meningkatkan aktifitasnya sehingga peningkatan kegiatan ekonomi dan kemakmuran daerah belum dapat terwujud sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.
4. Kemampuan penerapan IPTEK daerah yang masih sangat rendah

sehingga kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia menjadi sangat terbatas. Disamping itu, IPTEK yang rendah juga mengakibatkan mutu dan kualitas produk yang dapat dihasilkan dan kemampuan untuk menghasilkan produk baru menjadi relatif kurang. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi produksi yang masih tradisional dan belum berkembangnya kegiatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) pada dunia usaha. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan masih rendahnya daya saing produk yang dapat dihasilkan daerah sehingga menimbulkan kendala sangat serius dalam mengembangkan kegiatan ekonomi daerah. Kendala ini menjadi semakin serius dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dimana tingkat persaingan menjadi sangat tajam

5. Masih relatif rendahnya efisiensi kegiatan produksi dan pemasaran produk sebagai akibat dari kegiatan produksi yang umumnya mempunyai skala kecil dan dikelola dengan pola manajemen tradisional yang kurang efisien sehingga harga jual dipasaran relatif tinggi. Faktor penyebab kurang efisiennya kegiatan produksi adalah karena relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja, potensi sumberdaya alam yang terbatas dan relatif tinggi ongkos transport sebagai akibat dari kondisi geografis yang umumnya berbukit-bukit. Rendahnya daya saing produk daerah ini menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan bisnis dan ekspor serta kurang menariknya melakukan investasi di Sumatera Barat.
6. Masyarakat Sumatera Barat yang menganut budaya Minangkabau memiliki tanah ulayat cukup luas yang dimiliki oleh kaum. Permasalahan yang dihadapi adalah tanah ulayat yang dimiliki tidak mempunyai kepastian hukum, karena tidak mempunyai bukti kepemilikan serta batas-batas tanah yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan tanah ulayat sulit untuk mendukung kegiatan usaha dan guna menarik investor menjadi sangat terbatas sehingga manfaat ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat tersebut belum dapat diperoleh secara maksimal untuk mendorong kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
7. Walaupun proses pembangunan daerah secara terencana telah berjalan sejak dimulainya pelaksanaan *Rencana Pembangunan Lima Tahun* (REPELITA) tahun 1969 yang lalu, namun demikian sampai saat ini, permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi tetap merupakan permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini. Namun demikian selama 5 tahun terakhir telah terabaikan perbaikan yang cukup signifikan. Kondisi ini terlihat dari perkembangan persentase penduduk menganggur

yang mencapai 13,34 % pada tahun 2005 dan menurun menjadi 7,90 % pada tahun 2009. Sedangkan perkembangan tingkat kemiskinan juga memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan dari 12,07 % pada tahun 2006 menjadi 9,54 % pada tahun 2009. Pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat masih belum dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan. Karena itu, pengangguran dan kemiskinan masih tetap sebagai salah satu permasalahan pokok dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, Sumatera Barat sampai saat ini masih mempunyai 8 kabupaten daerah tertinggal yang perlu segera ditanggulangi.

8. Permasalahan dan sekaligus ancaman serius yang dialami oleh Sumatera Barat adalah bahwa daerah ini ternyata sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan tsunami. Bencana alam ini sudah sering terjadi dan yang paling serius akibatnya adalah gempa besar 7,9 skala Richter yang terjadi di daerah Pariaman pada tanggal 30 September tahun 2009 yang lalu yang menelan korban sebanyak 1,200 orang dan ratusan bangunan runtuh dan rusak berat. Akibat negatifnya sangat dirasakan terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah karena dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
9. Permasalahan dan ancaman lainnya yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah dalam bentuk peningkatan persaingan sebagai akibat dari adanya globalisasi dan pelaksanaan *Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN (CAFTA)* yang secara resmi mulai berlaku tahun 2010. Sejalan dengan hal tersebut telah disepakati pula oleh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk melaksanakan perdagangan bebas pada tahun 2020 mendatang. Peningkatan persaingan ini segera akan menjadi permasalahan dan tantangan yang sangat serius dan bahkan menjadi ancaman karena daya saing produk yang dapat dihasilkan oleh daerah Sumatera Barat sampai saat ini umumnya masih rendah yang terjadi sebagai cerminan dari rendahnya tingkat efisiensi sehingga biaya produksi rata-rata masih relatif tinggi. Disamping itu penggunaan teknologi untuk kegiatan produksi yang belum maju sehingga kualitas produk yang dapat dihasilkan umumnya masih relatif rendah.
10. Permasalahan pengembangan Sumatera Barat selain karena kondisi fisik juga adanya kesenjangan perkembangan antara wilayah utara dengan wilayah selatan, seperti: (1) adanya disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan, sehingga wilayah selatan (Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Pesisir Selatan) relatif kurang berkembang dibandingkan wilayah utara (2) Terdapatnya karakteristik alam yang berbukit dan bergunung,

dimana dari luas Provinsi Sumatera Barat 4.229.721 Ha, lahan dengan kelerengan lebih dari 40 % mencapai proporsi 39,03 % dari luas wilayah provinsi, kawasan non hutan hanya 38,54 % dan luas kawasan budidaya 54,83 %, belum optimalnya pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam yang ada di Provinsi Sumatera Barat, pusat-pusat pertumbuhan yang ada belum mampu menciptakan rembesan kepada wilayah-wilayah belakangnya, masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

11. Permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat saat ini sampai beberapa tahun ke depan adalah terbatasnya kesempatan kerja, hal ini disebabkan karena pertambahan jumlah angkatan kerja baru tidak diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Akibatnya adalah lapangan pekerjaan yang terbatas harus diperebutkan oleh warga Provinsi Sumatera Barat dengan warga daerah sekitarnya.
12. Masalah utama kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat terutama masalah kekurangan, adalah sebesar 15.7 %. Hal ini merupakan permasalahan kesehatan yang sudah dianggap Kritis. Dari 19 Kabupaten / Kota, hanya Padang Panjang dan Kota Bukittinggi yang prevalensi kekurangan dibawah 10 %. Ada 7 Kabupaten / Kota yang menjadi permasalahan kesehatan yang serius yaitu: Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman, Payakumbuh, Kota Pariaman, Padang dan Sawahlunto, Kota Solok. Disamping itu yang ada 10 Kabupaten / Kota yang kritis, prevalensi diatas 15 % yaitu Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Koto, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu negara atau daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Isu-isu pembangunan pokok pembangunan daerah dan bersifat strategis yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat dewasa ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman Agama dan Budaya

Isu strategis dibidang sosial budaya utama Sumatera Barat adalah pemahaman akan agama dan budaya dalam masyarakat yang dapat

memberikan arah dan bimbingan terhadap pelaksanaan proses pembangunan daerah merupakan kekuatan utama yang terdapat dalam masyarakat. Aspek ini perlu diberikan tekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Sumatera Barat sebagai provinsi terkemuka berbasis sumberdaya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang;

2. *Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik*

Pengalaman masa lalu di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa tata-pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Karena itu, upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat. Perbaikan tata-pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 tahun mendatang;

3. *Pelaksanaan Otonomi Daerah*

Isu strategis lainnya yang juga cukup menentukan masa depan pembangunan adalah dilaksanakannya otonomi daerah sehingga kewenangan dan peranan pemerintah daerah dalam menggerakkan proses pembangunan daerah menjadi semakin besar. Hal ini sangat penting artinya untuk dapat mendorong aspirasi, inisiatif dan kreasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya pembangunan yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat;

4. *Kualitas Sumberdaya Manusia*

Sejalan dengan hal tersebut, pengalaman di masa lalu menunjukkan pula bahwa kualitas sumberdaya manusia yang terdapat di Sumatera Barat adalah relatif baik. Kondisi ini tercermin dari perkembangan *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) yang sudah cukup baik yang didalamnya mencakup pendapatan, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan (lihat Tabel 4.1. Kualitas sumberdaya yang relatif baik akan dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk dapat proses pembangunan daerah berbasis sumberdaya manusia dalam rangka proses pembangunan daerah yang berlandaskan pada IPTEK. Karena itu, unsur kualitas sumberdaya manusia ini juga dapat diberikan

perhatian yang cukup tinggi dalam analisis faktor strategis sebagai faktor penggerak pembangunan daerah;

5. Kemampuan Wirausaha

Disamping itu, kenyataan menunjukkan pula bahwa masyarakat Sumatera Barat sampai saat ini terkenal mempunyai jiwa dan semangat wirausaha (*Entrepreneurship*) yang cukup tinggi dan ulet. Kondisi tersebut ditandai dengan banyaknya anggota masyarakat yang bergerak dan sukses dalam bidang perdagangan, industri dan jasa walaupun umumnya masih dalam skala kecil dan menengah (UKM). Semangat kewirausahaan ini merupakan modal dasar yang sangat penting dan perlu terus dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah ke depan pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah Sumatera Barat;

6. Daya Beli Masyarakat

Isu strategis berikutnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya kebutuhan dan daya beli masyarakat daerah sebagai hasil dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Peningkatan kebutuhan dan daya beli tersebut dapat pula memicu peningkatan permintaan efektif yang dapat mendorong kegiatan investasi masuk ke daerah. Peningkatan kegiatan investasi ini selanjutnya akan mendorong pula peningkatan penyediaan lapangan kerja dan sumber penghasilan masyarakat dan pemerintah daerah;

7. Daya Saing Daerah Untuk Menghadapai Globalisasi

Proses globalisasi kelihatannya sudah menjadi kenyataan umum yang tidak dapat lagi ditolak. Untuk kawasan ASEAN dimana Indonesia termasuk di dalamnya, proses globalisasi tersebut telah berjalan dengan dimulainya pelaksanaan *Asean Free Trade Area* (AFTA) sejak tahun 2003 yang lalu dan akan dikembangkan tahun 2010 dengan masuknya China ke dalamnya. Sedangkan Untuk kawasan Asia-Pasifik akan dimulai pada tahun 2020 mendatang. Kondisi ini dapat merupakan masalah dan kendala bagi pengembangan kegiatan ekonomi daerah, tetapi sekaligus juga adalah peluang untuk peningkatan hubungan ekonomi internasional. Isu strategis dalam hal ini adalah peningkatan daya saing komoditi produksi daerah sehingga dapat menembus pasaran dunia sehingga volume perdagangan internasional akan dapat ditingkatkan. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka perekonomian daerah otomatis juga akan meningkat sehingga penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan juga akan dapat diperbaiki;

8. Akses Dengan Daerah Tetangga

Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas yang sangat tinggi dengan semakin berkembang pembangunan di Provinsi Riau dan selesainya pembangunan *Fly Over* Kelok Sembilan, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan untuk membangun jalan dua jalur dari Padang sampai ke Kota Payakumbuh. Pembangunan Jalan 2 jalur ini dari Batas Kota Padang sampai dengan batas Kota Payakumbuh. Rencana perbaikan dan pelebaran jalan tersebut merupakan isu strategis yang cukup penting dan dapat menjadikan hubungan ekonomi dan sosial antara Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau dan sebaliknya akan semakin lancar dan hal ini akan membawa pengaruh besar terhadap pembangunan daerah Sumatera Barat. Perkembangan masa depan yang akan muncul adalah semakin banyaknya arus lalu lintas barang dan orang, baik yang masuk maupun yang ke luar dari Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau yang pertumbuhan ekonominya sejak 10 tahun terakhir ternyata sangat pesat;

9. Prasarana dan Sarana Daerah

Pembangunan bandar udara Minangkabau, Perluasan pelabuhan Teluk Bayur dan pengembangan prasarana dan sarana perhubungan juga diperkirakan merupakan isu strategis yang cukup penting bagi peningkatan peranan Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dikawasan pantai Barat Sumatera. Dengan adanya perluasan ini selanjutnya juga akan dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi daerah yang terkait dengan provinsi kabupaten dan kota daerah tetangga yang berada di pantai Barat Pulau Sumatera. Disamping itu, melalui pengembangan bandar udara dan pelabuhan ini diperkirakan akan dapat pula mendorong pengembangan kegiatan **ekspor daerah**;

10. Dukungan Pemerintah Nasional

Isu strategis berikutnya yang masih tetap mendapatkan dukungan dan bantuan pemerintah nasional terhadap kegiatan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dukungan dan bantuan ini ditunjukkan dari masih cukup besarnya perhatian dan tanggung jawab serta dana dekonsentrasi (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan program dan kegiatan berskala besar yang berlokasi di daerah Sumatera Barat. Dana dekonsentrasi yang cukup besar ini perlu terus disinergikan dengan dana APBD Sumatera Barat sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal untuk meningkatkan kegiatan pembangunan daerah;

11. Daerah Tertinggal dan Ketimpangan Pembangunan

Untuk mengatasi disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan (Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Pesisir Selatan) perlu mengoptimalkan pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam yang ada di Provinsi Sumatera Barat, menciptakan rembesan pusat-pusat pertumbuhan kepada wilayah-wilayah belakangnya, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk mengentaskan daerah tertinggal diperlukan peningkatan akses transportasi yang menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah lainnya serta kegiatan-kegiatan sarana prasarana sosial ekonomi pada daerah tertinggal;

12. Bencana Alam

Lebih dari 50 % luas Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang mempunyai zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan menengah. Kawasan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat tersebar di seluruh wilayah terutama pada sepanjang jalur sesar aktif (patahan semangka). Isu strategis dalam hal ini adalah menyediakan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

13. Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk penjagaan terhadap kualitas lingkungan hidup. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Karena peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan isu strategi yang juga sangat penting dalam proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Termasuk dalam isu strategis ini adalah: penjagaan daerah konservasi dan hutan lindung, pengawasan eksploitasi sumberdaya alam, pengawasan pencemaran udara, sungai dan laut, peningkatan kebersihan kota dan lain-lainnya.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, adalah rencana pelaksanaan tahap ke dua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 adalah "Menjadi Provinsi Berkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025".

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan pula 5 misi utama pembangunan daerah, meliputi: 1) Mewujudkan Kehidupan Agama dan Budaya Berdasarkan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; 2) Mewujudkan Sistem Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik; 3) Mewujudkan Sumberdaya Insani yang Berkualitas, Amanah dan Berdaya Saing Tinggi; 4) Mewujudkan Ekonomi Produktif dan Mampu Bersaing di Dunia Global; 5) Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan.

Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJM ke 2 ini secara umum ditujukan untuk terwujudnya pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan dan jasa. Kondisi pemerintahan yang baik yang telah ditekankan pada RPJM ke 1 akan terus disempurnakan sehingga akan mempercepat proses pembangunan sektor pertanian yang modern. Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk barang dan jasa Sumatera Barat sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian akan dapat dikurangi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan akan semakin membaik. Pada periode ini diharapkan pengembangan sektor pariwisata sudah semakin kondusif karena kesejahteraan masyarakat telah membaik ditunjukkan dengan tingkat pendidikan, kesehatan, disiplin atau keteraturan, kebersihan dan lain-lain. Disamping itu, pada periode ini juga diharapkan penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju di bidang pertanian sudah semakin meningkat dengan didorongnya upaya penguasaan teknologi maju melalui revitalisasi penyuluh pertanian dan pengelola usaha jasa.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran ringkas visi, misi dan agenda pembangunan nasional.

Visi Indonesia dalam RPJMN Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Sejahtera mencerminkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi mencerminkan terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan keadilan. Mencerminkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Sedangkan Misi Pembangunan Nasional adalah: 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) Memperkuat pilar demokrasi, dan 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Visi dan Misi pemerintah Tahun 2010-2014 dijabarkan lebih operasional ke dalam sebelas Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional tersebut diatas, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah:

***Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil,
Sejahtera dan Bermartabat***

Masyarakat *Madani* yang dimaksudkan disini adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta

selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan spiritual

Adil yang dimaksudkan disini adalah suatu kondisi masyarakat yang dapat menjaga kebutuhan, kepentingan dan hak seluruh anggota masyarakat sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran. Karena itu dalam suatu masyarakat yang adil akan terdapat tingkat kesejahteraan yang relatif merata, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha, mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, pemerintahan sudah berjalan secara demokratis, taat dan sadar hukum, terdapatnya kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender), serta adanya jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia lanjut.

Sejahtera dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Bermartabat dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat dimana hak azasi manusia sudah terjamin dengan baik, bebas dari tekanan dan rasa takut dan mendapat perlindungan hukum yang cukup dari negara. Dengan demikian masyarakat yang bermartabat adalah suatu masyarakat yang taat azas, dihormati, mempunyai harga diri dan kedudukan yang sama dalam pergaulan masyarakat baik nasional maupun internasional.

5.2 MISI

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan oleh masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan terdahulu. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan daerah dalam RPJP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut: Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"; Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik; Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi; Mewujudkan ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global; dan Mewujudkan kualitas lingkungan hidup

yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";**
- 2. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;**
- 3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi;**
- 4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global;**
- 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Misi untuk mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

Misi untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari *Korupsi*, *Kolusi* dan *Nepotisme* (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya

manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (IPTEK) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

Misi untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Misi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

5.3.1. Tujuan Pembangunan

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2010-2015 adalah:

Tujuan Misi 1 adalah:

1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais
2. Diwarisinya dan diamalkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya

3. Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat

Tujuan Misi 2 adalah:

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif

Tujuan Misi 3 adalah:

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang sehat

Tujuan Misi 4 adalah:

1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis
2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi
3. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya
4. Berkurangnya penduduk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal
5. Terpenuhinya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat

Tujuan Misi 5 adalah:

1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana
2. Tercapainya lingkungan hidup yang ber kualitas

5.3.2. Sasaran Pembangunan

1. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi pertama adalah:
 - a) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama,
 - b) Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama,
 - c) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya,
 - d) Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya,
 - e) Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.
2. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kedua adalah:
 - a) Meningkatnya efektivitas peraturan daerah,
 - b) Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan,
 - c) Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif,
 - d) Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM,
 - e) Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu,
 - f) Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik,
 - g) Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu,
 - h) Meningkatnya kemampuan

pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan, i) Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, j) Meningkatnya kompetensi aparatur daerah, k) Meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja, l) Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, m) Berkurangnya temuan audit inspektorat, n) Terselenggaranya penata usahaan kearsipan secara efektif dan efisien, o) Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan, p) Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan

3. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ketiga adalah: a) Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD, b) Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar, c) Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah, d) Meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan, e) Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, f) Meningkatnya prestasi olah raga, g) Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan, h) Meningkatnya kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan, i) Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat, j) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, k) Meningkatnya umur harapan hidup, l) Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang, m) Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender, n) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.
4. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi keempat adalah: a) Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; b) Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing); c) Meningkatnya kesejahteraan petani, d) Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah; e) Meningkatnya serapan tenaga kerja pada industri olahan; f) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; g) Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan; h) Meningkatnya ekspor daerah; i) Meningkatnya investasi daerah; j) Berkembangnya wisata seni dan budaya; k) Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik; l) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; m) Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); n) Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial; o) Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya; p) Menurunnya tingkat kemiskinan; q) Meningkatnya akses menuju

daerah tertinggal; r) Meningkatnya sarana prasarana pada daerah tertinggal; s) Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal; t) Meningkatnya kualitas SDM pada daerah tertinggal; u) Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan; v) Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat; w) Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang; x) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air; y) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara; z) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.

5. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kelima adalah:
- a) Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - b) Tersedianya informasi wilayah rawan bencana;
 - c) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
 - e) Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem;
 - f) Menurunnya jumlah illegal logging

Hubungan hirarkhis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Hubungan Hirarkhis Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah"	1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais	1. <i>Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama</i> 2. <i>Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama</i>
	2. Diwarisinya dan diamalkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya	1. <i>Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya</i> 2. <i>Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya</i> 3. <i>Berkembangnya lembaga seni dan sosial budaya</i>
	Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat	1. <i>Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat</i>
Misi 2: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional	a. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel	1. <i>Meningkatnya efektivitas peraturan daerah</i> 2. <i>Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan</i> 3. <i>Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif</i> 4. <i>Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM</i> - <i>Meningkatnya perlindungan Hukum dan HAM</i>
	b. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	1. <i>Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu</i> 2. <i>Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik</i> 3. <i>Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu</i> 4. <i>Meningkatnya kemampuan pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan</i> 5. <i>Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i> - <i>Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu</i> - <i>Meningkatnya kompetensi aparatur daerah</i>
	c. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN	1. <i>Meningkatnya kompetensi aparatur daerah</i> 2. <i>Meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja</i> 3. <i>Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>

MISI	TUJUAN	SASARAN
		4. Berkurangnya temuan audit inspektorat 5. Terselenggaranya penata usahaan kearsipan secara efektif dan efisien - <i>Berkurangnya temuan audit yang bernuansa KKN</i>
	d. Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif	1. <i>Meningkatnya efektivitas (kualitas) perencanaan pembangunan</i> 2. <i>Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan</i>
Misi 3: Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi	1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter	1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD 2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar 3. Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah 4. Meningkatkan SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan 5. Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. <i>Meningkatnya prestasi olah raga</i> 7. Meningkatkan peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan 8. Meningkatkan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan 9. <i>Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat</i> - <i>Meningkatnya SDM yang unggul dan mutu pendidikan</i>
	2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang sehat	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak 2. <i>Meningkatnya umur harapan hidup (meningkatkan derajat kesehatan masyarakat)</i> 3. <i>Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang (meningkatkan derajat kesehatan masyarakat)</i> 4. <i>Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender</i> 5. <i>Menurunnya laju pertumbuhan penduduk</i>
Misi 4: Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global	1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis	1. <i>Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</i> 2. Meningkatkan jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 3. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing) 4. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan
	2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi	1. <i>Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah</i> 2. Meningkatkan serapan tenaga kerja pada industri olahan 3. <i>Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi</i> 4. <i>Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan</i> 5. <i>Meningkatnya ekspor daerah</i> 6. <i>Meningkatnya investasi daerah</i>
	3. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya	1. Berkembangnya wisata seni dan budaya 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik 3. <i>Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara</i>
	4. Berkurangnya penduduk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal	1. Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial 3. Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya 4. <i>Menurunnya tingkat kemiskinan</i> 5. Meningkatkan akses menuju daerah tertinggal 6. Meningkatkan sarana prasarana pada daerah tertinggal 7. <i>Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal</i> 8. Meningkatkan kualitas SDM pada daerah tertinggal - <i>Berkurangnya daerah tertinggal</i>
	5. Terpenuhinya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan 2. Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat 3. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang 4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air 5. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara

MISI	TUJUAN	SASARAN
		6. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik - <i>Meningkatnya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat</i>
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	1. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana 2. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana 3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana - <i>Meningkatnya pengurangan resiko bencana, dan pemulihan kawasan/ daerah pasca bencana</i> - <i>Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana</i> - <i>Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana</i>
	2. Tercapainya lingkungan hidup yang ber kualitas	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 2. <i>Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem</i> 3. Menurunnya jumlah illegal logging - <i>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup</i> - <i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i>

**TARGET INDIKATOR KINERJA RPJMD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 – 2015**

VISI Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat					
RPJMD 2010 – 2015			TARGET		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2014	2015	SKPD Penang-gung Jawab
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan yang Harmonis, Agamais, Beradat dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah ABS-SBK					
1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. Jumlah konflik dalam masyarakat bernuansa SARA	2	1	Kesbang Pol
		2. Persentase peningkatan zakat /wakaf/ infak/sedekah yang disalurkan melalui badan amil zakat/wakaf /infak/ sedekah resmi	10	12	Biro Binsos
2. Diwarisinya dan diamalkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	1. Persentase KAN yang melaksanakan fungsinya	30	45	Biro Binsos
		2. Jumlah sanggar seni dan budaya yang diberdayakan	29	34	Dinas Dikbud
3. Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat	1. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	a. Jumlah kasus perbuatan maksiat yang ditangani	1.210	1.162	Satpol PP
Misi 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional					
1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan	1. Opini BPK	WTP	WTP	Inspektorat, DPKD. Biro Aset
	2. Meningkatnya perlindungan hukum dan HAM	1. Persentase kasus hukum masyarakat miskin yang terbantu	11.6	12.5	Biro Hukum
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu	1. Persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu	100	100	BKMP
	2. Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Peringkat Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi	Tinggi (2,50)	Tinggi (2,75)	Biro Pemerintahan
		2. Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi	B	A	Biro Organisasi
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN	1. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah	1. Rata-rata lamanya PNS yang mengikuti diklat	3 JPL	4 JPL	Badan Diklat
	2. Berkurangnya temuan audit Inspektorat	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	Inspektorat
		2. Persentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi	0.1	0.1	Inspektorat
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif	1. Meningkatnya efektivitas (kualitas) perencanaan pembangunan	1. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD, KUA PPA dan APBD)	75	80	Bappeda
	2. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan	1. Persentase kesesuaian perencanaan dg pelaksanaan (sesuai waktu dan realisasi)	80	85	Bappeda

RPJMD 2010 – 2015			TARGET		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2014	2015	SKPD Penang-gung Jawab
Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman dan Berkualitas Tinggi					
1. Terwujudnya sumber-daya manusia yang cerdas dan berkarakter	1. Meningkatnya SDM yang unggul dan mutu pendidikan	1. Persentase APK PAUD	73.15	75	Dinas Dikbud
		2. Persentase APM Dikdas	100	100	Dinas Dikbud
		3. Meningkatnya APK/APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B	103.42/83.45	104.92/85	Dinas Dikbud
		4. Meningkatnya APK/APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	85.58/75	86/80	Dinas Dikbud
		5. Angka rata-rata lama sekolah	8.78	8.88	Dinas Dikbud
		6. PersentaseMelekAksaraPendudukusia > 15 tahun	99.6	99.7	Dinas Dikbud
		7. Meningkatnya persentase kelulusan siswa diterima Perguruan Tinggi	32	35	Dinas Dikbud
	2. Meningkatnya prestasi olahraga	1. Peringkat kontingen PPLP Sumbar di tingkat Nasional - Pencak Silat - Senam - Tekwondo - Judo - Tinju - Gulat	5 5 5 6 10 3	5 5 5 6 10 3	Dispora
		2. Jumlah medali yang didapat pada kegiatan POPNAS - Emas - Perak - Perunggu	- - - 6	12 10 15 5	Dispora
		3. Peringkat kontingen Sumbar pada Kejurnas Atlet andalan	-	10	
		4. Peringkat Kontingen Sumbar pada Peparpelnas			
	3. Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat	1. Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan	500 orang	500 orang	Badan Perpustaka- aan & Arsip
		2. Peningkatan jumlah anggota baru perpustakaan	100 orang	100 orang	Badan Perpustaka- aan & Arsip
2. Terwujudnya sumber-daya manusia yang sehat	1. Meningkatnya umur harapan hidup (Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat)	1. Angka harapan hidup	71.12	71.48	Dinkes
		2. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	118	102	Dinkes
		3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	24	23	Dinkes
	2. Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang (Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat)	1. Angka gizi kurang (BB/TB) pada balita	7	6.6	Dinkes
	3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender	1. Indeks Pembangunan Gender	71.49	72.13	BPPr & KB
		2. Indeks Pemberdayaan Gender	65.95	67.02	BPPr & KB
	4. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	1.34%	1.34%	BPPr & KB

RPJMD 2010 – 2015			TARGET		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2014	2015	SKPD Penang- gung Jawab
Misi 4 : Mewujudkan Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, Produktif, Berbasis Kerakyatan, Berdaya Saing Regional dan Global					
1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis	1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1. Persentase peningkatan produksi:			Dinas Pertanian/ Perkebunan/ Pternakan/ DKP
		1) Kakao	4	4	
		2) Kopi	1	1	
		3) Karet	2.5	2.5	
		4) Padi	3.5	3.5	
		5) Jagung	6	6	
		6) Daging	3.82	3.83	
		7) Nila	24.5	24.5	
	2. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	2. Persentase peningkatan UPH Perkebunan	7	7	Dinas Perke- bunan
		3. Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	4	4	DKP
		4. Persentase penambahan unit pengolahan hasil tanaman pangan	8.69	8	Dinas Pertanian
		1. Nilai tukar petani	109	110	Dinas Pertanian/ Perkebunan/ Pternakan/ DKP
2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKM dan iklim investasi	1. Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah	1. Persentase pertumbuhan industri pengolahan	4	4.5	Disperindag
	2. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi	1. Persentase pertumbuhan UMKM	4	5	Dinas Koperasi & UMKM
		2. Persentase koperasi yg berkualitas	10	12	Dinas Koperasi & UMKM
		3. Persentase peningkatan volume usaha koperasi	15	20	Dinas Koperasi & UMKM
	3. Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan	1. Persentase pasar yang layak	23.01	24.03	Disperindag
	4. Meningkatnya ekspor daerah	1. Persentase Peningkatan nilai ekspor	2-3	2-3	Disperindag
	5. Meningkatnya investasi daerah	1. Penambahan realisasi investasi			BKPMP
		a) PMDN (milyar rupiah) b) PMA (juta US\$)	480 24	501 25	
3. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya	1. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara	1. Persentase peningkatan wisatawan nusantara dan mancanegara a) Wisatawan Nusantara b) Wisatawan Mancanegara	5 10.3	5.5 12.5	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
4. Berkurangnya penduduk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal	1. Menurunnya tingkat kemiskinan	1 Tingkat Kemiskinan	7.35	6.95	Semua SKPD
	2. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal	1. Tingkat pengangguran	5.5	5.13	Dinas Nakertrans dan SKPD terkait lainnya
	3. Berkurangnya daerah tertinggal	1. Jumlah daerah tertinggal	5	3	Bappedadan SKPD terkait lainnya
5. Terpenuhinya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat	1. Meningkatnya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat	1. Persentase peningkatan kemandapan jalan provinsi	86	89.5	Dinas Prasjal Tarkim
		2. Meningkatnya persentase cakupan layanan listrik (Rasio elektrifikasi)	94	95	Dinas ESDM
		3. Meningkatnya persentase cakupan layanan perumahan, pemukiman dan bangunan gedung	65	68	Dinas Prasjal Tarkim
		4. Meningkatnya persentase sarana prasarana perhubungan kominfo	70	75	Dinas Perhubungan dan Kominfo

RPJMD 2010 – 2015			TARGET		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2014	2015	SKPD Penang-gung Jawab
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan					
1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	1. Meningkatnya pengurangan resiko bencana, dan pemulihan kawasan/ daerah pasca bencana	1. Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana	80	100	BPBD
		2. Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana serta sarana dan prasarana	80	100	BPBD
	2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	1. Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	80	80	BPBD
	3. Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	1. Persentase kejadian bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	60	60	BPBD
2. Tercapainya lingkungan hidup yang berkualitas	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	1. Tingkat pencemaran lingkungan hidup (udara dan air) 1. Udara	82 < IPU < 90	82 < IPU < 90	Bapedalda
		2. Air	58 < IPA < 66	58 < IPA < 66	
	2. Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem	1. Persentase penurunan lahan kritis	2.68%	2.68%	Dinas Kehutanan
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Persentase penurunan illegal mining	5.5	5	Dinas ESDM
		2. Persentase tersedianya perencanaan-Tata Ruang dan Perda RTRW	90	95	Dinas Prasjal & Tarkim
		3. Persentase penurunan kasus illegal logging	4%	4%	Dinas Kehutanan

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. MISI 1: MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH ABS-SBK

Perwujudan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" merupakan landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau yang dijadikan sebagai persyaratan untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram melalui pengamalan ajaran agama dan adat istiadat yang berpedoman kepada falsafah berdasarkan "Adat Bersandi Sarak Sarak Bersandi Kitabullah". Sedangkan sasaran yang akan dicapai: a) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, b) Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama, c) Meningkatnya kerukunan umat beragama, d) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya, e) Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya, f) Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia pemangku adat, dan g) Berkurangnya tingkat konflik dalam masyarakat.

6.1.1. Strategi untuk Misi 1

Untuk mencapai sasaran pada Misi 1, diperlukan strategi sebagai berikut: meningkatkan kualitas pendidikan agama, meningkatkan pelayanan pada rumah ibadah, mengembangkan komunikasi antar umat beragama, mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan budaya daerah, mengembangkan lembaga seni dan budaya, meningkatkan kelembagaan adat dan budaya daerah, meningkatkan peranan pemangku adat dalam pendidikan adat, meningkatkan pendidikan moral bagi remaja, dan menekan terjadinya perbuatan maksiat.

6.1.2. Arah Kebijakan untuk Misi 1

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh lembaga yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 1 adalah: mengembangkan kurikulum pendidikan agama, mengembangkan kepastakaan rumah ibadah, meningkatkan kapasitas guru-guru agama, meningkatkan kualitas pengelola rumah ibadah, menambah jam pelajaran untuk praktek agama, mengembangkan forum pertemuan antar agama, mengembangkan lembaga sosial keagamaan, mengembangkan kurikulum pendidikan ABS-SBK, memasyarakatkan nilai-nilai moral ABS-SBK, mengembangkan gerakan terpadu pengamalan agama dan ABS-SBK, mengembangkan kepastakaan adat dan budaya, menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah, mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah, meningkatkan pengelolaan keberagaman sosial budaya, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pemangku adat, meningkatkan komunikasi pemangku adat dengan masyarakat, meningkatkan penyuluhan moral kepada remaja dan anggota masyarakat lainnya, serta meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan pencegahan perbuatan maksiat. Hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 1 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 1

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI 1 : Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais	1. <i>Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama</i> 2. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatkan akses informasi keagamaan 2. Meningkatkan pengelolaan potensi dan agihan zakat 3. Meningkatkan pelayanan haji 4. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap Al-Qur'an 5. Meningkatkan pelayanan pada rumah ibadah	1. Meningkatkan akses informasi keagamaan 2. Menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak 3. Menambah jam pelajaran untuk praktek agama 4. Meningkatkan pengelolaan potensi dana agihan zakat 5. Meningkatkan kualitas pelayanan Jemaah haji 6. Meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Al-Qur'an 7. Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah ibadah
2. Diwarisinya dan diamalkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya 2. Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya 3. Berkembangnya lembaga seni dan sosial budaya	1. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah 2. Mengembangkan lembaga seni dan budaya 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan budaya daerah 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat seni dan budaya daerah	1. Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatkan dan mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah 3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah 4. Meningkatkan dan mengembangkan lembaga adat, seni dan budaya daerah 5. Menambah jam pelajaran praktek pendidikan adat dan budaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3. Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat	1. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	1. Menekan terjadinya perbuatan maksiat 2. Meningkatkan pendidikan bagi moral remaja	1. Fasilitasi pengawasan terhadap pelanggaran perbuatan maksiat

6.2 MISI 2: MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESSIONAL

Pelaksanaan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat yang mendambakan tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel, efektif, efisien menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari *Korupsi, Kolusi* dan *Nepotisme* (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good goverment*) terutama prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien. Sasaran yang hendak dicapai adalah: a) Meningkatnya kinerja aparatur daerah, b) Tersedianya data dan informasi statistik, c) Meningkatnya efektivitas peraturan daerah, d) Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu, e) Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, f) Meningkatnya kompetensi aparatur daerah, g) Berkurangnya temuan audit keuangan, h) Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan, i) Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan.

6.2.1. Strategi untuk Misi 2

Untuk mencapai sasaran yang dinyatakan pada Misi 2, ditempuh strategi: meningkatkan jumlah dan kualitas peraturan daerah, meningkatkan jenis dan kualitas data statistik, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah, meningkatkan ketatalaksanaan pelayanan publik, mengembangkan kualitas pelayanan satu pintu, mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, meningkatkan kualitas rekrutmen aparatur, meningkatkan kemampuan aparatur

dalam bidangnya, meningkatkan ketepatan penempatan aparatur, meningkatkan disiplin aparatur, meningkatkan motivasi kerja aparatur, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, mengembangkan kelembagaan yang adaptif, membangun produk hukum yang adil dan partisipatif, memantapkan manajemen kepegawaian melalui pembinaan karir, mengembangkan perencanaan berbasis data, dan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan pembangunan.

6.2.2 Arah Kebijakan untuk Misi 2

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah: mengembangkan produk hukum yang efektif dalam rangka pemberantasan KKN, menyediakan data dan informasi statistik, meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengembangkan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu, memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mengembangkan polaseleksi aparatur yang berkualitas, mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas, meningkatkan pola karir aparatur yang terarah, meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur, mengembangkan pola insentif yang efektif, melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang adaptif, mengembangkan kualitas musrenbang daerah, mengembangkan penelitian dan pengembangan terapan, mengembangkan basis data pembangunan, dan meningkatkan administrasi pengawasan pembangunan. Hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 2 dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 2

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI 2 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya efektivitas peraturan daerah 2. <i>Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan</i> 3. Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif 4. Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM - <i>Meningkatnya perlindungan Hukum dan HAM</i>	1. Meningkatkan jumlah dan kualitas peraturan daerah 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah 3. Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas 4. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan penganggaran pembangunan 5. Pembangunan Materi Hukum 6. Mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan 7. Terwujudnya budaya sadar hukum dan taat hukum di masyarakat 8. Tersedianya sarana dan informasi hukum	1. Mengembangkan produk hukum yang efektif 2. Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah 4. Efektif dan efisien dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan 5. Meningkatkan ketersediaan produk hukum daerah 6. Meningkatkan rancangan produk hukum 7. Meningkatkan budaya sadar dan taat hukum pada masyarakat 8. Meningkatkan saran dan informasi hukum

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pelayanan satu pintu 2. Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 3. Meningkatkan keterediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu 4. Meningkatkan kemampuan pemerintahan Nagari/Desa/ Kelurahan 5. <i>Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i> - <i>Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu</i> - <i>Meningkatnya kompetensi aparatur daerah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas pelayanan satu pintu 2. Mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan melalui pengembangan system informasi kependudukan yang terpadu 4. Peningkatan kemampuan Pemerintah Nagari/Desa/ Kelurahan 5. Pengembangan komunikasi dan informasi 6. Peningkatan kerjasama dengan media cetak dan elektronik 7. Meningkatkan tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah 8. Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 9. Terwujudnya good governance 10. Terwujudnya sinergitas pembangunan antar wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu 2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu 3. Memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 4. Meningkatkan pelayanan kependudukan melalui ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu 5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Nagari/Desa/Kelurahan 6. Meningkatkan kelembagaan Pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan 7. Mengembangkan komunikasi dan informasi 8. Meningkatkan kerjasama dengan media cetak dan elektronik 9. Meningkatkan tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah 10. Meningkatkan kualitas lembaga perwakilan daerah 11. Mewujudkan good governance 12. Meningkatkan sinergitas pembangunan antar wilayah
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi aparatur daerah 2. Meningkatkan kinerja aparatur daerah dalam bekerja 3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 4. Berkurangnya temuan audit inspektorat 5. Terselenggaranya penatausahaan kearsipan secara efektif dan efisien - <i>Berkurangnya temuan audit yang bernuansa KKN</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas rekrutmen aparatur 2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam bidangnya 3. Meningkatkan ketepatan penempatan aparatur 4. Meningkatkan disiplin aparatur 5. Meningkatkan motivasi kerja aparatur 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN 7. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur pelaksana pembangunan 8. Meningkatkan penambahan khasanah arsip 9. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas 2. Mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas 3. Meningkatkan pembinaan karir aparatur yang terarah 4. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur 5. Mengembangkan pola insentif yang efektif 6. Melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 7. Meningkatkan manajemen kepegawaian 8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN 9. Menyusun SOP 10. Meningkatkan SDM Aparatur 11. Meningkatkan efektifitas penyusutan arsip instansi pemerintah 12. Menyempurnakan sistem dan pengelolaan kearsipan
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan</i> 2. <i>Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan jenis dan kualitas data statistik 3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas musrenbang daerah 2. Tersedianya data dan informasi statistik 3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan

6.3 MISI 3 : MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN DAN BERKUALITAS TINGGI

Sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah: a) Meningkatnya angka partisipasi sekolah, b) Meningkatnya umur harapan hidup, c) Menurunnya persentase gizi buruk, d) Meningkatkan kualifikasi guru, e) Meningkatkan jumlah sekolah unggul dengan pendidikan berkarakter, f) Berkembangnya pendidikan bernuansa surau, g) Berkembangnya lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan, h) Meningkatnya jumlah wirausahawan yang profesional, i) Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat, j) Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6.3.1. Strategi untuk Misi 3

Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada Misi 3, diperlukan strategi sebagai berikut: meningkatkan akses pendidikan usia dini, dasar, dan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas pembinaan pemuda dan olahraga, meningkatkan pelayanan kesehatan, penurunan persentase gizi buruk, meningkatkan strata pendidikan guru, meningkatkan sertifikasi guru, meningkatkan jumlah pendidikan berkarakter, mengembangkan pendidikan bernuansa surau, mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan, meningkatkan jumlah wirausahawan profesional, mengembangkan sumber-sumber belajar yang berkualitas, meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi.

6.3.2. Arah kebijakan untuk Misi 3

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah: meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan akses dan kualitas

pendidikan menengah, mengembangkan organisasi pembina pemuda dan olah raga, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelayan kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, meningkatkan pendidikan guru minimal sarjana, meningkatkan kualitas proses sertifikasi guru, meningkatkan jumlah sekolah pendidikan berkarakter, mengembangkan pendidikan bernuansa surau, meningkatkan jumlah dan kuantitas sekolah kejuruan, mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan, mengembangkan kemitraan lembaga pendidikan dengan dunia usaha, mengembangkan perpustakaan berkualitas, meningkatkan pelayanan perpustakaan, meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan, dan meningkatkan pertemuan antara peneliti dengan masyarakat dan swasta. Hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 3 dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3.
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI 3 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter	1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD 2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar 3. Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah 4. Meningkatkan SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan 5. Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. <i>Meningkatnya prestasi olah raga</i> 7. Meningkatkan peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan 8. Meningkatkan kemandirian pemuda dan organisasi kepe-mudaan	1. Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatnya kualifikasi guru PAUD 3. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 4. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar 5. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 6. Meningkatnya kualifikasi guru menengah 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan berkualitas serta Dilandasi Iman, Taqwa dan Akhlak Mu-lia 7. Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses dan pelaksanaan pembangunan 8. Meningkatnya pembinaan dan permasyarakatan olahraga 9. Terwujudnya sarana dan prasaran olah raga yang representatif	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD 3. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 4. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar 5. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 6. Meningkatnya kualifikasi guru menengah 7. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 8. Meningkatkan Pengelolaan, Pengawasan dan Manajemen 9. Tersedianya lembaga pendidikan berkarakter 10. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan boarding school 11. Meningkatnya jumlah sekolah bertaraf SBI dan RSBI 12. Meningkatkan kualitas sekolah sehat 13. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik 14. Meningkatkan kompetensi pendidikan bernuansa surau 15. Meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan 16. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas peneliti

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	9. Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat <i>Meningkatnya SDM yang unggul dan mutu pendidikan</i>	10. Terwujudnya generasi muda yang berperan aktif dalam proses pembangunan 11. Meningkatnya kualitas organisasi pemuda peran serta keterampilan pemuda 12. Terwujudnya pelayanan perpustakaan yang berkualitas	17. Meningkatkan alokasi dana penelitian dan pengembangan 18. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang 19. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah 20. Meningkatkan pembinaan olahraga yang intensif dan konsisten 21. Meningkatkan sarana parasaran olah raga 22. Meningkatkan kualitas dan peran serta pemuda dalam segala bidang pembangunan 23. Meningkatkan kualitas organisasi pemuda 24. Meningkatkan keterampilan pemuda 25. Meningkatkan efektifitas pelayanan perpustakaan 26. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan 27. Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan
2. Terwujudnya Sumberdaya manusia yang sehat	1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak 2. <i>Meningkatnya umur harapan hidup (meningkatnya derajat kesehatan masyarakat)</i> 3. <i>Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang (meningkatnya derajat kesehatan masyarakat)</i> 4. <i>Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender</i> 5. <i>Menurunnya laju pertumbuhan penduduk</i>	1. Meningkatkan kualitas pendidikan perempuan dan anak 2. Terwujudnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat 3. Terwujudnya akses kesehatan bagi semua masyarakat 4. Meningkatnya peran aktif masyarakat, swasta dalam pembangunan kesehatan 5. Terwujudnya masyarakat yang terhindar dari penyakit menular/tidak menular 6. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan kondisi kesehatan sekitar 7. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan baik 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan 9. Tersedianya akses pelayanan kesehatan pada masalah kebencanaan 10. Meningkatkan coverage pelayanan kesehatan masyarakat 11. Meningkatnya perencanaan pembangunan kesehatan 12. Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas 13. Penurunan persentase prevalensi gizi kurang	1. Meningkatkan pendidikan gender 2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak 3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat 4. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang merata 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan 6. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara intensif 7. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan kondisi kesehatan sekitar 8. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan 9. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu 10. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan pada masalah kebencanaan 11. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan 12. Meningkatnya kualitas data dan informasi kesehatan 13. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan 14. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 15. Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna 16. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat 17. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		14. Terwujudnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak 15. Meningkatnya peran serta wanita dalam proses pembangunan 16. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan hak anak 17. Meningkatnya jumlah akseptor KB 18. Tersedianya informasi yang cukup tentang KB kepada masyarakat 19. Meningkatnya ketersediaan tenaga pendamping terampil	18. Meningkatkan peran serta wanita dalam proses pembangunan 19. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan anak 20. Meningkatkan jumlah akseptor KB terutama pasangan usia subur 21. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi tentang KB 22. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping terampil

6.4. MISI 4: MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TANGGUH, PRODUKTIF, BERBASIS KERAKYATAN, BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL

Pewujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, wisata, dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah: a) Meningkatnya produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, b) Meningkatnya jumlah kawasan sentra produksi pertanian, c) Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, d) Meningkatnya industri unggulan daerah, e) Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan, f) Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya, g) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, h) Menurunnya persentase penduduk miskin, i) Menurunnya persentase pengangguran, j) Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, k) Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat,

l) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air, m) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara, n) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.

6.4.1. Strategi untuk Misi 4

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 4 pada prioritas pengembangan pertanian berbasis komoditi kawasan dan komoditi unggulan, adalah sebagai berikut: meningkatkan produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (*fishery processing*), memperkuat manajemen untuk mengelola resiko usaha pertanian, mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju, dan menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain.

Strategi pada prioritas pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi adalah sebagai berikut: mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah, meningkatkan jumlah pelaku usaha industri pengolahan, mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, menyediakan pasar yang layak untuk perdagangan, melindungi konsumen dari kecurangan perdagangan, meningkatkan daya saing komoditi daerah, dan meningkatkan kerjasama promosi dan investasi.

Strategi pada prioritas pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah: mengembangkan kawasan wisata alam unggulan utama Sumatera Barat, mengembangkan kawasan wisata budaya unggulan utama Sumatera Barat, meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata, dan meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha dan aparatur pariwisata.

Untuk percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran ditempuh strategi: mengembangkan pendataan penduduk miskin, membangun gerakan terpadu dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemberdayaan bagi penduduk miskin, memberikan bantuan bagi penduduk miskin dalam berbagai bidang, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja.

Sedangkan pada prioritas pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat ditempuh strategi sebagai berikut: meningkatkan jumlah jalan dan jembatan, meningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan, menyediakan perumahan dan pemukiman masyarakat, meningkatkan pengelolaan sumberdaya air, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara, dan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.

6.4.2. Arah Kebijakan untuk Misi 4

Untuk melaksanakan strategi tersebut dalam prioritas pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani, membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan, mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan), mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) hasil perikanan (*fishery processing*), memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan, mengembangkan gerakan terpadu dalam memfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis nagari, dan memfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah.

Untuk prioritas pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri, meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK, meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK, meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK, meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK, meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK, membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan, meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen, memperpendek mata rantai pemasaran, meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi, mengembangkan pemberian insentif bagi para investor, meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor, dan mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal.

Arah kebijakan dalam pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah mengembangkan kawasan wisata alam Gunung Padang, mengembangkan kawasan wisata alam Mandeh, mengembangkan kawasan wisata alam Panorama Baru, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Kembar, mengembangkan kawasan wisata alam Kawasan Harau, mengembangkan kawasan wisata tambang Sawahlunto, mengembangkan kawasan wisata budaya Ulakan Tapakis, mengembangkan kawasan wisata budaya Pagaruyung, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Maninjau, mengembangkan kawasan wisata surfing Mentawai, meningkatkan promosi

yang efektif, dan meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata, meningkatkan kualitas cagar budaya dan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah, meningkatkan Kualitas produk wisata budaya.

Untuk prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: mengembangkan basis data penduduk miskin, melakukan koordinasi program pengentasan kemiskinan, meningkatkan keterampilan penduduk miskin, memberikan bantuan biaya pendidikan penduduk miskin, memberikan jaminan kesehatan penduduk miskin, melakukan gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin, memberi bantuan permodalan bagi usaha mikro, meningkatkan perlindungan bagi keluarga miskin, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dan menambah lapangan usaha bagi angkatan kerja.

Sedangkan untuk prioritas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat adalah diperlukan arah kebijakan: meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, membangun jalan dan jembatan sesuai kebutuhan, membangun jalan dan jembatan penunjang ekonomi rakyat, membangun jalan dan jembatan penunjang pariwisata, membangun jalan dan jembatan untuk evakuasi bencana, mengembangkan infrastruktur kawasan khusus, membangun prasarana jalan strategis antar daerah, membangun perumahan masyarakat, menata bangunan dan lingkungan pemukiman, mengelola jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya, mengelola konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya, mengembangkan angkutan kereta api, membangun dan rehabilitasi sarana dan fasilitas jalan, membangun dan rehabilitasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, mengembangkan komunikasi dan informasi, mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut, mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara, merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang, menyusun regulasi dan pengelolaan energi, mengembangkan energi kelistrikan, menyusun regulasi dan mengendalikan pemanfaatan tambang mineral, hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 4 dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4.
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 4

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI 4 : Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</i> 2. <i>Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</i> 3. <i>Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing)</i> 4. <i>Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 3. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing) 4. Memperkuat manajemen untuk mengelola resiko usaha pertanian 5. Mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju 6. Menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan 2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 3. Merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani 5. Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agro-industri pedesaan. 6. Mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan) 7. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan 8. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) hasil perikanan (Fishery Processing) 9. Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, & perikanan 10. Mengembangkan gerakan terpadu dalam memfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya 11. Meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis nagari
2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah</i> 2. <i>Meningkatnya serapan tenaga kerja pada industri olahan</i> 3. <i>Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi</i> 4. <i>Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan</i> 5. <i>Meningkatnya ekspor daerah</i> 6. <i>Meningkatnya investasi daerah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah 2. Meningkatkan jumlah pelaku usaha industri pengolahan 3. Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 4. Menyediakan pasar yang layak untuk perdagangan 5. Melindungi konsumen dari kecurangan perdagangan 6. Meningkatkan daya saing komoditi daerah 7. Meningkatkan kerjasama promosi dan investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri 3. Meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK 4. Meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK 5. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK 6. Meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK 7. Meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK 8. Membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan 9. Meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen 10. Memperpendek mata rantai pemasaran 11. Meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi 12. Mengembangkan pemberian insentif bagi para investor 13. Meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor 14. Mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal 15. Meningkatkan investasi dan pengawasan sumberdaya mineral dan batubara

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> Berkembangnya wisata seni dan budaya Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik <i>Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan wisata seni dan budaya daerah Mengembangkan kawasan wisata alam unggulan utama Sumatera Barat Mengembangkan kawasan wisata budaya unggulan utama Sumatera Barat Meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata Meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha dan aparatur parawisata 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas cagar budaya dan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah Meningkatkan Kualitas produk wisata budaya Mengembangkan kawasan (kws) wisata alam Gunung Padang Mengembangkan kws. wisata alam Mandeh Mengembangkan kws. wisata alam Panorama Baru Mengembangkan kws. wisata alam Danau Kembar Mengembangkan kws. wisata alam kws. Harau Mengembangkan kws. wisata tambang Sawahlunto Mengembangkan kws. wisata budaya Ulakan Tapakis Mengembangkan kws. wisata budaya Pagaruyung Mengembangkan kws. wisata alam danau maninjau Mengembangkan kws. wisata surfing Mentawai Meningkatkan promosi yang efektif Meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata
4. Berkurangnya pen dukuk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya <i>Menurunnya tingkat kemiskinan</i> Meningkatnya akses menuju daerah tertinggal Meningkatnya sarana prasarana pada daerah tertinggal <i>Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal</i> Meningkatnya kualitas SDM pada daerah tertinggal <i>Berkurangnya daerah tertinggal</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya pelayanan terhadap PMKS Terwujudnya Sasaran program/ kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien Terwujudnya pengembangan sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu Meningkatkan integrasi sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tepat dan jaminan pelaksanaan program tepat pada sasaran keluarga miskin Meningkatkan infrastruktur Meningkatkan rasio elektrifikasi Meningkatkan kualitas sarana dan prasana pelayanan dasar Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan panti sosial untuk PMKS Meningkatkan keterampilan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang kesejahteraan sosial Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu Meningkatkan kualitas tenaga kerja Memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja Meningkatkan efektifitas penggunaan data kemiskinan Meningkatkan efektifitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Meningkatkan jaringan listrik dan telekomunikasi Meningkatkan sarana air bersih dan sanitasi Memperluas lapangan kerja Meningkatkan usaha ekonomi mikro Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana pendidikan Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana kesehatan
5. Terpenuhi infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun jalan dan jembatan pada kawasan sentra produksi Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat Menyediakan perumahan dan permukiman masyarakat Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan (PU) Meningkatkan aksesibilitas wil. yang sedang dan belum berkembang pada koridor-koridor utama, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil dan pulau (pu) Meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur (pu) Penataan kawasan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat, dan asri (perumahan) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum (air bersih, limbah, sampah dan drainase) yang memadai dan terpadu (perumahan)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	5. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara 6. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik <i>Meningkatnya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat</i>	6. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara 7. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik	6. Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung melalui pengawasan dan pembinaan teknis standar bangunan gedung serta peningkatan keserasiannya dengan tata ruang dan lingkungan (perumahan) 7. Merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang (tata ruang) 8. Peningkatan dan mempertahankan kondisi saluran irigasi dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (pu) 9. Mengelola konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya (pu) 10. Optimalisasi bendung dan embung yang telah dibangun untuk menunjang irigasi dan pengendalian (pu) 11. Mendayagunakan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga, pertanian, perkotaan, dan industri (pu) 12. Melindungi kawasan prioritas dari daya rusak air akibat banjir, abrasi pantai, dan lahar gunung berapi/ sedimen (pu) 13. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal (pu) 14. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut (perhubungan) 15. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara (perhubungan) 16. Mengembangkan angkutan kereta api (perhubungan) 17. Mengembangkan energi kelistrikan (energi) 18. Menyusun regulasi dan pengelolaan energi (energi)

6.5. MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kelima ini adalah: a) Tersedianya informasi wilayah rawan bencana, b) Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana, c) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, d) Meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam pelestarian lingkungan hidup, e) Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem, f) Menurunnya jumlah *illegal logging* dan *illegal fishing*.

6.5.1. Strategi untuk Misi 5

Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan Misi 5, ditempuh strategi sebagai berikut: menyediakan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem, dan menurunkan jumlah *illegal logging* dan *illegal fishing*.

6.5.2. Arah Kebijakan untuk Misi 5

Sedangkan arah kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah: menyediakan peta dan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana prasarana evakuasi bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesiagaan bencana, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan konservasi sumberdaya alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mengamankan hutan dari *illegal logging*, mengamankan laut dari *illegal fishing*, serta mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 5 dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5.
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 5

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI 5 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	1. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana 2. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana 3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana - <i>Meningkatnya pengurangan resiko bencana, dan pemulihan kawasan/daerah pasca bencana</i> - <i>Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana</i> - <i>Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana</i>	1. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 2. Menyediakan informasi wilayah rawan bencana 3. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1. Meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana 2. Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiap-siagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu 3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
2. Tercapainya lingkungan hidup yang berkualitas	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 2. <i>Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem</i> 3. Menurunnya jumlah illegal logging - <i>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup</i> - <i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i>	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem 3. Menurunkan jumlah illegal logging	1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup 2. Mengembangkan konservasi sumberdaya alam 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 4. Mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 5. Mengamankan hutan dari <i>illegal logging</i>

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab VI telah dijabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur secara hirarkhis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Berdasarkan hasil jabaran tersebut pada Bab ini akan diidentifikasi indikator-indikator kinerja, target capaian, serta program-program prioritas yang harus direalisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahun mendatang. Program-program tersebut, merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasinya secara operasional, program-program yang telah dirumuskan harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sekaligus ditentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi penanggung jawab dari setiap program tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

7.1.1 Kebijakan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan

Kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur terdiri dari: Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

7.1.2. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 1

Kebijakan umum untuk mencapai Misi 1 adalah: Meningkatkan akses informasi keagamaan, Meningkatkan kualitas pengelola rumah ibadah, Menambah jam pelajaran untuk praktek agama, menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak, meningkatkan pengelolaan

potensi dana agihan zakat, meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji, meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Al-Quran, mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat, Meningkatkan dan mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah, Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah, Fasilitasi pengawasan terhadap pelanggaran perbuatan maksiat.

Sedangkan program-program prioritas untuk mewujudkan Misi 1 adalah: Gerakan Terpadu Pengamalan Agama dan ABS-SBK, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat, Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama, Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Seni dan Budaya, Pengembangan Pendidikan Budaya. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.1.

TABEL 7.1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 1

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
I	Misi 1 : Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK									
1	Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat									
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. Meningkatkan akses informasi keagamaan 2. Meningkatkan pemahaman terhadap Al Qur'an	1. Meningkatkan akses informasi keagamaan 2. Menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak 3. Menambah jam pelajaran untuk praktek agama. 4. Meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Al-Qur'an	Meningkatnya syiar agama kepada masyarakat	%	N/A	100	Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kebudayaan	Biro Binsos
				Meningkatnya pemahaman dan pengamalan terhadap Al Qur'an	Peringkat	5	4	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama	Kebudayaan	Biro Binsos
				Wirid/pelatihan/ kegiatan ibadah yang dilaksanakan	%	N/A	100	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama	Kebudayaan	Biro Binsos
	Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatkan pengelolaan potensi dan agihan zakat 2. Meningkatkan pelayanan haji 3. Meningkatkan pelayanan pada rumah ibadah	1. Meningkatkan pengelolaan potensi dana agihan zakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan haji 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah ibadah	Meningkatnya kualitas SDM lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	%	N/A	100	Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Kebudayaan	Biro Binsos
				Meningkatnya pelayanan Jemaah haji	%	N/A	100	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Kebudayaan	Biro Binsos
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya (SOSIAL BUDAYA)	1. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan budaya daerah	1. Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat	Terwujudnya pengembangan nilai budaya di masyarakat	%	N/A	100	Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Sosial, Biro Binsos
				Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat adat	Kali Pelatihan	N/A	4	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	Kebudayaan	Biro Binsos
				Sinkronisasi program pemerintah dengan lembaga adat.	kali		12	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	Kebudayaan	Biro Binsos
	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	1. Menekan terjadinya perbuatan maksiat 2. Meningkatkan pendidikan bagi moral remaja	Fasilitasi pengawasan terhadap pelan ggaran perbuatan maksiat	Persentase penurunan pelanggaran perbuatan maksiat	%	N/A	20	Peningkatan Pemberantasan Maksiat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbang Linmas

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Meningkatnya wawasan aparatur, toga dan tomas	%	N/A	20	Peningkatan pemberantasan maskiat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbang Linmas
				Terlaksananya sosialisasi	Orang	N/A	40			
				Jumlah pelanggaran maksiat yang ditangani	Kasus	0	581	Peningkatan Pemberantasan Maksiat	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Sat Pol PP
	Berkembangnya lembaga seni dan sosial budaya	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan budaya daerah	1. Meningkatkan dan mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah	Berkembangnya kapasitas kelembagaan adat, seni dan budaya	Lembaga	2	3	Pemberdayaan Lembaga Adat, Seni dan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya (EKONOMI)	1. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah	1. Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia seni dan budaya daerah 3. Menambah jam pelajaran praktek pendidikan adat dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan kecintaan terhadap seni dan budaya	Kali	21	30	Pengembangan Pendidikan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah pelaksanaan praktek pendidikan adat, sejarah dan budaya daerah	Kali	2	10	Pengembangan Pendidikan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7.1.3. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 2

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 2 adalah: mengembangkan produk hukum yang efektif dalam rangka pemberantasan KKN, menyediakan data dan informasi statistik, meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengembangkan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu, memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas, mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas, meningkatkan pola karir aparatur yang terarah, meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur, mengembangkan pola insentif yang efektif, melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang adaptif, mengembangkan kualitas musrenbang daerah, mengembangkan penelitian dan pengembangan terapan, mengembangkan basis data pembangunan, dan meningkatkan administrasi pengawasan pembangunan.

Sedangkan program prioritas untuk mencapai Misi 2 adalah: Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi, Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Pengembangan E-Government dan E-Procurement, Peningkatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Materi Hukum, Pengembangan Data dan Statistik, Peningkatan Supremasi dan Jaminan Perlindungan Hukum, Peningkatan Budaya Hukum, Peningkatan Sarana Informasi Hukum, Peningkatan Penataan Perundang-undangan, Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan, Peningkatan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik, Peningkatan manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pendidikan Politik Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Peningkatan Manajemen ADM Aparatur, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah, Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.2.

TABEL 7.2
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 2

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
Misi 2: Mewujudkan Tata-Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional										
Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan										
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan jenis dan kualitas data dan informasi pembangunan	1. Mengembangkan kualitas porses perencanaan daerah 2. Tersedianya data dan informasi pembangunan	Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RTRW. RPJP, RPJMD dengan RKPD dan KUA PPAS)	%	-	77	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
				Tersedianya data dan statistik pembangunan	%	-	65	Pengembangan Data dan Informasi Statistik	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan koordinasi, Intergras, Sinkronisasi dan Sinergitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas koordiansi dan integrasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya konsistensi kesesuaian program dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah (RTRW. RPJPD, RPJMD dengan RKPD dan KUA PPAS)	%	-	80	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
	Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif	Pembangunan materi Hukum	Meningkatkan ketersediaan produk hukum daerah	Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas Produk Hukum Daerah yang kondusif	Jml Perda	11	21	Pembangunan Materi Hukum	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Hukum
	Meningkatnya kualitas perlindungan Hukum dan HAM	1. Mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan	1. Meningkatkan rancangan produk hukum daerah	Meningkatnya jumlah pembinaan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota dalam rangka evaluasi				Pembangunan Materi Hukum		
		2. Terwujudnya budaya sadar hukum dan taat hukum di masyarakat 3. Tersedianya sarana dan informasi hukum	2. Meningkatkan budaya sadar dan taat hukum pada masyarakat 3. Meningkatkan saran dan informasi hokum	Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat	%	-	95	Peningkatan Budaya Hukum	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Hukum
				Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan HAM	%	-	95	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Hukum
				Jumlah Perda yang ditegakkan	Perda	0	2	Peningkatan supremasi hukum Peraturan Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Sat Pol PP

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi yang memahami fungsi Linmas	Kab/kota	0	19	Peningkatan fungsi perlindungan masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Sat Pol PP
				Jumlah Kab/kota yang tertib dan tentram	Kab/kota	0	19	Pemeliharaan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Sat Pol PP
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Informasi Hukum	%	95	45	Sarana Informasi Hukum	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Hukum
				Persentase Perundang-Undangan yang Dapat Tersusun dan Terdokumentasikan	%	95	75	Peningkatan Penataan Perundang-Undangan	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Hukum, Setwan
	Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan melalui pengembangan system informasi kependudukan yang terpadu	Meningkatnya pelayanan kependudukan melalui ketersediaan system informasi kependudukan yang terpadu	Ketersediaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan yang akuntabel	Jml Kab/Kota	N/A	19	Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Pemerintahan dan Kependudukan
	Meningkatnya kinerja aparatur daerah	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan propinsi yang lebih profesional	1. Mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas 2. Meningkatkan pembinaan karir aparatur yang terarah 3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur	Persentase peningkatan kinerja perangkat pemerintah daerah	%			Peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Organisasi, Biro Pemerintahan & Kependudukan
				Tingkat kelulusan diklat	%	5	7	Pendidikan Kedinasan	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Badan Diklat
	Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan dan aset	1. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah 2. Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah 3. Efektif dan efisien dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur.	SKPD	5	38 (K)	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Organisasi

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		3. Meningkatnya efesiensi dan efektifitas pelaksanaan penganggaran pembangunan		Kualitas LKPD	Opini	Disclaimer	WTP	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg. Dan Persandian	Inspektorat
				Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg. Dan Persandian	DPKD
					Opini	Disclaimer	WTP			
				Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan kab/kota sesuai dengan ketentuan	Kab/kota	19	19	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg. Dan Persandian	DPKD
	Meningkatnya pendapatan daerah			Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	-5,20	61,92	Peningkatan Pendapatan Daerah	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg. Dan Persandian	DPKD
					Rp. (juta)	1.920.971	3.110.525			
	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Meningkatnya mutu manajemen pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	%	30	100	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg. Dan Persandian	Bappeda (UPTB-LPSE)
	Meningkatnya kompetensi aparatur daerah	Meningkatkan kualitas rekrutmen aparatur	Mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur	%	N/A	95	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg. Dan Persandian	BKD
	Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Nagari/ Desa/ Kelurahan	Peningkatan kemampuan Pemerintah Nagari/Desa/ Kelurahan	1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Nagari/ Desa/ Kelurahan 2. Meningkatkan kelembagaan Pemerintahan Nagari/Desa/ Kelurahan	Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi pemerintahan Nagari/ Desa/Kelurahan	%	N/A	100	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari	Pemberdayaan Masyarakat	Biro Pemerintahan & Kependudukan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Meningkatnya Kelembagaan Pemerintahan Nagari/ Desa/Kelurahan	%	100	100	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan nagari	Pemberdayaan Masyarakat	Biro Pemerintahan & Ke pendudukan
	Terselenggaranya penata usahaan kearsipan secara efektif dan efisien	1. Meningkatkan penambahan khasanah arsip 2. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kearsipan 3. Optimalisasi layanan kearsipan	1. Meningkatkan efektifitas penyusutan arsip instansi pemerintahan 2. Menyempurnakan sistem dan pengelolaan kearsipan 3. Melaksanakan pengolahan dan pemeliharaan arsip yang mempunyai nilai guna ilmiah dan kesejarahan 4. Meningkatkan wawasan arsiparis pada SKPD	Dokumen daerah terselamatkan	%		95	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Kearsipan	Badan Pustaka dan Arsip
				Jumlah khazanah arsip statis yang terselamatkan	Kab/ kota	4	4	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Kearsipan	Badan Pustaka dan Arsip
				Optimalnya pelaksanaan kearsipan	SKPD	10	42	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Kearsipan	Badan Pustaka dan Arsip
					Orang	0	0			
	Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Pengembangan komunikasi dan informasi 2. Peningkatan kerjasama dengan media cetak dan elektronik 3. Meningkatkan tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah 4. Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 5. Terwujudnya good governance 6. Terwujudnya sinergitas pembangunan antar wilayah	1. Mengembangkan komunikasi dan informasi 2. Meningkatkan kerjasama dengan media cetak dan elektronik 3. Meningkatkan tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah 4. Meningkatkan kualitas lembaga perwakilan daerah 5. Mewujudkan good governance 6. Meningkatkan sinergitas pembangunan antar wilayah	Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan komunikasi dan informasi di Sumbang	%	N/A	80	Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Biro Humas
				Terlaksananya pembinaan komunikasi dan informasi	Paket	N/A	2(t)	Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Biro Humas, Ktr. Penghubung
				Ketersediaan data informasi penyelenggaraan komunikasi	Buku	0	5 (k)	Pengembangan Data dan Informasi	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Biro Humas
				Penyebaran Informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pemberitaan	Kali Pemberitaan	0	60 (k)	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Komunikasi dan Informatika	Biro Humas
				Meningkatnya pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta perbaikan manajemen kepegawaian	%	50	85	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. Dan Persandian	Biro Pembangunan dan Rantau
				Meningkatnya kapasitas dan etos kerja lembaga perwakilan daerah	Kali Kunjungan	N/A	21	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepeg. Dan Persandian	Setwan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Persentase pemerintah daerah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik	%	N/A	100	Penerapan Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance)	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Pemerintahan & Kependu
				Kerjasama pembangunan antar lembaga daerah/ wilayah dan luar negeri	%	65	100	Kerjasama Pembangunan	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Pemerintahan & Kependu kan, Biro Pembangunan & Rantau
				Tersedianya regulasi sebagai pedoman pengembangan perekonomian daerah	ran-perda	1	8	Penerapan Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance)	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Perekonomian
				Pergub tentang kebijakan ekonomi daerah	pergub	4	28	Penerapan Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance)	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Perekonomian
				Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan kegiatan pengembangan ekonomi daerah	Kali Rapat	60	352	Penerapan Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance)	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Perekonomian
	Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	%	N/A	100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepeg Dan Persandian	Biro Hukum
				Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	60		Peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbang Linmas
				Jumlah aparatur kesbang linmas kabupaten/kota	Org	200		Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbang Linmas
				Persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan politik masyarakat	%	70		Pendidikan politik masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbang Linmas
				Persentase partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	%	75		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Sat Pol PP

7.1.4. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 3

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 3 adalah: meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah, mengembangkan organisasi pembina pemuda dan olah raga, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelayan kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, meningkatkan pendidikan guru minimal sarjana, meningkatkan kualitas proses sertifikasi guru, meningkatkan jumlah sekolah pendidikan berkarakter, mengembangkan pendidikan bernuansa surau, meningkatkan jumlah dan kuantitas sekolah kejuruan, mengembangkan kemitraan lembaga pendidikan dengan dunia usaha, mengembangkan perpustakaan berkualitas, meningkatkan pelayanan perpustakaan, meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan, dan meningkatkan pertemuan antara peneliti dengan masyarakat dan swasta.

Program prioritas untuk mencapai Misi 3 untuk prioritas pendidikan adalah: Gerakan Terpadu peningkatan SDM, Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Non Formal, Manajemen Pelayanan Pendidikan, Pendidikan Berkarakter, Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olah Raga, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Peningkatan Peranserta Kepemudaan, Peningkatan Penyadaran Kepemudaan, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Pendidikan Karakter, Peningkatan Kualitas Pendidikan Bernuansa Surau, Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan, Pengembangan "Sekolah Sahabat" regional dan internasional, Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan, Pengembangan sekolah sehat, Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintah dan pembangunan daerah.

Program prioritas untuk mencapai Misi 3 untuk prioritas kesehatan adalah: Penyediaan Obat dan Pembekalan Kesehatan, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Lingkungan Sehat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular, Pengadaan Sarana Prasarana Rumah sakit/RS. Paru/RS Jiwa/RS. Mata, Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Keluarga Berencana, Pelayanan Alat Kontrasepsi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan

Anak, Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS. Paru/ RS Jiwa/ RS. Mata, Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD, Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.3.

TABEL 7.3
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 3

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
Misi 3: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman dan Berkualitas Tinggi										
Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan										
Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD	1. Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatnya kualifikasi guru PAUD	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD	Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD	Jumlah APE	-	182	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Workshop penyusunan materi PAUD	Kali/ Judul	-	7	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini			
			Sosialisasi Materi PAUD	Orang	-	937	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar	Meningkatnya wajib belajar anak usia sekolah	%	-	100	Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Pembinaan Sekolah Sehat	%	-	100	Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru menengah	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatnya kualifikasi guru menengah 3. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 4. Meningkatkan Pengelolaan, Pengawasan dan Manajemen	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan menengah	Sekolah	-	48	Peningkatan Akses Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional	Jumlah SBI	-	-				
			Persentase buta aksara > 15 th	%	3,2	2	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal & Informal	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Lembaga dan program PUDNI terakreditasi	%	0,03	3,50				
			Sarana Prasarana PLB	%	-	100	Program Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Persentase Peserta Didik Terlayani	%	-	100	Program Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Dokumen Data Pokok Pendidikan	dokumen	-	1	Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Persentase pemantauan dan pengendalian program dan proses pendidikan	%	-	100	Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya	Pendidikan	Dinas Pendidikan	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	Meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan berkualitas serta Dilandasi Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia	1. Tersedianya lembaga pendidikan berkarakter 2. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan boarding school 3. Meningkatnya jumlah sekolah bertaraf SBI dan RSBI 4. Meningkatkan kualitas literasi sekolah sehat 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik 6. Meningkatkan kompetensi pendidikan bernuansa surau	SDM berkualitas yang berkarakter	Kab/kota	-	19	Pendidikan Berkarakter	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Biro Binsos
				SD Piloting	Jumlah	N/A	38			
				SMP Piloting	Jumlah	N/A	38			
				Sosialisasi dan workshop pendidikan berkarakter	Kab/ Kota	N/A	19			
				Sekolah Sehat	%	35	60			
				Buku Pembelajaran bernuansa surau	%	N/A	100			
				Sinkronisasi Program	%	-	100	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya dan berkembangnya SDM Pertanian	Orang	-	210	Peningkatan dan pengembangan SDM Pertanian	Pendidikan	Dinas Pertanian
				Meningkatnya dan berkembangnya SDM Pertanian	Orang	-	75.300	Peningkatan dan pengembangan SDM Pertanian	Pendidikan	Dinas Pertanian
				Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Pertanian	Unit	-	2	Peningkatan dan pengembangan SDM Pertanian	Pendidikan	Dinas Pertanian
	Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses dan pelaksanaan pembangunan	1. Meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan 2. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas peneliti 3. Meningkatkan alokasi dana penelitian dan pengembangan 4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang 5. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase hasil riset dan pengembangan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan	%	-	60	Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintah dan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
								Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintah dan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
	Meningkatnya prestasi olah raga	1. Meningkatkan pembinaan dan permasyarakatan olahraga 2. Terwujudnya sarana dan prasarana olah raga yang representatif	1. Meningkatkan pembinaan olahraga yang intensif dan konsisten 2. Meningkatkan sarana prasarana olah raga	Meningkatnya pembudayaan olahraga masyarakat Sumatera Barat	%	24,91	100	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora dan Biro binsos
				Meningkatnya prestasi olahraga Sumatera Barat tingkat wilayah, Nasional dan Internasional	Even/ Peringkat	3/5 E/4	5/9 E/3			

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Pembinaan pusat pendidikan latihan olah raga pelajar (PPLP) dan sekolah keberbakatan olah raga (SKO)	Jumlah atlet	1	80			
				Prasarana dan sarana olah raga yang representatif	Unit Gedung/ GOR	3	12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
					Paket peralatan	0	15			
				Prasarana dan sarana Pemuda yang representatif	Unit Gedung/ GOR/ Paket Peralatan	0	6			
				Prasarana dan sarana kepramukaan yang representatif	Unit / Gedung/ GOR	0	3			
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan	Terwujudnya generasi muda yang berperan aktif dalam proses pembangunan	Meningkatkan kualitas dan peran serta pemuda dalam segala bidang pembangunan	Persentase peningkatan penyadaran pemuda	Keg/org	60	100	Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olah Raga	Biro Binsos
				Persentase peningkatan pemberdayaan pemuda	Keg/org	0	56			
				Persentase peningkatan pengembangan pemuda	Keg/org	60	100			
	Meningkatnya kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan	Meningkatnya kualitas organisasi pemuda peran serta keterampilan pemuda	1. Meningkatkan kualitas organisasi pemuda 2. Meningkatkan keterampilan pemuda	Pengembangan kepemimpinan pemuda						
				Persentase keterampilan dan semangat wirausaha pemuda	%/keg	N/A	100	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Kepemudaan & Olah Raga	Disdikpora
	Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat	Terwujudnya pelayanan perpustakaan yang berkualitas	1. Meningkatkan efektifitas pelayanan perpustakaan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan 3. Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan	Jumlah kunjungan pemustaka/pengunjung perpustakaan	Orang	6.575	35.000	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Perpustakaan	Badan Pustaka & Arsip
Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat										
	Meningkatnya Umur Harapan hidup	Terwujudnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat	Persentase ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	%	85	100	Obat dan Pembekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Ketersediaan jenis dan kuantitas obat esensial generik di pelayanan kesehatan rujukan	%	86	100	Obat dan Pembekalan Kesehatan	Kesehatan	RSUD Pariaman
				Persentase ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	%	85	100	Obat dan Pembekalan Kesehatan	Kesehatan	RSUD Solok
				Ketersediaan jenis dan kuantitas obat esensial generik di pelayanan kesehatan rujukan	%	86	100	Obat dan pembekalan kesehatan	Kesehatan	RSJ HB Saanin
				Persentase pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat	%	80	100	Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
				Pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat	%	76	100	Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	RSJ HB Saanin
				Alokasi biaya Tindak siaga Medik	%	100	100	Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
				Informasi KIA	%	80	100	Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
				Sinkronisasi Program Kesehatan masyarakat	%	100	100	Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
				Persentase promosi kesehatan kepada masyarakat	%	63,7	80	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
				Promosi kesehatan kepada masyarakat	%	46	78	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	RSJ HB Saanin
				Meningkatnya pemahaman pelaksanaan program penyehatan lingkungan	Kali per temuan	12	15	Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
				Penemuan kasus baru Tuberculosis	%	77,81	90	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular)	Kesehatan	Dinkes
				Meningkatnya Succes Rate TB	%	85	92	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular)	Kesehatan	Dinkes
				Cakupan ODHA yang diobati	%	100	90	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular)	Kesehatan	Dinkes

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index-API)	Per 100 penduduk	0,24	1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular)	Kesehatan	Dinkes
				Pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat dan setelah haji	%	100	100	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/tidak menular)	Kesehatan	Dinkes
				Persentase pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan	%	100	100	Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit Jiwa/RS Mata/RS Paru	Kesehatan	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi
				Sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa, RS Paru, RS Mata	Kesehatan	Dinkes
				Tugas belajar dokter spesialis	Orang	12	6	Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
				Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Kali pelatihan	21	20	Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
				Pertemuan peningkatan pelayanan kesehatan	Kali	20	20	Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
				Sinkronisasi Program Kesehatan Masyarakat	%	100	100	Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Kesehatan	Dinkes
				Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan	%Penduduk	50	100	Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Kesehatan	Dinkes
				Persentase ketersediaan data kesehatan secara akurat dan tepat	%	60	100	Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Kesehatan	Dinkes
				Persentase kesiap siagaan bencana	%	100	100	Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Kesehatan	Dinkes
				Jumlah Peneliti	Dokumen	1	5	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
				Jumlah Rumah Sakit Kab/Kota yang Memberikan Pelayanan Kepada Penduduk Miskin	Kab/ Kota	18	18	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	kesehatan	RSAM
				Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin	%	0	100	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	kesehatan	RSJ HB Saanin
				Standarisasi, Akreditasi dan Peningkatan mutu Pelayanan di RS				Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	RSAM

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Standarisasi, Akreditasi dan Peningkatan mutu Pelayanan di RS				Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	RSUD Solok
				Peningkatan pelayanan BLUD	%	0	100	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Kesehatan	RSUD Pariaman
				BOR	%	0	70	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Kesehatan	RSUD Achmad Muchtar
				BOR	%	0	75	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Kesehatan	RSUD Solok
				BOR	%	83,1	80	Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
	Menurunnya persentase gizi kurang	Penurunan persentase prevalensi gizi kurang	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	Status gizi kurang	%	8,2	6,8	Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender	1. Terwujudnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak 2. Meningkatnya peran serta wanita dalam proses pembangunan 3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan hak anak	1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak 2. Meningkatkan peran serta wanita dalam proses pembangunan 3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan anak	Indeks pembangunan Gender (IPG)		70,04			Pemb. Peremp Dan Perlindgan Anak	BPPR dan KB.
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		61,69			Pemb. Peremp Dan Perlindgan Anak	BPPR dan KB.
				Terlaksananya pemantauan terhadap KDRT dan KPA	%	40	90	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pemb. Peremp Dan Perlindgan Anak	BPPR dan KB.
				Meningkatnya peran serta wanita dalam proses pembangunan	Kali	3	4	Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Pemb. Peremp Dan Perlindgan Anak	BPPR dan KB.
				Pembinaan terhadap peran serta gender dalam pembangunan	%	60	50		BPPR dan Perlindungan Anak	BPPR dan KB
				Meningkatnya pengarusutamaan gender	Organisasi Perempuan	8	16	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	BPPR dan Perlindungan Anak	BPPR dan KB
				Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan	Kali pertemuan	5	13	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BPPR dan Perlindungan Anak	BPPR dan KB
				Terselenggaranya pengarusutamaan hak anak (PUHA)	Sistem Informasi	1	1	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	BPPR dan Perlindungan Anak	BPPR dan KB

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Sosialisasi Bagi Anak	Kali pertemuan	5	9	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPR KB
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatnya jumlah akseptor KB 2. Tersedianya informasi yang cukup ttg KB kepada masyarakat 3. Meningkatnya ketersediaan tenaga pendamping terampil	1. Meningkatkan jumlah akseptor KB terutama pasangan usia subur 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi ttg KB 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping terampil	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,34			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPR KB
				Jumlah akseptor KB	PUS	153.191	151.693	Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPR KB
				Persentase ketersediaan informasi KB pada masyarakat	%	60	100	Keluarga Berencana	Keluarga Berencana	BPPR dan KB
				Informasi KB	Kali	1	9	Keluarga Berencana	Keluarga Berencana	BPPR dan KB
				Tersedianya informasi pelayanan kontrasepsi	Kali	1	10	Pelayanan Alat Kontrasepsi	Keluarga Berencana	BPPR dan KB
				Menurunnya perkawinan Usia Dini	%	60	100	Kesehatan reproduksi remaja	BPPR dan Perlindungan Anak	BPPR dan KB
				Meningkatnya keluarga bahagia sejahtera	Kali	1	5	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat	BPPR dan Perlindungan Anak	BPPR dan KB
				Tersedianya tenaga pendamping terampil	%	100	100	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Keluarga Bina Balita	BPPR dan Perlindungan Anak	BPPR dan KB

7.1.5. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 4

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan adalah: meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani, membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan, mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan), mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) hasil perikanan (*fishery processing*), memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan, mengembangkan gerakan terpadu dalam memfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis nagari, dan memfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah.

Program prioritas untuk mencapai Misi 4 untuk dalam pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan adalah: Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani, Pengembangan Satu Petani Satu Sapi, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian, Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pelaku Usaha Pertanian dan masyarakat pesisir, Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Secara Berkelanjutan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan perikanan, Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produk Hasil Pertanian dan perikanan, Peningkatan Ketahanan dan Keamanan serta diversifikasi Pangan, Pengamanan Sumberdaya Hewani, Pengembangan Budidaya Perikanan dan pengelolaan perikanan tangkap.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan industri olahan, perdagangan, dan iklim investasi adalah: meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri, meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK, meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK, meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK, meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK, meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK, membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan, meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen, memperpendek mata rantai

pemasaran, meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi, mengembangkan pemberian insentif bagi para investor, meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor, dan mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan industri olahan, perdagangan, dan iklim investasi adalah: Gerakan Terpadu Pengembangan UMKM dan Koperasi, Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, Peningkatan Iklim Usaha Industri, Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan Manufaktur, Revitalisasi dan Pengembangan IKM, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah, Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Klaster Industri Unggulan, Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar, Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah, Peningkatan Daya saing penanaman modal, Peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Penyiapan potensi sumberdaya daerah, Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan investasi sumberdaya mineral dan batubara, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Kompetensi SDM dan Aparatur Pembina UMKMK, Dukungan Pemodalan & peningkatan akses permodalan UMKMK kelembagaan keuangan, Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Mendukung UMKMK, Pengembangan Kemitraan, Kualitas Produk, Promosi, dan Jaringan Pemasaran Produk UMKMK, Peningkatan koperasi dalam perekonomian daerah, Program terpadu peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil, Peningkatan lembaga keuangan non bank dalam pembiayaan UMKMK.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah: mengembangkan kawasan wisata alam Gunung Padang, mengembangkan kawasan wisata alam Mandeh, mengembangkan kawasan wisata alam Panorama Baru, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Kembar, mengembangkan kawasan wisata alam Kawasan Harau, mengembangkan kawasan wisata tambang Sawahlunto, mengembangkan kawasan wisata budaya Ulakan Tapakis, mengembangkan kawasan wisata budaya Pagaruyung, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Maninjau, mengembangkan kawasan wisata surfing Mentawai, meningkatkan promosi yang efektif melalui berbagai media, dan meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah: Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Wisata, Pengembangan Wisata Alam, Pengembangan SDM Pariwisata, Peningkatan dan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau, Peningkatan

Diplomasi Seni dan Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pemberdayaan lembaga-lembaga seni dan budaya, dan Pengembangan Pendidikan Budaya.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal adalah: mengembangkan basis data penduduk miskin, melakukan koordinasi program pengentasan kemiskinan, meningkatkan keterampilan penduduk miskin, memberikan bantuan biaya pendidikan penduduk miskin, memberikan jaminan kesehatan penduduk miskin, melakukan gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin, memberi bantuan permodalan bagi usaha mikro, meningkatkan perlindungan bagi keluarga miskin, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dan menambah lapangan usaha bagi angkatan kerja.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal adalah: Gerakan Terpadu peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan, Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan, Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Peningkatan Perlindungan Terhadap Keluarga Miskin, Penyempurnaan Database dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, Peningkatan aksesibilitas ke daerah tertinggal.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat adalah diperlukan arah kebijakan: meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, membangun jalan dan jembatan sesuai kebutuhan, membangun jalan dan jembatan penunjang ekonomi rakyat, meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang pada koridor-koridor utama, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil dan pulau; meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum (air bersih, limbah, sampah dan drainase) yang memadai dan terpadu; membangun jalan dan jembatan penunjang pariwisata, membangun jalan dan jembatan untuk evakuasi bencana, mengembangkan infrastruktur kawasan khusus/tertinggal, membangun prasarana jalan strategis antar daerah, membangun perumahan masyarakat, menata bangunan dan lingkungan permukiman, mengelola jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya, mengelola konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya,

mengembangkan angkutan kereta api, membangun dan rehabilitasi sarana dan fasilitas jalan, membangun dan rehabilitasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, mengembangkan komunikasi dan informasi, mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut, mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara, merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang, menyusun regulasi dan pengelolaan energi, mengembangkan energi kelistrikan.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat adalah: Peningkatan Partisipasi Investasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur (Public Private Partnership), Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air lainnya, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengembangan Angkutan Kereta Api, Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara, Perencanaan Penataan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan, Penyusunan Regulasi, Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi, Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus/Tertinggal, Pengembangan Komunikasi dan Informasi. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.4.

TABEL 7.4
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 4

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
I	Misi 1 : Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK									
1	Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat									
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1. Meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan 2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 3. Merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Ton	2.273.602	2.588.013	Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Menurunnya serangan hama dan penyakit tanaman	%	0,4	1			Dinas Pertanian
				Bertambahnya persen tase luas pertanaman yang menggunakan bibit unggul	%	30	38			Dinas Pertanian
				Peningktan produksi pertanian, peternakan, perkebunan	%	4	16	Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan	Pertanian	Dinas Perkebunan
				Pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman	%	1	15			Dinas Perkebunan
				Meningkatnya produksi benih unggul	%	30	42			Dinas Perkebunan
				Berkembangnya balai alih teknologi pertanian	Unit	1	1	Pengembangan Teknolgi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian Tepat Guna	Pertanian	Dinas Pertanian
				Terpenuhinya alsintan bagi petani	Unit	8.724	13.114		Pertanian	Dinas Pertanian
				Meningkatnya kapasitas penyuluhan	unit	20	60	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian		Dinas Pertanian
				Meningkatnya kapasitas penyuluh	Orang	1.496	1.496	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	Orang	35	-	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan penyuluhan	buku	1	1	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Pertanian	Bakorluh

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Meningkatnya kapasitas SDM penyuluh	jenis	4	4	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Pertanian	Bakorluh
				Temu tugas penyuluh	orang	180	210	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Pertanian	Bakorluh
				Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh	orang	160	210	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Pertanian	Bakorluh
				Meningkatnya motivasi kerja	orang	658	696	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Pertanian	Bakorluh
				Meningkatnya motivasi dan kinerja penyuluh	orang	18	18	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Pertanian	Bakorluh
				Meningkatnya kualitas kelembagaan gapoktan	Gapoktan	10	22	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Pertanian	Bakorluh
				Meningkatnya kapasitas balai penyuluhan	Unit	22	35	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Pertanian	Bakorluh
	Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.	Meningkatnya jumlah KSP pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Berkembangnya KSP : KSP Hortikultura	Kawasan	43	60	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				KSP Perkebunan	unit	14	30	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Pertanian	Dinas Perkebunan
				KSP Peternakan	ksp	6	14	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Pertanian	Dinas Peternakan
				Tersedianya ternak kambing untuk penambahan populasi di kawasan	Ekor	65	75			
				Meningkatnya luas tanam komoditi kakao (Ha)	Ha	84	170	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Pertanian	Perkebunan
				Meningkatnya luas tanam komoditi kopi (Ha)	Ha	47	75	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Pertanian	Perkebunan
				Meningkatnya luas tanam komoditi karet	Ha	170	177	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Pertanian	Perkebunan
				Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Ton	4.092	11.031	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Pertanian	Pertanian

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Ton	354.262	629.618	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Pertanian	Pertanian
				Perluasan Areal Pertanian	%	2	10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Perkebunan
				Pengembangan balai Benih	Unit	1	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Perkebunan
				Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Unit/ UPTD	6	6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian		Dinas Pertanian
				Evaluasi penggunaan dana kredit bagi petani		1	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Perkebunan
				Berfungsinya pasar ternak (unit)	Unit	1	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Peternakan
				Peningkatan luas lahan budidaya sesuai target produksi	Ha	870	940	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Perkebunan
				Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Ha	620	5.120	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian		Dinas pertanian
				Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Unit	19	47	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Ha	50	2.955	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Unit	11	20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Peternakan
				Peningkatan kualitas UPTD	Unit	3	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Peternakan
				Fasilitas SKIM Kredit bagi petani	Jenis SKIM	2	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Peternakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Jumlah produk semen beku	Dosis	80.000	100.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Peternakan
				Evaluasi penggunaan dana kredit bagi petani (SKIM)	Kelompok	5	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Peternakan
				Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Ha	50	2.955	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery)	1. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery) 2. Mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju	1. Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan. 2. Mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan) 3. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan 4. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) hasil perikanan (Fishery Processing) 5. Memberikan ban tuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, & perikanan	Terbanggunanya Balai Alih Teknologi Pertanian (BATP/Agro-Techno Park).						
				Terbanggunanya Science/Techno Park untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif.						
				Berkembangnya balai alih teknologi pertanian	Unit	1	1	Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna	Pertanian	Dinas Pertanian
				Terpenuhinya alsintan bagi petani	Unit	50	80	Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna	Pertanian	Dinas Pertanian
				Tersedianya calon bibit unggul	ekor	24	144	Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna	Pertanian	Dinas Peternakan
				Tersebar nya informasi teknologi peternakan	kali	1	5	Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna	Pertanian	Dinas Peternakan
				Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian	Unit	5	100	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian	Pertanian	Dinas pertanian
				Peningkatan produksi olahan hasil pertanian	Komoditi	90	190	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian	Pertanian	Dinas Perkebunan
				Tersedianya produksi olahan hasil pertanian	Macam	90	130	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian		Dinas Pertanian
				Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian	%	3	15	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian	Pertanian	Dinas Perkebunan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian	Kebun	100	620	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Sertifikasi produk pangan	Unit	2	12	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian	Pertanian	Dinas Perkebunan
				Peningkatan jumlah UP3HP/UPH	Unit	10	50	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian	Pertanian	Dinas Perkebunan
				Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian	Unit	85	135	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian		Dinas Pertanian
				Penerapan GHP dan GMP produk segar olahan	kelompok	1	5	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian		Dinas Peternakan
				Peningkatan kualitas usaha produk olahan peternakan	kelompok	8	19			Dinas Peternakan
				Penerapan GHP dan GMP produk segar olahan bagi UMKM	Unit	4	25	Peningkatan nilai tambah, daya saing produk hasil perikanan	Kelautan dan Perikanan	DKP
				Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	Ton	1.550,50	69.755,52	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DKP
				Peningkatan mutu produk perikanan	Jenis	2	10	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DKP
				Peningkatan unit pengolahan ikan yang bersertifikat	Unit	2	10	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DKP
				Meningkatnya jumlah kelompok tani yang melakukan kemitraan	unit	-	10	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Jumlah pelaku usaha yang melakukan kemitraan	Unit	0	4	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Jumlah aktivitas promosi produk peternakan	Event	3	3	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Terpenuhinya daging yang layak konsumsi Produk olahan : Dendeng	ton ton ton	1 20	11 465	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain	1. Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mengembangkan gerakan terpadu dalam memfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya	Susu Operasi pasar komoditi peternakan	ton komoditi	3	3			
					Ton	1.122,9	9.504,96	Peningkatan Pemasaan Hasil Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DKP
				Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera (KK)	KK		1.528	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Perkebunan
				Jumlah rumah tangga petani yang difasilitasi	KK	-	34.700	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dinas pertanian
				Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera di nagari tertinggal	KK	-	29.760	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dinas pertanian
				Terbentuknya model pengembangan sumberdaya hutan, serta penanganan kasus SDA	Ha	-	160	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dishut
				terbentuknya model pengembangan lebah madu/gula enau dll 94 unit	unit	-	94	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dishut
				Terbinanya Model social forestry dan Agroforestry 4 Ha	Ha	-	4	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dishut
				Terfasilitasinya pembangunan hutan tanaman (HTR/HKm/ HR) oleh 20 Kelompok tani	Kelompok	-	20	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dishut
				Peningkatan produksi bibit	%	5	17	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dina Perkebunan
				Kelompok ternak berprestasi	Kelompok	2	12	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Petugas lapangan berprestasi	orang	3	15	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Pembinaan terhadap kelembagaan agribisnis peternakan	Lembaga	6	10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas Peternakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Jumlah kelompok yang dibina untuk kelompok penangkar bibit	Kelompok	4	20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Jumlah peternak yang ditingkatkan pengetahuannya tentang peternakan dan kelembagaan kelompok	orang	150	1300	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang penanganan gangguan reproduksi ternak	orang	40	96	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Jumlah masyarakat yang dilatih tentang pemotongan hewan qurban dan kesrawan	orang	0	880	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang pemeriksaan daging di RPH	orang	20	20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang pengawasan obat hewan	orang	40	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Peningkatan kelembagaan Penangkar Benih/Bibit	Unit	86	110	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas pertanian
					unit	33	160			Dinas Perkebunan
				Berkembangnya luasan pertanian organik	Ha	750	2.000	Peningkatan produksi dan mutu produk pertanian secara berkelanjutan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Peningkatan modal usaha petani mandiri	Klp/ tahun	200	840	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dina Pertanian,
				Jumlah kelompok tani yang memiliki ternak	Kelompok	17	96	Pengembangan Satu Petani Satu Sapi	Pertanian	Dina Peternakan
				Jumlah ternak yang disebarkan pada kelompok	Ekor	170	1.083			Dina Peternakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Meningkatnya ketahanan pangan						
		Peningkatan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	Meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis nagari	Terumuskanya kebijakan ketahanan pangan	Tahun Kebijakan	-	1	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Ketersediaan protein	Grm/ Kap.hr	57	63	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Penganekaragaman pangan yang bila dikonsumsi sesuai dengan daya beli sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi	%	75	78	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Jumlah kelembagaan pangan masyarakat (LDPM) bertambah	Gapok-tan	0	12	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi	Ton	30	194,8	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Terbinanya sertifikat prima 2 dan prima 3	Sertifikat	0	136	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Tertanggulangnya masyarakat yang mengalami rawan pangan	Kab/Kota	0	19			
				Meningkatnya ketahanan pangan Melalui konsumsi, keamanan pangan, distribusi dan pemberdayaan ditingkat masy (diversifikasi pangan)						
				Tersedianya kebutuhan pangan dan gizi kelompok dengan mudah dan murah	Klpk	0	204	Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Terlaksananya dan tumbuhnya usaha bisnis kelompok pangan lokal	Klpk	4	25	Diversifikasi Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Menurunnya kasus penyakit hewan menular	Kasus	32	20	Pengamanan Sumberdaya Hewani	Pertanian	Dinas Peternakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	Meningkatnya kualitas & produktivitas berbagai komoditi perikanan	Meningkatnya produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan perikanan	1. Meningkatkan luas tanam komoditi unggulan perikanan 2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang perikanan 3. Merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani	Tersedianya pusat pelayanan keswan	Unit	65	75	Pengamanan Sumberdaya Hewani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan keswan	Unit	1	9	Pengamanan Sumberdaya Hewani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Meningkatnya aplikasi teknologi medik veteriner	Unit	1	1	Pengamanan Sumberdaya Hewani	Pertanian	Dinas Peternakan
				Peningkatan produksi benih/bibit	%	2	45	Pengembangan Budi daya Perikanan	Kelautan & Perikanan	DKP
				Peningkatan kelembagaan pembenihan rakyat yang disertifikasi (CPIB)	Unit	1	13	Pengembangan Budi daya Perikanan	Kelautan & Perikanan	DKP
				Peningkatan luas lahan produksi	Ha	12	180	Pengembangan Budi daya Perikanan	Kelautan & Perikanan	DKP
				Peningkatan produksi perikanan	%	26	116,5	Pengembangan Budi daya Perikanan	Kelautan & Perikanan	DKP
				Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan	Jenis	2	12	Pengembangan Budi daya Perikanan	Kelautan & Perikanan	DKP
				Fasilitasi sarana dan prasarana balai benih	unit	3	3	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM petani	Kelautan & Perikanan	DKP
				Peningkatan kapasitas Penyuluh	Orang	40	187	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Kelautan & Perikanan	DKP
	Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang perikanan	Mengembangkan sentra produksi komoditi perikanan.	Meningkatnya jumlah KSP perikanan	Berkembangnya KSP Perikanan						
				KSP Perikanan	Kawasan	15	15	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	Kelautan & Perikanan	DKP
				Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan	Ton	22	5.745	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	Kelautan & Perikanan	DKP
				Meningkatnya jumlah produksi komoditi Tuna						
				Meningkatnya jumlah produksi komoditi Nila	Ton	44.160,37	522.384,1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	Kelautan & Perikanan	DKP
				Meningkatnya jumlah produksi komoditi Kerapu	Ton	11,98	758,59	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	Kelautan & Perikanan	DKP
				Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap						

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Fasilitasi izin usaha perikanan tangkap	Dokumen	80	400	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan & Perikanan	DKP
				Peningkatan kapasitas KUB nelayan skala kecil	Kelompok	2	36	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan & Perikanan	DKP
				Peningkatan jumlah kapal dan alat tangkap	Unit	21.442	25.523	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan & Perikanan	DKP
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain	1. Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perikanan 2. Mengembangkan gerakan terpadu dalam memfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya	Meningkat jumlah rumah tangga nelayan sejahtera Perencanaan Penganggaran Monitoring Evaluasi yang terintegrasi dan tepat waktu	% / Tahun	-	80	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Pertanian	Dinas Perkebunan
Prioritas 6: Pengembangan Industri Olahan, UMKMK Perdagangan dan Iklim Investasi										
	Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi	Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi	1. Meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK 3. Meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK 4. Meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK 5. Meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi - Jumlah koperasi yang ditingkatkan kualitasnya (unit) - Jumlah Koperasi yang bersertifikasi (Unit) - Penurunan koperasi tidak aktif - Jumlah koperasi yang berprestasi dan akuntabel (unit) Meningkatnya kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur UMKMK - Jumlah pengelola Koperasi dan IKM yang di latih	Unit Unit % / Tahun Unit	38 0 2 18	237 25 2 30	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi & Usaha Kecil & Menengah Koperasi & Usaha Kecil & Menengah Koperasi & Usaha Kecil & Menengah Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi
					Orang	120	600	Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK	Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	Dinas Koperasi

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				- Jumlah UMK yang dilatih (orang)	Orang	90	600	Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK	Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	Dinas Koperasi
				Meningkatnya permodalan UMKMK	Orang	90	540	Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK	Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	Dinas Koperasi
				Meningkatnya permodalan UMKMK						
				Jumlah PKL yang diberi bantuan modal	unit	7.000	13.000	Peningkatan Dukungan dan Akses Permodalan UMKMK	Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	Dinas Koperasi
				Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha mikro dajin kecil	UMK	0	950	Prog. Terpadu Peningkatan Kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil	Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	Dinas Koperasi
				Meningkatnya lembaga keuangan non bank dalam pembiayaan UMKMK	Unit	20	70	Peningkatan Lembaga keuangan Non Bank Dalam Pembiayaan UMKMK	Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	Dinas Koperasi
				Meningkatnya kemitraan dan kualitas promosi pemasaran	% / Thn	15	25	Pengembangan Kemitraan UMKMK	Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	Dinas Koperasi, BKPM, Biro Perekonomian
				Meningkatnya peranan koperasi dalam sektor riil	Unit	10	50	Peningkatan Peranan Koperasi dalam Setor Riil	Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	Dinas Koperasi
	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan kerjasama promosi dan investasi	1. Mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal 2. Mengembangkan pemberian insentif bagi para investor 3. Meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor 4. Meningkatkan investasi dan pengawasan sumber daya mineral dan batubara	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan realisasi investasi				Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal		
				Jumlah perizinan/ non perizinan yang diterbitkan PT SP	Izin/non izin	0	940		Penanaman Modal	BKPMP
				Realisasi investasi : a. PMDN b. PMA	Milyar Rupiah Juta US \$	404,65 17,81	2.703,65 132,81		Penanaman Modal	BKPMP BKPMP
				Meningkatnya calon investor yang berminat menanamkan modalnya di SumBAR dan Kerjasama di bidang investasi				Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				- Jumlah calon investor	Calon Investor	46	215		Penanaman Modal	BKPMP
				- Jumlah kesepakatan kerjasama	Jumlah MoU	0	10		Penanaman Modal	BKPMP
				Tersedianya dokumen pendukung sumber daya daerah	Dokumen	0	9	Penyiapan Potensi Sumberdaya daerah	Penanaman Modal	BKPMP
				Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	dokumen	0	2	Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Sumberdaya Mineral dan Batubara	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas ESDM
				Beroperasinya kegiatan pertambangan yang telah diberikan izin	Izin	30	40	Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Sumberdaya Mineral dan Batubara	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas ESDM
				Terwujudnya kawasan PETI yang menjadi wilayah Pertambangan Rakyat	Peti	0	42	Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Sumberdaya Mineral dan Batubara	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas ESDM
				Meningkatnya jumlah Sarana pasar yang berkualitas	Unit	0	1.050		Perdagangan	Dinas Perindag
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Menyediakan pasar yang layak untuk perdagangan	Membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan	Jumlah bantuan sarana perdagangan	Unit/ tahun	0	1.050	Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindag
				Stabilisasi harga	Kali/ tahun	0	6	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Dinas Perindag
				Laju Inflasi	%/tahun	0	< 10		Perdagangan	Dinas Perindag
				Stabilnya tingkat inflasi	%	0	100	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perindag
				Persentase peningkatan transaksi lelang	%/ Tahun	1	2 %		Perdagangan	Dinas Perindag
	Meningkatnya ekspor daerah	Meningkatkan daya saing komoditi daerah	1. Memperpendek mata rantai pemasaran 2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi	Meningkatnya nilai ekspor daerah	US \$ juta	2.219	2.750	Peningkatan & Pengembangan Ekspor Daerah	Perdagangan	Dinas Perindag
				- Jumlah produk yang diekspor	Komoditi	1	37-39	Peningkatan & Pengembangan Ekspor Daerah	Perdagangan	Dinas Perindag
				- Jumlah negara tujuan ekspor	Negara	40-45	47-50	Peningkatan & Pengembangan Ekspor Daerah	Perdagangan	Dinas Perindag
				- Jumlah sertifikat mutu yang diterbitkan	Sertifikat Mutu	0	1700	Peningkatan & Pengembangan Ekspor Daerah	Perdagangan	Dinas Perindag

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Meningkatnya keterampilan pelaku usaha dan aparatur perdagangan	Orang	0	532	Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindag
	Peningkatan perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Melindungi konsumen dari kecurangan perdagangan	Meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen	Berkurangnya konsumen yang dirugikan	Orang/tahun	0	720		Perdagangan	Dinas Perindag
				- Jumlah produk yang memenuhi SNI.	Produk/tahun	6	30	Peningkatan Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindag
				- Peningkatan jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	%/tahun	5	25	Peningkatan Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindag
	- Meningkatkan jumlah industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah	Mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah	- Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah	Berkembangnya sentra-sentra industri potensial	Unit Sentra/tahun	5	25	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Perindag
				Meningkatnya investasi usaha IKM.	% / Th	2	2,25	Peningkatan Iklim Usaha Industri	Perindustrian	Dinas Perindag
				Jumlah unit usaha industri unggulan daerah	Unit usaha	1	10	Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan Manufaktur	Perindustrian	Dinas Perindag
				Peningkatan jumlah unit usaha industri kecil (formal dan non formal)	Unit usaha/tahun	0	700	Revitalisasi dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Perindag
				Peningkatan jumlah unit usaha industri menengah	Unit usaha/tahun	1	25			
				Jumlah rekayasa teknologi tepat guna	Unit	3	18	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Perindustrian	Dinas Perindag
				Terbangunnya aglomerasi industri	Klaster/tahun	1	3	Pengembangan Klas ter Industri Unggulan		
	- Meningkatkan serapan tenaga kerja pada industri olahan	Meningkatkan jumlah pelaku usaha industri pengolahan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri	Meningkatnya produktifitas SDM IKM	Orang/tahun	50	250	Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah dan Aparat Pembina	Perindustrian	Dinas Perindag
	Meningkatnya fasilitas pengembangan UMKMK dalam upaya mendukung ekonomi lokal dan berdaya saing			Meningkatnya keikutsertaan UMK pada pameran tingkat nasional	Jumlah UMK	27	25	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	Biro Perekonomian

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
Prioritas 7 : Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya										
	Berkembangnya wisata seni dan budaya	Mengembangkan wisata seni dan budaya daerah	1. Meningkatkan kualitas cagar budaya dan kapasitas sumber-daya manusia seni dan budaya daerah 2. Meningkatkan Kualitas produk wisata budaya	Meningkatnya jumlah event budaya	Event	8	94	Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Meningkatnya jumlah event ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Event			Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Meningkatnya jumlah pengelolaan kekayaan budaya yang difasilitasi	Kali	3	7	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Meningkat dan berkembangnya produk wisata budaya	Produk	0	12	Peningkatan dan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Meningkat dan berkembangnya produk ekonomi kreatif berbasis media desain dan IPTEK	Produk			Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media desain dan IPTEK	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya jumlah dan kualitas wisata alam dan wisata budaya yang difasilitasi pengembangannya	Mengembangkan kawasan wisata alam unggulan utama Sumatera Barat	1. Mengembangkan kawasan (kws) wisata alam Gunung Padang 2. Mengembangkan kws. wisata alam Mandeh 3. Mengembangkan kws. wisata alam Panorama Baru 4. Mengembangkan kws. wisata alam Danau Kembar 5. Mengembangkan kws. wisata alam kws. Harau 6. Mengembangkan kws. wisata alam danau maninjau 7. Mengembangkan kws. wisata surfing Mentawai	Meningkatnya jumlah kawasan wisata alamyang difasilitasi	Kawasan	2	14	Pengembangan Kawasan Wisata Alam	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Meningkatnya jumlah kawasan wisata alam yang difasilitasi	kawasan			Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata alam	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Mengembangkan kawasan wisata budaya unggulan utama Sumatera Barat	1. Mengembangkan kws. wisata tambang Sawahlunto 2. Mengembangkan kws. wisata budaya Ulakan Tapakis 3. Mengembangkan kws. wisata budaya	Meningkatnya kualitas kawasan wisata budaya	Kawasan	0	19	Pengembangan Kawasan Wisata Budaya	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Meningkatnya kualitas kawasan wisata budaya	Kawasan			Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata Budaya	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara	Meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata	Meningkatkan promosi yang efektif	Meningkatnya pelaksanaan promosi pariwisata Sumatera Barat	Event	0	121	Pengembangan Pemasaran Wisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha dan aparatur parawisata	Meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata	Meningkatnya jumlah SDM pariwisata yang memiliki kompetensi dan profesionalisme bidang pariwisata	Orang	100	1120	Pengembangan SDM Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pembangunan Jalan Menuju Objek Wisata (kws. Wisata Alam Gn. Padang, Mandeh, Panorama Baru, Danau Kembar, Harau, Danau Maninjau, Kws. Surfing Maninjau, Kws. Wisata Tambang Sawahlunto, Kws. Wisata Budaya Ulakan Tapakis)	KM	0	25	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Prasjal Tarkim
Prioritas 8: Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal										
	Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terwujudnya pelayanan terhadap PMKS	1. Meningkatkan pelayanan panti sosial untuk PMKS 2. Meningkatkan keterampilan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	Meningkatnya Pelayanan terhadap PMKS						
				Penyuluhan dan pembinaan kepada eks penyandang penyakit social	Orang		40	Program Eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Sosial	Dinas Sosial
				Persentase partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan social	%	N/A	100	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
				Jumlah fakir msikin, komoditas adat terpencil, PMKS	Orang	N/A	6.000 (K)	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinsos
				Terlaksananya rehabilitasi kesejahteraan social	%	N/A	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
				Meningkatnya kemandirian dan keterampilan anak terlantar	Orang	360	360	Pembinaan Anak Terlantar	Sosial	Dinas Sosial

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Meningkatnya keterampilan anak cacat	Orang	150	150	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Sosial	Dinas Sosial
				Meningkatnya layanan bagi penghuni panti	Orang	155	155	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Sosial	Dinas Sosial
				Jumlah lanjutan usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	180	180		Sosial	Dinas Sosial
	Tervujudnya pemeliharaan taman makam pahlawan kusuma negara Padang			Luas Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	M2	28,50	1948,5	Pengembangan nilai budaya	Kebudayaan	Dinas Sosial
	Tervujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial	Tervujudnya Sasaran program/kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien	Sinkronisasi dan sinergitas program/ kegiatan bidang kesejahteraan sosial	Sinkronisasi program Pembangunan kesejahteraan sosial	Kali	N/A	6	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Sosial	Biro Binsos
				Terlaksananya program rehabilitasi social pasca bencana alam	Kab/Kota	N/A	11	Pengelolaan dan Penanganan dampak Bencana Alam	Sosial	Biro Binsos
				Terlaksananya koordinasi pembinaan penanggulangan gizi masyarakat	Kali	N/A	43	Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat	Sosial	Biro Binsos
	Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya	Tervujudnya pengembangan sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu	1. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja 3. Memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	416	2080	Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga Kerja	Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasian	Disnakertrans
				Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat	Orang	350	700	Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga Kerja		
				Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kewirusahaan	Orang	150	150	Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga Kerja		
				Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Orang	3500	14100	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasian	Disnakertrans
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Kasus	15	10	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasian	Disnakertrans

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	orang	50.000	103.184			
				Besaran pengujian lingkungan kerja di perusahaan	Sampel	800	840	Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasian	Disnakertrans
				Besaran pemeriksaan kesehatan kerja di perusahaan	Orang	900	900	Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasian	Disnakertrans
				Besaran perusahaan yang harus menerapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan Tenaga kerja dan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan	Perusahaan	150	28,45	Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasian	Disnakertrans
				Besaran kelompok usaha mandiri yang diberi bantuan	Orang	240	240	Gerakan terpadu kesejahteraan fakir miskin	Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasian	Disnakertrans
				Besaran transmigrans yang akan dibina	KK	70	70	Transmigrasi	Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasian	Disnakertrans
				Meningkatnya pemasukan keuangan daerah	Perusahaan	40	40	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ketenaga kerjaan dan Ket ransmigrasian	Disnakertrans
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatkan integrasi sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tepat dan jaminan pelaksanaan program tepat pada sasaran keluarga miskin	1. Meningkatkan efektifitas penggunaan data kemiskinan 2. Meningkatkan efektifitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan keterpaduan dalam penanggulangan kemiskinan	Kali Rapat	N/A	16 (k)	Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat	BPM
	Berkurangnya Jumlah Daerah tertinggal	Terwujudnya sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal yang tepat sasaran, efektif dan efisien.	1. Meningkatkan koordinasi integrasi, sinkronisasi & sinergitas program & kegiatan pembangunan daerah tertinggal 2. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah	Jumlah koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah tertinggal	Jumlah Koordinasi & kerjasama Perencanaan Pembangunan daerah tertinggal.	19	15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Peningkatan Pertumbuhan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal	Kawasan	0	125	Pembangunan Infrastruktur permukiman di perdesaan	Perumahan	Dinas Prasjal Tarkim
				Pembinaan kelompok lokasi penerima bantuan	Kab		5	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari	Pemberdayaan Masyarakat	BPM
				Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat	Kali		1	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari	Pemberdayaan Masyarakat	BPM
				Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat	%		100	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari	Pemberdayaan Masyarakat	BPM
				Tersedianya lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan masyarakat di daerah	Kali		53	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari	Pemberdayaan Masyarakat	BPM
				Meningkatnya partisipasi masyarakat	Kab/Kota	0	19	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari	Pemberdayaan Masyarakat	BPM
	Pensejahteraan ekonomi masyarakat pesisir				KK	-	5.680	Gerakan pensejahteraan ekonomi masyarakat pesisir	Kelautan dan Perikanan	DKP
Prioritas 9: Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat										
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Membangun jalan dan jembatan pada kawasan sentra produksi	1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan 2. Meningkatkan aksesibilitas wil. yang sedang dan belum berkembang pada koridor-koridor utama, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil dan pulau 3. Meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kondisi jalan/ jembatan & bertambahnya panjang jalan /jembatan yang terbangun						
				Pembangunan jembatan kelok sembilan	Meter	-	432	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim
				Pembangunan dan peningkatan jalan nasional	Km	-	300	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim
				Pembangunan Jalan Rao-Rokan (Bts. Riau)	Km	-	5	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim
				Pembangunan dan peningkatan jalan nasional pantai barat	Km	-	60	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Terlaksananya pembangunan jalan Padang - By pass	Km	-	14	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Prasjal Tarkim (Balai Besar Pelaksanaan Jalan II)
				Lanjutan pembangunan jalan Duku-Sicincin – Malalak–Bukittinggi	Km	-	20	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim
				Pembangunan Jembatan Provinsi dan Jembatan Strategis Provinsi	Meter	-	250	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim
				Peningkatan Jalan Provinsi	Km	-	75	Pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim
				Pembangunan Jalan Baru (Jalan strategis provinsi)	Km	-	40	Pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim
				Meningkatnya sistem jaringan jalan yang ada agar tetap dalam kondisi yang layak sesuai dengan standar pelayanan	KM/ tahun	-	800	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Balai Besar Pelaksana Jalan II
				Pemeliharaan rutin jembatan nasional	Meter/ tahun	-	6.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Balai Besar Pelaksana Jalan II
				Rehab/ Pemeliharaan Jalan dan jembatan Provinsi	KM/ tahun	-	600	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim
				Kemantapan Jalan Nasional	%	90	95	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim
				Kemantapan Jalan Provinsi	%	80	88	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pras jal Tarkim
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan	kws		125	Pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan	Perumahan	Dinas Pras jal Tarkim
				Peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan perdesaan	kws	-	25	Pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan	Perumahan	Dinas Pras jal Tarkim
				Terbangunnya jalan perdesaan penunjang pertanian dan perkebunan	kws	-	10	Pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan	Perumahan	Dinas Pras jal Tarkim

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	Meningkatnya pengelolaan sumber-daya air	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	1. Mengelola jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya 2. Mengelola konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya 3. Optimalisasi bendung dan embung yang telah dibangun untuk menunjang irigasi & pertanian 4. Mendayagunakan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga, pertanian, perkotaan, dan industri 5. Melindungi kawasan prioritas dari daya rusak air akibat banjir, abrasi pantai, dan lahar gunung berapi/sedimen	Terbangunnya irigasi baru	Km	2,311	15	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
				Terehabilitasinya jaringan irigasi	Ha	15.403	24.206	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
				Laksanakan OP jaringan irigasi	Ha	31.720	35.246	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
				Terehabilitasinya jaringan rawa	Ha	300	300	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
				Laksanakan OP Jaringan rawa	Ha	31.354	31.354	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
				Laksanakan rehab dan OP sumur air tanah	Buah	1	1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
						2	2	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA (BWSS V)	
				Laksanakan pembangunan checkdam	unit	2	4	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
				Laksanakan pembangunan embung	unit	1	2	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
				Laksanakan rehab embung	unit	2	5	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
				Laksanakan OP Embung	unit	20	25	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA + BWSS V
				Terbangunnya bendung	Ha	500	6.100	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	Penyediaan dan pengelolaan air baku			Terpeliharanya persediaan air baku	kawasan	3	3	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA (BWSS V)
	Pengendalian banjir dan pengamanan pantai			Pengamanan banjir dan pantai	KM	10	60	Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
					Kawasan	2	5			
	Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	1. Merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang	Meningkatnya perencanaan penataan ruang di Sumbar	Buku	-	10	Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Prasjal Tarkim
				Penetapan Perda, Pergub dan SK.Gub dalam penataan ruang	Perda	-	1	Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Prasjal Tarkim
				Meningkatnya keserasian dan keselarasan program pembangunan di Sumbar	kawasan	-	13	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Prasjal Tarkim
				Tersedianya dokumen zoning regulasian	Buku	-	1	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Prasjal Tarkim
	Tersedianya perumahan dan permukiman masyarakat	1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat 2. Menyediakan perumahan dan permukiman masyarakat	1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat 2. Membangun perumahan masyarakat 3. Menata bangunan dan lingkungan permukiman	Meningkatkan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan memperkuat kelembagaan bidang perumahan	Paket	-	5	Pengembangan Perumahan dan permukiman	Perumahan	Dinas Prasjal Tarkim
				Pembangunan dan pengembangan TPA regional	Kawasan	-	-	Pengembangan Perumahan dan permukiman	Perumahan	Dinas Prasjal Tarkim
				Pengembangan system pelayanan air minum	Kawasan	-	50	Pengembangan Perumahan dan permukiman	Perumahan	Dinas Prasjal Tarkim
				Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan di Sumbar	%	-	25	Penataan bangunan dan lingkungan	Perumahan	Dinas Prasjal Tarkim
				Rekontruksi bangunan SKPD dan Kanwil KL yang roboh (20-buah)	unit		19	Penataan bangunan dan lingkungan	Perumahan	Dinas Prasjal Tarkim
				Revitalisasi kawasan tradisional dan bersejarah	Paket		3	Penataan bangunan dan lingkungan	Perumahan	Dinas Prasjal Tarkim

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara	1. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal 2. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut 3. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara 4. Mengembangkan angkutan kereta api	Meningkatnya pengembangan angkutan kereta api di Sumbar	km	Kajian, ganti rugi tanah dan fisik	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Terlaksananya pelayanan berklasifikasi baik berdasarkan standart pelayanan perhubungan darat	%	-	80	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan kewenangan Provinsi	Paket	-	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Meningkatnya pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Sumbar (%)	Unit	-	-	Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Tranpsortasi Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Meningkatnya penyelenggaraan Moda Transportasi Laut di Sumbar	paket	-	1	Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Tranpsortasi Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Peningkatan dermaga dan fasilitas penunjang lainnya pada pelabuhan laut (Teluk Bayur dan Teluk Tapang)	Paket	-	1	Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Tranpsortasi Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Penetapan Perda / Pergub / SK.Gub	Paket	-	2	Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Tranpsortasi Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Terlaksananya pembangunan dermaga khusus & areal pergudangan	Paket	-	-	Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Tranpsortasi Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Terbangunnya dermaga dan pergudangan	Paket	-	1	Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Tranpsortasi Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Meningkatkan moda transportasi laut pada daerah terpencil (Kab. Mentawai)	unit	-	1	Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Tranpsortasi Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan moda transportasi udara di Sumbar	Meter	2.750	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Terlaksananya pembangunan Bandara three in one di Mentawai	paket	-	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Terlaksananya Rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan prasarana, fasilitas Angkutan Kereta Api	paket			Pengembangan Angkutan Kereta Api	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Tersedianya perencanaan rencana induk pembangunan jaringan KA Sumbar	paket			Pengembangan Angkutan Kereta Api	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Meningkatkan keselamatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	%			Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik	1. Mengembangkan energi kelistrikan 2. Menyusun regulasi dan dokumen pengelolaan energi	75 % rasio elektrifikasi	%	69,50	75	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
				Terlatihnya operator pelaku usaha kelistrikan	Orang	20	100	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
				Pemanfaatan energi terbarukan	Unit	3 (1 PLTMH; 2 Pico)	12 (8 LTMH; 4 Pico)	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
				Tersedianya data perencanaan pengembangan energi kelistrikan	Buku	0	1 Perda	Penyempurnaan restrukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana energi dan kelistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM

7.1.6. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 5

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 5 adalah: menyediakan peta dan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana prasarana evakuasi bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesiagaan bencana, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan konservasi sumberdaya alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mengamankan hutan dari *illegal logging*, serta mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Sedangkan program prioritas untuk mewujudkan misi 5 adalah: Peningkatan Mitigasi Bencana, Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, Penanganan Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan & Konservasi Sumberdaya Hutan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim, Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.5.

TABEL 7.5
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 5

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan										
Prioritas 10: Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup										
	Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana	Meningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana	1. Meningkatkan sarana prasarana evakuasi bencana	Jalan evakuasi yang dibangun	KM	-	5	Pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Prasarjal Tarkim
				Jembatan evakuasi yang dibangun	Unit	-	3	Pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Prasarjal Tarkim
				Escape building yang dibangun	Unit	-	1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pekerjaan Umum	Dinas Prasarjal Tarkim
				Shelter/ tempat Evakuasi yang dibangun	Buah	-	5	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pekerjaan Umum	Dinas Prasarjal Tarkim
				Terbangunnya perkua-tan tebing sungai	KM	0,5	4,0	Pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Lingkungan Hidup	Dinas PSDA
				Terbangunnya tanggul pengendali banjir	KM	1	5	Pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Lingkungan Hidup	Dinas PSDA
				Terbangunnya penga-manan pantai	Unit	3	5	Pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Lingkungan Hidup	Dinas PSDA
				Terbangunnya tanggul pengendali sedimen/lahar	Unit	3	3	Pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Lingkungan Hidup	Dinas PSDA
Tersedianya infor-masi wilayah rawan bencana	Menyediakan informasi wilayah rawan bencana	Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana &terpadu	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)	Laporan	1	1	Peningkatan Mitigasi Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD	
			Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) per-jenis bencana	Laporan	-	1	Peningkatan Mitigasi Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD	
			Penetapan dan peny-usunan dok. kebijakan (Perda, Pergub, SK-Gub)	Paket	-	1	Peningkatan Mitigasi Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD	
			Penetapan pemben tukan Pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Prov. / Kab. / Kota	Prov. Kab/ Kota	3 1	3 14	Peningkatan Mitigasi Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD	
			Penetapan dan pembi-naan Forum Pengurangan risiko Bencana (Prov. / Kab. / Kota)	Prov. Kab/ Kota	3 1	3 14	Peningkatan Mitigasi Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Paket	-	1	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD
				Terlaksananya operasional PUSDALOPS Prov.	Tahun	1	1	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD
				Terlaksananya Simulasi/ Pelatihan PB bagi Masyarakat (Kab. / Kota)	Prov/ Kab/ Kota	5	20	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD
				Terlaksananya peningkatan akses Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) - Paket	Paket	1	1	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD
				Tersedianya peta distribusi penduduk kawasan rawan bencana gunung api (lembar)	Buah	1	5	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Lingkungan Hidup	ESDM
				Tersedianya peta kawasan rawan gerakan tanah (lembar)	Lembar	-	1	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Lingkungan Hidup	ESDM
				Jumlah monitor gunung api prov. Sumatera Barat	Paket	-	1	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Lingkungan Hidup	ESDM
				Peta daerah rawan bencana geologi	Lembar	-	4	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Lingkungan Hidup	ESDM
				Penyediaan Peralatan kebencanaan/ Lapangan	paket	-	-	Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD
				Terlaksananya Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat	%	60	80	Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian	Terkendalinya sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Objek	-	24	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BAPEDALDA
				Jumlah kab/kota yang dibina	Kab/ Kota		5	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BAPEDALDA
				Masyarakat pelopor pelestarian lingkungan Perusahaan pelaksana CSR Lingkungan	Orang/Klp Perusahaan		4 10	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BAPEDALDA

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Terpantaunya pencemaran sungai dan danau	<i>Sungai Danau</i>		5 4	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BAPEDALDA
				Ditetapkannya daya dukung dan daya tampung sungai	<i>Sungai</i>		1	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BAPEDALDA
				Terfasilitasinya penyusunan status Kehati 19 kab/kota dan tersusunnya 1 (satu) rangkuman Kehati Provinsi	<i>Kab/ Kota</i>		3	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BAPEDALDA
				Terhimpun, Tersusun dan Terselamatkannya arsip/ dokumen daerah	<i>%</i>		15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Lingkungan Hidup	BAPEDALDA
				Terlindunginya kawasan konservasi sumber daya alam	<i>Kawasan</i>	1	5	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	DKP
	Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem	Meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem	1. Mengembangkan konservasi sumberdaya alam 2. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pembinaan KLHS	Kab Kota	-	2	Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	Lingkungan Hidup	BAPEDALDA
				Terfasilitasinya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan	<i>%</i>	-	100	Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	Lingkungan Hidup	BAPEDALDA
				Berkurangnya lahan kritis baik di dalam maupun diluar kawasan hutan 10.000 ha/ tahun	Batang	-	210.000	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	Dishut
					Batang	-	15.300.000	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BP DAS Agam Kuantan
					Batang		15.000.000	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BP DAS Indra Giri
					Batang		15.000.000	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BP DAS Batang Hari
				Terehabilitasinya lahan kritis dalam kawasan hutan 30.603 Ha	Ha	-	165	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	Dishut,
					Ha	-	27.229	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BP DAS Indragiri
					Ha	-	1.864	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BP DAS Agam Kuantan
					Ha		1350	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BP DAS Batang Hari

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan 66.490 ha	Ha	-	194	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	Dishut,
					Ha	-	36.784	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BPDAS Indragiri
					Ha	-	21.578	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BPDAS Agam Kuantan
					Ha		7.934	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BP DAS Batang Hari
				Terbangunnya bangunan konservasi (Dam Pengendali, Dam Penahan dan Guliv Plug) 12 unit	Unit	-	4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BPDAS Indragiri
					Unit	-	0	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BPDAS Agam Kuantan
					unit		0	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BP DAS Batang Hari
					unit		8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	Dishut
				Terbangunnya bangunan konservasi (Sumur Resapan, Embung dan Biopori) 6 unit	Unit	-	6	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	Dishut,
					Unit	-	0	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BPDAS Indragiri
					Unit	-	0	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BPDAS Agam Kuantan
					Unit	-	0	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BP DAS Batang Hari
				Terbangunnya teras guludan 0 unit	unit	-	-	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup	BPDAS Indragiri
				Terpeliharanya batas kawasan hutan 330 Km	Km	-	170	Pemantapan Kawasan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Penataan batas kawasan hutan (batas fungsi, batas luar) 350 Km	Km	-	75	Pemantapan Kawasan Hutan	Kehutanan	BPKH Wil. II
				Penataan batas kawasan hutan (batas fungsi, batas luar) 350 Km	unit	-	1	Pemantapan Kawasan Hutan	Kehutanan	Dishut
				Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) model 3 unit	Judul	-	107	Pemantapan Kawasan Hutan	Kehutanan	Dishut

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Tebentuknya model pengembangan sumber daya hutan, serta penanganan kasus SDA	Ha	-	160	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Kehutanan
				Terbentuknya model pengembangan lebah madu/gula enau dll 94 unit	Unit	-	94	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Kehutanan
				Terbinanya model sosial forestry dan agroforestry 2 Ha	Ha		4	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Kehutanan
				Terfasilitasinya pembangunan hutan tanaman (HTR/HKm/HR) oleh 20 kelompok tani	Klp tani		20	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Kehutanan
				Peningkatan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan 5%	Kab/ Kota	-	19	Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan Legal di Kab/Kota	Kab/ Kota	-	19	Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan performance industri Hasil hutan di Kab/Kota	Kab/ Kota	-	19	Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
	Mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut			Meningkatnya kawasan pesisir yang rusak pulih kembali Terlaksananya Rehabilitasi hutan Mangrove	Ha	-	50	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir danLaut	Lingkungan Hidup	DKP
				Terlaksananya Penghijauan pantai 50 ha	Ha	10	50	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir danLaut	Lingkungan Hidup	DKP
				Terlaksananya rehabilitasi terumbu karang	Ha	3	15	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir danLaut	Lingkungan Hidup	DKP
				Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perairan umum, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Kawasan	5	44	Pengelolaan sumberdaya perairan umum, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Lingkungan Hidup	DKP

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SAT	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Terlaksananya rehabilitasi terumbu karang	Lokasi	2	9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Kelautan dan Perikanan	DKP
	Menurunnya jumlah illegal logging dan illegal fishing	Menurunkan jumlah illegal logging dan illegal fishing	1. Mengamankan hutan dari illegal logging 2. Peningkatan kapasitas hukum kawasan hutan 20 %	Berkurangnya tekanan kerusakan hutan 20%	%	-	20	Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	Dishut, BKSDA TNKS Wil. II, TNS
				Pengawasan hot spot dan pengendalian kebakaran	Kab/kota	-	6	Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	Dishut, BKSDA TNKS Wil. II, TNS
				Meningkatnya pemahaman Aparatur tentang REDD pada 10 Kab	Kab	-	10	Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	Dishut
				Perkembangan ekosistem kawasan hutan atau lahan daerah rawan bencana	lokasi		41	Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	Dishut

7.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

Pelaksanaan pembangunan selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai daerah. Namun, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antarwilayah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan arahan umum pembangunan wilayah RPJPD 2005-2025, dan prioritas dalam RPJMD 2010-2015, maka arah pengembangan wilayah ditujukan untuk (1) mendorong terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata di seluruh wilayah; (2) mendorong pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya; (3) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem darat dan perairan pesisir; (4) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan; (5) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional; (6) memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan;

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat sebesar 9,54 % pada tahun 2009 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Permasalahan kemiskinan di Sumatera Barat antara lain (1) masih terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, modal, sarana produksi dan perlindungan pemasaran produk (2) ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi lingkungan, air minum serta penerangan.

Provinsi Sumatera Barat, saat ini masih terdapat 8 daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Sijunjung dan Kepulauan Mentawai dengan total nagari sebanyak 253 nagari. Permasalahan yang dihadapi di daerah tertinggal antara lain (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah maju; (2) kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar; serta (3) miskin sumberdaya alam dan manusia (4) Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi Yang Terbatas, Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi fisik penyebab ketertinggalan yakni kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan, penggunaan listrik, telepon, air bersih, kesehatan, pendidikan, komunikasi, pasar dan pelayanan publik lainnya dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Tabel 7.6
Jumlah Nagari Tertinggal per Kabupten

No	Kabupaten	Jumlah Nagari/ Desa	Jumlah Nagari/ Desa Tertinggal
1	Kabupaten Sijunjung	54	34
2	Kabupaten Solok Selatan	38	24
3	Kabupaten Dharmasraya	52	32
4	Kabupaten Solok	74	24
5	Kabupaten Pesisir Selatan	76	44
6	Kabupaten Pasaman Barat	19	18
7	Kabupaten Padang Pariaman	47	35
8	Kabupaten Kepulauan Mentawai	43	40
J u m l a h		403	253

Sumber Data : Biro Pemerintahan dan Kependudukan Serda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Pengembangan ekonomi wilayah sampai saat ini produksi terbesar adalah padi, sawit, karet, kakao, yang berada di seluruh wilayah. Hal ini karena masing-masing kabupaten dalam pengembangan produk pertanian belum berbasis pada kawasan dan komoditi unggulan masing-masing daerah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungannya.

1. Sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan

- a. Perwujudan sistem perkotaan dan Peningkatan sarana dan prasarana pada pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL)
- b. Pemantapan kawasan lindung
- c. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam
- d. Peningkatan kawasan pengembangan pertanian berbasis potensi kawasan dan komoditi unggulan masing-masing Kabupaten/Kota serta sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah
- e. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan strategi mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu
- f. Pengembangan kawasan perbatasan dengan provinsi tetangga dilakukan dengan strategi:
 - Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan;

- Mengembangkan kegiatan ekonomi lokal kawasan perbatasan.
- Peningkatan Fasilitas dan utilitas kawasan perbatasan
- g. Pengurangan daerah tertinggal dengan basis nagari sebanyak 180 nagari dari 253 nagari tertinggal sampai tahun 2015 atau dari 8 kabupaten tertinggal menjadi 4 kabupaten tertinggal.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arah pengembangan wilayah tersebut diatas, maka strategi pengembangan wilayah 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan yang potensial untuk menjadi pusat-pusat perkotaan
- b. Mendorong wilayah-wilayah potensial yang masih tertinggal dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah yang telah maju;
- c. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik;
- d. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
- e. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana;
- f. Mendorong pengentasan ketertinggalan daerah berbasiskan nagari atau kabupaten.

3. Arah Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan wilayah perkotaan di Sumatera Barat terutama diarahkan kepada melayani kegiatan yang berskala kota yang meliputi sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat juga mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Menurut RTRW provinsi Sumbar 2009-2029, untuk Pusat Kegiatan

Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi di sebut PKWp. Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah disampaikan maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2029 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, 5 (lima) kota PKW, 4 (empat) kota PKWp, dan 12 (duabelas) kota PKL.

Satu kota PKN yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang, dengan criteria yang dimiliki sebagai pusat kegiatan Nasional, diantaranya adalah: kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekspor-impor nasional, memiliki pelabuhan udara sebagai pintu gerbang menuju dunia Internasional, menjadi pusat industry dan jasa nasional, dan sebagai pusat pengembangan jaringan sistem transportasi yang menyatukan beberapa kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah di Sumatera Barat.

Berdasarkan arahan RTRW Sumatera Barat 2009 - 2029, maka terdapat 5 kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pengembangan wilayah (PKW) di Sumatera Barat yakni: Kota Bukittinggi, kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Kota Muaro Siberut. Apabila dilihat dari kriteria yang harus melekat pada pusat kegiatan wilayah ini, dimana suatu PKW harus dapat berfungsi sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Rencana pengembangan hirarki kota-kota di Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup provinsi Sumatera Barat. Penetapan tersebut selain didasarkan pada kondisi saat ini yang lebih penting adalah Rencana pengembangan kedepan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Selain itu, dasar acuan penetapan fungsi juga mengacu pada ketentuan atau kriteria dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah menetapkan arahan hirarki pusat-pusat kegiatan atau permukiman perkotaan nasional, dengan kriteria seperti pada tabel 7.7.

Tabel 7.7
Kriteria Fungsi Kota

No	Fungsi Kota	Kriteria
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	<ul style="list-style-type: none"> a. Merupakan ibukota Provinsi b. Merupakan gerbang nasional dan memiliki akses cepat dengan kota-kota internasional yang diindikasikan dengan bandara primer dan pelabuhan laut primer. c. Berfungsi sebagai simpul utama jaringan transportasi nasional dan lintas negara. d. Berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan nasional yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan jaringan jalan lintas negara atau jalur penerbangan internasional dan nasional sebagai jalur distribusi. e. Merupakan pusat lokasi ekonomi nasional yang memiliki potensi mendorong perkembangan secara nasional atau beberapa Provinsi. f. Memiliki fungsi pelayanan jasa-jasa pemerintahan dan jasa publik/kemasyarakatan untuk skala nasional atau beberapa Provinsi.
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfungsi sebagai pusat pengolahan, pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan wilayah berorientasi pasar yang melayani beberapa kabupaten. b. Berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi wilayah untuk beberapa kabupaten. c. Penghubung antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) . d. Umumnya merupakan kota simpul utama di kawasan prioritas (sentra produksi dan kawasan andalan). e. Memiliki bandar udara sekunder atau tersier atau pelabuhan pengumpan. f. Memiliki fungsi pelayanan jasa-jasa pemerintahan dan kemasyarakatan beberapa kabupaten.
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan lokal berorientasi pasar wilayah beberapa kecamatan. b. Berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi lokal c. Berfungsi sebagai pelayanan jasa-jasa pemerintahan dan kemasyarakatan beberapa kecamatan. d. Bersifat khusus mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya di wilayah kabupaten.

Sumber Data : PP 26 Tahun 2008

Berdasarkan kriteria tersebut maka hirarki pusat-pusat permukiman perkotaan di Provinsi Sumatera Barat dapat ditentukan, sebagaimana disampaikan pada tabel 7.8

Tabel 7.8
Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2029

PKN	PKW	PKWp	PKL
Kota Padang	1. Kota Bukittinggi 2. Pariaman 3. Sawahlunto 4. Kota Solok 5. Muara Siberut	1. Kota Payakumbuh 2. Kota Pulau Punjung 3. Kota Tapan 4. Kota Simpang Empat	1. Kota Painan 2. Kota Padang Panjang 3. Kota Lubuk Sikaping 4. Kota Sari Lamak 5. Kota Batusangkar 6. Kota Padang Aro 7. Kota Tuapejat 8. Kota Lubuk Basung 9. Kota Muaro Sijunjung 10. Kota Lubuk Alung 11. Kota Aro Suka

Sumber Data : PP 26 Tahun 2008, dan Hasil Analisis, 2008.

Pada Tabel diatas, terlihat bahwa pusat kegiatan pembangunan wilayah di provinsi Sumatera Barat itu adalah yang memiliki perkembangan aktifitas perekonomian yang mendukung kota utama Padang sebagai pusat kegiatan nasional yang aktifitas dominannya adalah kegiatan ekspor dan impor.

Pada sistem jaringan transportasi yang dapat dilihat pada aspek aksesibilitas menuju dan keluar kawasan Kota Padang, dan interaksi kota Padang dengan kota-kota yang menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW). Diantara jaringan transportasi jalan raya pada PKN dan PKW Provinsi Sumatera Barat, maka kota yang memiliki aksesibilitas geografis yang tinggi yang tercermin dari kecilnya indeks aksesibilitas geografisnya adalah Kota Padang, Bukittinggi, dan Kota Solok, dengan besaran matrik A(G)nya secara berturut-turut adalah 138,1 dan 130,9 serta 127,7. Hal ini berimplikasi bahwa dua kota yang tersebut terakhir ini memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap Kota Padang sebagai PKN. Jumlah arus penumpang yang datang ke Kota Padang dari Kota Bukittinggi tahun 2005 mencapai 268.657 orang, yang meninggalkan Kota Padang menuju Kota Bukittinggi mencapai 301.871 orang, telah meningkat menjadi 686.628 orang dan 689.627 orang tahun 2009 ini.

Terdapat tiga kota PKWp yang memiliki indeks aksesibilitas yang tinggi yakni kota Tapan 287,4 Simpang Empat: 223,8 dan Pulau Punjung 173,6. Tingginya indeks aksesibilitas geografis mengimplikasikan semakin sulitnya akses yang terlihat dari jauhnya jarak tempuh dan lamanya waktu tempuh menuju dan keluar kota-kota PKW ini. Dalam perencanaan pembangunan ke depan, selama RPJM II ini, maka program peningkatan aksesibilitas geografis diantara kota-kota PKW dengan PKNnya, maupun antara kota-kota PKL dengan PKW dan PKN harus menjadi pertimbangan prioritas, agar saling keterkaitan fisik diantara

pusat kegiatan nasional yakni Kota Padang, dengan pusat kegiatan wilayahnya semakin tinggi, yang berimplikasi semakin tingginya keterkaitan ekonominya.

Tabel 7.9
Indeks Aksesibilitas Geografis PKN dan PKW
Sumatera Barat Selama RPJM I 2005-2010

No	PKN dan PKW serta PKWp	Indeks Aksesibilitas Geografis (AG) Berdasarkan jarak
1.	Padang	138.1
2.	Bukittinggi	130.9
3.	Pariaman	145.7
4.	Sawah Lunto	156.7
5.	Solok	127.7
6.	Muara Siberut	na
7.	Payakumbuh	149.1
8.	Pulau Punjung	173.6
9.	Tapan	287.4
10.	Simpang IV	223.8

Sumber Data : Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Pada tabel di atas terlihat bahwa kota-kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat memiliki indeks geografis yang lebih kecil dari kota-kota lainnya yang bukan PKW. Kota yang memiliki indeks aksesibilitas geografis yang paling tinggi adalah Kota Tapan, sebesar 287,4 Simpang IV yakni 223,8. Sehingga semakin tinggi indeks aksesibilitas geografis, maka semakin sulit akses masuk dan keluar kota tersebut. Semakin sulitnya akses mengimplikasikan jaringan transportasi terutama jalan darat belum memadai untuk meningkatkan aksesibilitas dengan daerah lain baik sebagai kota PKN maupun dengan kota PKW dan PKL. Sehingga, agar indeks aksesibilitas geografis menjadi lebih kecil seperti Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi, maka jaringan transportasi darat harus semakin lebih baik. Oleh sebab itu, dalam pembangunan jaringan transportasi ke depan, wilayah PKW yang terletak di Ujung Utara dan Ujung Selatan pada wilayah Sumatera Barat haruslah dapat ditingkatkan aksesibilitasnya dengan menambah panjang jalan beraspal sehingga mempercepat waktu tempuh orang dan barang menuju Kota Padang sebagai kota yang melayani kegiatan ekspor dan impor.

4. Arahan Pengembangan Kawasan Lindung

Tabel 7.10
Rencana Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat
Hingga Tahun 2028 per Kabupaten/Kota

No	Kabupat/Kota	Luas (Ha)	Luas Hutan Lindung		Rencana Perubahan Luas		
			Sk. 422 th 1999	Rencana th 2028	Ha	% 1)	% 2)
A	Kabupaten						
1	Agam	223.230	32.134	22.451	-9.683	-30,13	5,08
2	Dharmasraya	296.113	12.336	8.660	-3.676	-29,80	1,93
3	Kep. Mentawai	601.135	4.614	6.406	1.792	38,84	-0,94
4	Limapuluh Kota	335.430	123.003	99.022	-23.981	-19,50	12,59
5	Padang Pariaman	132.879	22.268	13.334	-8.934	-40,12	4,69
6	Pasaman	444.763	237.044	158.455	-78.589	-33,15	41,24
7	Pasaman Barat	338.777	95.461	78.264	-17.197	-18,01	9,03
8	Pesisir Selatan	579.495	41.672	23.096	-18.576	-44,58	9,75
9	Sijunjung	313.080	88.262	78.015	-10.247	-11,61	5,38
10	Solok	373.800	119.646	118.603	-1.043	-0,87	0,55
11	Solok Selatan	334.620	89.286	80.040	-9.246	-10,36	4,85
12	Tanah Datar	133.600	29.208	18.480	-10.728	-36,73	5,63
B	Kota						
13	Bukittinggi	2.524	-	-	-	-	-
14	Padang	69.496	13.778	13.433	-345	-2,50	0,18
15	Padang Panjang	2.300	36	-	-36	-100,00	0,02
16	Pariaman	7.336	-	-	-	-	-
17	Payakumbuh	8.043	148	295	147	99,32	-0,08
18	Sawahlunto	27.345	496	294	-202	-40,73	0,11
19	Solok	5.764	1.141	1.141	-	-	-
	Jumlah	4.229.730	910.532	719.989	-190.544	-20,93	100,00

Sumber Data : Hasil rencana perubahan fungsi hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008

Keterangan :

- 1) Terhadap luas hutan lindung per kabupaten/kota
- 2) Terhadap jumlah perubahan luas hutan lindung provinsi

Penyebaran kawasan perlindungan setempat tersebut, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 7.11

Tabel 7.11
Rencana Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat
Dirinci Menurut Kabupaten /Kota

No.	Kawasan Perlindungan Setempat	
1	Sempadan Pantai	Kab. Pesisir Selatan
		Kota Padang
		Kab. Padang Pariaman
		Kota Pariaman
		Kab. Agam
		Kab. Pasaman Barat
		Kab. Kepulauan Mentawai
2	Sempadan Sungai	Seluruh Kota dan Kabupaten
3	Kawasan Sekitar Danau dan Waduk	Kab. Agam
		Kab. Tanah Datar
		Kab. Solok
4	Kawasan Sekitar Mata Air	Seluruh Kabupaten dan Kota
5	Kawasan Terbuka Hijau perkotaan	Kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Sumatera Barat

Sumber Data : Hasil rencana perubahan fungsi hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008

5. Arahkan Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat berkembang dengan pesat, dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka diambil langkah-langkah perlindungan hutan dan pelestarian alam, diantaranya dengan menetapkan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan suaka alam dan cagar budaya adalah meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

a. Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam merupakan kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alam yang memberikan perlindungan bagi flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. Kawasan ini terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa.

Kawasan ini ditetapkan dengan kriteria:

- Memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun perairan; dan/atau
- Mempunyai fungsi utama pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang ada di dalamnya.

b. Kawasan Suaka Alam Laut

Sesuai dengan karakteristik fisiografi yang dijumpai di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta berdasarkan hasil scoring dan hasil perubahan bahwa luasan kawasan yang termasuk Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri dari:

- *Cagar alam*, dijumpai di Kab. Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Pasaman, dan Agam. Dengan luasan terbesar di Kabupaten Pasaman (570 Ha), dan terendah di Kab.Agam. seluas 3,4 Ha.
- *Kawasan Suaka Margasatwa* terdapat di kawasan Suaka margasatwa di Pulau Pagai Selatan
- *Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya*, Kawasan konservasi laut daerah Pulau Penyu, Kawasan konservasi laut daerah di Pulau Pasumpahan dan Pulau Pisang, Kawasan pengawasan keanekaragaman hayati biota laut di Pulau Sikuai, Kawasan konservasi laut daerah Pulau Ujung Agam, Daerah perlindungan laut Tiku Agam, Kawasan perlindungan laut daerah berbatasan dengan Sumatera Utara (Pulau Batu Bakudung) dengan Bengkulu (Pulau Baringin), Kawasan konservasi biota laut langka di Pulau Penyu dan Pulau Pasumpahan.
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau, kawasan ini terletak di Batang Tomak Air Bangis, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat; Lunang Silaut Pesisir Selatan; Sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai; Agam, Pariaman dan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Pelestarian Alam, dengan distribusi berupa: 1. Taman Nasional didominasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Solok, dan Kab. Dharmasraya, dengan luas mencapai sekitar 348.126 Ha. Sedangkan taman hutan raya, taman wisata alam, dan cagar budaya masing-masing dijumpai di: Kota Padang, Kab. Solok, dan Kab. Tanah Datar.

6. Arahkan Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008, disebutkan bahwa yang termasuk kawasan bencana alam meliputi: rawan bencana alam tanah longsor, rawan gelombang pasang, rawan banjir, rawan letusan gunung berapi,

rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, zona patahan aktif, rawan tsunami, dan rawan bahaya gas beracun.

Secara lebih rinci dan lengkap peluang bencana yang dapat terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Rawan Tanah Longsor tersebar hampir merata di seluruh Sumatera Barat terutama pada sepanjang jalur patahan samangko, pada zona ini banyak terdapat morfologi dan relief yang terjal serta banyak daerah hancuran menjadi zona rentan gerakan tanah karena terkena patahan. Selain itu pada kawasan gunung api, hal ini disebabkan oleh batuan produk gunung api kuartar merupakan batuan yang tidak solid, menempati morfologi perbukitan sehingga mudah longsor akibat curah hujan tinggi maupun akibat getaran gempa bumi. Lebih dari 50 % dari seluruh luas Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan Zona gerakan tanah menengah. Kawasan ini tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman, sampai pada perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai wilayah perbatasan dengan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan Provinsi Bengkulu.
- b. Kawasan Rawan Banjir di Sumatera Barat terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan: daerah berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelereng yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Wilayah dengan ciri-ciri seperti ini terdapat di Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut, di Kabupaten Pesisir Selatan; Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

7. Arahan Pengembangan Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memiliki keunikan baik dari jenis bebatuan, bentang alam, proses geologi maupun kawasan imbuhan air tanah. Untuk kawasan lindung geologi yang ada di Provinsi Sumatera Barat, tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, diantaranya:

- a. kawasan cagar alam geologi;
Kawasan lindung Kars, kawasan lindung kars kubah Batusangkar, bukit-bukit kars di sungaidareh di kab. Dharmasraya dan sijunjung,

b. kawasan rawan bencana alam geologi; meliputi:

- Kawasan rawan gempa tektonik, dengan sumber gempa penunjaman Jawa-Sumatera yang berpusat di laut sebelah barat sepanjang pantai barat Sumatera, dengan tingkat intensitas kerusakan pada skala VI-VII MMI tingkat resiko sedang tingkat tiga, yaitu mencakup Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kawasan rawan gempa tektonik dengan sumber pada zona patahan aktif Sumatera yaitu sepanjang patahan Semangko dengan tingkat intensitas kerusakan mencapai skala VIII-IX MMI, dengan tingkat resiko besar satu yang mencakup wilayah Kabupaten Sijunjung, Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Solok, Solok Selatan, Agam. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi dengan skala V-VII dengan tingkat resiko kecil yang disebabkan oleh guncangan akibat gempa tektonik dan vulkanik yang mencakup hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan ini terjadi umumnya pada daerah yang berada di sepanjang pantai barat Sumatera: Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah gempa tektonik yang berpusat di laut. Sedangkan kawasan rawan gempa tektonik yang berada zona sepanjang patahan Semangko meliputi mulai dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Solok, sampai Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

- Kawasan Rawan Letusan Gunung Api terdapat di kawasan gunung api aktif yaitu kawasan sekitar Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci dengan klasifikasi: kawasan bahaya I dengan radius 3 km dari puncak gunung, kawasan bahaya II dengan radius 3-7 km dari puncak gunung, dan kawasan bahaya III dengan radius 8-14 km dari puncak gunung. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat juga pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas gunung api memanjang hingga ke lereng bawah, sebagai akibat adanya aliran lahar, dan abu vulkanik.

Kawasan ini umumnya terjadi di Kabupaten dan Kota yang berada < 10 Km dari pusat erupsi gunung api pada Kawasan gunung api aktif yaitu Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci.

- Kawasan Rawan Bencana Tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir pantai Pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan rawan tsunami di pesisir

Provinsi Sumatera Barat dapat di kelompokkan dalam tiga kategori zona kerawanan tsunami yaitu:

- Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
 - Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.
 - Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 – 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.
- Kawasan Rawan Abrasi Pantai terjadi pada daerah pantai dengan komposisi batuan sedimen lunak yang dicirikan oleh pantai landai dan berhadapan langsung dengan laut lepas. Terdapat mulai dari Kota Padang, hingga Kota Pariaman. Termasuk yang ada di Pasaman Barat dan kabupaten Pesisir Selatan serta Kepulauan Mentawai.
 - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan ini termasuk kawasan tuf ngarai sianok, danau dibawah, dan kaldera gunung api maninjau.

8. Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

A. Arahan pengembangan Kawasan Hutan Produksi

Kawasan budidaya hutan produksi, berdasarkan PP 26 tahun 2008 terdiri dari Hutan Produksi Terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi serta hutan rakyat. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas dan tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sampai dengan tahun 2028 adalah seluas 796.424 Ha. Adapun pengembangan hutan produksi di arahkan di Kab/ kota yang meliputi: Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kota Solok Selatan dan Kota Sawah Lunto

B. Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan budidaya pertanian dimaksudkan untuk dapat menciptakan produktivitas maksimal dengan masukan terbatas, tanpa mengurangi keseimbangan lingkungan, baik untuk pertanian tanaman pangan maupun perkebunan.

Tabel 7.12
Arahan Kawasan Pusat Pengembangan Pertanian (Agropolitan)

No	Pusat Kawasan Agropolitan	Kabupaten	Core Komoditi
1	IV Angkat Candung	Agam	Sapi dan Sayuran Dataran Tinggi
2	Lembah Gumanti	Solok	Sayuran Dataran Tinggi
3	Koto Baru	Tanah Datar	Sayuran Dataran Tinggi
4	Lengayang	Pesisir Selatan	Sapi Potong
5	VII Koto Sungai Sarik	Padang Pariaman	Sapi Potong
6	Mungka	Lima Puluh Kota	Unggas
7	Kecamatan Rao	Kab. Pasaman	Karet
8	Kecamatan Bonjol	Kab. Pasaman	Pertanian Terpadu (Pertanian, Peternakan)

Sumber Data : Kementerian Pertanian Tahun 2008

Tabel 7.13
Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan
Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing dan Domba

No	Komoditi	Kabupaten/Kota
1	Sapi Potong	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman
		Kawasan Sentra yang telah dikembangkan (20 kawasan) : Kenagarian Mungo, Mungka Kab. Limapuluh Kota, Koto Hilalang, Baso, Pakan Kamis Kab. Agam, Sitiung, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Tanjung Emas, Salimpaung Kab. Tanah Datar, Lembah Gumanti Kab. Solok, Lubuk Alung, Padang Sago Kab. Padang Pariaman, Sutera, Bayang Kab. Pesisir Selatan dan Kenagarian Kinali Kab. Pasaman Barat.
2	Sapi Perah	Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang
		Kawasan Sentra yang telah dikembangkan (2 Kawasan): Gunggung Kota Padang Panjang, X Koto Kab. Tanah Datar
3	Kerbau	Kawasan Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung
		Kawasan Sentra yang telah dikembangkan (5 kawasan) Sijunjung Kab. Sijunjung, IV Kota, Matur, Batagak, Kabuapten Agam, Alahan Panjang Kab. Solok.
4	Kambing	Kab. Agam, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kota Solok
5	Itik	Kawasan sentra Itik 3 Kawasan : Sumani Kab. Solok, Pitalah Kab. Tanah Datar, Payobasung Kota Payakumbuh.

Sumber Data : Kesepakatan dengan Kabupaten/Kota

Tabel 7.14
Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Peternakan

No	Komoditi	Kawasan Sentra	Penyangga
1	Sapi Potong	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Dharmasraya, Kota Payakumbuh	Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan
2	Sapi Perah	Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kota Padang, Kota Sawahlunto
3	Kerbau	Kab. Agam, Kab. Sijunjung	Kab. Solok, Kab. Tanah Datar,
4	Kambing	Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar,	Kab. Solok Kota Sawahlunto
5	Itik	Kab. Tanah Datar, Kab. Pss Selatan.	Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya
6	Ayam Potong	Kota Padang, Kab.Pdg Pariaman	Kota Payakumbuh, Kota Pariaman
7	Ayam Petelur	Kab. Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh	Kota Padang, Kab.Pasaman Barat
8	Ayam Buras	Kota Swahlunto, Kab.Tanah Datar	Kab.Pss Selatan, Kab.Pdg Pariaman, Kab.Sjj

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

C. Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Hasil analisis menunjukkan, kawasan yang sesuai untuk tujuan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas: 1.148.728 Ha, yang terdiri dari: potensi lahan sawah, dan lahan bukan sawah, sedangkan distribusi kesesuaian untuk tiap kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat mempunyai luas areal potensial dengan potensi tertinggi, dan Kota Padang Panjang mempunyai areal potensial terendah. Sedangkan potensi pengembangan areal pertanian terluas di kabupaten Agam seluas 29.611 Ha, dan terendah Kota Bukittinggi hanya 414 Ha. Adapun rencana pengembangan kawasan pertanian pangan dan hortikultura, adalah:

1. Pertanian Lahan sawah

Tersebar pada seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Barat .
Pengembangan lahan irigasi: Kab. Pasaman (Irigasi Panti Rao), Kab. Dharmasraya (Irigasi Batang Hari), Kab. Pasaman Barat (Irigasi Batang Tongar dan Irigasi Batang Batahan), Kab. Pesisir Selatan (Irigasi Inderapura), Kab. Padang Pariaman (Irigasi Batang Anai II), Kabupaten Tanah Datar (Irigasi Sinamar).

2. Kawasan Pertanian Lahan Kering (Palawija dan Hortikultura)

Pertanian lahan kering meliputi palawija dan hortikultura terdiri dari komoditi sayuran (seperti kubis, kentang, bawang merah, cabe), buah-buahan (seperti: manggis, pisang, jeruk, melinjo, markisah,

alpokat, salak), dan tanaman hias serta obat-obatan. Dimana sentra produksinya tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.15 berikut.

Tabel 7.15
Arahan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Komoditi	Lokasi
Buah-buahan		
1.	Jeruk	Kab. Pasaman, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam, Kab. Padang Pariman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok
2.	Pisang	Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok
3.	Alpokot	Kab. Solok
4.	Manggis	Kab. 50 Kota, Kab. Agam, Kab. Pdg Pariaman dan Kab. Siunjung, Kab. Solok.
5.	Markisa	Kab. Solok
6.	Sawo	Kab. Tanah Datar
Sayur-sayuran		
1.	Sayuran organik	Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Limapuluh Kota
2.	Kentang	Kab. Agam dan Kab. Solok,
3.	Bawang Merah	Kab. Solok
4.	Tomat	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok
5.	Cabe	Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar dan Kab. Agam, Kab. Solok
Palawija		
1	Jagung	Kab. Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung
2	Kedele	Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya
Tanaman Hias		
1.	Bunga	Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Tabel 7.16
Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Komoditi	Lokasi Sentra	Penyangga
Buah-buahan			
1	Jeruk	Kab. Limapuluh Kota,	Kab. Agam, Kab. Solok Selatan
2.	Pisang	Kab. Tanah Datar, Kab. Agam	Kab. Pasaman, Kota Pariaman
3.	Alpokot	Kab. Solok	Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar
4.	Manggis	Kab. 50 Kota,	Kab. Padang Pariaman, Kab. Sjj
5.	Markisa	Kab. Solok	
6.	Sawo	Kab. Tanah Datar	

No	Komoditi	Lokasi Sentra	Penyangga
Sayur-sayuran			
1.	Sayuran organik	Kab. Tanah Datar	Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Limapuluh Kota
2.	Kentang	Kab. Solok	Kab. Agam, Kab. Tanah Datar
3.	Bawang Merah	Kab. Solok	Kab. Tanah Datar, Kab. Agam
4.	Tomat	Kab. Tanah Datar,	Kab. Solok, Kab. Agam
5.	Cabe	Kota Payakumbuh	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar
Palawija			
1	Jagung	Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan	Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar
2	Kedele	Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya	
Tanaman Hias			
1.	Bunga	Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang,	Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

D. Arahkan Pengembangan Kawasan Perkebunan. Kawasan Perkebunan.

Kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut kim-bun. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan antara lain berupa Komoditi unggulan: kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, gambir, cassiavera, nilam, jarak pagar. Adapun rencana pengembangan kawasan perkebunan adalah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 7.17
Arahkan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perkebunan

No	Komoditi Perkebunan	Lokasi Kawasan Pengembangan Pada Kabupaten/Kota
1	Kelapa Sawit	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Kepulauan Mentawai
2	Karet	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman
3	Kelapa Dalam	Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Solok, Kab. Kepulauan Mentawai

No	Komoditi Perkebunan	Lokasi Kawasan Pengembangan Pada Kabupaten/Kota
4	Kakao	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok
5	Kopi	Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pasaman
6	Gambir	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung
7	Cassia vera	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, Kab. Solok
8	Nilam	Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung, Kab. Solok
9	Jarak Pagar	Kab. Pasaman, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Tabel 7.18
Arahan Pengembangan Kawasan Sentra Komoditi Unggulan Perkebunan

No	Komoditi Perkebunan	Lokasi Sentra	Penyangga
1	Kelapa Sawit	Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan,
2	Karet	Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya,	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman
3	Kelapa Dalam	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai
4	Kakao	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman	Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Kep. Mentawai,
5	Kopi	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok	Kab. Agam
6	Gambir	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan,	Kab. Agam
7	Cassia vera	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok Selatan	Kab. Solok
8	Nilam	Kab. Pasaman Barat, Kab. Mentawai	Kab. Solok, Kab. Sjj

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

E. Arahan Pengembangan Kawasan Perikanan

▪ Perikanan Tangkap

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 pasal 3, bahwa wilayah provinsi, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12

mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka batas wilayah laut termasuk kawasan perikanan tangkap yang pengelolaannya menjadi wewenang provinsi adalah sejauh 12 mil.

Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan di 2 kota dan 5 Kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing daerah tersebut adalah (1) Kota Padang, (2) Kabupaten Pesisir Selatan, (3) Kabupaten Padang Pariaman, (4) Kabupaten Agam, (5) Kabupaten Pasaman Barat dan (6) Kabupaten Kepulauan Mentawai dan (7) Kota Pariaman.

▪ **Perikanan Budidaya**

Perikanan budidaya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar. Budi daya laut dikembangkan di wilayah kota dan kabupaten yang memiliki perairan laut, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan komoditi budidaya rumput laut, kerang mutiara, ikan kerapu serta tambak udang.

Rencana pengembangan perikanan darat budidaya yaitu tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan sentra di Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Limapuluh Kota dan Kabupaten Dharmasraya.

F. Arah Pengembangan Kawasan Pertambangan

Hampir semua wilayah administrasi merupakan rencana areal penambangan, karena 17 dari 19 wilayah administrasi kabupaten kota mempunyai bahan mineral yang berpotensi untuk dieksploitasi.

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang kaya akan hasil tambang, terutama: tambang, bahan galian dan berbagai sumberdaya mineral. Kawasan pertambangan di Sumatera Barat berada di Sawahlunto, Sijunjung dan Pesisir Selatan untuk batubara; Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat dan Solok untuk pertambangan Galena; Sijunjung, Solok, Tanah Datar dan Kepulauan Mentawai untuk pertambangan minyak dan gas; serta Padang Pariaman, Agam dan Pasaman Barat untuk kawasan tambang pasir besi.

G. Arahan Pengembangan Kawasan Industri

Adapun rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan Padang Industrial Park (PIP). Disamping kawasan industri tersebut arah pengembangan sentra industri pada Kabupaten/Kota antara lain:

Tabel 7.19
Arahan Pengembangan Industri di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Komoditi Industri
1	Kabupaten Limapuluh Kota	Gambir, anyaman rotan, batu bata, bubuk kopi Komoditi Inti : Gambir
2	Kabupaten Agam	Bordir, konveksi/garmen, kerajinan perak, CPO, gula tebu, perabot Komoditi Inti : Konveksi/Garment
3	Kabupaten Dharmasraya	CPO, batu bata, meubel kayu, keret, genteng Komoditi Inti : Industri Berbasis Tanah Liat
4	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pengolahan hasil laut, minyak nilam, batu bata, kelapa, kopra, rotan Komoditi Inti : Rotan
5	Kota Padang	Makanan ringan, pengolahan hasil laut, kompor minyak tanah, sulaman benang emas, perabot rotan, semen Komoditi Inti : Pengolahan Hasil Laut
6	Kota Pariaman	Emping melinjo, bordir, sulaman benang emas, pengolahan hasil laut Komoditi Inti : Kelapa Terpadu
7	Kota Solok	Bubuk kopi, perabot kayu, batu bata, makanan ringan Komoditi Inti : Industri Pakaian Jadi & Tekstil Lainnya
8	Kota Payakumbuh	Makanan ringan, bordir, anyaman bambu, telur rendang Komoditi Inti : Industri Pengolahan Daging (Rendang, Dendeng Salai)

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Pada RPJMD ini, pengembangan industri unggulan diarahkan pada pengembangan 10 (sepuluh) industri unggulan sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk Provinsi Sumatera Barat oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yaitu:

Tabel 7.20
Sepuluh (10) Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat

No	Industri Unggulan	Lokasi Pengembangan
1	Industri Pengolahan Kakao	Industri Fermentasi : Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kota Sawahlunto, Industri Pengolahan Kakao: Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Industri Makanan berbasis Coklat : Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh
2	Industri Gambir	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan

No	Industri Unggulan	Lokasi Pengembangan
3	Industri Minyak Atsiri	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Daharmasraya
4	Industri Pengolahan Makanan Ringan	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, Kab. 50 Kota, Kab. Padang Pariaman, Kota Solok
5	Industri Kulit dan Alas Kaki	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi Kabupaten Tanah Datar
6	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Payakumbuh
7	Industri Alsintan	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Payakumbuh
8	Industri Semen (suku cadang dan pengolahan semen)	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Industri Maritim (perkapalan)	Kabupaten Pesisir Selatan
10	Industri Hasil Laut	Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

H. Arahkan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata dilakukan melalui penataan kawasan wisata terdiri atas: penetapan obyek/atraksi unggulan, kota pusat pelayanan pariwisata, dan jalur wisata. Upaya pengembangan wisata Provinsi Sumatera Barat ini juga tetap dikaitkan dengan pusat pariwisata nasional yakni: Jakarta, Jogja, dan Bali sebagai satu kesatuan tujuan wisata nasional sekaligus untuk menarik minat pengunjung. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan pengembangan koridor wisata dan peningkatan daya tarik obyek wisata. Pengembangan pariwisata ini ditujukan untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pembangunan sektor pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dibagi kedalam 7 (tujuh) WPP sebagaimana diuraikan berikut:

Tabel 7.21
Wilayah Pengembangan Pariwisata

No	Wilayah Pengembangan	Kabupaten/kota dan Pusat Layanan
1	Wilayah Pengembangan Pariwisata I	Koridor Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kota Payakumbuh. WPP ini didominasi atraksi adalah Budaya, Belanja, MICE, Kerajinan, Kesenian, Peninggalan Sejarah, Danau, Pegunungan, serta Flora dan Fauna dengan Pusat Layanan di Kota Bukittinggi
2	Wilayah Pengembangan Pariwisata II	Meliputi koridor Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat. DPP ini didominasi atraksi dari jenis wisata bahari, pulau-pulau, serta MICE, peninggalan sejarah, budaya, kesenian, pegunungan, sungai dan hutan dengan pusat layanan di Kota Padang
3	Wilayah Pengembangan Pariwisata III	Meliputi koridor Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dimana WPP ini didominasi jenis wisata Budaya, Peninggalan Sejarah, Kesenian, Rekreasi, Danau, Agro, Olah Raga, Pegunungan, Hutan, Kerajinan dengan Pusat Layanan di Kota Batusangar
4	Wilayah Pengembangan Pariwisata IV	Meliputi koridor Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok dengan Pusat Layanan di Kota Arosuka. WPP ini didominasi jenis wisata Rekreasi Danau, Pegunungan, Hutan, Agro, Taman Nasional Budaya dan Kesenian
5	Wilayah Pengembangan Pariwisata V	WPP ini meliputi koridor Kota Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya yang didominasi oleh jenis wisata Peninggalan Sejarah, Tambang, Rekreasi Agro, Olah Raga, Hutan dengan Pusat Layanan di Kota Sawahlunto
6	Wilayah Pengembangan Pariwisata VI	Meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pusat Layanan di Kota Painan. Berupa objek wisata bahari karena terdapat kawasan yang ditetapkan dalam RIPPNAS Pariwisata sebagai Pusat Pengembangan Wisata Bahari Wilayah Barat, yakni Kawasan Wisata Mandeh
7	Wilayah Pengembangan Pariwisata VII	Meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sesuai dengan kondisi geografis berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan laut lepas Samudera Hindia, maka kawasan ini didominasi oleh wisata bahari yang dilengkapi dengan wisata budaya dan alam. Pusat layanan pada WPP ini adalah Kota Tua Pejat

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Arah pengembangan kawasan pariwisata pada RPJMD ini sesuai dengan kesepakatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota tentang 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan Pariwisata adalah:

Tabel 7.22
Sepuluh (10) Destinasi Unggulan Pariwisata

No	Destinasi Unggulan	Kabupaten/kota
1	Pantai air Manis, Pantai Padang, Gunung Padang	Kota Padang
2	Teuk Katurai, Pantai Barat Sikakap dan Siberut	Kabupaten Kepulauan Mentawai
3	Panorama Baru	Kota Bukittinggi
4	Heritage transportasi batubara	Kota Sawahlunto
5	Lembah Harau	Kabupaten Lima Puluh Kota
6	Kawasan Mandeh	Kabupaten Pesisir Selatan
7	Danau Kembar	Kabupaten Solok
8	Istana Pagaruyung	Kabupaten Tanah Datar
9	Ulakan Tapakis, Tabuik	Kabupaten Padang Pariaman
10	Danau Maninjau, Puncak Lawang	Kabupaten Agam

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

I. Arahkan pengembangan Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Barat, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Secara keseluruhan luas lahan terbangun di Provinsi Sumatera Barat direncanakan seluas 61.682 ha, sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok yakni permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan, Adapun arahan pengembangan kawasan permukiman adalah:

- Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehingga pada permukiman yang telah ada diupayakan untuk direlokasi ke wilayah yang relatif aman.
- Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas yang ada disekitarnya dan meningkatkan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.
- Perlu adanya pengaturan terhadap luas lahan terbangun dengan tak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman.
- Perlu pengelompokan kawasan permukiman agar dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman lebih efisien dan efektif.

- e. Perlu adanya penegasan batas kawasan terhadap kawasan non permukiman.
- f. Perlu adanya penetapan tinggi bangunan pada kawasan pengembangan permukiman.

J. Arah Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Lain

Sumatera Barat di wilayah utara berbatas langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, wilayah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan sebelah barat dengan Samudera Hindia. Jumlah kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi tetangga sebagai berikut:

Tabel 7.23
Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan
Yang berbatasan dengan Provinsi Tetangga

No	Provinsi Berbatasan	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kecamatan
1	Sumatera Utara	Pasaman Barat	4	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Gunung Tuleh dan Lembah Malintang
		Pasaman	4	Duo Koto, Rao Utara, Rao, Mapat Tunggul
2	Riau	Pasaman	2	Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan
		Lima Puluh Kota	4	Kapur IX, Pangkalan Koto Baru, Harau, Lareh Sago Halaban
		Sijunjung	3	Sijunjung, Kamang Baru, Sumpur Kudus
		Dharmasraya	2	Sitiung dan Koto Baru
3	Jambi	Dharmasraya	2	Koto Baru, Sungai Rumbai
		Solok Selatan	2	Sangir Jujuhan dan Sangir
		Pesisir Selatan	3	Pancung Soal, basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut
4	Bengkulu	Pesisir Selatan	1	Lunang Silaut

Wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga sebagian besar merupakan wilayah yang tertinggal dan sebagai kantong-kantong kemiskinan. Hal ini terjadi karena pada wilayah perbatasan merupakan wilayah yang termarginalkan dari pusat pemerintahan; kurangnya aksesibilitas dan keterbatasan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi, pasar, serta energy serta sifat permukimannya menyebar.

Strategi pengembangan wilayah perbatasan antara lain:

- a. Pengembangan infrastruktur meliputi transportasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur perekonomian.
- b. Pengembangan dan penyelamatan ekosistem, kesepakatan antar wilayah hulu, hilir, provinsi, dan pusat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan antisipasi terhadap bencana.
- c. Pengembangan potensi ekonomi, Potensi ekonomi berupa potensi wisata, sumberdaya alam serta sumber ekonomi lainnya dilakukan dengan pola kerjasama antar provinsi maupun antar kabupaten tetangga.

Pengembangan sosial budaya, pertalian sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan biasanya mempunyai keterkaitan persaudaraan, kekerabatan karena interaksi masyarakat antar wilayah perbatasan sudah lama terjadi.

7.3. Arahkan Pengembangan Daerah Tertinggal

Wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari 7 Kota dan 12 Kabupaten, saat ini masih 8 kabupaten yang dikategorikan tertinggal, secara aksesibilitas ke ibu kota kabupaten pada dasarnya sudah lancar dan terhubung, hanya satu kabupaten yang membutuhkan transportasi melalui laut dan udara yang sering terkendala dengan cuaca yaitu ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karakteristik wilayah atau kondisi geografis serta menyebarnya kawasan permukiman sehingga akses ke nagari/jorong masih banyak yang belum dapat ditempuh dengan lancar.

Penetapan nagari/desa tertinggal berdasarkan kepada 15 kriteria dasar, yaitu jalan utama desa, lapangan usaha masyarakat, fasilitas dan tenaga kesehatan, sarana komunikasi kondisi perekonomian masyarakat, kondisi sosial masyarakat, ketersediaan infrastruktur, kepadatan penduduk, Sumber air, sumber bahan bakar, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga pertanian, kondisi sosial ekonomi masyarakat, akses sarana kesehatan dan ke pasar serta kemudahan mencapai pertokoan. Pendekatan untuk pengurangan daerah tertinggal perlu berbasis pada nagari, sehingga peningkatan sarana aksesibilitas dari wilayah nagari ke pusat ekonomi atau ibukota kabupaten dan peningkatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat akan terfokus.

Strategi pengurangan daerah tertinggal berbasis nagari dilakukan dengan:

- a. Pengembangan kebersamaan dan kemandirian daerah dalam pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui; (1) Pengembangan ekonomi lokal, (2) Pemberdayaan masyarakat, dan (3) Penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan.

- b. Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing secara berkelanjutan. Strategi ini diharapkan untuk dapat mengembangkan daerah masing-masing berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kondisi potensi lokal setempat. Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing dilakukan melalui; (1) Peningkatan investasi daerah baik investasi swasta, masyarakat dan pemerintah, (2) Pemberdayaan usaha kecil, menengah, koperasi dan dunia usaha, (3) Pengembangan kawasan produksi, kawasan cepat tumbuh dan agropolitan.
- c. Peningkatan sistem wilayah ekonomi yang sinergis antara daerah tertinggal dan daerah maju tanpa mempertimbangkan wilayah administrasi. Strategi ini dilakukan melalui; (1) Pengembangan akses dan jaringan ekonomi dan prasarana antar wilayah, (2) Pengembangan sentra produksi, (3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Peningkatan penanganan kawasan tertinggal yang memiliki permasalahan khusus dengan membuka aksesibilitas kepada daerah yang sulit dijangkau secara fisik disebabkan kurangnya moda transportasi, komunikasi dan informasi, minimnya infrastruktur. Strategi ini dilakukan melalui; (1) Pembukaan infrastruktur untuk mengatasi keterisolasian daerah, (2) Pembangunan infrastruktur dasar berupa pendidikan, kesehatan, komunikasi, air bersih dan energi, (3) Pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sasaran pengurangan daerah tertinggal berbasis nagari dilakukan melalui:

- 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tertinggal minimal sama dengan daerah yang lebih maju.
- 2. Meningkatnya aksesibilitas kepada daerah tertinggal.
- 3. Berkurangnya ketimpangan antara daerah yang lebih maju dengan daerah tertinggal yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten tertinggal.

7.4. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

7.4.1. Agenda Pembangunan Daerah

Agenda pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah

dirumuskan serta mempedomani agenda pembangunan nasional, maka pada bagian ini ditetapkan 5 agenda pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2010-2015. Masing-masing agenda merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk setiap misi. Kelima agenda tersebut adalah:

Agenda 1: Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah

Penerapan ajaran agama dan budaya daerah merupakan landasan utama untuk dapat mewujudkan proses pembangunan daerah yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Melalui agenda pembangunan daerah ini diharapkan akan dapat diwujudkan keselarasan antara ajaran agama dan budaya daerah dengan tingkah laku dan kebiasaan hidup masyarakat setempat sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan agamais menuju masyarakat madani. Termasuk ke dalam agenda pembangunan ini adalah perbaikan moral dan akhlak, peningkatan kepedulian sosial, pengembangan pendidikan bernuansa agama, peningkatan toleransi beragama, penerapan dan pengembangan budaya Minangkabau serta peningkatan kepastian hukum tanah ulayat,

Agenda 2: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Oleh karena peran pemerintah dalam pembangunan cukup dominan, maka percepatan proses pembangunan daerah berkaitan erat dengan tata-kelola pemerintah daerah. Dengan demikian perbaikan tata-kelola pemerintah daerah merupakan agenda penting dalam mendorong proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Tekanan utama dalam agenda pembangunan ini adalah: peningkatan keterpaduan dan sinergi antar pelaku pembangunan daerah, pelaksanaan sistem pemerintahan yang partisipatif dan transparansi, perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi aparatur, dan peningkatan pelayanan publik.

Agenda 3: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan landasan utama bagi terwujudnya proses pembangunan yang baik, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas pendidikan yang mencakup pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, peningkatan derajat kesehatan tinggi dan pelayanan kesehatan merata, perbaikan gizi dan penerapan dan pengembangan IPTEK tepat guna serta perbaikan etos kerja masyarakat.

Agenda 4: Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masih tetap menjadi sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah. Karena itu agenda untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah disemua sektor, penambahan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Nagari serta pengembangan prasarana dan sarana pembangunan.

Agenda 5: Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan yang baik tidak hanya dalam bentuk peningkatan kemakmuran masyarakat, tetapi juga dalam bentuk terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan. Oleh karena itu, agenda perbaikan kualitas lingkungan hidup juga merupakan unsur yang sangat penting dan strategi untuk meningkatkan proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Fokus utama agenda ini adalah pada perbaikan kualitas *Rencana Tata-Ruang Wilayah* (RTRW), mewujudkan disiplin aparatur dan masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan rencana tata-ruang tersebut serta terus meningkat kesadaran masyarakat Sumatera Barat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

7.4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan adalah kumpulan program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari masing-masing agenda pembangunan. Agenda pembangunan Sumatera Barat tahun 2010-2015 dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas pembangunan, yaitu: 1) Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat, 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan, 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, 4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, 5) Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan, 6) Pengembangan Industri Olahan, UMKMK, Perdagangan dan Iklim Investasi, 7) Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, 8) Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal, 9) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat, 10) Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas, dapat dilihat pada Tabel 7.24.

Tabel 7.24
Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas Pembangunan

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS
1	Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah	1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat
2	Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan Daerah	2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4	Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global	Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan 6. Pengembangan Industri Olahraga, UMKMK, Perdagangan dan Iklim Investasi 7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya 8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal 9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat
5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	10. Penanggulangan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat. Prioritas pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat diarahkan kepada implementasi prinsip-prinsip agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif diharapkan akan terwujud: 1) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 2) Terwujudnya pribadi masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia, 3) Tercerminnya nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Menurunkan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Terwujudnya optimalisasi peran lembaga lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Berkurangnya perbuatan maksiat.

Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

Prioritas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud: 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 4) Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN, 6) Terwujudnya kepastian hukum 7) Terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 8) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel 9) Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

Prioritas peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan terwujud: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan, 4) Terwujudnya pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Indonesia Bagian Barat, 6) Terwujudnya pendidikan spesifik sesuai dengan bakat SDM, 7) Terwujudnya lembaga pendidikan penghasil SDM profesional, 8) Lahirnya wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Berkembangnya penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 2) Meningkatnya angka harapan hidup, 3) Menurunnya tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Menurunnya persentase masyarakat gizi kurang, 6) Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat, 7) Meningkatnya layanan rumah sakit berakreditasi internasional.

Prioritas 5: Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.

Prioritas pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan diarahkan untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan,

perikanan dan kelautan) yang mempunyai nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan: 1) Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, 2) Berkembangnya agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 3) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai propinsi agraris dengan petani yang sejahtera, 4) Berkembangnya penerapan teknologi pertanian, 5) Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian, 6) Terwujudnya ketahanan pangan, 7) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah penghasil pengusaha profesional, 8) Terwujudnya pola pembangunan berbasis kawasan, 9) Terwujudnya pola pembangunan berbasis komoditi unggulan dan prinsip *one village one product*.

Prioritas 6: Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi. Prioritas pengembangan industri olahan dan perdagangan diarahkan untuk mengembangkan industri skala kecil dan menengah dan jasa berbasis bahan baku dan potensi daerah. Dengan pengembangan industri ini diharapkan: 1) Berkembang sentra industri dan jasa berdasarkan potensi lokal, 2) Penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 3) Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa, 4) Meningkatnya jumlah ekspor produk industri, 5) Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 6) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pelopor pertumbuhan UMKMK dan ekonomi kerakyatan, 7) Terwujudnya promosi dan pemasaran produk industri, 8) Peningkatan Investasi.

Prioritas 7: Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya. Prioritas pengembangan kawasan wisata alam dan budaya diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata alam dan situs-situs budaya Minangkabau yang sudah ada menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata alam dan budaya ini diharapkan: 1) Berkembang objek-objek wisata alam yang potensial, 2) Berkembang objek-objek wisata budaya yang sudah ada pada setiap daerah, 3) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya.

Prioritas 8: Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal. Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunn tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur secara lebih tajam, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam, 3) Perluasan lapangan kerja, 4) Meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan, 5) Meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, 6) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal.

Prioritas 9: Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.

Prioritas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat diarahkan untuk meningkatkan akses, jumlah, dan efisiensi distribusi produksi masyarakat, penataan ruang terpadu untuk usaha dan industri, sarana prasarana pertanian, dan perumahan rakyat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Meningkatnya akses transportasi penunjang ekonomi, 2) Lancarnya akses antar kota dan desa, 3) Meningkatnya akses jalan terhadap destinasi wisata, 4) Tersedianya akses jalan evakuasi penanggulangan bencana, 5) Tersedianya sarana prasarana irigasi pertanian, 6) Tersedianya sarana prasarana perekonomian masyarakat, 7) Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan pemukiman.

Prioritas 10: Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Prioritas Penanggulangan Bencana alam diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas aparat, penguatan lembaga masyarakat, tersedianya tim gerak cepat, tersedianya sistem peringatan dini, dan program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan potensi sumberdaya yang sudah ada untuk usaha ekonomi masyarakat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Terwujudnya kesiapan daerah untuk penanggulangan bencana, 2) Terwujudnya pemetaan daerah rawan bencana, 3) Tersedianya sistem peringatan dini yang siap siaga, 4) Pengurangan resiko bencana alam, 5) Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi, 6) Terwujud konservasi sumberdaya alam, 7) Penekanan laju deforestasi, 8) Pengendalian kerusakan lingkungan, 9) Penurunan pencemaran lingkungan, 10) Terpeliharanya kearifan lokal terhadap lingkungan.

Sinkronisasi prioritas pembangunan Sumatera Barat dengan Prioritas Nasional dilihat pada Tabel 7.25

Tabel 7.25
Sinkronisasi Prioritas Nasional Dengan Prioritas Sumatera Barat

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat (1,11)* 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan (1) 3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (2) 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (3) 5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan (5, 7) 6. Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi (7,11) 7. Pengembangan Wisata Alam dan Budaya (11) 8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal (4, 10) 9. Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat (6, 8, 10) 10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup (9)

**) Nomor di belakang prioritas menunjukkan nomor prioritas nasional yang terkait*

7.4.3 Program Per Prioritas Pembangunan

Visi dan misi Pemerintah Daerah 2010-2015, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional kedalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Tabel 7.26
Hubungan Misi, Agenda, Prioritas dan Program

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	1. Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah	1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat	1. Program Gerakan Terpadu Pengamalan Agama, ABS-SBK 2. Program Pengembangan Nilai Budaya 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat 4. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 5. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan Nilai agama 6. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan 7. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 8. Program Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 9. Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat 10. Program Pengembangan Pendidikan Budaya 11. Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya
2. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	2. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan Daerah	2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan	1. Program Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi 2. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik 3. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintah dan pembangunan daerah 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat 9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban Umum 10. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 11. Program Pendidikan Kedinasan 12. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM 13. Pengembangan manajemen pelayanan publik 14. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur 15. Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik (good governance) 16. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
			17. Program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah 18. Program Pengembangan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan 19. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 20. Program Kerjasama Pembangunan 21. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22. Program Sarana Informasi Hukum 23. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan 24. Program Pembangunan Materi Hukum 25. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 26. Program Peningkatan Budaya Hukum 27. Program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum 28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 29. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari 30. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 31. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari 32. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Nagari 33. Program perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 34. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ arsip daerah 35. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi kearsipan 36. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika 37. Program Pengembangan Data dan Informasi 38. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi	3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1. Program Gerakan Terpadu Peningkatan SDM 2. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 3. Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar 4. Program Peningkatan Akses Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah 5. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal 6. Program Pendidikan Luar Biasa 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya 8. Program Pendidikan Berkarakter 9. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
			10. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 11. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga 12. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan 13. Program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga 14. Program peningkatan penyadaran kepemudaan 15. Program pengembangan kepemimpinan pemuda 16. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
		4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Gerakan Terpadu Peningkatan SDM 2. Program Penyediaan obat dan pembekalan kesehatan 3. Program upaya kesehatan masyarakat 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 5. Program Perbaikan gizi masyarakat 6. Program pengembangan lingkungan sehat 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular/tidak menular) 8. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rs. paru / rs.mata 9. Program sumber daya kesehatan 10. Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 11. Program penelitian dan pengembangan kesehatan 12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rs. paru/rs.mata 15. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD 16. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 17. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 18. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 19. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 20. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak 21. Program Kesehatan reproduksi remaja 22. Program pelayanan alat kontrasepsi 23. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 24. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita 25. Program keluarga berencana

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global	4. Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan	1. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani 2. Program Pensejahteraan Ekonomi Nelayan 3. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Perikanan 4. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian dan Perikanan 5. Program Pengembangan Teknologi informasi pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dan Perikanan 7. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan SDM Petani 8. Program Peningkatan Produksi dan mutu Pertanian secara berkelanjutan 9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan 10. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, produk Hasil Pertanian dan Perikanan 11. Program Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan 12. Program Diversifikasi Pangan 13. Program Pengamanan Sumberdaya Hewani 14. Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi 15. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 16. Program Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap 17. Program Pemberdayaan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
		6. Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi	1. Program Terpadu peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Program Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK 4. Program Peningkatan Dukungan dan akses pemodal UMKMK 5. Program Pengembangan Kemitraan UMKMK 6. Program Peningkatan Peranan Koperasi dalam sektor riil 7. Program peningkatan Lembaga Keuangan Non Bank dalam pembiayaan UMKMK 8. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 10. Program Penyiapan Potensi Sumber daya daerah 11. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
			12. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 13. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah 14. Program pengembangan sentra-sentra industri Potensial 15. Program Peningkatan Iklim Usaha Industri 16. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan berbasis Agro dan Manufaktur 17. Program Revitalisasi dan pengembangan industri kecil dan menengah 18. Program Pengembangan SDM Industri kecil dan Menengah dan Aparat pembina 19. Program Pengembangan Teknologi Tepatguna 20. Program Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan aparatur perdagangan 21. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 22. Program Pengembangan Klaster Industri Unggulan
		7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya	1. Program Pengembangan Pemasaran Wisata 2. Program Pengembangan Kawasan Wisata Alam 3. Program Pengembangan Kawasan Wisata Budaya 4. Program Pengembangan SDM Pariwisata 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau 6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 7. Program Pengembangan Pendidikan Budaya 8. Program Pemberdayaan lembaga-lembaga adat, seni dan budaya
		8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	1. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin 2. Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 7. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9. Program Pembinaan Anak Terlantar 10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
			11. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 12. Program Produktifitas Tenaga Kerja 13. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan diversikasi usaha 14. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium 16. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 17. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal
		9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat	1. Program Peningkatan Partisipasi Investasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur (Public Private Partnership - PPP) 2. Program Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air lainnya 5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 6. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Barat 8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman 10. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 11. Program Perencanaan Tata Ruang 12. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 13. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan , Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 14. Program Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut 15. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara 16. Pengembangan Angkutan Kereta Api 17. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalsitrikan 18. Program Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan investasi sumberdaya mineral dan batubara 19. Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan prasarana Energi dan Kelistrikan

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	5. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	10. Penanggula- ngan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana 2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 3. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam 4. Program Penanganan Tanggap Darurat 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7. Program Tata lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan 8. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim 9. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 10. Program Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum, Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 11. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 12. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 13. Program Pemantapan Kawasan Hutan 14. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab-bab terdahulu, telah dijabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur secara hirarkhis memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 5 agenda dan 10 prioritas pembangunan, program-program tersebut adalah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan SKPD terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab SKPD langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 23 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Pangan, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan: Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program

diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama SKPD dan kemudian disepakati dengan DPRD Provinsi. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan output selain outcome pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada SKPD dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta SKPD penanggungjawab. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1.

TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
URUSAN WAJIB							1,285,909			1,903,228			1,232,617			2,004,165			2,313,561	
PENDIDIKAN							71,775			76,209			83,440			90,499			91,678	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							71,025			75,384			82,532			86,531			88,170	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	-	-	1,231	-	-	1,547	-	-	3,533	-	-	3,138	-	-	3,452	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	466	-	-	266	-	-	242	-	-	175	-	-	192	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	-	-	-	-	-	60	-	-	67	-	-	91	-	-	483	-	-	532	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD	-	-	-	-	-	444	-	-	910	-	-	1,279	-	-	927	-	-	1,019	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD	Jumlah APE		182	124		430	136		473	150		520	165		572	182		630	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Workshop penyusunan materi PAUD	Kali/ Judul	-	7	5	5	256	6	4	282	6		310	7		341	7		375	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi Materi PAUD	Orang	-	937	160	120	1,083	176	300	1,191	194		1,310	213		1,441	234		1,586	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Meningkatnya wajib belajar anak usia sekolah	%	-	100	60		857	70		943	80		1,037	90		1,141	100		1,256	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Sekolah Sehat	%	-	100	80	80	967	85	85	1,064	90		1,171	95		1,288	100		1,416	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Akses Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan menengah	Sekolah	-	48	28		2,351	33		2,586	38		2,845	43		3,129	48		3,442	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional	Jumlah SBI	-	-	5		19,434	6		21,377	7		23,515	8		25,867	9		28,453	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal & Informal	Persentase buta aksara > 15 th	%	3.2	2	3.1	3.03	2,845	3	1.66	3,442	80		3,442	90	2.5	3,787	100	2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Lembaga dan program PUDNI terakreditasi	%	0.03	3.5										2.5				3.5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Program Pendidikan Luar Biasa	Sarana Prasarana PLB	%	-	100	70	70	995	75	80	1,095	80		1,204	90		1,324	100		1,457	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Peserta Didik Terlayani	%	-	100	80	80	1,030	85	93.25	1,133	90		1,246	95		1,371	100		1,508	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya	Dokumen Data Pokok Pendidikan	dokumen	-	1	1	1	400	1	1	440	1		484	1		532	1		586	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase pemantauan dan pengendalian program dan proses pendidikan	%	-	100	80	80	6,500	85	90	7,150	90		7,865	100		8,652	100		9,517	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan Berkarakter	SDM berkualitas yang berkarakter	Kab/Kota	-	19	19	19	28,500	19	19	28,500	19		28,500	19		28,500	19		28,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SD Piloting	Jumlah	N/A	38										19			38			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SMP Piloting	Jumlah	N/A	38										19			38			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi dan workshop pendidikan berkarakter	Kab/Kota	N/A	19										19			19			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sekolah Sehat	%	35	60										55			60			
	Buku Pembelajaran bernuansa surau	%	N/A	100										95			100			
Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	Sinkronisasi Program	%	-	100	80	80	460	90	-	506	100		557	100		612	100		673	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BIRO BINA SOSIAL							750			825			908			998			1,098	
Pendidikan Berkarakter	Meningkatnya kompetensi pendidikan bernuansa surau	%	N/A	100	80	80	750	85	85	825	90		908	95		998	100		1,098	Biro Binsos
DINAS PERTANIAN							-			-			-			2,970			2,410	
Peningkatan dan pengembangan SDM Pertanian	Meningkatnya dan berkembangnya SDM Pertanian	Orang	-	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	480	-	210	570	Dinas Pertanian
	Meningkatnya dan berkembangnya SDM Pertanian	Orang	-	75,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75300	590	-	75300	590	Dinas Pertanian
	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan pertanian	Unit	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,900	-	2	1,250	Dinas Pertanian
KESEHATAN							701,486			1,023,215			225,647			586,830			757,201	
DINAS KESEHATAN							28,002			31,131			34,366			124,891			50,915	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran				20%	20%	3,058	40%	40%	3,458	60%	60%	3,958	80%	80%	5,442	100%	100%	5,986	Dinas Kesehatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur				20%	20%	1,503	140%	140%	1,981	160%	160%	2,146	80%	80%	3,213	100%	100%	3,534	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBM PRBHN	STLH PRBHN		
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur				20%	20%	179	240%	240%	174	260%	260%	174	80%	80%	188	100%	100%	207	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur				20%	20%	33	340%	340%	68	360%	360%	68	80%	80%	76	100%	100%	84	Dinas Kesehatan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD				20%	20%	459	440%	440%	605	460%	460%	688	80%	80%	694	100%	100%	763	Dinas Kesehatan
Obat dan Pembekalan Kesehatan	Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan	%	85	100	85	85	5,236	90	100	5,584	95	90	6,142	100	80	5,171	100	100	5,444	Dinas Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat	%	80	100	70	85	-	80	100	-	90	100	-	100	-	-	100	-	-	Dinas Kesehatan
	Alokasi biaya Tindak siaga Medik	%	100	100	100	100	1,464	100	100	2,196	100	100	2,418	100	-	-	100	-	-	Dinas Kesehatan
	Informasi KIA	%	80	100	70	70	-	80	95.13	-	90	100	-	100	-	-	100	-	-	Dinas Kesehatan
	Sinkronisasi Program Kesehatan masyarakat	%	100	100	70	70	-	80	100	-	90	-	-	95	-	-	100	-	-	Dinas Kesehatan
	Menurunnya AKI dan AKB	%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	7,482	-	100	8,399	Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembinaan, monitoring penyediaan sarana promosi, pertemuan, pelatihan dan gerakan generasi muda dalam pembangunan kesehatan	%	63.7	80	72	69.38	1,469	74	100	2,029	76	80.2	2,232	78	80	2,009	80	100	1,582	Dinas Kesehatan
Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat yang diukur dengan prevalensi gizi seimbang Balita dan meningkatnya proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang	%	8,20	6,80	8,20	8,20	2,250	7,80	6,50	2,475	7,40	6.5	2,723	7,00	80	3,264	6,80	100	1,005	Dinas Kesehatan
Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pemahaman pelaksanaan program penyehatan lingkungan	Kali pertemuan	12	15	7	14	394	9	9	433	11	11	477	13	-	-	15	-	-	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat	%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1,142	-	100	416	
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/ tidak menular)	Penemuan kasus baru Tuberculosis	%	77.81	90	55	58.38	34	60	58.95	37	70	139.05	41	80	-	-	90	-	-	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Succes Rate TB	%	85	92	88	88	232	89	100	255	90	89.76	281	91	-	-	92	-	-	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
	Cakupan ODHA yang diobati	%	100	90	90	100	57	90	100	63	90	100	69	90	-	-	90	-	-	Dinas Kesehatan
	Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index-API)	Per 100 penduduk	0.24	1	2	0,30	84	2	0.24	92	1	0.25	102	1	-	-	1	-	-	Dinas Kesehatan
	Pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat dan setelah haji	%	100	100	100	100	111	100	100	122	100	100	134	100	-	-	100	-	-	Dinas Kesehatan
	Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular melalui pembinaan, montiroing dan peningkatan SDM kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	308	-	100	339	Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit Jiwa/RS Mata/ RS Paru	Terpenuhinya sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTD	%	100	100	100	100	2,289	100	100	1,413	100	100	1,554	100	80	12,306	100	100	19,002	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa, RS Paru, RS Mata	Meningkatnya sarana dan prasarana di dinas kesehatan/UPTD/RS melalui pemeliharaan sarana dan prasarana	%	100	100	85	90	253	90	100	358	95	95	394	100	80	308	100	100	339	Dinas Kesehatan
Sumber Daya Kesehatan	Tugas belajar dokter spesialis	Orang	12	6	2	12	450	3	9	495	4	2	545	6	-	-	6	-	-	Dinas Kesehatan
	Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Kali pelatihan	21	20	12	50	1,488	14	2	1,637	16	41	1,800	20	-	-	20	-	-	Dinas Kesehatan
	Pertemuan peningkatan pelayanan kesehatan	Kali	20	20	21	21	766	13	22	843	15	15	927	18	-	-	20	-	-	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan di Kab/ Kota dan RS serta Provinsi	%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	3,171	-	100	2,473	Dinas Kesehatan
Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Sinkronisasi Program Kesehatan Masyarakat	%	100	100	80	80	967	90	100	1,064	100	100	1,170	100	-	-	100	-	-	Dinas Kesehatan
	Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan	% Penduduk	50	100	63.8	61.6	4,177	78.6	72.64	4,595	91.3	73.35	5,054	100	-	-	100	-	-	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan data kesehatan secara akurat dan tepat	%	60	100	80	80	243	85	68	267	90	90	294	95	-	-	100	-	-	Dinas Kesehatan
	Persentase kesiap siagaan bencana	%	100	100	80	100	372	90	97.6	409	95	95	450	100	-	-	100	-	-	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015	
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN
														TARGET						
														TARGET						
	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	79,682	-	100	863	Dinas Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Penelitian	Dokumen penelitian	1	5	1	1	434	2	2	478	3	0	525	5	-	-	5	-	-	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya SDM dibidang penelitian dan pengembangan, pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam memberikan masukan untuk perumusan kebijakan program dan penanggulangan kesehatan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	435	-	100	479	
RSUD PARIAMAN							576,043			701,640			50,054			163,253			418,459	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	bulan			-	-	1,718	12 bulan	-	2,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Pariaman
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%		100%	-	-	775	100%	100%	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Pariaman
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	%		100%	-	-	139	100%	100%	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Pariaman
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	%		100%	-	-	125	100%	100%	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Pariaman
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD	%		100%	-	-	75	100%	100%	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Pariaman
Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terjaminnya ketersediaan obat/bahan habis pakai dan reagen untuk pemeriksaan labor	%	86	100	100	100	1,437	100	100	1,557	100	100	1,315	100	100	4,826	100	100	4,488	RSUD Pariaman
Upaya kesehatan masyarakat	Lancarnya pelayanan siaga dan tindak medik kepada masyarakat/pasien	%	100	100	80	80	3,599	90	85	6,332	100	100	1,204	100	100	779	100	100	857	RSUD Pariaman
Promosi kesehatan masyarakat	Meningkatnya informasi pelayanan dan kesehatan kepada masyarakat RS	%	100	100	20	100	96,000	40	100	45	100.00	-	36.00	100.00		41.40	100.00		47.60	RSUD Pariaman
Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ RS Paru/RS Mata	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan RS	%	0	100	20	20	3,994	40	40	5,800	60	60	18,217	80	80	10,968	100	100	9,500	RSUD Pariaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/RS Paru/ RS Mata	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana RS sesuai standar dan berfungsi baik	%	0	100	20	60	81	40	40	1,555	60	60	457	60	60	100,000	100	100	350,000	RSUD Pariaman

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin	%	0	100	20	20	468,100	40	40	683,100	60	60	825	60	80	1,423	100	100	1,566	RSUD Pariaman
Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Terjaminnya ketersediaan biaya operasional pelayanan RS	%	0	100								100	8,000	100	100	25,216	100	100	27,000	RSUD Pariaman
	BOR	%	0	70	70	65	-	75	74.05	-	75	78.4	20,000	78	78	20,000	80	80	25,000	RSUD Pariaman
RSUD ACHMAD MUCHTAR							54,827			237,176			85,377			188,263			190,734	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi kantor						1,360													RSUD Achmad Muchtar
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya penyelenggaraan tugas dinas aparatur						-			-			294			3,213			3,534	RSUD Achmad Muchtar
Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Jiwa/RS Mata/RS Paru	Meningkatnya pelayanan unggulan RS dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap	%	100	100	100	88.96	6,794	100	97.83	187,979	100		17,350	100	100	90,500	100	100	82,150	RSUD Achmad Muchtar
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin	Kab/ Kota	18	18	11	18	500	12	18	1,024	15		1,383	17	18	1,700	19	18	2,000	RSUD Achmad Muchtar
Standarisasi pelayanan kesehatan	Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan						500			500			1,350			1,700			2,000	RSUD Achmad Muchtar
Pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana RS setelah dilakukan pemeliharaan															1,150			1,050	RSUD Achmad Muchtar
Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Meningkatnya kemandirian RS dengan pelayanan BLUD yang berkualitas	%		75	71	59.2	45,673	73	63.85	47,673			65,000		70	90,000		75	100,000	RSUD Achmad Muchtar
RSUD SOLOK							25,067			34,067			32,125			89,057			63,676	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran						1,647	12 bulan		2,511	100%		2,737	12 bulan		3,716	12 bulan		4,377	RSUD Solok
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur						595			881			1,316			782			1,401	RSUD Solok
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur						164			192			177			188			195	RSUD Solok

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANG-GUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur						150			250			116			116			116	RSUD Solok
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD						200			300			236			211			232	RSUD Solok
Standarisasi pelayanan kesehatan	Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan	Kegiatan	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250	-	-	-	RSUD Solok	
Pengadaan, Peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Jiwa/RS Mata/RS Paru	Meningkatnya pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan	%	0	100	20	20	15,775	40	40	22,778	60	60	20,851	80	-	-	100	-	RSUD Solok	
		%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	76,301.00	-	100	48,866	RSUD Solok	
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Meningkatnya persentase masyarakat miskin menerima pelayanan kesehatan RS	%	0	100	20	20	800	40	40	1,313	60	60	1,409	80	-	-	100	-	RSUD Solok	
		%	0	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	1,667.00	-	95	3,501	RSUD Solok	
Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru/RS Mata	Sarana dan prasarana yang terpelihara	%	0	100	20	20	150	40	40	430	60	60	150	80	80	1,000	100	100	500	RSUD Solok
Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	BOR	%	83.1	80	71	80.29		73	87.47					78			80		RSUD Solok	
Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat essensial generik di sarana pelayanan keseha tan dasar	%	85	100	85	85	5,586	90	100	5,412	95		5,133	100	100	4,826	100	100	4,488	RSUD Solok
RSJ HB SAANIN							17,547			19,201			23,725			21,366			33,417	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	-	-	100	-	1,862	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	RSJ HB SAANIN
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	40	100	45	-	1,625	50	-	1,081	-	-	-	-	-	-	100	100	550	RSJ HB SAANIN
Peningkatan disiplin Aparatur	Terpenuhiya peningkatan disiplin aparatur	%		100	100		137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSJ HB SAANIN
Peningkatan kapasitas Sumbr daya Aparatur	Terpenuhiya peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	-	100	-	-	75	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSJ HB SAANIN
Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD	%					242			-										RSJ HB SAANIN
Obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat generik dan perbekalan kesehatan di RS	%	86	100	90	90	1,437	90	95	1,557	95	95	1,315	-	-	-		-	-	RSJ HB SAANIN
Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat	%	76	100	80	78		90	85	752					100			100		RSJ HB SAANIN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Ruamah Sakit Jiwa/RS Paru/RS.Mata	Terlaksananya peningkatan sarana rumah sakit	%	20	100	20	20	4,645	40	40	7,385	60	60	11,810	-	80	3796	-	100	11207	RSJ HB SAANIN
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan mayarakat	Terwujudnya pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat	%	46	78	74	60	500.00	0	0	370	60	0	440	70	65	510	80	80	600	RSJ HB SAANIN
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terlaksananya pelayanan penduduk miskin	%	0	100	20		23.8	40		55.9	60		60	80	80	1,060	100	100	1,060	RSJ HB SAANIN
Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Terlaksananya Program BLUD	%	Belum BLUD	100	BLUD Penuh	100	7000	BLUD Penuh	100	8000	BLUD Penuh	100	10,000	80	100	16,000	100	100	20,000	RSJ HB SAANIN
		%	76	85	73	78	-	75	80	-	80	80.33	-	-	84	-	-	85	-	RSJ HB SAANIN
PEKERJAAN UMUM							132,494			288,301			330,261			867,663			933,996	
DINAS PRASARANA JALAN							55,608			84,481			98,310			735,903			789,627	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	%			100	100	2,270	100	100	2,238	100	100	3,254	100	100	3,222	100	100	3,545	Dinas Prasjal Tarkim
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	%			100	100	1,805	100	100	1,815	100	100	1,950	100	100	2,689	100	100	2,958	Dinas Prasjal Tarkim
Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	%			100	100	264	100	100	264	100	100	300	100	100	291	100	100	320	Dinas Prasjal Tarkim
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tercapainya Peningkatan SDM Aparatur	%			100	100	69	100	100	69	100	100	700	100	100	549	100	100	604	Dinas Prasjal Tarkim
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	%			100	100	872	100	100	872	100	100	1,485	100	100	2,083	100	100	2,292	Dinas Prasjal Tarkim
Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas sarana jalan dan jembatan dlm rangka mengurangi biaya transportasi dan meningkat efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat																			
	a. Pembangunan jembatan kelok sembilan	Meter	-	432	145	145	50.000 *)	500	250	98.000 *)	500	100	98.000 *)	-	-		-	-		Dinas Prasjal Tarkim
	b. Pembangunan dan peningkatan jalan nasional	Km	-	300	240.15	117	664.000*)	294	160	765.000*)	211	112	482.000*)	83	60	192.000*)	145	60	363.000*)	Balai Besar Pelaksana Jalan II
	c. Pembangunan Jalan Rao-Rokan (Bts. Riau)	Km	-	5	15	4.65	18,992	15	4.65	20,891	15	2.7	22,980	15	0	25,278	15	0	27,806	Dinas Prasjal Tarkim
	d. Pembangunan dan peningkatan jalan nasional pantai barat	Km	-	60	42	41	107.000*)	60	135	150.000*)	60	21.4	150.000*)	60	60	150.000*)	60	60	150.000*)	Balai Besar Pelaksana Jalan II

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
	h. Terlaksananya pembangunan jalan Padang - By pass	Km	-	14	DED	DED	5.000*)	36	Pembebasan Tanah	155.000*)	36	Pembebasan Tanah	155.000*)	36	7	155.000*)	36	7	155.000*)	Balai Besar Pelaksana Jalan II
	i. Lanjutan pembangunan jalan Duku-Sicincin – Malalak – Bukittinggi	Km	-	20	60	3.72	55.000*)	60	6.1	55.000*)	17	2.51	42.500*)	17	16	42.500*)	17	20	42.500*)	Dinas Prasarjal Tarkim
	j. Pembangunan Jembatan Provinsi dan Jembatan Strategis Provinsi	Meter	-	250	25	42	5,000	100	227	20,000	100	146	20,000	100	50	20,000	100	50	20,000	Dinas Prasarjal Tarkim
	Pembangunan Jalan Menuju Objek Wisata (kws. Wisata Alam Gn. Padang, Mandeh, Panorama Baru, Danau Kembar, Harau, Danau Maninjau, Kws. Surfing Maninjau, Kws. Wisata Tambang Sawahlunto, Kws. Wisata Budaya Ulakan Tapakis)	KM	0	25	5	4	-	5	5.19	10.000 *)	5	5	10.000 *)	5	5	10.000 *)	5	5	10.000 *)	Dinas Prasarjal Tarkim
	Peningkatan Jalan Provinsi	Km	-	75	15	18		15	22		15	25.42			15			15		Dinas Prasarjal Tarkim
	Pembangunan Jalan Baru (Jalan strategis provinsi)	Km	-	40	8	15		8	21		8	34.59			8			8		Dinas Prasarjal Tarkim
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya sistem jaringan jalan yang ada agar tetap dalam kondisi yang layak sesuai dengan standar pelayanan	KM/ tahun	-	800	800	854	48.500*)	800	1022	48.500*)	800	1026	48.500*)	800	800	48.500*)	800	800	48.500*)	Balai Besar Pelaksana Jalan II
	Pemeliharaan rutin jembatan nasional	Meter/ tahun	-	6,000	6,000	7,999	30.000*)	6,000	8,170	30.000*)	6,000	6,000	30.000*)	6,000	6,000	30.000*)	6,000	6,000	30.000*)	Balai Besar Pelaksana Jalan II
	Rehab/ pemeliharaan jalan dan jembatan prov	KM/ tahun	-	600	1,150	1035	26,000	1,150	1,027	28,750	1,150	1024	35,000	1,150	600	38,000	1,150	600	42,000	Dinas Prasarjal Tarkim
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kemantapan Jalan Nasional	%	90	95	89	90		91	92			93	95		0	-		0	-	Balai Besar Pelaksana Jalan II
	Kemantapan Jalan Provinsi	%	80	88	82	82		83	85			84	87	86	0	-	88	0	-	Dinas Prasarjal Tarkim
Pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi	Meningkatnya kapasitas SDM jasa konstruksi	Kali			5	5	336	6	6	757	8	22	3,334	8	8	800	8	8	800	Dinas Prasarjal Tarkim
Peningkatan Sarana dan Prasarana ke PU an	Meningkatnya persentase layanan sarana prasarana ke PU an	Paket			-	-	-	1	1	8,825	1	1	9,125	1	1	11,000	1	1	11,000	Dinas Prasarjal Tarkim
	persentase kemantapan jalan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	593,931	-	89.5	521,043	Dinas Prasarjal Tarkim

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
	Persentase cakupan layanan air minum	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	29,841	-	67	8,242	Dinas Pras-jal Tarkim
	Jumlah bangunan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	143.415*)	-	5	141,655	Dinas Pras-jal Tarkim
	TPA Regional	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5,915	-	2	4,930	Dinas Pras-jal Tarkim
	Sarana dan Prasarana bidang jalan dan jembatan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2,304	-	4	2,432	Dinas Pras-jal Tarkim
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR							76,886			203,820			231,671			131,700			144,271	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	60	12	12	1,079	12	12	1,468	12	12	2,142	12	12	1,931	12	12	2,124	Dinas PSDA
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	unit	29	962	29	29	1,475	186	186	3,531	233	233	4,781	264	264	771	250	250	848	Dinas PSDA
Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	Orang	405	1573	405	405	141	405	405	141	249	249	87	257	257	99	257	257	109	Dinas PSDA
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	laporan	36	68	36	36	346	2	2	583	10	10	707	10	10	767	10	10	844	Dinas PSDA
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Km	2.311	15	3	11.1	3,710	6	7.015	4,081	9	9	4,489	12	12	4,938	15	15	5,432	Dinas PSDA
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Terehabilitasinya jaringan irigasi	Ha	15,403	24,206	24,206	50,736	37,412	24,206	50,736	82,092	24,206	24,206	90,301	24,206	-	-	24,206	-	-	Dinas PSDA
	Terlaksananya OP jaringan irigasi	Ha	31,720	35,246	31,720	48,427	7,000	31,720	35,246	10,171	31,720	35,246	17,169	31,720	-	-	31,720	-	-	Dinas PSDA
	Terehabilitasinya jaringan rawa	Ha	300	300	300	300	10.000*)	300	300		300	300		300	-	-	300	-	-	Dinas PSDA
	Terlaksananya OP Jaringan rawa	Ha	31,354	31,354	5,000	31,354	500*)	5,000	31,354	500*)	5,000	31,354	500*)	5,000	-	-	5,000	-	-	Dinas PSDA
	Terlaksananya rehab dan OP sumur air tanah	Buah	1	1	1	1	840*)	1	1	840*)	1	1	840*)	1	-	-	1	-	-	Dinas PSDA
				2	2	2	2	240*)	2	2	240*)	2	1	240*)	2	-	-	2	-	-
Pengembangan, Pengelola an dan Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air Lainnya	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau, danau dan sumber air lainnya																			
	Pembangunan check Dam	unit	2	4	1	1	3,723	4	5	25,931	4	2	28,525	4	2	31,377	4	1	34,715	Dinas PSDA
	Pembangunan embung/ Situ	unit	1	2	2	2	7.000*)	2	2	7.000*)	2	1	7.000*)	2	1	7.000*)	2	1	7.000*)	Dinas PSDA
	Rehabilitasi embung/ Situ	unit	2	5	5	5	2.500*)	5	2	2.500*)	5	2	2.500*)	5	2	2.500*)	5	2	2.500*)	Dinas PSDA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
	Rekontruksi bangunan SKPD dan Kanwil KL yang roboh (20-buah)	unit		19	40	3	9,500	80	5	10,450	80	3	11,495	100	0	-	-	0	-	Dinas Prasjal Tarkim
	Revitalisasi kawasan tradisional dan bersejarah	Paket		3	3	1	250	3	2	275	3	1	303	3	0	-	3	0	-	Dinas Prasjal Tarkim
PENATAAN RUANG							2,150			2,365			2,602			1,799			1,977	
DINAS PRASARANA JALAN							2,150			2,365			2,602			1,799			1,977	
Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya perencanaan penataan ruang di Sumbang	Dokumen	-	10	3	3	1,350	3	5	1,485	3	2	1,634	2	4	1,799	2	5	1,977	Dinas Prasjal Tarkim
	Penetapan Perda, Pergub dan SK.Gub dalam penataan ruang	Perda	-	1	1	1		1	1		1	1		1	0	-	1	0	-	Dinas Prasjal Tarkim
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya keserasian dan keselarasan rencana dengan pembangunan	ka-wasan	-	13	3	3	4.900*)	4	5	5.400*)	4	5	5.400*)	4	2	5.400*)	4	2	5.400*)	Dinas Prasjal Tarkim
	Tersedianya dokumen zoning regulation	Buku	-	1	2	2	800	2	3	880	1	2	968	1	0	-	1	0	-	Dinas Prasjal Tarkim
PERENCANAAN PEMBANGUNAN							16,947			17,544			17,706			19,156			23,567	
BAPPEDA							16,947			17,544			17,706			19,156			23,567	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran dan operasional perkantoran Bappeda dan UPTB LPSE	bulan	-	60	12	12	1,639	12	12	1,825	12	12	2,037	12	12	2,802	12	12	2,532	BAPPEDA
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas gedung perkantoran	bulan	-	60	12	12	1,364	12	12	2,025	12	12	2,340	12	12	1,280	12	12	1,265	BAPPEDA
Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	bulan	-	60	12	12	53.7	12	12	47	12	12	50	12	12	53	12	12	53	BAPPEDA
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Perencana Bappeda	bulan	-	60	12	12	110	12	12	154	12	12	161	12	12	188	12	12	103	BAPPEDA
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	bulan	-	60	12	12	388	12	12	433	12	12	625	12	12	541	12	12	606	BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Buah	4	24	4	4	1,575	9	9	3,230	3	3	1,892	4	-	-	4	-	-	BAPPEDA
	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RTRW, RPJP, RPJMD dengan RKPD dan KUA PPAS)	%												74	3,304		77	5,188	BAPPEDA	
Pengembangan Data dan Informasi Statistik	Jumlah dokumen data dan statistic pembangunan/ publikasi statistik	Buku	4	24	4	4	2,215	4	5	1,725	5	5	1,897	5	-	-	5	-	2,087	BAPPEDA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015	
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN
														TARGET						
	Tersedianya data dan statistik pembangunan	%	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1,897	65	2,087		
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah	Kali	-	76	78	-	8,027	73	85	6,349	73	86	6,708	73	-	-	76	-	-	BAPPEDA
	Meningkatnya konsistensi kesesuaian program dengan pelaksanaan Pembangunan daerah (RTRW, RPJPD, RPJMD dengan RKPD dan KUA PPAS)	%												75	6,985		80	7,329		
Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintah dan Pembangunan Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan terapan	Judul	11	34	14	14	1,425	19	19	1,606	24	24	1,846	29	-	-	34	-	-	BAPPEDA
	Jumlah diskusi aktual	Judul	5	41	17	17		23	23		29	30		35	-		41	-		BAPPEDA
	Persentase hasil riset dan pengembangan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan	%	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2,106	-	60	2,317	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal	Jumlah koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah tertinggal	Jml Koord. & kerjsma Perenc. Pemb. daerah tertinggal .	19	15	19	19	150	19	-	150	17	17	150	17	-	-	15	-	-	BAPPEDA
PERHUBUNGAN							16,991			13,754			26,615			9,748			10,926	
DINAS PERHUBUNGAN & KOMINFO							16,991			13,754			26,615			9,748			10,926	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						1,100			1,654			1,942			1,845			1,954	Dinas Perhubungan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						267			842			2,624			282			554	Dinas Perhubungan
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						115			98			86			98			100	Dinas Perhubungan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						40			50			130			100			120	Dinas Perhubungan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						174			285			426			375			445	Dinas Perhubungan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya pengembangan angkutan kereta api di Sumbar	km	Kajian, ganti rugi tanah dan fisik	0	4.5	0	10,000	2.5		75.000*)	2		50.000*)	0		10.000*)	0			Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
	Terlaksananya pelayanan berklasifikasi baik berdasarkan standart pelayanan perhubungan darat	%	-	80	76	50	345	77		380	78		417	79		459	80		505	Dinas Perhubungan
	Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan kewenangan Provinsi	Paket	-	1	1	5	1,100	1		1,210	1		1,331	1		1,464	1		1,611	Dinas Perhubungan
Rehabilitasi Pemeliharaan dan Peningkatan Transprtasi Laut	Meningkatnya pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Sumbar (%)	Unit	-	-	-	1		1	-	28.500*)	-			1		30.000*)	-			Dinas Perhubungan
	Meningkatnya penyelenggaraan Moda Trasnportasi Laut di Sumbar	paket	-	1	1	1	10.500*)	1		15.000*)	1		15.000*)	1		15.000*)	1		15.000*)	Dinas Perhubungan
	Peningkatan dermaga dan fasilitas penunjang lainnya pada pelabuhan laut (Teluk Bayur dan Teluk Tapang)	Paket	-	1	2	2	385.000*)	2		385.000*)	2		385.000*)	1		300.000*)	1		300.000*)	Dinas Perhubungan
	Penetapan Perda / Pergub / SK.Gub	Paket	-	2	2	0		2			2			2			2			Dinas Perhubungan
	Terlaksananya pembangunan dermaga khusus dan areal pergudangan	Paket	-	-	1	1	400*)	1		50.000*)	1		75.000*)	1		150.000*)	1			Dinas Perhubungan
	Terbanggunnya dermaga dan pergudangan	Paket	-	1	1	0	10.500*)	1		13.500*)	1		15.000*)	1		15.000*)	1		20.000*)	Dinas Perhubungan
	Meningkatkan moda transportasi laut pada daerah terpencil (Kab. Mentawai)	unit	-	1	1	0		1		5.000*)	1		10.000*)	1		10.000*)	1		10.000*)	Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transprtasi Udara	Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan moda transportasi udara di Sumbar	Meter	2,750	-	50	2,500	20.000*)	150		75.000*)	-		25.000*)	-			-			Dinas Perhubungan
	Terlaksananya pembangunan Bandara three in one di Mentawai	paket	-	1	Kajian	0	-	1		2.000*)	1		100.000*)	1		150.000*)	1		50.000*)	Dinas Perhubungan
Pengembangan angkutan Kereta Api	Terlaksananya Rehabilitasi, pemeliharaan an dan pembangunan prasarana, fasilitasi Angkutan Kereta Api	paket			DED dan Pembebasan Lahan		3,600	1		6,960	1		16,356	1		4,792	1		5,271	Dinas Perhubungan
	Tersedianya perencanaan rencana induk pembangunan jaringan KA Sumbar	paket			Kajian dan Pembebasan Lahan		250	DED		2,275	1		3,303	1		333	1		366	Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015				
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN			
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatkan keselamatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	%			20			20			20			20			20				Dinas Perhubungan
LINGKUNGAN HIDUP							50,635			94,270			91,515			43,873			65,261		
DINAS PRASJAL TARKIM							17,000			49,000			47,000			-			17,000		
Pembangunan Jalan dan Jembatan	a. Jalan evakuasi yang dibangun	KM	-	5	3.5	2	5,000 10.000*)	5	1.5	7,000 10.000*)	5	4.5	5,000 10.000*)	5	0	-	5	-	-	Dinas Pras-jal Tarkim	
	b. Jembatan evakuasi yang dibangun	Buah	-	3	3	1	2,000	3	2	10,000 7.000*)	3	3	10,000 7.000*)	3	0	-	3	-	-	Dinas Pras-jal Tarkim	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Escape building yang dibangun	Buah	-	1	1	1	10,000	1	1	30,000	1	1	30,000	1	0	-	1	-	-	Dinas Pras-jal Tarkim	
	Shelter/ tempat Evakuasi yang dibangun	Buah	-	5	-	-		5	6	2,000	5	-	2,000	5	0	-	5	-	-	Dinas Pras-jal Tarkim	
	Tersedianya bangunan shelter	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28.000 *)	-	6	17,000	Dinas Pras-jal Tarkim	
DINAS PSDA							24,005			26,405			29,045			31,949			35,145		
Pegendalian banjir dan pengamanan pantai	Terbangunnya perkuatan tebing sungai	KM	0.5	4	0.5	0.5	13,750	0.5	5.205	15,125	0.5	0.5	16,637	0.5	0.5	18,301	0.5	0.5	20,131	Dinas PSDA	
	Terbangunnya tanggul pengendali banjir	KM	1	5	1	1	6,350	1	1.17	6,985	1	1	7,683	1	1	8,451	1	1	9,297	Dinas PSDA	
	Terbangunnya pengamanan pantai	Unit	3	5	3	3	3,905	3	0	4,295	3	1	4,725	3	1	5,197	3	1	5,717	Dinas PSDA	
	Terbangunnya tanggul pengendali sedimen/lahar	Unit	3	3	3	3	25.000*)	3	0	15.000*)	3	1	15.000*)	3	1	15.000*)	3	1	15.000*)	Dinas PSDA	
BPBD							4,271			12,458			7,718			3,440			3,942		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	20	100	20	20	648	40	40	843	60	60	1,061	80	80	1,115	100	100	1,290	BPBD	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	%	20	100	20	20	463	40	40	1,215	60	60	1,049	80	80	479	100	100	1,073	BPBD	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	%	20	100	20	20	19	40	40	21	60	60	21	80	80	28	100	100	28	BPBD	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	%	20	100	20	20	150	40	40	60	60	60	45	80	80	80	100	100	100	BPBD	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	%	20	100	20	20	97	40	40	192	60	60	204	80	80	204	100	100	223	BPBD	
Peningkatan Mitigasi Bencana	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)	Laporan	1	1	-	-	-	1	1	250	1	0	250	1	-	-	1	-	-	BPBD	
	Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) per- jenis bencana	Laporan	-	1	-	1	-	1	1	250	1	1	250	1	-	-	1	-	-	BPBD	
	Penetapan dan penyusunan dokumen kebijakan (Perda, Pergub, SK-Gub)	Paket	-	1	-	-	-	1	-	250	1	0	250	1	-	-	1	-	-	BPBD	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
	Penetapan pembentukan dan Pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Prov. / Kab. / Kota	Prov.	3	3	3	3	269	3	3	296	3	1	325	3	-	-	3	-	-	BPBD
		Kab/ Kota	1	14	1	1		5	5		8	10		11	-		14	-	-	
	Penetapan dan pembinaan Forum Pengurangan risiko Bencana (Prov. / Kab. / Kota)	Prov.	3	3	3	3	180	3	3	198	3	1	217	3	1	-	3	-	-	BPBD
		Kab/ Kota	1	14	1	1		5	5		8	8		11	10		14	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Paket	-	1	1	100 (buku)	300	1	1 unit Baliho, 5.500 Lembar Brosur	300	1	1	300	1	-	-	1	-	-	BPBD
	Terlaksananya peningkatan akses Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) - Paket	Paket	1	1	1	1	224	1	1	246	1	1	271	1	-	-	1	-	-	BPBD
	Terlaksananya operasional PUSDALOPS Prov.	Tahun	1	1	1	1	968	1	1	1,064	1	1	1,171	1	-	-	1	-	-	BPBD
	Terlaksananya Simulasi/ Pelatihan PB bagi Masyarakat (Kab. / Kota)	Prov/ Kab/ Kota	5	20	20	20	703	20	20	773	20	20	851	20	20	936	20	-	-	BPBD
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	598	-	60	1,228	BPBD
Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	Meningkatnya penanganan tanggap darurat pasca bencana	paket	-	-	-	-	-	9	6	6,000	-	5	953	-	-	-	-	-	-	BPBD
	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat	% (dari kejadian bencana)	60	80	70	70	250	75	75	500	75	75	500	75	-	-	80	-	-	BPBD
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	*)	-	80	*)	BPBD
ESDM							165			181			198			761			900	
Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	e. Tersedianya peta distribusi penduduk kawasan rawan bencana gunung api (lembar)	Buah	1	5	1	1` (gn. Kerinci)	75	1	1 (gn. Ta-lang)	82	-	1	90	-	1	99	1	1	109	ESDM
	f. Tersedianya peta kawasan rawan gerakan tanah (lembar)	Lembar	-	1	1	1	40	2	2	44	5	5	48	-	5	53	1	1	58	ESDM
	g. Jumlah monitor gunung api prov. Sumatera Barat	Paket	-	1	1	1	50	1	1	55	1	1	60	1	1	66	1	1	73	ESDM
	Peta daerah rawan bencana geologi	Lembar	0	4											5	543		4	660	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
BAPEDALDA							2,983			2,964			3,454			3,248			3,829	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%		100	100	100	868.8424	100	100	815	100	100	962	100	100	881	100	100	1,101	BAPEDAL DA
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	%		100	100	100	943.6945	100	100	234	100	100	504	100	100	294	100	100	527	BAPEDAL DA
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	%		100	100	100	23.8	100	100	26	100	100	23	100	100	24	100	100	24	BAPEDAL DA
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	%		100	100	100	91.58	100	100	59	100	100	49	100	100	47	100	100	47	BAPEDAL DA
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	%		100	100	100	217.25	100	100	232	100	100	249	100	100	214	100	100	217	BAPEDAL DA
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Terhimpun, Tersusun dan Terselamatkannya arsip/ dokumen daerah	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	15	BAPEDAL DA
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Objek	-	24	7	8	85	8	12	150	9	19	175	10	22	185	11	24	200	BAPEDAL DA
Perlindungan dan konser-vasi sumber daya alam	Jumlah kab/kota yang dibina	Kab/ Kota		5	13	13	125	13	13	190	13	13	209	13	13	230	13	13	250	BAPEDAL DA
	Masyarakat pelopor pelestarian lingkungan	Orang/ Kelom-pok		4	4	4	125	4	4	173	4	6	173	4	4	173	4	4	173	BAPEDAL DA
	Perusahaan pelaksana CSR Lingkungan	Perusa-haan		10	2	-	7.000*)	4	6	9.000*)	6	9	11.000*)	8	8	13.000*)	10	10	15.000*)	BAPEDAL DA
	Terpantaunya pencemaran sungai dan danau	Sungai		5	2	2	200	3	3	260	2	2	260	4	4	350	5	5	350	BAPEDAL DA
		Danau		4	-	-	500*)	2	2	500*)	4	4	500*)	4	4	600*)	4	4	600*)	
	Ditetapkannya daya tampu ng dan daya dukung sungai	Sungai		1	1	1	94	1	1	200	1	1	200	1	1	200	1	1	225	BAPEDAL DA
	Terfasilitasinya penyusu-nan status Kehati 19 kabu-paten/kota dan tersusunnya 1 (satu) rangkuman Kehati Provinsi	Kabu-paten/ Kota		3	4	4	110	4	5	300	4	4	300	4	4	300	4	3	300	BAPEDAL DA
Tata Lingkungan dan Pena-taan Hukum Lingkungan	Terlaksananya pembinaan KLHS	Kab/ Kota	-	2	0	0	54	1	1	200	1	1	200	2	2	200	2	2	225	BAPEDAL DA
	Terfasilitasinya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	-	100	100	100	45	100	100	125	100	100	150	100	100	150	100	100	175	BAPEDAL DA
DINAS KEHUTANAN							1,911			2,438			3,150			3,400			3,645	
Pengamanan dan pengen-dalian hutan serta mitigasi perubahan iklim	Berkurangnya tekanan kerusakan hutan 20%	%		20	4	4.6	500	4	3.63	900	4	3.77	1,000	4	4	1,025	4	4	1,120	Dishut, BKSDA, TNKS Wil. III, TNS

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
							6.300*)			6.500*)			6.500*)			6.700*)			6.700*)	
	b. Pengawasan hot spot dan pengendalian kebakaran	Kab/ Kota	-	6	19	19	186	19	19	300	19	19	400	6	19	500	6	19	500	Dishut, BKSDA TNKS Wil. II, TNS
	c. Meningkatnya pemahaman Aparatur tentang REDD pada 10 Kab	Kab	-	10	2	3	100	2	2	100	2	6	350	2	2	400	2	2	450	Dishut
	d. Perkembangan ekosistem kawasan hutan atau lahan daerah rawan bencana 41 lokasi	Lokasi	-	41	10	10	400	11	9	100	11	3	150	12	4	500	15	5	600	Dishut
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Berkurangnya lahan kritis baik di dalam maupun diluar kawasan hutan 10.000 ha/ tahun	Batang	-	210,000	200,000	200,000	575	210,000	182,700	500	210,000	100,000	500	210,000	100,000	500	210,000	100,000	500	Dishut
		Batang	-	15,300,000	15,300,000	31,864,660	14.435*)	15,300,000	18,387,470	14.435*)	15,300,000	-	14.435*)	15,300,000	5,000,000	14.435*)	15,300,000	5,000,000	14.435*)	BP DAS Agam Kuantan
		Batang	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	BP DAS Indra Giri
		Batang	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	BP DAS Batang Hari
	Terehabilitasinya lahan kritis dalam kawasan hutan 30.603 Ha	Ha	-	165	20	0	300*)	35	30	350*)	60	90	600*)	10	25		35	25		Dishut,
		Ha	-	27,229	12,037	12,037	15.500*)	12,037	3,633	15.500*)	12,037	-	15.500*)	12,037	300	15.500*)	12,037	200	15.500*)	BP DAS Indragiri
		Ha	-	1,864	5.39	5.39	5.400*)	8.6	1,100	8.200*)	1500	-	8.300*)	10.35	200	10.100*)	8.37	150	8.100*)	BP DAS Agam Kuantan
		Ha	-	1,350	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	200	-	-	150	-	BP DAS Bt. Hari
	Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan 66.490ha	Ha	-	194	24	40	150	70	75	300	60	180.47	350	90	20	350	90	20	350	Dishut,
		Ha	-	36,784	15,492	15,492	15.492*)	15,492	6,350	15.492*)	2,800	3,291	15.492*)	3,291	1,800	15.492*)	15,492	1,200	15.492*)	BPDAS Indragiri
		Ha	-	21,578	5,531	5,531	5.531*)	5,375		5.375*)	3,400	6,622	5.531*)	6,469	6,622	5531*)	6,438	650	5531*)	BPDAS Agam Kuantan
		Ha	-	7,934	-	-	-	-	-	-	3000	-	-	-	4,184	-	-	750	-	BP DAS Bt. Hari
	Terbanggunya bangunan konservasi (Dam Pengendali, Dam Penahan dan Guliv Plug) 12 unit	Unit	-	4	-	-		2	-		2	4		2	-	-	2	-		BPDAS Indragiri

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015	
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
	Terbangunnya bangunan konservasi (Sumur Resapan, Embung dan Biopori) 6 unit	Unit	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
		unit	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
		unit	-	6	-	-	-	2	2	87.5	2	2	125	2	2	125	2	2	125	-
		Unit	-	6	-	-	-	2	3	150*)	2	2	150*)	2	1	150*)	2	1	150*)	Dishut,
		Unit	-	0	23	-	-	0	-	-	0	0	-	0	-	-	0	-	-	BPDAS Indragiri
		Unit	-	0	77,933	-	-	0	-	-	0	0	-	0	-	-	0	-	-	BPDAS Agam Kuantan
		Unit	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BP DAS Bt. Hari
	Terbangunnya teras guludan 0 unit	unit	-	0	-	-	-	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	BPDAS Indragiri
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN						300			825			950			1,075			800		
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terlindungnya kawasan konservasi sumber daya alam	Kawasan	1	5	1	2	25	1	3	100	1	2	100	1	1	125	1	1	125	DKP
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir danLaut	Meningkatnya kawasan pesisir yang rusak pulih kembali																			
	Rehabilitasi hutan mangrove	Ha	-	50	50	1	200*)	100	6	750*)	100	3.5	750*)	100	10	750*)	100	10	750*)	DKP
	Penghijauan pantai	Ha	10	50	50	1	150	100	1.4	500	100	52	500	100	10	500	100	10	100	DKP
	Rehabilitasi terumbu karang	Ha	3	15	3	0	25	6	3	75	9	3.5	125	12	3	175	15	3	225	DKP
Pengelolaan sumberdaya perairan umum, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perairan umum, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Kawasan	5	44	1	8	125	2	10	250	3	10	325	4	14	400	5	15	475	DKP
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2,465			2,630			3,201			3,342			4,092		
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB						2,465			2,630			3,201			3,342			4,092		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	bulan			12	12	513	12	12	532	12	12	560	12	12	567	12	12	819	BPPr&KB
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas gedung perkantoran	bulan			12	12	75	12	12	68	12	12	424	12	12	354	12	12	582	BPPr&KB
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	bulan			12	12	17	12	12	19	12	12	15	12	12	19	12	12	25	BPPr&KB
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	bulan			12	12	52	12	12	41	12	12	19	12	12	45	12	12	60	BPPr&KB

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	bulan			12	12	142	12	12	139	12	12	170	12	12	143	12	12	170	BPPr&KB
	Indeks pembangunan Gender (IPG)		70.04		71.33	69.55		72.62	0		73.91			75.2	71.49		76.49	72.13	BPPR dan KB.	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		61.69		62.76	64.62		63.82	0		64.88			65.95	65.95		67.02	67.02	BPPR dan KB.	
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga unit pelayanan terpadu perempuan dan anak	%	40	90	70	95.38	50	75	70	55	80	373	61	85	90	67	90	90	73	BPPR dan KB.
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya peran serta wanita dalam proses pembangunan	Kali	3	4	3	1	78	4	2	84	4	1	92	4	4	101	4	4	111	BPPR dan KB
	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	%	60	50	75	75	362	85	85	398	95	95	438	28	28	482	50	50	530	BPPR dan KB
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	60	90	8	57	345	10	57	380	12	54	417	85	85	459	90	90	505	BPPR dan KB
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan	Kali pertemuan	5	13	5	5	392	7	5	431	9	9	474	11	11	521	13	13	574	BPPR dan KB
	Persentase industri rumahan yang dikelola perempuan yang aktif	%													85			90		BPPR dan KB
	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan	Kasus	0	445											445			445		BPPR dan KB
Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Persentase kelembagaan anak yang aktif	Sistem Informasi	1	1	1	1	63	1	1	69	1	1	76	1	-	-	1	-	-	BPPR dan KB
		%	60	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	84	-	90	92	BPPR dan KB
	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak	Kali pertemuan	5	9	5	4	376	6	6	414	7	7	455	8	-	-	8	-	-	BPPR dan KB
		%	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	500		557	551	BPPR dan KB
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA							1,024			1,129			1,239			1,363			1,500	
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB							1,024			1,129			1,239			1,363			1,500	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015					
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN				
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN							
																					SBLM PRBHN	STLH PRBHN
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.34		1.1	102		1.3	1.34		1.27	1.34			1.1							BPPr KB
Keluarga Berencana	Persentase ketersediaan informasi KB pada masyarakat	%	60	100	70	70	196	80	80	216	90	90	237	95	-	-	100	-	-	-	-	BPPR dan KB
	Informasi KB	Kali	1	9	2	9	166	5	9	183	7	1	201	9	-	-	9	-	-	-	-	BPPR dan KB
	Jumlah akseptor KB	PUS	53,191	151,693	170,781	198,624		188,375	169,624		207,782	154,034		229,188	151,693	482	252,799	151,693	530	BPPr KB		
Pelayanan Alat Kontrasepsi	Tersedianya informasi pelayanan kontrasepsi	Kali	1	10	2	1	430	4	4	474	6	5	521	8	8	573	10	10	630	BPPR dan KB		
Kesehatan reproduksi remaja	Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	%	60	100	80	85	67	85	85	74	90	90	81	95	95	89	100	100	98	BPPR dan KB		
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan anak		1	5	1	1	125	2	1	138	3	1	151	4	4	166	5	5	183	BPPR dan KB		
Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Keluarga Bina Balita	Persentase tersedianya tenaga pendamping	%	100	100	80	30	40	85	85	44	90	90	48	95	95	53	100	100	59	BPPR dan KB		
SOSIAL							33,493			39,002			43,269			46,323			43,538			
DINAS SOSIAL							32,463			37,869			42,022			44,952			42,030			
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	bln		60	12	12	2,280	12	12	3,216	12	12	3,145	12	12	3,244	12	12	-	Dinas Sosial		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	Tahun		5	1	1	1,011	1	1	2,439	1	1	3,481	1	1	2,839	1	1	-	Dinas Sosial		
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Tahun		5	1	1	110	1	1	97	1	1	100	1	1	110	1	1	-	Dinas Sosial		
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Tahun		5	1	1	6	1	1	24	1	1	21	1	1	10	1	1	-	Dinas Sosial		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tahun		5	1	1	349	1	1	515	1	1	539	1	1	540	1	1	-	Dinas Sosial		
Program Eks penyandang penyakit social (eks narapi-dana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Eks Korban Narkoba dan eks penyakit sosial yang telah mengikuti rehabilitasi/ mandiri	Orang		40	40	40	2,645	40	40	2,909	40	40	3,200	40	40	3,520	40	40	3,872	Dinas Sosial		
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	PSKS/LKS yang berkompetensi dan melakukan pelayanan kepada PMKS	%	N/A	100	70	70	42	80	100	46	85	100	51	90	90	56	100	100	61	Dinas Sosial		
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya yang mandiri	Orang	N/A	6.000 (K)	4,500	4,691	15,263	4750	4,833	16,789	5,000	4,700	18,468	5,500	4,850	20,314	6,000	6,000	22,346	Dinsos		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Aksesibilitas yang memadai bagi PMKS	%	N/A	100	70	70	2,000	80	80	2,200	90	90	2,420	100	100	2,662	100	100	2,928	Dinas Sosial
Pembinaan Anak Terlantar	Kemandirian anak terlantar	Jumlah Panti	2	2	2	2	3,116	2	2	3,428	2	2	3,771	2		4,148	2		4,563	Dinas Sosial
		Orang	360	360		360		360		360		360		360		360				Dinas Sosial
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kemandirian penyandang disabilitas	Jumlah Panti	2	2	2	2	2,147	2	2	2,362	2	2	2,598	2		2,858	2		3,144	Dinas Sosial
		Orang	150	150		150		150		150		150		150		150				Dinas Sosial
Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	- Lanjut usia yang mandiri/ potensi - Anak asuh yang menamatkan pendidikan SLTA	Jumlah Panti	2	2	2	2	3,494	2	2	3,844	2	2	4,228	2		4,651	2		5,116	Dinas Sosial
		Orang	155	155		155		155	155		155		155		155		155			Dinas Sosial
		Orang	180	180	180	180		180	180		180				180		180			Dinas Sosial
BIRO BINSOS						1,030			1,133			1,247			1,371			1,508		
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Sinkronisasi program Pembangunan kesejahteraan sosial	Kali	N/A	6	6	6	850	6	6	935	6	6	1,029	6		1,131	6		1,244	Biro Binsos
Pengelolaan dan Penanganan dampak Bencana Alam	Terlaksananya program rehabilitasi social pasca bencana alam	Kab/ Kota	N/A	11	11	11	90	11	18	99	11	11	109	11		120	11		132	Biro Binsos
Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya koordinasi pembinaan penanggulangan gizi masyarakat	Kali	N/A	43	4	4	90	6	6	99	9	9	109	12		120	12		132	Biro Binsos
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI						9,540			10,056			9,834			10,165			8,338		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						9,540			10,056			9,834			10,165			8,338		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	85	85	85	77,68	1,904	85	87.55	1,838.77	85	90.97	1,868.88	85	85	2,323.96	85	85	2,630.34	Disnaker-trans
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	85	85	85	87,98	1,351	85	89.5	2,558.51	85	91.98	2,096.71	85	85	1,692.32	85	85	1,913.76	Disnaker-trans
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur	%	85	85	85	94,05	121	85	82.21	111.30	85	99.71	86.80	85	85	80.1	85	85	114.50	Disnaker-trans
Fasilitasi Purna Tugas PNS	Meningkatnya fasilitas Purna Tugas PNS	%	85	85	85		-	85	100	542.50	85		-	85	85	-	85	85	-	Disnaker-trans
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Wawasan dan kemampuan / kapasitas SDM aparatur	%	85	85	85	54,50	10	85	17.41	13.50	85	72.24	24.50	85	85	11.4	85	85	18.00	Disnaker-trans
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan sistem pelaporan kinerja SKPD	%	85	85	85	94,92	714	85	97.66	758.30	85	98.08	759.21	85	85	743.47	85	85	729.61	Disnaker-trans
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang berkompeten	Orang	416	2080	416	1,184	3,318	416	1157	2,633.76	416	1,173	2,827.8	90.91	90.85	3,318.4	416	90.90	318.20	Disnaker-trans

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANG-GUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	Orang	3500	14100	2,350	879	1,270	2,500	2500	469.00	2,750	6,658	791.37	8.79	-	-	3.500 org	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.75	645.3	-	20.17	815.67	-
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Berkurangnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	Kasus	15	10	15	8	702	10	10	814.41	20	41	365.83	14	12	422.5	6	10	409.99	-
	Jumlah pekerja buruh yang menjadi peserta program BPJS Naker	orang	50,000	110,000	50,000	91,472	-	60,000	93,572	-	95,226	103,184	-	103,184	103,184	-	103,184	110,000	-	-
Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang melakukan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003	Perusahaan	150	28.45	-	-	-	-	-	-	150	193	100.22	25.29	25.29	63.4	150	28.45	54.12	-
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Besaran pengujian lingkungan kerja di perusahaan	sampel	800	840	-	-	-	-	-	-	800	800	592.49	840	840	639.4	840	840	770	-
	Besaran pemeriksaan kesehatan kerja di perusahaan	orang	900	900	-	-	-	-	-	-	900	900	-	900	900	-	900	900	-	-
Gerakan terpadu pensejahteraan fakir miskin	Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	Orang	240	240	-	-	-	-	-	-	240	240	75.00	55.71	86.77	72.6	240	83.57	411.70	-
Transmigrasi (pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh)	Besaran transmigrans yang akan dibina	KK	70	70	-	-	-	70	70	156.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pemasukan keuangan daerah	Perusahaan	40	40	40	40	150.00	40	40	160.00	40	40	245.00	40	40	152	40	40	152	-
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							-			-			-			-			-	-
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Tersedianya lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi	Orang	N/A	221	36	36	-	40	27	-	44	-	-	48	-	-	53	-	-	BPM
KOPERAI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH							9,390			9,179			10,625			13,323			15,646	
DINAS KOPERASI DAN UKM							9,390			9,179			10,625			13,323			15,646	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	100	100	20	20	2,130	40	40	1,049	60	60	913	80	80	1,028	100	100	1,105	Dinas Koperasi

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANG-GUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														T	R						RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	SBLM PRBHN	STLH PRBHN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																														T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
PENANAMAN MODAL							3,308			5,014			4,101			4,945			8,262	
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PPT							3,308			5,014			4,101			4,945			8,262	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	%	0	100	20	20	692	40	40	543	60	60	548	80	80	651	100	100	784	BKMP dan PPT
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur	%	0	100	20	20	276	40	40	539	60	60	151	80	80	362	100	100	870	BKMP dan PPT
Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	%	0	100	20	20	18	40	40	18	60	60	18	80	80	16	100	100	19	BKMP dan PPT
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	0	100	20	20	39	40	40	123	60	60	38	80	80	73	100	100	150	BKMP dan PPT
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelapran capaian kinerja dan keuangan	%	0	100	20	20	196	40	40	246	60	60	277	80	80	300	100	100	367	BKMP dan PPT
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Penambahan realisasi investasi PMDN/PMS						1,034			1,804			1,560			1,904			3,673	
	Jumlah perizinan/non perizinan yang diterbitkan PT SP	Izin/non izin	0	940	0	8		10	39		30	644		400	400		500	500		BKMP dan PPT
	Realisasi Investasi PMDN	Milyar Rupiah	404.65	2,703.65	418	1,678.38		439	749.93		461	873.76		480	480		501	501		BKMP dan PPT
	Realisasi Investasi PMA	Juta US \$	17.81	132.81	21	65.46		22	86.19		23	136.12		24	24		25	25		BKMP dan PPT
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya calon investor yang berminat menanamkan moalnya di Sumatera Barat dan kerjasama investasi						748			935			965			974			1,999	
	Jumlah calon investor	Calon Investor	46	215	19	27		36	47		36	32		38	38		40	40		BKMP dan PPT
	Jumlah kesepakatan kerjasama	Jumlah MoU	0	10	1	2		2	2		2	5		3	3		2	2		BKMP dan PPT
Penyiapan Potensi Sumberdaya daerah	Menyiapkan potensi sumber daya daerah	Dokumen	0	9	2	2	305	2	2	806	2	2	544	2	2	665	2	1	400	BKMP dan PPT
BIRO PEREKONOMIAN							-			-			-			-			-	
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya nilai transaksi dan kontak dagang UMK peserta promosi	Jumlah UMK	27	25	22	27		40	40		25	25		42	25		42	25		Biro Perekonomian
URUSAN KEBUDAYAAN							12,718			14,618			16,045			18,058			21,064	
BIRO BINA SOSIAL							7,171			7,888			8,679			9,544			10,498	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya pengembangan nilai budaya di masyarakat	%	N/A	100	70	70	785	75	80	863	80		950	90	90	1,045	100	100	1,149	Dinas Sosial, Biro Binsos
Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat adat	Kali Pelatihan	N/A	4	4	6	650	4	4	715	4		787	4	4	865	4	4	952	Biro Binsos
	Sinkronisasi program pemerintah dengan lembaga adat	kali		12	3	3	1,000	4	3	1,100	6		1,210	9	9	1,331	12	12	1,464	Biro Binsos
Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya pelayanan Jemaah haji	%	N/A	100	100	179.1	1,651	100	170	1,816	100		1,998	100	100	2,197	100	100	2,417	Biro Binsos
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan terhadap Al Qur'an	Peringkat	5	4	5	5	1,250	5	5	1,375	4		1,513	4	4	1,664	4	9	1,830	Biro Binsos
		%	N/A	100	80	80	675	90	80	743	100		817	100	100	898	100	100	988	Biro Binsos
	Meningkatnya syiar agama kepada masyarakat	%	N/A	100	70	70	860	80	80	946	90		1,041	95	95	1,145	100	100	1,259	Biro Binsos
Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Meningkatnya kualitas SDM lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	%	N/A	100	70	70	300	80	80	330	90		363	95	95	399	100	100	439	Biro Binsos
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							5,547			6,730			7,293			8,514			10,566	
Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya	Peningkatan jumlah lembaga seni dan budaya	Lembaga	2	3	2	2	1,970	2	8	2,300	3		2,400	3	3	2,500	3	3	2,600	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	Workshop/pelatihan bagi pemangku adat	orang	0	100	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	100	300	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Pengembangan Pendidikan Budaya	Jumlah kunjungan ke museum Nagari Adhityawarman	Kali	21	30	3	3	431	21	31	900	21		950	25	25	1,576	30	39	2,700	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	Jumlah pelaksanaan praktek pendidikan adat, sejarah dan budaya daerah	Kali	2	10	5	5	300	6	9	400	7		500	8	8	650	10	10	800	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah produk warisan budaya yang meningkat kualitasnya	Kali	3	7	4	4	2,846	5	5	3,130	6	6	3,443	6	6	3,788				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	7	7	4,166	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
DINAS SOSIAL							-			-			73			-			-	
Pengembangan nilai budaya	Luas Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	M2	28.5	1948.5	28.5	28.5		960	960		960	960	73							Dinas Sosial
		Paket	-	-	-	-		-	-		-				1			1		
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							10,584			15,085			22,269			49,790			53,513	

[illegible]

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana olah raga Sumatera Barat				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,400	-	-	20,350	
Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase peningkatan penyadaran pemuda	Keg/Org	60	100	70	70		1/70	1/70	150	1/80	1/80	191	2/95-80	-	-	2/120-95	-	-	Dispora
	Persentase peningkatan pemberdayaan pemuda	Keg/Org/	0	56	5	0		2/30-6	2/30-4	320	2/50-100	2/50-100	383	2/196-30	-	-	3/50-30-130	-	-	Dispora
	Persentase peningkatan pengembangan pemuda	Keg/Org/	60	100	70	70.1		100	100	1,063	100	100	930	110	-	-	110	-	-	Dispora
	Persentase pemuda Sumatera Barat yang ditingkatkan peransertanya di berbagai kegiatan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,885	-	-	6,910	
Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	Jumlah organisasi pramuka yang mandiri	Lemb	0	20	0	0	795	-	-	0	7	7	160	7	-	-	20	-	-	Dispora
	Persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876	-	-	1,339	
Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi pemuda yang mandiri	Keg/Org/ Lemb	2	85	2	2	659	80	80	160	50	50	177	70	-	-	120	-	-	Dispora
	Jumlah organisasi olahraga yang mandiri	Keg/Org/ Lemb	2	10	2	2		-	-	0	-	-	0	-	-	-	2	-	-	Dispora
	Persentase kemandirian organisasi pemuda dan olah raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	-	-	484	
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Persentase keterampilan dan semangat wirausaha pemuda	%/Keg	N/A	100	70	63	2,003	80	72	551	85	97,18	1,205	90	-	-	100	-	-	Dispora
	Persentase peningkatan keterampilan dan semangat wirausaha pemuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	330	Dispora
BIRO BINA SOSIAL							7,127			7,840			8,624			9,486			10,435	
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Meningkatnya budaya olah raga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat	%	N/A	95	65	58.5	6,727	75	67.5	7,400	80		8,140	85	85	8,954	95	95	9,849	Biro binsos
Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase peran pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.	%	N/A	95	65	58.5	400	75	67.5	440	80		484	85	85	532	95	95	586	Biro Binsos
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							6,382			7,551			8,669			9,088			8,417	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015	
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN
BADAN KESBANG POL						3,479			3,645			4,298			4,699			3,396		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran					527			635			712			782				Kesbang Linmas	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan					400			213			467			445				Kesbang Linmas	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur					26			26			19			25				Kesbang Linmas	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur					20			20			35			50				Kesbang Linmas	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan					187			198			258			308				Kesbang Linmas	
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	60		75		1,058	80		1,164	85		1,281	90		1,409	95		1,549 Kesbang Linmas	
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah aparatur kesbang linmas kabupaten/kota	Org	200		40		451	40		497	40		546	40		601	40		661 Kesbang Linmas	
Pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan politik masyarakat	%	70		75		645	80		710	85		780	90		859	90		944 Kesbang Linmas	
Peningkatan Pemberantasan Maksiat	Persentase penurunan pelanggaran perbuatan maksiat	%	N/A	20	20	20	165	20	89.95	182	20		200	20	20	220	20	20	242 Badan Kesbang Linmas	
	Meningkatnya wawasan aparatur, toga dan tomas	%	N/A	20	20	0		40	0		20			20	20		20	20	Badan Kesbang Linmas	
	Terlaksananya sosialisasi	Orang				50			40						40			40		
SATPOL PP						2,903			3,906			4,371			4,389			5,021		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran					1,078			1,447			1,809			1,756			2,108	Satpol PP	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan					139			629			400			325			331	Satpol PP	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur					199			94			21			210			252	Satpol PP	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur					41			44			68			77			85	Satpol PP	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan					96			208			439			224			269	Satpol PP	
Peningkatan Pemberantasan Maksiat	Jumlah pelanggaran maksiat yang ditangani	Kasus			1,313	1,508		1,313	1,508		0			0	605		0	581	Sat Pol PP	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum	Persentase partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	%	75		80		1,350	85		1,484	90		1,634	95		1,797	95		1,976 Sat Pol PP	
Peningkatan supremasi hukum peraturan daerah	Jumlah perda yang ditegakkan	Perda	0	2	0	0		0	0		0			0	2		0	2	Satpol PP	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015	
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN
														TARGET						
Peningkatan fungsi perlindungan masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi memahami fungsi Linmas	Kab/ Kota	0	19	0	0		0	0		0			0	19		0	19		Satpol PP
Pemeliharaan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	JumlahKab/Kota yang tertib dan tentram	Kab/ Kota	0	19	0	0		0	0		0			0	18		0	19		Satpol PP
OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN							141,959			154,938			165,080			168,815			188,006	
SETDA (BIRO ORGAN-ISASI)							3,276			3,526			3,916			4,327			4,677	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						607			528			619			648			708	Setda (Biro Organisasi)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						62			83			87			137			79	Setda (Biro Organisasi)
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						-			-			-			-			-	Setda (Biro Organisasi)
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						21			25			25			29			40	Setda (Biro Organisasi)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						58			109			127			149			149	Setda (Biro Organisasi)
Peningkatan manajemen SDM aparatur	Persentase Aparatur bereselon yang dilakukan penilaian	%			50		398	75		437	85		481	95		529	100		582	Setda (Biro Organisasi)
Peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase peningkatan kinerja perangkat pemerintah daerah	%			50		628	75		691	85		760	95	95	836	100	100	919	Setda (Biro Organisasi)
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Persentase SKPD yang telah menerapkan SAKIP Secara tepat	SKPD	5	38 (K)	5	-	486	10	-	535	10		588	10	10	647	3	3	712	Setda (Biro Organisasi)
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Persentase pemerintah daerah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik	%	N/A	100	15	15	1,016	45	-	1,118	75		1,230	85	85	1,353	100	100	1,488	Setda (Biro Organisasi)
SETDA (BIRO BINA SOSIAL)							267			727			804			782			782	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						151			355			342			481			481	Setda (Biro Bina Sosial)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						33			242			382			146			146	Setda (Biro Bina Sosial)
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						-			-			-			-			-	Setda (Biro Bina Sosial)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLN PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLN PRBHN					
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						28			40			-			60			60	Setda (Biro Bina Sosial)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						55			90			80			95			95	Setda (Biro Bina Sosial)
SETDA (BIRO PEREKONOMIAN)							2,738			3,332			3,501			3,748			3,849	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						148			205			240			232			279	Setda (Biro Perekonomian)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur						32			322			143			104			125	Setda (Biro Perekonomian)
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur						12			4			14			14			17	Setda (Biro Perekonomian)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya pelaksanaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						46			51			104			148			178	Setda (Biro Perekonomian)
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Tersedianya regulasi sebagai pedoman pengembangan perekonomian daerah	ran-perda	1	8	1	2	2,000	2	1	2,200	3		2,400	4	2	2,600	5	2	2,600	Biro Perekonomian
	Pergub tentang kebijakan ekonomi daerah	pergub	4	28	2	4	500	4	7	550	6		600	8	8	650	10	8	650	Biro Perekonomian
	Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan kegiatan pengembangan ekonomi daerah	Kali Rapat	60	352	65	68		65	70		70			72	76		74	76		Biro Perekonomian
SETDA (BIRO HUKUM)							2,885			3,266			3,738			3,882			4,203	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						151			198			248			83			98	Setda (Biro Hukum)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						-			35			163			58			69	Setda (Biro Hukum)
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						-			-			-			-			-	Setda (Biro Hukum)
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						63			83			65			70			84	Setda (Biro Hukum)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						70			87			114			119			143	Setda (Biro Hukum)
Pembangunan Materi Hukum	Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas Produk Hukum Daerah yang kondusif	Jml Perda	11	21	15	15	1,045	17	17	1,150	19	8	1,264	19	19	1,391	21	21	1,530	Setda (Biro Hukum)
Peningkatan Budaya Hukum	Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat	%	-	95	50	50	191	65	65	210	75	75	231	85	85	254	95	95	279	Biro Hukum

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM	Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan HAM	%	-	95	75	75	178	80	80	196	85	85	216	90	90	237	95	95	261	Biro Hukum
Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	%	N/A	100	35	35	344	50	50	379	75	75	417	90	90	548	100	100	504	Biro Hukum
Sarana Informasi Hukum	Persentase Ketersediaan Sarana dan Informasi Hukum	%	95	45	45	60	18	60	75	20	75	75	22	85	85	24	95	95	27	Biro Hukum
Peningkatan Penataan Perundang-Undangan	Persentase Perundang-Undangan yang Dapat Tersusun dan Terdokumen-tasikan	%	95	75	75	80	825	80	85	908	85	72	998	90	90	1,098	95	95	1,208	Biro Hukum
SETDA (BIRO ADMINIS-TRASI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA RANTAU)							1,852			2,164			2,561			3,875			4,098	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	100	100	100	100	116	100	100	178	100%	88.47	279	100	100	299	100	100	301	Setda (Biro Adm. Pem-bangunan & Kerjs. Rantau)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	%	100	100	100	100	116	100	100	115	100	96.65	70	100	100	91	100	100	52	Setda (Biro Adm. Pem-bangunan & Kerjs. Rantau)
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	%					-			-			-			-			-	Setda (Biro Adm. Pem-bangunan & Kerjs. Rantau)
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	%	100	100	100	100	-	100	100	-	100	70.6	59	100	100	45	100	100	50	Setda (Biro Adm. Pem-bangunan & Kerjs. Rantau)
Peningkatan Pengemban-gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	%	100	100	100	100	41	100	100	51	100	91.53	82	100	100	44	100	100	49	Setda (Biro Adm. Pem-bangunan & Kerjs. Rantau)
Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemer-intah Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta perbaikan manajemen kepe-gawaian	%	50	85	65	70	1,320	75	75	1,520	75	84.66	1,620	80	80	3,071	85	85	3,288	Setda (Biro Adm. Pem-bangunan & Kerjs. Rantau)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
Kerjasama Pembangunan	Kerjasama pembangunan antar lembaga daerah/ wilayah dan luar negeri	%	65	100	70	70	259	75	75	300	80	93.56	451	90	90	325	100	100	358	Setda (Biro Adm. Pembangunan & Kerjs. Rantau)
SETDA (UMUM)							15,805			16,248			18,952			19,771			19,860	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						8,937			9,759			11,178			11,130			11,675	Setda (Biro Umum)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						5,305			5,110			6,191			6,529			5,780	Setda (Biro Umum)
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						419			566			534			460			495	Setda (Biro Umum)
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						238			121			202			202			280	Setda (Biro Umum)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						906			692			847			1,450			1,630	Setda (Biro Umum)
SETDA (BIRO PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN)							3,393			3,850			3,903			4,261			3,440	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						802			625			482			495			-	Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						80			468			368			295			-	Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						-			-			-			-			-	Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						45			36			48			45			-	Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						102			105			159			300			-	Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)
Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan yang akuntabel	Jml Kab/ Kota	N/A	19	3	19	461	5	19	507	5		557	4	4	613	2	2	675	Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Persentase pemerintah daerah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik	%	N/A	100	15	15	1,016	45	-	1,118	75		1,230	85	85	1,353	100	100	1,488	Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														TARGET						
Peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan kinerja perangkat pemerintah daerah	%			50		628	75		691	85		760	95		836	100		919	Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)
Kerjasama Pembangunan	Kerjasama pembangunan antar lembaga daerah/ wilayah dan luar negeri	%	65	100	70	70	259	75	75	300	80		300	90	90	325	100	100	358	Setda (Biro Pemerintahan & Kependdk)
SETDA (BIRO HUMAS)							1,138			1,261			1,611			1,349			1,399	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						859			922			1,009			967			1,063	Setda (Biro Humas)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						178			193			479			251			191	Setda (Biro Humas)
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						-			-			-			-			-	Setda (Biro Humas)
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						-			36			14			18			20	Setda (Biro Humas)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						101			110			109			113			125	Setda (Biro Humas)
SETDA (BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH)							-			5,201			5,961			4,339			5,862	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	bulan	0	48 bulan			-	12 bulan	12 bulan	2,081	12 bulan	12 bulan	1,379	0	12 bulan	1,244	0	12 bulan	1,713	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)
	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	0	12 bulan				12 bulan	12 bulan		0	0		0	0		0			Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)
	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	tahun	0	120 unit bangunan dan 2 unit kendaraan R4				80 unit bangunan dan 170 unit kendaraan	80 unit bangunan dan 170 unit kendaraan		120 unit bangunan, 4 unit kendaraan	120 unit bangunan		0	120 unit bangunan dan 2 unit kendaraan R4		0	120 unit bangunan dan 2 unit kendaraan R4		Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)
	Tersedianya Alat tulis kantor	bulan	0	48 bulan				12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan		0	12 bulan		0	12 bulan		Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)
	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	bulan	0	48 bulan				12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan		0	12 bulan		0	12 bulan		Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015	
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	0	1 unit mesin foto-copy, 1 unit kulkas				18 unit	18 unit		1 unit mesin foto-copy, 1 unit kulkas	1 unit mesin foto-copy, 1 unit kulkas		0	0		0	0		Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)
	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu	bulan	0	48 bulan				12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan		0	12 bulan		0	12 bulan		Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)
	Terlaksananya koordi-nasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	bulan	0	48 bulan				12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan		0	12 bulan		0			Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	unit	0	3 unit			-			271	1 unit kend-araan	1 unit kend-araan	596	0	1 unit	479	0	1 unit	1,377	Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)
	Tercapainya ketersediaan meubelair	unit	0	20 unit meja kursi, 3 unit almari arsip, 1 unit almari pus-taka, 7 kursi hadap eselon 3				16 unit meja dan 16 unit kursi	16 unit meja dan 16 unit kursi		2 unit lemari arsip, 7 unit kursi hadap eselom 3	2 unit lemari arsip, 7 unit kursi hadap eselom 3		0	2 unit filling kabinet, 1 unit almari arsip, 1 unit almari pustaka		0	4 unit meja dan kursi kerja		Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)
	Tersedianya peralatan komputer dan jaringannya	unit	0	10 unit PC, 11 note-book, 11 unit print-er, 1 stabi-lizer, 4 UPS				4 PC,4 Note-book, 4 print-er, 4 stabi-lizer	4 PC,4 Note-book, 4 print-er, 4 stabi-lizer		2 unit PC, 4 note-book, 3 print-er, 1 stabi-lizer	2 unit PC, 4 note-book, 3 print-er, 1 stabi-lizer		0	2 unit PC, 2 Unit laptop, 3 unit printer, 2 unit UPS		0	2 unit PC, 2 Unit laptop, 3 unit printer, 2 unit UPS		Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB			
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015		
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	2015	
														STLH PRBHN	STLH PRBHN						
																				STLH PRBHN	STLH PRBHN
	Tersedianya alat studio, komunikasi dan informasi	unit	0	1 unit TV, 1 unit infocus, 1 unit kamera							1 unit TV, 1 Unit kamera	1 unit TV, 1 Unit kamera		0	1 unit infokus, 1 unit kamera		0	0		Setda (Biro Pengelo- laan Aset Daerah)	
	Terlaksananya pemeli- haraan mobil operasional	unit	1	3 unit				1 unit	1 unit		2 unit kend- araan R4	2 unit kend- araan R4		0	2 unit		0	3 unit		Setda (Biro Pengelo- laan Aset Daerah)	
	Terlaksananya peme- lihaaran komputer dan jaringannya	unit	0	18 unit laptop, 18 unit kom- puter, 18 unit printer				9 note- book, 16 PC, 10 printer	9 note- book, 16 PC, 10 printer		12 unit note- book, 15 PC, 12 printer	12 unit note- book, 15 PC, 12 printer		0	15 unit laptop, 16 unit kom- puter, 15 unit printer		0	18 unit laptop, 18 unit kom- puter, 18 unit printer		Setda (Biro Pengelo- laan Aset Daerah)	
	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	unit	0	5 unit AC, 3 unit mesin tik, 1 unit mesin foto- copy							5 unit AC, 3 unit mesin tik,	5 unit AC, 3 unit mesin tik,		0	5 unit AC, 3 unit mesin tik, 1 unit mesin foto- copy		0	5 unit AC, 3 unit mesin tik, 1 unit mesin foto- copy		Setda (Biro Pengelo- laan Aset Daerah)	
	Terlaksananya pengolaan, pengawasan aset	bulan	0	36 bulan							12 bulan	12 bulan		0	12 bulan		0	12 bulan		Setda (Biro Pengelo- laan Aset Daerah)	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	buah	0	10 orang			-			35	2 orang	2 orang	13	0	4 orang	66	0	4 orang	77	Setda (Biro Pengelo- laan Aset Daerah)	
	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dan lokakarya sesuai dengan undangan	kali	0	6 orang							0	0		0	3 orang		0	3 orang		Setda (Biro Pengelo- laan Aset Daerah)	
Peningkatan Pengemban- gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	bulan	0	12 doku- men							4 doku- men	4 doku- men	323	0	4 doku- men	315	0	4 doku- men		Setda (Biro Pengelo- laan Aset Daerah)	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB			
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015		
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					TARGET		
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN				SBLM PRBHN	STLH PRBHN	
	Terlaksananya Administrasi kegiatan dan keuangan	bulan	0	48 bulan				12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan		0	12 bulan		0	12 bulan		Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)	
	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	bulan	0	12 doku-men				3 doku-men	3 doku-men		3 doku-men	3 doku-men		0	3 dokumen (renja, DPA, DPPA)		0	3 doku-men		Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)	
Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kesesuaian belanja modal SKPD dengan RKBMD dan DKBMD	doku-men	0	28 doku-men				7 doku-men/ 25 buah buku	7 doku-men/ 25 buah buku	840	7 doku-men	7 doku-men	1,327	-	-	-	-	-	-	Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)	
	Tersedianya Nilai Aset SKPD yang belum Bernilai	item	0	190 item				170 item	170 item	350	0	0		-	-	-	-	-	-	Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)	
	Terbitnya Surat Izin Penghunian	SIP	0	400				100 SIP	100 SIP	85	100 SIP	97 SIP		-	-	-	-	-	-	Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)	
	Terlaksananya proses administrasi pensertifikatan dan Terbitnya Sertifikat Kepemilikan	proses	0	105 persil				50 persil	0	450	20 persil	0		-	-	-	-	-	-	Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)	
	Tersedianya Software Manajemen aset terintegrasi dan Upgrade Program GIS	aplikasi	0	4 aplikasi				1 aplikasi	1 aplikasi	250	1 unit software untuk 46 SKPD, 1 aplikasi	1 unit software untuk 46 SKPD, 1 aplikasi		-	-	-	-	-	-	Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)	
	Terlaksananya proses pen-gadaan barang dan jasa			1086 paket								0	0		-	-	-	-	-	-	Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)
	Tersedianya aplikasi penyusutan aset tetap			3 aplikasi								1 aplikasi	1 aplikasi		-	-	-	-	-	-	Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)
	Terlabelisasinya aset			20 persil tanah, 150 unit bangunan, 50 kendaraan							0	0		-	-	-	-	-	-	Setda (Biro Pengelo-laan Aset Daerah)	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB			
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015		
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN	
		%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	2,236		90	2,695			
Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Tersedianya pedoman standarisasi Barang dan Jasa	buku	0	7 dokumen				42 SKPD, 1 dokumen	42 SKPD, 1 dokumen	115	2 dokumen, 2 SK Gub	2 dokumen, 2 SK Gub	2,324	0	-	-	0	-	-	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)	
	Terlaksananya sensus BMD dan Tersedianya buku Laporan Hasil sensus BMD	buku	0	46 SKPD dan 1 laporan							46 SKPD	46 SKPD		0	-	-	0	-	-	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)	
	Terbitnya SK Penghapusan Aset	SK	0	65 SK				10	10	150	25 SK Gub	25 SK Gub		0	-	-	0	-	-	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)	
	Tersusunnya Buku Laporan hasil rekonsiliasi, buku laporan semesteran dan tahunan BMD	buku	0	16 dokumen				4 dokumen	4 dokumen	325	4 dokumen	4 dokumen		0	-	-	0	-	-	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)	
	Terlaksananya Rakor dengan SKPD dan Kab/Kota dan terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	kali	0	3 kali bimtek, 46 SKPD yang dibina				1 kali/ 80 orang	1 kali/ 80 orang	150	1 kali	1 kali		0	-	-	0	-	-	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)	
	Terlaksananya rapat Pembahasan pemindahtanganan dan Terbitnya Berita Acara Pemindahtanganan BMD	kali	0	22 BA dan 22 SK gub tentang hibah								8 BA dan 8 SK Gub	8 BA dan 8 SK Gub		0	-	-	0	-	-	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)
	Terbitnya Surat perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Pinjam Pakai	surat perjanjian	0	15 perjanjian pinjam pakai, 25 perjanjian pemanfaatan, 1 kali sosialisasi, 46 SK penetapan status								15 surat perjanjian pinjam pakai, 10 perjanjian kerjasama pemanfaatan	15 surat perjanjian pinjam pakai, 10 perjanjian kerjasama pemanfaatan		0	-	-	0	-	-	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB			
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015		
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN	
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN						
	Tercapainya target rencana aksi penyelesaian permasalahan aset			3 SKPD, 6 kali rapat, 1 laporan capaian								0	0		0	-		0	-		Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)
		%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1,805	-	100	1,890		
SEKRETARIAT DPRD							54,292			60,335			61,504		100	57,639		100	69,997		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						9,169			12,289			12,910			14,111			15,523	Sekretariat DPRD	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						9,511			9,018			5,951			5,220			5,284	Sekretariat DPRD	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						392			380			343			1,990			2,189	Sekretariat DPRD	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						531			341			534			693			762	Sekretariat DPRD	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						480			677			373			383			422	Sekretariat DPRD	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan etos kerja lembaga perwakilan daerah		Kali Kunjungan	N/A	21	15	15	34,209	17	-	37,630	19	-	41,393	19	-	21	-	-	Setwan	
		Perda	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	35,242		21	45,817	Setwan	
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							31,131			31,653			30,980			32,713			34,566		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	-	100	20	20	8,289	40	40	7,436	60	60	6,551	80	80	8,899	100	100	8,168	DPKD	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	-	100	20	20	6,951	40	40	7,592	60	60	7,124	80	80	4,986	100	100	5,891	DPKD	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya motivasi semangat kerja dan disiplin aparatur	%	-	100	20	20	154	40	40	123	60	60	113	80	80	111	100	100	111	DPKD	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	%	-	100	20	20	150	40	40	74	60	60	115	80	80	53	100	100	53	DPKD	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	-	100	20	20	1,592	40	40	1,552	60	60	1,618	80	80	1,660	100	100	1,638	DPKD	
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan peanggaran pembangunan	Ketepatan waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	4,546	Tepat Waktu	Tepat Waktu	4,628	Tepat Waktu	Tepat Waktu	4,781	Tepat Waktu	Tepat Waktu	5,259	Tepat Waktu	Tepat Waktu	5,785	DPKD	
		Opini	Dis-claimer	WTP	WDP	WDP		WDP	WTP		WTP	WTP		WTP							
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan kab/kota sesuai dengan ketentuan	Kab/kota	19	19	19	19	520	19	19	820	19	19	820	19	19	902	19	19	992	DPKD	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah	Meningkatnya kinerja aparatur pengelola keuangan daerah	Orang	210	600	136	136	705	369	369	952	790	790	1,216	0	600	1,338	0	600	1,472	DPKD
Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	-5.2	61.92	3.42	13.69	8,225	9.64	23.82	8,476	34.58	36.22	8,642	0	47.23	9,507	0	61.92	10,457	DPKD
		Rp. (juta)	1,920,971	3,110,525	1,986,576	2,183,959		2,106,241	2,378,641		2,233,479	2,161,841		-	2,828,241		-	3,110,525		
INSPEKTORAT PROVINSI							7,603			8,723			9,438			10,892			11,982	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						1,250			1,432			1,480			1,516			1,668	Inspektorat Provinsi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						254			571			583			1,201			1,321	Inspektorat Provinsi
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						36			38			31			33			36	Inspektorat Provinsi
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						86			121			130			174			192	Inspektorat Provinsi
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						71			64			68			107			118	Inspektorat Provinsi
Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Kualitas LKPD	Opini	Dis-claimer	WTP	WDP	WDP	5,906	WDP	WTP	6,497	WTP	WTP	7,146	WTP	WTP	7,861	WTP	WTP	8,647	Inspektorat
KANTOR PENGHUBUNG							2,195			3,576			3,190			2,784			3,026	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						1,414			2,028			2,111			1,846			1,976	Kantor Penghubung
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						367			989			395			452			498	Kantor Penghubung
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						13			23			343			21			30	Kantor Penghubung
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						73			68			77			85			86	Kantor Penghubung
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						328			468			264			380			436	Kantor Penghubung
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN							6,268			5,715			9,316			8,281			8,974	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran						915			1,381			1,323			1,781			1,954	Badan Diklat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan						2,132			750			3,924			2,040			2,145	Badan Diklat
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur						38			28			34			67			49	Badan Diklat
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur						45			55			139			90			95	Badan Diklat
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan						149			213			280			325			355	Badan Diklat

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Pendidikan Kedinasan	Tingkat kelulusan peserta diklat memuaskan	%	5	7	5	6	2,989	5	6.8	3,288	6		3,616	6		3,978	7		4,376	Badan Diklat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							6,712			2,716			2,795			6,971			7,252	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	bulan			12	12	1,081	12	12	1,114	12	12	1,327	12	12	1,751	12	12	1,562	BKD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	bulan			12	12	776	12	12	812	12	12	707	12	12	742	12	12	543	BKD
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin apartaur	bulan			12	12	38	12	12	38	12	12	36	12	12	52	12	12	52	BKD
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	bulan			12	12	30	12	12	51	12	12	42	12	12	39	12	12	41	BKD
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dan kegiatan	bulan			12	12	289	12	12	321	12	12	293	12	12	258	12	12	304	BKD
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	%	N/A	95	50	50	4,498	65	69.57	380	75	78.17	390	85	85	4,129	95	95	4,750	BKD
BAPPEDA							2,405			2,646			2,910			3,201			3,521	
Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Meningkatnya mutu manajemen pelayanan publik yg transparan dan akuntabel	%	30	100	30	30	2,405	50	81.82	2,646	70	100	2,910	90	90	3,201	100	100	3,521	Bappeda (UPTB-LPSE)
KORPRI							-			-			-			-			519	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran Set DP Korpri	%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	519	KORPRI
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Sekretariat DP KORPRI	%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	169	KORPRI
Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur dilingkungan Set DP KORPRI	%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5	KORPRI
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	75	KORPRI
Program Penerapan Keperintahan Yang Baik	Terlaksananya keperintahan yang baik di Sekretariat DP KORPRI	%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	230	KORPRI
KETAHANAN PANGAN							3,775			4,369			5,869			7,515			10,755	
BADAN KETAHANAN PANGAN							3,775			4,369			5,869			7,515			10,755	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	bulan			12	12	665	12	12	750	12	12	979	12	12	169	12	12	900	Badan Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015					
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN				
														TARGET								
														TARGET								
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	bulan			12	12	1,086	12	12	872	12	12	541	12	12	847	12	12	1,245	Badan Ketahanan Pangan		
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	bulan			12	12	43	12	12	43	12	12	36	12	12	36	12	12	45	Badan Ketahanan Pangan		
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	bulan			12	12	50	12	12	30	12	12	36	12	12	56	12	12	60	Badan Ketahanan Pangan		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	bulan			12	12	221	12	12	214	12	12	447	12	12	460	12	12	295	Badan Ketahanan Pangan		
Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi	Kkal. kap/hr	2,200	2,400	50	4,569	250	50	5,408	300	52	5,489	350	55	2,400	-	57	2,400	-	Badan Ketahanan Pangan		
	Ketersediaan protein	Grm/ Kap.hr	57	63	80	109.72	250	82	129.21	300	-	129.31	350	-	63	-	-	63	-	Badan Ketahanan Pangan		
	Penganekaragaman pangan yang bila dikonsumsi sesuai dengan daya beli sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi	%	75	78	80	77	450	82	75.8	40	83	76	500	84	77	-	85	78	-	Badan Ketahanan Pangan		
	Jumlah kelembagaan pangan masyarakat (LDPM) bertambah	Gapok-tan	0	12	20	3	400	50	3	600	80	3	700	110	3	-	140	3	-	Badan Ketahanan Pangan		
	Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi	Ton	30	194.8	54	54	-	20	20.8	550	30	30	600	40	30	-	60	30	-	Badan Ketahanan Pangan		
	Terbinanya sertifikat prima 2 dan prima 3	Serti-fikat	0	136	16	16	-	40	30	-	30	30	200	40	30	-	60	30	-	Badan Ketahanan Pangan		
	Tertanggulangnya masyarakat yang mengalami rawan pangan	Kab/ Kota	0	19	1	1	-	-	1	-	6	6	250	6	6	-	6	6	-	Badan Ketahanan Pangan		
	Memperkuat Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga sehingga terbebas dari kemungkinan kondisi kekurangan energi dan protein																			Badan Ketahanan Pangan		
	Ketersediaan energi	Kkal. kap/hr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	440	-	2,400	570	Badan Ketahanan Pangan		
	Ketersediaan protein	Grm/ Kap.hr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	63	-	Badan Ketahanan Pangan		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	ton ekv beras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	683	0	30	775	Badan Ketahanan Pangan
	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	271		60	500	Badan Ketahanan Pangan
	Persentasi ketersediaan informasi :															1,211			1,345	Badan Ketahanan Pangan
	Pasokan pangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100			100		
	Harga pangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100			100		
	Stabilisasi harga bahan pangan pokok di tingkat produsen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CV ≤ 5%	180		CV ≤ 5%	190	Badan Ketahanan Pangan
	Persentase penanganan keamanan pangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1,872		80	2,200	Badan Ketahanan Pangan
Diversifikasi Pangan	Tersedianya kebutuhan pangan dan gizi kelompok dengan mudah dan murah	Kelompok	0	204	25	12	160	50	12	320	75	74	380	100	60	-	100	60	-	Badan Ketahanan Pangan
	Terlaksananya dan tumbuhnya usaha bisnis kelompok pangan lokal	Kelompok	4	25	10	4	200	20	12	350	30	1	500	40	2	-	50	2	-	Badan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar dan pemberdayaan di tingkat masyarakat																			Badan Ketahanan Pangan
	Angka konsumsi :															750			850	Badan Ketahanan Pangan
	Energi	kkal/kap/hr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000		2000			
	Protein	Gr/kap/hr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52		52			
	Penurunan konsumsi beras	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	110		1	1,290	
	Skor Pola Pangan Harapan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	430		78	490	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						15,109			72,653			111,121			33,085			40,341		
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						14,485			71,967			110,366			32,255			39,428		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran					541			755			1,018			860			900	BPM	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan					552			564			660			1,235			1,245	BPM	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														TARGET						
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur					24			24			21			38			45	BPM	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur					46			48			57			60			60	BPM	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan					271			308			414			285			295	BPM	
Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan	Meningkatkan keterpaduan dalam penanggulangan kemiskinan	Kali Rapat	N/A	16 (k)	4	4	1,742	3	4	1,916	3		2,108	3		2,318	3		2,550	BPM
Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/ nagari	Pembinaan kelompok lokasi penerima bantuan	Kab		5	2	2		2	2	56,000	5	5	90,000	5	5	68	5	5	90	BPM
	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat	Kali		1	1		415	1		457	1		502	1		552	1		608	BPM
	Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat	%		100	70	30	740	80	35	814	90		895	95		985	100		1,083	BPM
	Tersedianya lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan masyarakat di daerah	Kali		53	36	36	650	40	27	715	44	27	787	48	28	544	53	19	400	BPM
	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Kab/ Kota	0	19	18	18	147	19	19	162	19		178	19		196	19		215	BPM
BIRO PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN						624			686			755			830			913		
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari	Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi pemerintahan Nagari/ Desa/ Kelurahan	%	N/A	100	75	75	624	80	80	686	90		755	100	100	830	100	100	913	Biro Pemerintahan & Kependudukan
Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan nagari	Meningkatnya Kelembagaan Pemerintahan Nagari/ Desa/Kelurahan	%	100	100	40	40		60	60		80			100	100		100	100		Biro Pemerintahan & Kependudukan
KEARSIPAN						2,703			2,944			4,072			7,818			10,037		
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						2,703			2,944			4,072			7,818			10,037		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran					1,085			1,351			1,761			1,827			2,552	Badan Pustaka dan Arsip	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan					474			363			821			845			1,153	Badan Pustaka dan Arsip	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur					49			48			43			45			110	Badan Pustaka dan Arsip	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur					31			28			178			155			300	Badan Pustaka dan Arsip	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLN PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLN PRBHN					
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan					263			273			299			298			345	Badan Pustaka dan Arsip	
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daetah	Jumlah khazanah arsip statis yang terselamatkan	Kab/ Kota	4	4	5	4		5	4	-	-	-	-	4	0	-	4	0	-	Badan Pustaka dan Arsip
	Dokumen daerah yang terselamatkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,035	-	4	1,255	Badan Pustaka dan Arsip
	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib arsip	SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,644	-	2	1,910	Badan Pustaka dan Arsip
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Optimalnya pelaksanaan kearsipan	SKPD	10	42	15	5	801	25	11	881	35		970	42	42	-	42	0	-	Badan Pustaka dan Arsip
		Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,969		10	2,412	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							260			2,771			3,034			3,324			5,643	
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							130			2,641			2,904			3,194			3,514	
Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan komunikasi dan informasi di Sumbar	%	N/A	80	70	70	3.000*)	72	-	3.500*)	75		4.000*)	77	77	4.250*)	80	80	4.500*)	Dinas Perhubungan, Biro Humas, KPID
	Terlaksananya pembinaan komunikasi dan informasi	Paket	N/A	2(t)	1	1	75	2	-	2,580	2		2,837	2	2	3,121	2	2	3,433	Dinas Perhubungan, Biro Humas, Ktr. Penghubung, KPID
Pengembangan Data dan Informasi	Ketersediaan data informasi penyelenggaraan komunikasi	Buku	0	5 (k)	1	2	55	2	2	61	1		67	1	1	73	1	1	81	Dinas Perhubungan, Biro Humas
BIRO HUMAS							130			130			130			130			130	
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyebaran Informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pemberitaan	Kali Pemberitaan	0	60 (k)	12	14	130	12	12	130	12		130	12	12	130	12	12	130	Biro Humas
KPID							-			-			-			-			1,999	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1,170	KPID
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	138	KPID

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	71	KPID
Pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	%	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10	KPID
Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase lembaga penyiaran yang taat aturan	%	0	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	610	KPID
	Persentase FMPP yang berperan aktif	%	0	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	610	KPID
PERPUSTAKAAN							2,371			3,456			-			5,419			6,360	
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							2,371			3,456			-			5,419			6,360	
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca	Orang	6,575	35,000	30,000	31,453	2,371	17,000	57,737	3,456			-	0	500	5,419	0	500	6,360	Badan Pustaka & Arsip
URUSAN PILIHAN							153,329			217,869			581,075			299,603			320,964	
PERTANIAN							108,108			153,999			495,596			207,419			219,752	
DINAS PERTANIAN							35,351			43,200			58,893			63,381			62,886	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	0	100	20	20	1,877	40	40	2,544	60	60	2,931	80	80	2,719	100	100	2,991	Dinas Pertanian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	%	0	100	20	20	1,394	40	40	1,330	60	60	1,609	80	80	1,206	100	100	1,327	Dinas Pertanian
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	%	0	100	20	20	249	40	40	242	60	60	207	80	80	217	100	100	238	Dinas Pertanian
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	%	0	100	20	20	120	40	40	244	60	60	18	80	-	-	100	-	-	Dinas Pertanian
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	%	0	100	20	20	436	40	40	589	60	60	954	80	80	954	100	100	1,097	Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Ton	2,273,602	2,588,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,512,634	1,200	-	2,588,013	1,819	Dinas Pertanian
	Menurunnya serangan hama dan penyakit tanaman	%	0.4	1	-	-	-	1	1	426	2	1	260	3	1	850	4	1	900	Dinas Pertanian
	Bertambahnya persentase luas pertanaman yang menggunakan bibit unggul	%	30	38	30	30	400	32	31	500	34	34	750	36	36	1,000	38	38	1,250	Dinas Pertanian
	Meningkatnya produksi pertanian organik	Ha	750	2,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,682	-	1,750	1,188	-	2,000	1,500	Dinas Pertanian
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian untuk pengembangan teknologi	unit	20	60	20	40	1,200	30	66	1,700	40	66	1,950	50	50	2,200	60	60	2,450	Dinas Pertanian
	Meningkatnya kapasitas penyuluh	Orang	1,496	1,496	40	1,496	900	60	1,496	1,800	80	1,496	2,300	100	60	227	120	60	227	Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015	
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN
														TARGET						
														TARGET						
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Terbangunnya sentra kawasn produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan agroindustri																			
	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Ka-wasan	43	60	40	43	3,230	47	60	3,550	52	60	3,800	56	60	4,050	60	60	4,300	Dinas Pertanian
	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Ton	4,092	11,031	10,191	10,603	-	10,395	11,873	100	10,603	12,087	102	-	10,815	104	-	11,031	106	Pertanian
	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Ton	354,262	629,618	488,978	471,849	1,600	524,138	495,497	1,712	559,298	547,417	1,831	594,458	594,458	1,959	629,618	629,618	2,096	Pertanian
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian																			
	Pengembangan sarana dan prasarana UPT Diperta	Unit/ UPTD	6	6	6	6	650	6	6	650	6	6	650		6	650		6	650	Dinas Pertanian
	Terlaksananya cetak sawah	Ha	620	5,120	750	430	-	2000	2150	-	1000	1,000	250	-	500	250	-	250	250	Dinas pertanian
	Unit pengelolaan pupuk organik (UPPO)	Unit	19	47	19	38	6,650	32	40	8,150	37	42	8,650	42	42	9,150	47	47	9,650	Dinas Pertanian
	Perluasan areal hortikultura	Ha	50	2,955	690	690	3,105	940	890	4,105	1,190	100	5,105	1,440	300,000	6,105	1,690	300,000	7,105	Dinas Pertanian
Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna	Meningkatnya informasi dan penerapan teknologi pertanian																			
	Berkembangnya balai alih teknologi pertanian	Unit	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	Dinas Pertanian
	Terpenuhinya alsintan bagi petani	%	50	80	70	50	500	75	65	550	80	70	9,020	80	750	11,011	100	750	4,500	Dinas Pertanian
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi komoditi pertanian	Unit	5	100	20	10	400	40	20	600	60	10	800	80	80	1,000	100	100	1,200	Dinas pertanian
	Tersedianya produksi olahan hasil pertanian	Macam	90	130	90	90	600	115	115	900	140	120	1,200	165	125	1,500	190	130	2,000	Dinas Pertanian
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian	Kebun	100	620	100	200	200	200	300	400	300	100	600	400	450	800	500	500	1,000	Dinas Pertanian
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian	Unit	85	135	10	10	100	20	20	200	30	30	600	40	40	800	50	50	1,000	Dinas Pertanian
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian	unit	-	10	2	2	-	4	5	200	6	5	300	8	2	400	10	2	500	Dinas Pertanian
Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Meningkatnya penerapan teknologi dan pengembangan usaha pertanian melalui gerakan terpadu pensejahteraan petani	KK	-	34,700	2,480	2,480	10,740	4,960	4,960	11,458	4,960	4,960	11,834	1670	9,920	12,210	1,528	12,400	12,710	Dinas pertanian

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan usaha pertanian																			
	Peningkatan kelembagaan Penangkar Benih/Bibit	Unit	86	110	33	50	250	50	96	250	70	70	240	90	90	-	110	0	135	Dinas pertanian
	Terfasilitasi petani dalam pembangunan pertanian PUP/LKMA, UPJA dan Penyelia Mitra Tani	kelembagaan/unit	0	8 kelmb, 35 unit komputer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 kelembagaan, 30 komputer	131	0	4 kelembagaan, 5 komputer	135	Dinas pertanian
	Peningkatan modal usaha petani mandiri	Klp/ Tahun	200	840	25	146	750	35	146	1,000	45	228	1,250	55	5 P4S	1,500	65	4 P4S	1,750	Dinas Pertanian
DINAS PERKEBUNAN						59,866			77,211			85,044			93,437			105,775		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	0	100	20	20	561	40	40	806	60	60	850	80	80	766	100	100	910	Dinas Perkebunan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	%	0	100	20	20	376	40	40	1,719	60	60	1,747	80	80	1,276	100	100	1,507	Dinas Perkebunan
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	%	0	100	20	20	55	40	40	56	60	60	64	80	80	59	100	100	56	Dinas Perkebunan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	%	0	100	20	20	70	40	40	101	60	60	220	80	80	100	100	100	220	Dinas Perkebunan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	%	0	100	20	20	173	40	40	414	60	60	567	80	80	438	100	100	500	Dinas Perkebunan
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	KSP Perkebunan	unit	14	30	14	20	927	17	25	1,122	20	22	1,358	24	28	1,640	28	30	1,988	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya luas tanam komoditi kakao	Ha	84	170	110	117	1,594	140	137	1,623	160	148	1,652	180	155	1,661	200	165	1,711	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya luas tanam komoditi kopi	Ha	47	75	55	55	252	60	60	274	65	65	298	70	70	324	75	75	353	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya luas tanaman komoditi karet	Ha	170	177	170	172	2400	171.5	173	1800	173	173	1800	175	175	1,800	177	177	3,000	Dinas Perkebunan
Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan	Peningktan produksi pertanian, peternakan, perkebunan	%	4	16	4	4	30,000	6	6	35,000	7	7	37,000	2	2	40,000	2	2	45,000	Dinas Perkebunan
	Pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman	%	1	15	1	2	-	1	1	450	1	1	550	3	10	650	4	15	750	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya produksi benih unggul	%	30	42	30	20	250	32	30	500	40	40	750	4	4	1,000	4	4	1,250	Dinas Perkebunan
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing produk Hasil Pertanian	Peningkatan produksi olahan hasil pertanian	Ko-moditi	90	190	90	5	180	115	4	230	2	2	155	1	1	183	1	1	210	Dinas Perkebunan
	Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian	%	3	15	3	3	700	5	2	6,000	8	2	6,500	10	2	7,000	15	2	7,500	Dinas Perkebunan
	Sertifikasi produk pangan	Unit	2	12	2	7	100	2	2	200	7	2	350	10	1	500	13	1	650	Dinas Perkebunan
	Peningkatan jumlah UP3HP/UPH	Unit	10	50	10	15	100	20	25	200	30	2	600	40	12	800	50	1	1,000	Dinas Perkebunan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera (KK)	KK		1,528	1,780	2,480	10,704	1,840	1,640	11,458	1,650	1,660	11,834	1,670	1,670	12,210	1,528	1,528	12,710	Dinas Perkebunan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	Peningkatan produksi bibit	%	5	17	5	5	5,900	8	8	8,400	11	12	10,900	14	14	13,400	17	17	15,900	Dinas Perkebunan
	Peningkatan kelembagaan Penangkar Benih/Bibit	unit	33	160	33	50	3,150	50	60	3,650	45	45	4,150		15	4,650		25	5,150	Dinas Perkebunan
	Perencanaan Penganggaran Monitoring Evaluasi yang terintegrasi dan tepat waktu	% / Tahun	-	80	60	60	1,054	65	60	1,138	70	75	1,229	80	80	1,400	80	90	1,400	Dinas Perkebunan
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Terbentuknya kontrak kerjasama antara gapoktan dengan pengusaha agribisnis			10	2	2	-	4	5	200	6	6	300	8	8	400	10	10	500	Dinas Perkebunan
Penyediaan sarana dan prasarana pembangunan pertanian	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian																			
	- perluasan areal pertanian	%	2	10	2	2	500	4	4	1,000	6	6	1,250	8	8	1,500	10	10	1,750	Dinas Perkebunan
	- pengembangan balai benih	unit	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	Dinas Perkebunan
	- evaluasi penggunaan dana kredit	0	1	5	1	1	70	2	2	70	2	2	70	3	3	70	4	5	70	Dinas Perkebunan
	- peningkatan luas lahan budidaya sesuai	0	870	940	870	870	250	900	900	250	930	930	250	1	960	960	1	990	990	Dinas Perkebunan
Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna	Meningkatnya teknologi informasi pertanian																			
	- Terpenuhinya alsintan bagi petani	%	50	100	70	70	500	75	550	550	80	80	600	85	85	650	90	90	700	Dinas Perkebunan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							11,846			32,488			347,655			46,423			46,321	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran		bulan		12	12	683	12	12	1,058	12	12	1,279	12	12	1,741	12	12	1,966	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan		bulan		12	12	289	12	12	2,509	12	12	3,188	12	12	2,245	12	12	1,965	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur		bulan		12	12	56	12	12	56	12	12	56	12	12	54	12	12	64	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur		bulan		12	12	185	12	12	75	12	12	208	12	12	59	12	12	120	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015	
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan		bulan		12	12	200	12	12	485	12	12	806	12	12	787	12	12	830	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan produksi dan mutu pertanian secara berkelanjutan	Meningkatnya produksi dan mutu pertanian secara berkelanjutan															22,723			10,344	
	Tersedianya produksi daging sapi	Ton	18322	64450	5,622	5,435		5,017	55,858	125	59,970	24,162	128	62,100	-	-	64,450	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tersedianya produksi daging	Ton			5,960	52,982		575,456	57,575		59,970	59,882		62,100	61,675	-	64,450	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Produksi Daging	%		2.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.99	-	-	4.49	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tersedianya produksi telur	Ton			68,750	69,590		70,187	72,390		75,285	75,285		77,000	-	-	79,870	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tersedianya ternak sapi	ekor			300		2,500	1100	1095	12,280	900	880	10,560	1400	-	-	1100	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tersedianya ternak kambing	ekor			175		300	1000	959	1,975	1,700	1,600	4,000	850	-	-	300	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tersedianya unggas lokal	ekor			3000		300	4200	4156	415	6,600	6,600	830	1500	-	-	1800	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tersedianya anak hasil ET	ekor	4	20	4	4	150	4	4	150	4	4	150	4	-	-	4	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah kelompok GEPEMP yang difasilitasi		17	55	0	0	-	17	17	1,100	14	14	1,464	12	-	-	12	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian	Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian															8,063			6,148
KSP Peternakan		KSP	6	14	6	6	1,654	8	10	2,200	10	10	134	12	0	-	14	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
	persentase Kawasan yang mempunyai fasilitas memadai	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	-	0	58.33	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tersedianya ternak kambing untuk penambahan populsi di kawasan	ekor	200	500	175	175	300	200	200	368	100	110	275,000	88	0	-	100	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengamanan Sumberdaya Hewani	Meningkatnya pengamanan sumber daya hewani															2,381			3,376	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular	Kasus	32	20	30	25	600	25	20	500	20	36	400	15	0	-	10	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah penyakit hewan strategis dengan 0 kejadian	Jenis penyakit													2	-	0	2	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Penurunan kasus penyakit hewan menular (flui burung/AI)	%													5	-	0	5	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tersedianya pusat pelayanan keswan	Unit	65	75	65	65	325	68	68	340	70	70	350	73	0	-	75	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan keswan	Unit	1	9	1	1	2,000	2	2	4,000	2	2	4,000	2	0	-	2	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Meningkatnya aplikasi teknologi medik veteriner	Unit	1	1	1	1	180	1	1	180	1	1	180	1	0	-	1	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	Unit	1	7	1	4	100	2	7	200	4	4	300	6	0	-	7	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan kualitas UPTD	Unit	3	4	1	1	-	2	2	-	1	1	635	3	0	-	4	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Unit pengelolaan pupuk organik (UPPO)	Unit	11	20	11	11	-	0	0	-	4	4	-	3	0	-	2	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
	Fasilitas SKIM kredit bagi petani	Jenis SKIM	2	3	2	2	-	2	2	-	2	2	-	3	0	-	3	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah produk semen beku	Dosis	80000	100000	80000	80000	650	90000	90000	735	100,000	100,000	741	100000	0	-	100000	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Evaluasi penggunaan dana kredit bagi petani (skim)	Kelompok	5	5	5	5	70	5	5	70	5	0	70	5	0	-	5	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna	Berkembangnya teknologi informasi peternakan dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna															182			318	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah akseptor ET untuk meningkatkan mutu genetik ternak	ekor	24	144	24	24	150	30	33		30	30	150	30	0	-	30	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase peternak yang sudah mengimplementasikan embrio transfer pada ternak sapi	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	-	0	0.07	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase peternak yang sudah mengimplementasikan inseminasi buatan pada ternak sapi	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.41	-	0	89.26	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tersebaranya informasi teknologi peternakan	kali	1	5	1	1	385	1	1	44	1	1	60	1	0	-	1	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan nilai tambah, daya saing, produk hasil pertanian	Meningkatnyan nilai tambah, daya saing, produk hasil pertanian															362			470	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Penerapan GHP dan GMP produk segar olahan	kelompok	1	5	0	0	-	1	1	57	2	2	85	1	0	-	1	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase peningkatan nilai tambah harga produk olahan hasil peternakan :																			
	Daging	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30			30		
	Telur	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30			30		
	Susu	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50			50		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015	
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
	Peningkatan kualitas usaha produk olahan peternakan	kelompok	8	19	8	8	25	10	10	118	14	14	100	17	0	-	19	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian															1,337			2,118	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah aktivitas promosi produk peternakan	Event	3	3	3	3	385	3	3	176	0	3	176	3	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Terpenuhinya daging yang layak konsumsi	ton			36,000	36,636		38,000	38,637				39,000		-	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Produk olahan :														-	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Dendeng	ton	1	11	1	1		1	1		1.5				-	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Rendang	ton	20	465	20	20		25	20		30				-	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Susu	ton	3	3	1	1		1	1		1.5				-	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Operasi pasar komoditi peternakan	komoditi			3	3	65	3	3	70		0	100		-	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase peternak/ Kelompok penerima KKPE	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.53	-	0.62		
	Persentase peternak/ Kelompok yang menerima KUPS	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	-	0.06		
	Jumlah MoU/kerjasama kelompok tani dengan pengusaha	MoU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	9		
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM petani	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dari SDM Petani				0	0	49	0	0	86	0	0	90			3,642	-		4,048

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB			
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015		
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	STLH PRBHN	
														TARGET							
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN						
	Kelompok ternak berprestasi	Kelompok	2	12	2	2		2	2							-	-	-		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Petugas lapangan berprestasi	orang	3	15	3	3		3	3							-	-	-		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pembinaan terhadap kelembagaan agribisnis peternakan	Lembaga	6	10	6	6	30	9	9	120	0	9	117		-	-	-	-		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah kelompok yang dibina untuk kelompok penangkar bibit	Kelompok	4	20	0	0	-	4	4	86	0	4	35		-	-	-	-		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah peternak yang ditingkatkan pengetahuannya tentang peternakan dan kelembagaan kelompok	orang	150	1300	150	150	150	300	300	260		156	90		-	-	-	-		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang penanganan gangguan reproduksi ternak	orang	40	96	0	0	-	40	40	550	0	16	100	20	-	-	-	-		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah masyarakat yang dilatih tentang pemotongan hewan qurban dan kesrawan	orang	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	-	-	-	-		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang pemeriksaan daging di RPH	orang	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang pengawasan obat hewan	orang	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase SDM Peternakan yang bersertifikat	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.52	-	-	0.67		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan	orang	35	-	35	35	65	40	40	80	30	30	64	-	-	-	-	-		-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengembangan satu petani satu sapi	Berkembangnya program satu petani satu sapi															2,847			14,554	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN					
	Jumlah kelompok tani yang memiliki ternak	Kelompok	17	96	0	0	-	17	17	2,020			3,009		0	-	0	0		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase peternak yang memiliki usaha lebih dari satu	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.39	0	0	1.75	0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah ternak yang disembarkan pada kelompok	ekor	170	1083	0	0	-	170	170					275	0	-	330	0	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
DINAS KEHUTANAN							1,045			1,100			1,290			1,300			1,360	
Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Terbentuknya model pengembangan sumberdaya hutan, serta penanganan kasus SDA	Ha	-	160	20	20	320	10	35	325	50	50	330	10	40	335	10	40	340	Dishut
	terbentuknya model pengembangan lebah madu/ gula enau di 94 unit	unit	-	94	19	15	625	15	16	625	18	21	800	20	21	800	22	21	850	Dishut
	Terbinanya Model social forestry dan Agroforestry 2 Ha	Ha	-	2	0	-	0	0	0	0	0	0	0	50	2	165*)	50	2	165*)	Dishut
	Terfasilitasinya pembangunan hutan tanaman (HTR/HKm/ HR) oleh 20 Kelompok tani	Kelompok tani	-	20	2	2	100	2	8	150	2	20	160	2	7	165	2	7	170	Dishut
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN													2,714			2,878			3,410	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	bulan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	129	12	12	206	Bakorluh
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	bulan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	598	12	12	195	Bakorluh
Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	bulan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	7	12	12	14	Bakorluh
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	bulan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	62	12	12	335	Bakorluh
Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pelayanan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha																			
	Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan penyuluhan	buku	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	50	1	1	65	1	1	90	Bakorluh
	Meningkatnya kapasitas SDM penyuluh	jenis	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	95	4	4	105	4	4	150	Bakorluh

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015				
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN			
	Temu tugas penyuluh	orang	180	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180	93	210	210	150	Bakorluh
	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh	orang	160	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160	93	210	210	250	Bakorluh
	Meningkatnya motivasi kerja	orang	658	696	-	-	-	-	-	-	662	662	2,173	696	696	2,147	696	696	2,300	Bakorluh	
	Meningkatnya motivasi dan kinerja penyuluh	orang	18	18	-	-	-	-	-	-	18	18	191	18	18	165	18	18	200	Bakorluh	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan gapoktan	Gapok-tan	10	22	-	-	-	-	-	-	10	10	93	20	20	90	22	22	120	Bakorluh	
	Meningkatnya kapasitas balai penyuluhan	Unit	22	35	-	-	-	-	-	-	22	22	112	29	29	120	35	35	150	Bakorluh	
KEHUTANAN							2,654			3,427			3,277			2,969			3,351		
DINAS KEHUTANAN							2,654			3,427			3,277			2,969			3,351		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	0	100	12	12	662	12	12	748	12%	12	698	12	12	754	12	12	977	Dinas Kehutanan	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	%	0	100	71	57	378	34	59	1,079	36	42	864	73	73	401	42	42	502	Dinas Kehutanan	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	%	0	100	163	162	60	163	165	57	163	163	59	163	139	75	163	163	75	Dinas Kehutanan	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	%	0	100	12	12	21	12	12	-	12	12	5	12	12	21	12	12	10	Dinas Kehutanan	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	%	0	100	6	5	141	6	6	225	6	5	252	6	5	229	6	5	297	Dinas Kehutanan	
Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Terwujudnya perencanaan pembangunan kehutanan yang sinergis, dinamis, terarah dan terpadu sesuai dengan perkembangan daerah	Paket	1	1	1	1	217	1	1	238	1	1	262	1	1	289	1	1	317	Dinas Kehutanan	
Pemantapan Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan 330 Km	Km	-	170	80	80	75	80	80	200	70	70	220	170	50	242	170	50	170	Dinas Kehutanan	
	Penataan batas kawasan hutan (batas fungsi, batas luar) 350Km	Km	-	75	100	115	750*)	50	800	400*)	50	1,152	400*)	75	75	600*)	75	75	600*)	BPKH Wil. II	
	Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) model 3 unit	unit	-	1	-	2		0	1		0	0	75*)	-	1		1	0	75*)	Dishut	
	Tersedianya atas potensi hasil hutan kayu & Non kayu, NSDH penggunaan, pemanfaatan kawasan hutan sebanyak 107 judul	Judul	-	107	15	16	500	31	31	100	20	32	110	20	4	121	21	4	133	Dishut	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan	Peningkatan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan 5%	Kab/ Kota	-	19	19	19	200	19	19	270	19	19	270	19	19	270	19	19	270	Dinas Kehutanan
	Peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan Legal di Kab/Kota	Kab/ Kota	-	19	19	19	250	19	19	275	19	19	302	19	19	332	19	19	365	Dinas Kehutanan
	Peningkatan performance industri Hasil hutan di Kab/Kota	Kab/ Kota	-	19	10	10	150	10	10	235	10	10	235	19	10	235	19	10	235	Dinas Kehutanan
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						4,533			5,510			6,234			7,990			9,251		
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						4,533			5,510			6,234			7,990			9,251		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	bulan			12	12	612	12	12	607	12	12	659	12	12	907	12	12	972	Dinas ESDM
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meingkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	bulan			12	12	368	12	12	538	12	12	651	12	12	501	12	12	483	Dinas ESDM
Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat pemenuhan penunjang disiplin aparatur	bulan			12	12	36	12	12	35	12	12	29	12	12	29	12	12	39	Dinas ESDM
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	bulan			12	12	98	12	12	50	12	12	150	12	12	221	12	12	250	Dinas ESDM
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	bulan			12	12	129	12	12	150	12	12	286	12	12	445	12	12	324	Dinas ESDM
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pencapaian rasio elektrifikasi	%	69.5	75	71	71.6	1,620	72	73.48	1,782	73	77.69	1,960	74	79	4,052	75	81	4,458	Dinas ESDM
	Trlatihnya operator pelaku usaha kelistrikan	Orang	20	100	20	20	70	40	40	138	60	60	151	-	-	-	-	-	-	Dinas ESDM
	Pemanfaatan energi terbarukan	Unit	3	12	3	3	1,300	6	3	1,430	9	3 (6-9)	1,573	-	-	-	-	-	-	Dinas ESDM
				(1 PLT-MH; 2 Pico)	(8 PLT-MH; 4 Pico)	(1 PLT-MH; 2 Pico)	(1 PLT-MH; 2 Pico)		(1 PLT-MH; 2 Pico)			3 PLT-MH		-	-	-	-	-	-	
Penyempurnaan restrukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana energi dan kelistrikan	Pengawasan terhadap SPBU dan Agen penyalur BBM dan LPG sesuai dengan harga pemerintah	Buku	0	1 Perda	1	0	200	1	0	255	1	1	150	0	0	-	0	0	-	Dinas ESDM

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
		SPBU & Agen	-	102 SPBU & 20 Agen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 SPBU &20 Agen	500	-	102 SPBU &20 Agen	760	
Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Sumberdaya Mineral dan Batubara	Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB	dokumen	0	2	0	0	-	2	2	150	2	0	175	0	1	135	0	0		Dinas ESDM
		Izin	30	40	0	30	-	31	31	250	33	33	300	36	36	350	40	40	400	Dinas ESDM
		Peti	0	42	1	8	100	2	14	125	3	10	150	4	5	175	5	5	200	Dinas ESDM
		Angka kecelakaan tambang	%	0											0	675		0	1,365	
	Persentase pertambangan tanpa izin yang ditertibkan (illegal mining)	%													5.5			5		
KELAUTAN DAN PERIKANAN							16,846			22,920			27,567			31,366			35,384	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							16,846			22,920			27,567			31,366			35,384	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Bulan	12	60	12	12	1,013	12	12	1,086	12	12	1,588	12	12	1,646	12	12	1,638	DKP
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	Bulan	12	60	12	12	606	12	12	963	12	12	745	12	12	594	12	12	594	DKP
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Bulan	12	60	12	12	74	12	12	75	12	12	75	12	12	75	12	12	75	DKP
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Bulan	12	60	12	12	-	12	12	16	12	12	30	12	12	50	12	12	42	DKP
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Bulan	12	60	12	12	273	12	12	375	12	12	379	12	12	379	12	12	379	DKP
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	Terbangunnya kawasan sentra produksi perikanan																			
	Sentra produksi	Kawasan	15	15	15	15	1,900	15	15	2,400	15	15	2,900	15	15	3,400	15	15	3,900	DKP
	Produksi Tuna	Ton	22	5,745	890	586.6	250	945	1,225.75	300	1,150	1,151.35	350	1,260	1,260	400	1,500	1,500	450	DKP
	Produksi Nila	Ton	44,160.37	522,384.10	65,725	56,447.57	1,000	84,927	76,016.31	1,300	96,540	82,398.38	1,690	95	122,605.80	2,197	271	152,586.30	2,856	DKP
	Produksi Kerapu	Ton	11.98	758.59	70	56.77	900	120	96.24	1,400	134.74	310.04	1,900	220	188.63	2,400	270	245.22	2,900	DKP
Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya																			
	Produksi bibit/benih	%	2	45	3	13.24	300	6	8.48	500	9	9.99	700	12	12	900	15	15	1,200	DKP
	UPR Bersertifikat CPIB	Unit	1	13	1	3	500	2	3	550	3	13	650	5	3	800	7	4	900	DKP
	Peningkatan Luas lahan produksi	Ha	12	180	20	65	1,400	40	121.16	2,000	40	118.35	2,500	80	40	2,500	100	40	3,000	DKP

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
	persentase produksi perikanan	%	26	116.5	27	20.28	1,000	27	37.33	1,250	20	14.5	1,500	27	9.6	1,750	27	15	2,000	DKP
	Penyakit yang dikendalikan	Jenis	2	12	4	6	150	2	3	200	2	5	250	10	2	250	12	2	300	DKP
Peningkatan nilai tambah, daya saing produk hasil perikanan	Meningkatnya peningkatan nilai tambah, daya saing hasil produksi perikanan																			
	Penerapan GHP dan GMP bagi UMKM	Unit	4	25	5	4	-	5	5	150	5	3	300	5	5	400	5	5	500	DKP
	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	1,550.50	69,755.52	120.75	15,341.30	180	12,670.75	13,861.79	200	14,416.36	7,396.43	350	5	14,992.91	375	5	15,592.60	400	DKP
	Peningkatan mutu produk perikanan	Jenis	2	10	2	2	-	2	2	150	2	2	300	2	2	450	2	2	600	DKP
	Unit pengolahan ikan yang bersertifikat	Unit	2	10	2	2	300	2	2	1,000	2	3	1,250	2	2	1,500	2	2	1,750	DKP
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Meningkatnya pemasaran hasil perikanan	Ton	1,122.90	9,504.96	1,300.6	1,578.99	-	1,534.71	1,346.68	250	1,826.3	1,957.1	250	1	2,191.56	250	1	2,651.79	250	DKP
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Petani	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM petani	unit	3	3	3	3	1,000	3	3	2,500	3	3	3,500	3	3	4,500	3	3	5,000	DKP
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas Penyuluh	Orang	40	187	40	40	100	40	37	130	35	37	160	40	-	-	40	-	-	DKP
Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap																			
	Izin usaha	Dokumen	80	400	50	101	200	50	170	200	100	170	200	50	100	200	50	100	200	DKP
	Peningkatan Kapasitas KUB	Kelompok	2	36	2	3	-	4	5	225	10	15	300	8	10	350	10	10	450	DKP
	Peningkatan Jumlah alat tangkap	Unit	21,442	25,523	23,586	23,079	5,400	24,197	25,067	5,400	24,301	25,418	5,400	0.5	24,912	5,400	0.5	25,523	5,400	DKP
Gerakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir	KK	-	5,680	-	-	-	1,400	1,472	-	1,400	1,509	-	125	1,440	-	150	1,440	-	DKP
Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Lokasi	2	9	2	7	300	2	7	300	9	9	300	8	9	300	10	9	300	DKP
Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna	Meningkatnya teknologi informasi pertanian	unit	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300	0	3	300	DKP
PARIWISATA							11,192			13,022			19,224			17,945			19,667	
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							11,192			13,022			19,224			17,945			19,667	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya proses administrasi sesuai SOP	bulan	12	60	12	12	2,217	24	24	2,749	36	36	3,115	48	48	2,971	60	60	2,971	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	unit	73	1037	73	73	625	241	241	1,008	239	239	424	242	242	1,103	242	242	1,103	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	stel	260	1130	260	260	103	260	260	103	220	220	100	190	190	80	200	200	80	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	bulan	12	60	12	12	50	24	24	80	36	36	100	48	48	50	60	60	50	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	bulan	12	60	12	12	221	24	24	250	36	36	470	48	48	525	60	60	525	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	Meningkatnya jumlah event budaya	Event	8	94	7	4	1,225	11	16	1,347	14	48	1,482	17	21	1,630	20	-	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Jumlah iven seni dan budaya yang rutin dilaksanakan	Event	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1,793	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peningkatan dan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau	Meningkat dan berkembangnya produk wisata budaya	Produk	0	12	1	1	291	2	4	320	2	7	352	3	1	387	4	-	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek	Jumlah produk ekonomi kreatif berbasis media design dan IPTEK yang berkembang	Produk	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	426	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Kawasan Wisata Alam	Meningkatnya jumlah kawasan wisata alam yang difasilitasi	Kawasan	2	14	3	2	3,500	4	4	4,000	5	6	4,500	6	10	5,000	7	-	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata Alam	Jumlah kawasan wisata alam yang berkembang menjadi wisata utama dan kawasan wisata strategis	Kawasan	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5,500	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Kawasan Wisata Budaya	Meningkatnya kualitas kawasan wisata budaya	Kawasan	-	19	0	5	-	0	6	-	1	9	1,500	2	14	2,000	3	-	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata Budaya	Jumlah kawasan wisata budaya yang berkembang menjadi wisata utama dan kawasan wisata strategis	Kawasan	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,500	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015				
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN			
														SBLM PRBHN	STLH PRBHN						
																					SBLM PRBHN
Pengembangan Pemasaran Wisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman pintu imigrasi	%	0	37	5	5	2,810	10	10	3,000	12	37	3,500	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya pelaksanaan promosi pariwisata Sumatera Barat	Event	0	121	-	-	-	-	-	-	12	38	3,500	15	81	4,000	20	121	4,500	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Pengembangan SDM Pariwisata	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi	Orang	100	1120	125	125	150	125	240	165	185	395	181	220	60	199	220	200	219	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
PERDAGANGAN							3,855			10,894			14,982			11,471			11,967		
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							3,855			10,894			14,982			11,471			11,967		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	bulan	0	60	12	12	-	12	12	1,713	12	12	1,588	12	12	1,828	12	12	2,023	Dinas Perindag	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	bulan	0	60	12	12	-	12	12	1,419	12	12	4,335	12	12	2,654	12	12	2,101	Dinas Perindag	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	orang	0	174	200	167	-	210	163	73	180	180	63	174	174	69	174	174	66	Dinas Perindag	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	orang	0	40	90	90	-	98	87	137	180	180	250	30	30	269	40	40	250	Dinas Perindag	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	bulan	0	60	12	12	-	12	12	313	12	12	584	12	12	559	12	12	559	Dinas Perindag	
Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan	Meningkatnya jumlah Sarana pasar yang berkualitas	Unit	0	1,050	56	56	-	344	26	-	280	280	-	180	180	-	190	190	-	Dinas Perindag	
	Jumlah bantuan sarana perdagangan	Unit/ tahun	0	1,050	56	56	-	344	26	3,000	280	280	3,500	180	-	-	190	-	-	Dinas Perindag	
	Meningkatnya jumlah sarana perdagangan	%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	4,000	-	100	4,500		
Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Stabilisasi harga	Kali/ tahun	0	6	2	2	1,006	3	3	1,106	-	3	1,217	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindag	
	Laju inflasi	%/ tahun	0	< 10	< 10	5.37	-	< 10	4.16	-	< 10	< 10	-	< 10	-	-	< 10	-	-	Dinas Perindag	
	Persentase peningkatan transaksi lelang	%/ Tahun	1	2%	1	5%	-	1	1	-	15	1	-	18	-	-	20	-	-	Dinas Perindag	
	Stabilnya tingkat inflasi	%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1,338	-	100	1,472		
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah	Meningkatnya nilai ekspor daerah	US \$ juta/ tahun	2,219	2,750	2,552	2,552	252	2,935	2,363	277	3,375	2,500	304	3,882	-	-	4,464	-	-	Dinas Perindag	
	Jumlah produk yang diekspor	Komoditi/ tahun	1	37-39	2	30	-	2	30	-	2	31-32	-	2	-	-	2	-	-	Dinas Perindag	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN														RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)	2015			
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET			SBLM PRBHN	STLH PRBHN		
	Jumlah negara tujuan ekspor	Negara / tahun	40-45	47-50	40-45	40		45-50	45		50-55	46-50		55-60	-		60-65	-		Dinas Perindag
	Jumlah sertifikat mutu yang diterbitkan	Serti-fikat Mutu / tahun	0	1,700	1,500	1,500		1,550	1,665		1,600	1,600		1,650	-		1,700	-		Dinas Perindag
	Meningkatnya nilai ekspor daerah	%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		335		100		368
Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan	Meningkatnya keterampilan pelaku usaha dan aparatur perdagangan	Orang	0	532	25	25	315	50	182	346	75	75	381	100	-	-	150	-	-	Dinas Perindag
	Meningkatnya keterampilan pelaku usaha dan aparatur perdagangan	%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		419	-	100		628
Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Berkurangnya konsumen yang dirugikan	Produk/ tahun	6	30	6	6	1,141	12	6	1,255	18	6	1,380	24	-	-	30	-	-	Dinas Perindag
	- Jumlah produk yang memenuhi SNI.	Produk/ tahun	6	30	6	6	1,141	12	6	1,255	18	6	1,380	24	-	-	30	-	-	Dinas Perindag
	- Peningkatan jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	%/ tahun	5	25	10	10.11		10	2.68		10	5		10	-	-	10	-	-	Dinas Perindag
	Berkurangnya konsumen yang dirugikan	%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		1,518		100	1,670
PERINDUSTRIAN							6,141			8,097			14,195			20,443			21,592	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							6,141			8,097			14,195			20,443			21,592	
Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Berkembangnya sentra-sentra industri potensial	Unit Sentra/ tahun	5	25	2	2	60	10	9	400	15	5	450	20	-	-	25	-	-	Dinas Perindag
	Lancarnya kegiatan industri di sentra industri potensial	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		500	-	100	550	
Peningkatan Iklim Usaha Industri	Meningkatnya investasi usaha IKM.	% / Th	2	2.25	7	2	92	2	2.68	250	2	2.15	5,104	2	-	-	2	-	-	Dinas Perindag
		%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		5,500		100	5,614	
Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan Manufaktur	Jumlah unit usaha industri unggulan daerah	Unit usaha	1	10	1	1	3,800	1	2	4,640	2	2	5,104	2	2	5,500	3	3	5,614	Dinas Perindag
		%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		5,500	-	100	5,614	
Revitalisasi dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah secara proporsional	Unit usaha/ tahun	0	700	600	447	380	600	147	418	600	140	459	600	-	-	600	-	-	Dinas Perindag
		%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		505	-	100	600	
Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah rekayasa teknologi tepat guna	Unit	3	18	6	3	555	9	3	610	12	3	771	15	-	-	18	-	-	Dinas Perindag
		%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		938	-	100	1,100	
Pengembangan Klaster Industri Unggulan	Terbangunnya aglomerasi industri	Klaster/ tahun	1	3	1	1	1,000	1	2	1,500	2	2	2,000	2	-	-	3	-	-	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												RP. (Jt)	SKPD PENANGGUNG JAWAB									
			KON-DISI AWAL	KON-DISI AKHIR	2011			2012			2013			2014		RP. (Jt)			2015								
					T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	T	R	RP. (Jt)	TARGET					SBLM PRBHN	TARGET							
		%	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	2,000	-	100	2,500								
Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah dan Aparat Pembina	Meningkatnya produktifitas SDM IKM	Orang/ tahun	50	250	50	50	254	100	205	279	150	150	307	200	-	-	250	-		Dinas Perindag							
		%		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	338	-	100	371								
JUMLAH							1,439,238			2,121,097			1,813,692			2,301,678			2,631,228								

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi: Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi: Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun 2009, tendensi perkembangan dimasa lalu dan kemampuan keuangan. Selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		SAT	THN 2010	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN									
					2011		2012		2013		2014		2015	
	SBLM PRBHN	STLH PRBHN			TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET		TARGET	
											SBLM PRBHN	STLH PRBHN	SBLM PRBHN	STLH PRBHN
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			73,78	74,24	74,28	74,64	74,7	75,04	75,01	75,44	75,44	75,84	75,84
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1.	Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi													
1.1.a	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Th Dasar 2000)	%		5,93	6,21	6,26	6,5	6,38	6,81	6,18	7,13	6,42	7,46	6,49
1.1.b	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Th Dasar 2010)	%		5,60		6,30		6,30		6,00		6,14		6,28
1.2	PDRB Per Kapita		Rp. Jt	17,93	20,26	20,17	22,4	22,21	24,48	25,1	26,49	26,49	28,44	28,44
1.3	ICOR			3,63	3,41 ***		3,44 ***		3,48 ***		3,50 ***		3,54 ***	
1.4	PDRB Harga Konstan		Rp.T	38,86	41,03		43,69		46,67		49,99		53,73	
1.5.a	PDRB Harga Berlaku (Th Dasar 2000)		Rp.T	87,22	100,64	98,96	112,82	110,1	125	127,1	137,17	137,17	149,35	149,35
1.5.b	PDRB Harga Berlaku (Th Dasar 2010)		Rp.T	105,2		118,67		131,44		146,89		164,27		183,71
1.6	Investasi ADHK		Rp.M	7.161	8.166	7.940	9.184	8.505	10.347		11.634	11.634	13.191	13.191
1.7	Tingkat Pengangguran		%	6,95	6,59	6,45	6,22	6,52	5,86	7,02	5,5	5,5	5,13	5,13
1.8	Tingkat Kemiskinan		%	9,5	8,55	8,99	8,15	8	7,75	7,56	7,35	7,35	6,95	6,95
1.9	Jumlah Kabupaten Tertinggal		Kab	8	8	8	7	8	6		5	5	4	4
2.	Kesejahteraan Sosial													
2.1	Pendidikan													
2.1.1	Rata-rata Lama Sekolah (th)		TH	8,48	9,35	8,57	9,7	8,68	10,05	8,68	10,4	8,78	10,75	8,88
2.1.2	Angka Partisipasi Kasar													
	a. SD/MI/SDLB/Paket A	%		112,54	118,48	111,91	119,98	111,94	120,44	115,8	121,92	117	122,1	118
	b. SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B .	%		98,31	98,92	92,96	100,42	93,51	101,92	103,52	103,42	103,42	104,92	104,92
	c. SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket C	%		83,92	84,33	67,42	84,75	86,75	85,16	95,3	85,58	85,58	86	86
2.1.3	Angka Partisipasi Murni													
	a. SD/MI/ SDLB/ Paket A	%		99,67	99,67	94,46	99,75	94,49	100	99,54	100	95	100	95,25
	b. SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B	%		77,25	78,8	75,43	80,35	80,9	82,9	80,75	83,45	82,28	85	83,44
	c. SMA/ SMK/MA/ SMALB Paket C	%		55,5	62,5	50,34	67,5	69,67	72,5	71,96	75	72,33	80	73,99
2.1.4	Ranking Ujian Nasional			9	9	28	9	23	9		8		8	
	a. SMP									24		22		20
	b. SMA									23		21		19
	c. SMK									28		26		24

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		SAT	THN 2010	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN									
	SBLM PRBHN	STLH PRBHN			2011		2012		2013		2014		2015	
					TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET		TARGET	
											SBLM PRBHN	STLH PRBHN	SBLM PRBHN	STLH PRBHN
2.1.5	Kualifikasi guru setara S1/DIV													
	b. SMP		%	86,63	90	90,5	95	90,5	100	90,5	100	91	100	91,25
	c. SMA		%	91,01	95	92,61	100	92,61	100	97,95	100	98,5	100	99,01
	d. SMK		%	91,01	95	91,95	100	92,95	100	97,55	100	98,2	100	99,15
2.1.6	Sertifikasi Guru													
	a. TK		Org	30	50	390	75	712	100	925	125	125	150	150
	b. SLB		Org	30	50	243	75	328	100	328	125	125	150	150
	c. SD/MI		Org	600	750	13.823	1.500	17.499	2.250	18.199	3.000	3.000	4.250	4.250
	d. SMP/MTs		Org	1.440	1.750	8.955	2.500	10.563	3.250	11.263	4.250	4.250	5.250	5.250
	e. SMA/SMK/MA		Org	2.400	2.500	8.879	3.750	10.039	5.000	11.009	6.250	6.250	7.500	7.500
2.1.7	Wajib Belajar 12 tahun (rintisan wajib belajar 12 tahun)		% (Kab/ Kota)	3	10	21,05	20	21,05	30	21,05	40	26,31	50	31,57
2.1.8	Lembaga pendidikan terakreditasi		%	30	30	62,91	75	67,68	100	85,47	100	86	100	87
2.1.9	Rasio guru bidang studi dan siswa			55	30	30	30	30	25	30	25	25	20	20
2.1.10	Boarding School Bertaraf Maju		buah	2	3	2	3	3	4	6	4	4	5	5
2.2.	Kesehatan													
2.2.1	UmurHarapanHidup (UHH)		Th	69,5	71,12	69,76	71,48	70,02	71,84	70,09	72,2	71,12	72,56	71,48
2.2.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan		Org Per 100.000 KH	207	190	207*)	166	212*)	142	212*)	118	118	102	102
2.2.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi		Bayi per 1.000 KH	28	22	28*)	20	27*)	18	27*)	16	24	14	23
2.2.4	AngkaGiziKurang (BB/TB) (padaBalita)		%	8,2	8,2	8,2	7,8	7,2	7,4	6,5	7	7	6,6	6,6
2.2.5	Akses Air Minum yang berkualitas		%	46,68	64	65,02	65	72,81	66	78,71	67	67	68	68
2.2.6	Kasusbaru Tuberculosis		%	57,05	55	57,77	60	58,95	70	139,05	80	80	90	90
2.2.7	Kasus Malaria (Annual Paracite Index-API)/1000 pd		Per 1.000 pddk	0,24	≤ 2	0,29	≤ 2	0,27	≤ 1	0,25	≤ 1	≤ 1	1	1
2.2.8	ODHA yang diobati		%	100	90	100	93	100	95	100	100	100	100	100
2.2.9	Cakupan imunisasi bayi usia 0-11 bulan		%	95,6	80	89	85	89	90	91	95	95	100	100
2.2.10	Penduduk menggunakanJamban Sehat		%	61,49	67	69,02	70	70,05	73	73,56	74	74	75	75
2.2.11	Jaminan pemeliharaan kesehatan		%	50,08	63,8	61,6	78,6	72,64	91,3	73,3	100	80,44	100	84,34
2.2.12	Bed Occupation Rate (BOR)		%	65,1	71	74,2	73	75,9	75	75,86	78	78	80	80
	ASPEK PELAYANAN UMUM													
	Pelayanan Urusan Wajib													
1.	Pekerjaan Umum													
1.1	Kemantapan Jalan Provinsi		%	80	82	82	83	85	85	84	86	86	88	88
1.2	Panjang Irigasi Terbangun		Km	2,311	2,313	6,015	2,316	7,015	2,319		2,322	2,322	2,325	2,325

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		SAT	THN 2010	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN									
	SBLM PRBHN	STLH PRBHN			2011		2012		2013		2014		2015	
					TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET		TARGET	
											SBLM PRBHN	STLH PRBHN	SBLM PRBHN	STLH PRBHN
1.3	Panjang Jalan Evakuasi		Km	0	10	14	20	27,5	30	42,5	40	0	50	0
1.4		Jumlah shelter terbangun	unit	-	-	-	-	-	-	4	-	9	-	6
2.	Kebudayaan													
2.1	Jemaah haji yang terlayani		Org	4.398	4.398	7.877	4.398	7.498	4.398	3.599	4.398	3.599	4.398	3.599
2.2	Kasus Perbuatan Maksiat		Kasus	1.471	1.368	1.038	1.313	1.508	1.261		1.210	1.210	1.162	1.162
3.	Pemerintahan													
3.1	Opini BPK		Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Pelayanan Urusan Pilihan													
1.	Pertanian													
1.1	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian		Rp. Jt	9,66	10,72	11,57	11,25	11,92	11,78		12,31	12,31	12,84	12,84
1.2	Berkembangnya Balai Alih Teknologi Pertanian (UPTD)		Unit	1	6	11	14	-	22		30	30	38	38
1.3	Berkembangnya Kawasan Sentra Produksi													
	a. KSP Tanaman Pangan (unit)		Unit	40	43	64	47	64	52	60	56	56	60	60
	b. KPS Perkebunan (unit)		Unit	12	14	20	17	25	20	22	24	24	28	28
	c. KSP Peternakan (unit)		Unit	6	6	6	8	10	10	10	12	12	14	14
2.	Energi													
2.1	Cakupan Layanan Listrik		%	90	91	91	92	93,96	93		94	94	95	95
3.	Pariwisata													
3.1	Jumlah Destinasi Wisata Alam yang dikembangkan	Fasilitasi pengembangan destinasi kawasan wisata	Kws	2	3	2	4	4	5	6	6	10	7	10
4.	Lingkungan Hidup													
4.1	Lahan Kritis (Ha)		Ha	372.386	362.386	361.336	352.386	342.278	342.386		332.386	10.000	322.386	10.000
	Penanganan Lahan Kritis (Ha)		Ha		10.000	1.050	10.000	10.108	10.000		10.000		10.000	
5.	Industri													
5.2	Pertumbuhan Industri Pengolahan		%	2,51	10,68	4,65	11,47	4,04	12,7	4,86	13,07	6,5	13,69	6,9
	ASPEK DAYA SAING													
1.	Nilai Tukar Petani		%	105,6	106	106,25	107	105,03	108		109	109	110	110
2.	Produktifitas total daerah		Rp. Jt.	40	44,88		49,62		54,23		58,68		63	
3.	Rasio ekspor terhadap PDRB		%	27,68	23	28,95	27	27,95	31		35	35	39	39

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025, Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2010-2015.

10.1 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan RKPD Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan program pembangunan dapat berlanjut, sedangkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 telah habis masa berlakunya serta untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan daerah tahun 2016, dimana tahun bersangkutan pemerintah daerah sudah diharuskan menyusun RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA APBD Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Proses penyusunan RPJMD Tahun 2016-2020 memerlukan waktu cukup lama berdasarkan masa jabatan gubernur terpilih hasil Pilkada Tahun 2015. Selanjutnya Gubernur Sebagai Kepala Daerah Terpilih Dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2016 berikut penyusunan RKPD Tahun 2016.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan penganggaran serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan

Tahun 2015. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Gubernur dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Penetapan target indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2010-2015 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
4. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan dengan koordinator Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 merupakan pedoman dalam menyusun Renstra dengan SKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Program-Program yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan secara operasional oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 sudah mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
8. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
9. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
10. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
11. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin

agar sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD".

12. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
13. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO



GOVERNOR OF WEST SUMATRA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 – 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR OF WEST SUMATRA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pertengahan jalan (midterm review) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian kebijakan nasional dan daerah yang harus diakomodir dalam RPJMD sehingga RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 50 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 284 harus dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
 - d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
 - i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - j. BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
- (2) Mengubah Bab II, Bab III, Bab VIII dan Bab IX pada Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

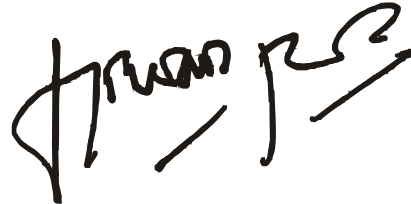
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2014

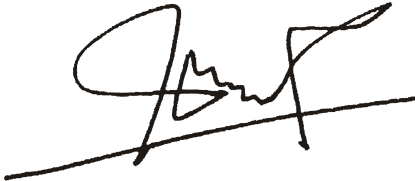
GUBERNUR SUMATERA BARAT

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'A' and a long horizontal stroke extending to the right.

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2014
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2011
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJMD) DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 – 2015

I. Penjelasan Umum

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang hirarki perencanaan, proses perencanaan, mekanisme perencanaan, isi rencana, waktu pelaksanaan serta stakeholder perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengamanatkan tentang perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah atau sedang dijalankan untuk dapat mengetahui tingkat capaian pelaksanaan pembangunan berikut masukan kebijakan dan program yang perlu dilakukan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pada periode yang tersisa.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Provinsi Sumatera Barat yang sedang dilaksanakan adalah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah* (RPJMD) Tahap II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Periode 2005-2025. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tersebut berisikan lima Agenda untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kelima agenda tersebut adalah sebagai berikut: Agenda Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah, Agenda Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Agenda Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK, Agenda Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Agenda Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tersebut telah memasuki tahun ketiga. Untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi RPJMD dan RPJMN, RKPD dan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi pertengahan jalan terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi pertengahan jalan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa kebijakan yang harus disesuaikan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional dan daerah sehingga kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan kebijakan dimaksud. Perubahan kebijakan nasional meliputi antara lain perubahan kebijakan nasional di bidang pendidikan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum, penerapan standar pelayanan minimal, serta adanya perubahan struktur organisasi. Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap indikator capaian pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan kesesuaian kembali antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 50 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 284 maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan perubahan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 95

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2014
 TANGGAL : 6 JUNI 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
 2010-2015

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	9
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	9
2.1.2 Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah	19
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	21
2.1.4 Demografi	25
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	28
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	28
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	39
2.2.3 Gambaran Kondisi Pencapaian SPM Provinsi Sumatera Barat	41
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	43
2.3.1 Fokus Layanan Dasar Urusan Wajib	43
2.3.2 Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan	70
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	91
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	93
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	96
2.4.3 Investasi Daerah	119
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	123
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU	123
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	123
3.1.2. Neraca Daerah	126

3.2.	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	128
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	128
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	132
3.3.	KERANGKA PENDANAAN	134
3.3.1.	Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama	134
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	135
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	145
4.1.	PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH	145
4.2.	ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	149
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	155
5.1.	VISI	155
5.2.	MISI	157
5.3.	TUJUAN DAN SASARAN	159
5.3.1.	Tujuan Pembangunan	159
5.3.2.	Sasaran Pembangunan	160
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	169
6.1.	MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH ABS-SBK	169
6.1.1.	Strategi untuk Misi 1	169
6.1.2.	Arah Kebijakan untuk Misi 1	170
6.2.	MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL	171
6.2.1.	Strategi untuk Misi 2	171
6.2.2.	Arah Kebijakan untuk Misi 2	172
6.3.	MISI 3 : MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN DAN BERKUALITAS TINGGI	174
6.3.1.	Strategi untuk Misi 3	174
6.3.2.	Arah kebijakan untuk Misi 3	174
6.4.	MISI 4 : MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TANGGUH, PRODUKTIF, BERBASIS KERAKYATAN, BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL	177
6.4.1.	Strategi untuk Misi 4	178
6.4.2.	Arah Kebijakan untuk Misi 4	179
6.5.	MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	183
6.5.1.	Strategi untuk Misi 5	183
6.5.2.	Arah Kebijakan untuk Misi 5	184

BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	187
7.1.	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	187
7.1.1	Kebijakan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan	187
7.1.2	Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 1	187
7.1.3	Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 2	191
7.1.4	Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 3	197
7.1.5	Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 4	206
7.1.6	Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 5	233
7.2.	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN	240
7.3.	ARAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	264
7.4.	AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	265
7.4.1.	Agenda Pembangunan Daerah	265
7.4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	267
7.4.3	Program Per Prioritas Pembangunan	272
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	281
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	347
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	351
10.1	Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016	351
10.2	Kaidah Pelaksanaan	351

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perkembangan Nilai Indeks Koefisien Lokasi Menurut Sektor Dan Sub Sektor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2009	20
Tabel 2.2 Kerentanan Umum di Provinsi Sumatera Barat	24
Tabel 2.3 Kerentanan Khusus di Provinsi Sumatera Barat	24
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 2010	26
Tabel 2.5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2006 – 2010	27
Tabel 2.6 Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat Periode 2005-2010 atas Dasar Harga Konstan	29
Tabel 2.7 Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat Periode 2005-2010 Atas Dasar Harga Berlaku	30
Tabel 2.8 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005-2010 Atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat	31
Tabel 2.9 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB pada Harga Belaku dan Harga Konstan Tahun 2005-2010 di Provinsi Sumatera Barat	33
Tabel 2.10 Perkembangan PDRB Tahun 2005-2010 Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan pada Harga Berlaku dan Konstan	34
Tabel 2.11 Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2005-2010 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat	36
Tabel 2.12 Nilai Inflasi PDRB Rata-rata Tahun 2005-2009 Provinsi Sumatera Barat	38
Tabel 2.13 Gambaran Kondisi Pencapaian SPM Provinsi Sumatera Barat	42
Tabel 2.14 Perkembangan Kinerja Makro Bidang Pendidikan Tahun 2006– 2010	45
Tabel 2.15 Perkembangan Kinerja Makro Bidang Kesehatan Sumatera Barat Tahun 2006– 2010	47
Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2007	49
Tabel 2.17 Perbandingan Output UMKMK Terhadap PDB/PDRB Indonesia dan Sumatera Barat Tahun 2004-2008	55
Tabel 2.18 Perkembangan Koperasi di Sumatera Barat Tahun 2006 -2009	55
Tabel 2.19 Perkembangan UKM di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2009	56
Tabel 2.20 Data Perencanaan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah	65
Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Judul Penelitian di Sumatera Barat Tahun 2006-2010	66
Tabel 2.22 Persandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran & Kemiskinan Antara Nasional dengan Sumatera Barat	68

Tabel 2.23	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Nasional dan Sumbar Tahun 2010-2015	70
Tabel 2.24	Peranan Pertanian dalam Pembangunan di Sumatera Barat 2006-2010	70
Tabel 2.25	Produksi Beberapa Komoditi Utama Pertanian di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010	71
Tabel 2.26	Produktivitas Beberapa Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2006-2010	72
Tabel 2.27	Perkembangan Luas dan Produksi Komoditi Utama Perkebunan Tahun 2008-2010	73
Tabel 2.28	Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2006-2010	77
Tabel 2.29	Perkembangan Armada Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2006-2010	78
Tabel 2.30	Perkembangan Nilai Produksi dan Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2006-2010	78
Tabel 2.31	Jumlah Tenaga Kerja Masyarakat Perikanan Tahun 2006-2009	79
Tabel 2.32	Komposisi Ketersediaan Energi dan Protein di Sumatera Barat Tahun 2005-2009	81
Tabel 2.33	Kondisi Jumlah Output dan Ekspor Industri Pengolahan Sumatera Barat Tahun 2008	84
Tabel 2.34	Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan Tahun 2006-2009	86
Tabel 2.35	Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Kelompok Komoditi 2006-2009	87
Tabel 2.36	Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang 2006-2009	88
Tabel 2.37	Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2009	89
Tabel 2.38	Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2009	90
Tabel 2.39	Peringkat Daya Saing Daerah Sumatera Barat di Indonesia	92
Tabel 2.40	Perkembangan Konsumsi Rumah tangga Per Kapita Tahun 2005-2010 Provinsi Sumatera Barat	93
Tabel 2.41	Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2005-2010 Provinsi Sumatera Barat	94
Tabel 2.42	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	95
Tabel 2.43	Peningkatan Perbaikan dan Pemeliharaan Irigasi Tahun 2006-2010	99
Tabel 2.44	Pembangunan Pengendalian Banjir, Pengamanan Abrasi Pantai dan Pengamanan Daya Rusak Air Tahun 2006-2010	100
Tabel 2.45	Lokasi Terminal di Provinsi Sumatera Barat	103

Tabel 2.46	Angkutan Khusus Batu bara dan Semen Melalui Pelabuhan Teluk Bayur Tahun 2005-2009	106
Tabel 2.47	Pemakaian Batubara di Sumatera Barat Tahun 2005-2009	109
Tabel 2.48	Produksi Pembangkit Listrik Tahun 2005 – 2009	110
Tabel 2.49	Pemakaian Energi Listrik Tahun 2005 – 2009	110
Tabel 2.50	Indikator Kinerja Makro Bidang Energi Listrik Tahun 2005-2009	111
Tabel 2.51	Jumlah Unit dan Kapasitas Terpasang PLTMH	112
Tabel 2.52	Potensi Energi Biomassa	112
Tabel 2.53	Jenis Pembangkit Listrik Yang Belum Tergarap Di Sumatera Barat	114
Tabel 2.54	Tingkat Kekritisan Lahan Tiap Wilayah Administrasi Pemerintah	117
Tabel 2.55	Investasi (Pembantuan Modal Tetap Bruto) Tahun 2006-2010	119
Tabel 2.56	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2009	121
Tabel 2.57	Pertumbuhan PMA dan PMDN di Indonesia dan Sumatera Barat Tahun 2004-2008	122
Tabel 3.1	Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010	125
Tabel 3.2	Jumlah dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2006 – 2010	127
Tabel 3.3	Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2006 – 2010	128
Tabel 3.4	Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2007 – 2010	130
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2010	131
Tabel 3.6	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2007 - 2010	132
Tabel 3.7	Surplus (Defisit) Riil Anggaran Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2007 – 2010	133
Tabel 3.8	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Sumatera Barat, tahun 2008 – 2010	135
Tabel 3.9	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2012	138
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tahun 2011 – 2015	139
Tabel 3.11	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tahun 2011 – 2015	141
Tabel 3.12	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015	143

Tabel 5.1	Hubungan Hirarkhis Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	162
Tabel 6.1	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 1	170
Tabel 6.2	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 2	172
Tabel 6.3	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3	175
Tabel 6.4	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 4	181
Tabel 6.5	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 5	185
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 1	189
Tabel 7.2	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 2	192
Tabel 7.3	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 3	199
Tabel 7.4	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 4	210
Tabel 7.5	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 5	234
Tabel 7.6	Jumlah Nagari Tertinggal per Kabupaten	241
Tabel 7.7	Kriteria Fungsi Kota	244
Tabel 7.8	Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009	245
Tabel 7.9	Kondisi Jaringan Jalan dan Aksesibilitas Geografis PKN dan PKW Sumatera Barat selama RPJM I 2005-2010	246
Tabel 7.10	Rencana Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat Hingga Tahun 2028 per Kabupaten/Kota	247
Tabel 7.11	Rencana Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat Dirinci Menurut Kabupaten/Kota	248
Tabel 7.12	Arahan Kawasan Pusat Pengembangan Pertanian (Agropolitan)	253
Tabel 7.13	Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing dan Domba	253
Tabel 7.14	Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Peternakan	254
Tabel 7.15	Arahan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	255
Tabel 7.16	Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	255
Tabel 7.17	Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perkebunan	256
Tabel 7.18	Arahan Pengembangan Kawasan Sentra Komoditi Unggulan Perkebunan	257
Tabel 7.19	Arahan Pengembangan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat	259
Tabel 7.20	Sepuluh (20) Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat	259
Tabel 7.21	Wilayah Pengembangan Pariwisata	261
Tabel 7.22	Sepuluh (10) Destinasi Unggulan Pariwisata	262
Tabel 7.23	Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan Yang Berbatasan dengan Provinsi Tetangga	263
Tabel 7.24	Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas Pembangunan	268

Tabel	7.25	Sinkronisasi Prioritas Nasional Dengan Prioritas Sumatera Barat	272
Tabel	7.26	Hubungan Misi, Agenda, Prioritas dan Program	273
Tabel	8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Barat	283
Tabel	9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	348

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	1.1 Proses penyusunan dan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya	6
Gambar	1.2 Bagan keterkaitan RPJMD Provinsi dengan dokumen perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota	6
Gambar	2.1 Penduduk Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 1971-2010	26
Gambar	2.2 Ketimpangan Wilayah Menurut Indeks Williamson di Sumatera Barat	37
Gambar	2.3 Grafik Indeks Aksesibilitas Potensial Kota-Kota Utama di Sumatera Barat, Tahun 2009	37
Gambar	2.4 Indeks Pembangunan Gender Indonesia Tahun 2005-2008	50
Gambar	2.5 Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia Tahun 2005-2008	50
Gambar	2.6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2002-2010	69
Gambar	2.7 Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Tahun 2002-2010	69
Gambar	2.8 Perbandingan Kondisi Mantap Jalan Nasional dan Provinsi di Sumatera Barat Tahun 2004-2009	97